

PENGANTAR POLITIK



Buku ajar “Pengantar Politik” ini merupakan buku ajar untuk mahasiswa maupun mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan perguruan tinggi di Indonesia untuk membantu memahami khazanah ilmu politik. Buku ajar ini dibagi menjadi enam belas bab membahas permasalahan penting dalam ilmu politik atas sebagian besar pertanyaan tentang negara, pemerintahan, administrasi publik, perbandingan politik, dan teori politik. Akhir kata, semoga buku ajar kecil ini dapat bermanfaat luas. Banyak pinta dan harapan kepada Al-Kholiq, semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala menerima karya buku ajar ini sebagai bagian dari ibadah penulis. Allahuma Amin.



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1981 dengan nama Ali Musa Harahap putra dari Bapak Parliungan Harahap dan Ibu Melinda Dalimunthe. Dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Anwar Harahap dan Jamila Nur Harahap dari seorang istri bernama Ridha Abrita Mawarti, S.Pd. Riwayat Pendidikan yang ditempuh penulis mulai dari sekolah Taman Kanak-kanak bersekolah di TK Tangkai Mulia. Kemudian melanjutkan di SD Kartika Candra Kirana lulus pada tahun 1993 dan menempuh pendidikan menengah pertama di SMPN 177 Bintaro lulus pada tahun 1996. Sedangkan pendidikan menengah atas, penulis tempuh di Madrasah Aliyah Darunnajah Ulujami, Jakarta Selatan lulus pada tahun 2000. Penulis memulai pendidikan Strata I di International Islamic University Malaysia pada program studi Ilmu Politik dan menyelesaikannya pada tahun 2008. Melanjutkan studi, penulis menempuh pendidikan Strata II di universitas yang sama dalam program studi Ilmu Politik dan lulus pada tahun 2013. Alhamdulillah, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Strata III (Ph.D) di program studi Ilmu Politik, juga di International Islamic University Malaysia, pada awal tahun 2025. Penulis adalah seorang akademisi yang saat ini menjabat sebagai dosen di Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor), Indonesia, yang memiliki kekhususan keahlian tentang Value Based Governance and Political Empowerment.



UNIDA Gontor Press
Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia 63471
HP : +62 821-4197-9785 (WhatsApp)
Email: : press@unida.gontor.ac.id
Website : press.unida.gontor.ac.id



9 786347 239105

ALI MUSA HARAHAP

PENGANTAR POLITIK

ALI MUSA HARAHAP



PENGANTAR POLITIK





Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1 Angka 1 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Angka 4 Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ a tau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ a tau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ a tau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ a tau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



PENGANTAR POLITIK

Ali Musa Harahap



Diterbitkan oleh:

UNIDA Gontor Press

Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia 63471

HP : +62 821-4197-9785 (WhatsApp)

Email : press@unida.gontor.ac.id

Website : press.unida.gontor.ac.id



Judul Buku:

Pengantar Politik

Desain Sampul:

Sonia Trisna Wijaya

Penulis:

Ali Musa Harahap

Cetakan I:

Juli 2025

Editor:

Ali Muhammad

Spesifikasi:

293 hlm.+ xiv ; 16 cm x 23 cm

Penyelia Bahasa

Niken Ratna Sari

ISBN:

978-634-7239-10-5

Penata Letak:

Ihsan Fauzi

Distributor:

Toko Buku La Tansa

Jl. HOS Cokroaminoto
Bangunsari, Kec.
Ponorogo, Ponorogo,
East Java
Telp. +62 895 0342 1751

**Toko Buku UNIDA
Gontor**

Main Building UNIDA
Gontor, Siman,
Ponorogo, East Java,
Indonesia
Telp. +62 821-4197-9785

Toko Online

Shopee:
unida.gontor.press

Website:
press.unida.gontor.ac.id

HAK CIPTA DILINDUNGI

Hak Cipta © 2025, pada Penulis

Hak Penerbitan pada Penerbit UNIDA Gontor Press
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini
dengan cara apa pun, tanpa izin sah dari penerbit

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya, buku ajar Pengantar Politik ini dapat diselesaikan dengan baik dan hadir untuk memberikan kontribusi bagi pemahaman dasar dalam ilmu politik. Buku ini hadir sebagai sumber belajar yang tidak hanya memberikan wawasan teoritis tentang politik, tetapi juga membuka cakrawala berpikir tentang dinamika politik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai editor, saya merasa sangat beruntung dapat berkolaborasi dalam penyusunan buku ini. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai konsep-konsep dasar dalam ilmu politik, seperti kekuasaan, sistem politik, negara, ideologi, serta berbagai isu politik yang relevan di dunia modern. Materi yang disajikan disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh-contoh praktis, sehingga dapat menjadi referensi yang berguna bagi para mahasiswa, akademisi, serta siapa saja yang tertarik untuk mendalami dunia politik.

Kami berharap buku ini dapat menjadi jembatan antara teori politik dengan praktik di lapangan, serta memberi inspirasi bagi pembaca untuk lebih memahami dan terlibat dalam proses-proses politik yang membentuk dunia kita. Tentu saja, penyusunan buku ini tidak lepas dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran

yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu politik di Indonesia.

Selamat membaca!

15 Syawal 1446 H

Prof. Ali Muhammad, Ph.D

Prakata

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala penulis panjatkan atas ampunan, rahmat, rahmat, izin dan keberkahan-Nya sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga harus berterima kasih kepada istri dan anak-anak, atas dukungan tiada henti lahir dan batin terhadap penulis khususnya ketika penulis dalam keadaan sulit.

Buku ajar Pengantar Politik ini merupakan buku ajar untuk mahasiswa maupun mahasiswi perguruan tinggi di Indonesia untuk membantu memahami khazanah ilmu politik. Jumlah buku asing yang dijadikan rujukan dalam buku ajar ini relatif banyak. Ini disebabkan keharusan penulis menghadirkan pengertian atas sejumlah konsep langsung dari sumber yang banyak disajikan ke dalam bahasa asing khususnya bahasa Inggris.

Buku ajar ini dibagi menjadi enam belas bab membahas permasalahan penting dalam ilmu politik atas sebagian besar pertanyaan tentang negara, pemerintahan, administrasi publik, perbandingan politik, teori politik, maupun hubungan internasional.

Sebagai penulis, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penulisan buku ini khususnya pihak UNIDA Gontor Press demi terpublikasinya buku ajar ini. Segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam buku ajar

ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Akhir kata, semoga buku ajar kecil ini dapat bermanfaat luas. Banyak pinta dan harapan kepada Sang Kholik, semoga Alloh Subhanahu Wa Ta'ala menerima karya buku ajar ini sebagai bagian dari ibadah penulis. Allahuma Amin.

Siman, 1 Ramadhan 1446 H

Ali Musa Harahap, Ph.D

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Prakata	vii
Daftar Isi	ix

BAB 1: Karakteristik Politik

A. Deskripsi Singkat:	1
B. Capaian Pembelajaran:	1
C. Penyajian Materi	1
1. Pengenalan Politik	2
2. Perwujudan Politik	4
3. Perilaku Politik	4
4. Budaya Politik	5
5. Nilai-nilai Politik	6
6. Kepentingan yang saling bertentangan	7
7. Tingkatan Pemerintahan	8
8. Penerusan/Pengiriman Politik	9
D. Rangkuman Materi	14
E. Soal Latihan:	15
F. Sumber Bacaan	16

BAB 2: Ruang Lingkup Ilmu Politik

A. Deskripsi Singkat	17
B. Capaian Pembelajaran:	17
C. Penyajian Materi	17

1. Definisi Ilmu Politik	17
2. Ruang Lingkup Ilmu Politik	19
3. Ilmu Politik dan Disiplin Ilmu Lain	21
4. Apakah Ilmu Politik adalah sebuah ilmu?.....	24
5. Fakta dan Nilai dalam Analisis Politik.....	26
6. Pendekatan dalam Studi Politik	27
D. Rangkuman Materi	28
E. Soal Latihan:	29
F. Sumber Bacaan.....	30

BAB 3: Kekuasaan, Pengaruh dan Otoritas

A. Deskripsi Singkat	31
B. Capaian Pembelajaran:	31
C. Penyajian Materi	31
1. Definisi Kekuasaan	32
2. Potensi Kekuasaan	33
3. Sumber-sumber Kekuasaan	35
4. Kekuasaan dan Pengaruh.....	38
5. Kekuasaan dan Korupsi	39
6. Otoritas	40
D. Rangkuman Materi	41
E. Soal Latihan:	42
F. Sumber Bacaan.....	42

BAB 4: Teori Politik

A. Deskripsi Singkat.....	43
B. Capaian Pembelajaran:	43
C. Penyajian Materi.....	43
1. Karakteristik Ideologi	44
2. Komponen-komponen Intelektual dari sebuah Ideologi	46
3. Fungsi-fungsi Ideologi	48
4. Liberalisme Klasik	50
5. Liberalisme Modern	52
6. Konservatisme Klasik	54
7. Teori Politik Klasik.....	56
8. Pemikir Politik Abad Pertengahan	61
9. Pemikir Politik Moderen.....	68

10. Teori-teori Politik Kontemporer	71
D. Rangkuman Materi	75
E. Soal Latihan:	76
F. Sumber Bacaan	76

BAB 5: Sifat dan Karakteristik Negara

A. Deskripsi Singkat	77
B. Capaian Pembelajaran:	77
C. Penyajian Materi	77
1. Definisi Negara	78
2. Elemen-elemen Negara	79
3. Bangsa, Negara, dan Negara-Bangsa	82
4. Asal Usul Negara	85
D. Rangkuman Materi	90
E. Soal Latihan:	92
F. Sumber Bacaan	92

BAB 6: Konstitusi dan Pemerintahan Konstitusional

A. Deskripsi Singkat	93
B. Capaian Pembelajaran:	93
C. Penyajian Materi	93
1. Metode Penetapan Konstitusi	94
2. Klasifikasi Konstitusi	96
3. Pemerintahan Konstitusional	101
D. Rangkuman Materi	102
E. Soal Latihan:	103
F. Sumber Bacaan	104

BAB 7: Lembaga-lembaga Pemerintahan

A. Deskripsi Singkat	105
B. Capaian Pembelajaran:	105
C. Penyajian Materi	105
1. Badan Legislatif	106
2. Badan Eksekutif	124
3. Fungsi Yudikatif	134
D. Rangkuman Materi	136
E. Soal Latihan:	137

F. Sumber Bacaan.....	138
A. Deskripsi Singkat	139
B. Capaian Pembelajaran:	139
C. Penyajian Materi	139
1. Dunia Barat.....	140
D. Rangkuman Materi	142
E. Soal Latihan:	143
F. Sumber Bacaan.....	144

BAB 9: Nasionalisme

A. Deskripsi Singkat	145
B. Capaian Pembelajaran:	145
C. Penyajian Materi.....	145
1. Definisi Nasionalisme	146
2. Asal-usul dan Pengaruh Nasionalisme	147
3. Penggunaan dan Penyalahgunaan Nasionalisme.....	150
4. Nasionalisme dan hubungan internasional.....	153
5. Nasionalisme Lanjutan	160
D. Rangkuman Materi	173
E. Soal Latihan:	176
F. Sumber Bacaan.....	176

BAB 10: Feminisme

A. Deskripsi Singkat	177
B. Capaian Pembelajaran:	177
C. Penyajian Materi	177
1. Feminisme	178
D. Rangkuman Materi	183
E. Soal Latihan:	185
F. Sumber Bacaan.....	185

BAB 11: Lingkungan Hidup

A. Deskripsi Singkat	187
B. Capaian Pembelajaran:	187
C. Penyajian Materi.....	187
1. Prinsip-Prinsip Environmentalisme	188
2. Aktivis lingkungan	190

3. Lingkungan dan Politik	191
D. Rangkuman Materi	193
E. Soal Latihan:	194
F. Sumber Bacaan	194

BAB 12: Partai Politik

A. Deskripsi Singkat	197
B. Capaian Pembelajaran:	197
C. Penyajian Materi	197
1. Definisi Partai Politik	198
2. Pertumbuhan Partai Politik	199
3. Fungsi Partai Politik	201
4. Sistem Kepartaian	206
D. Rangkuman Materi	210
E. Soal Latihan:	211
F. Sumber Bacaan	211

BAB 13: Kelompok Penekan

A. Deskripsi Singkat	213
B. Capaian Pembelajaran:	213
C. Penyajian Materi	213
1. Pengertian Kelompok Penekan/Kelompok Kepentingan	214
2. Perbedaan Kelompok Kepentingan dengan Partai Politik	214
3. Peran/Kontribusi Kelompok Penekan	217
D. Rangkuman Materi	255
E. Soal Latihan:	257
F. Sumber Bacaan	258

BAB 14: Pemilihan Umum

A. Deskripsi Singkat	259
B. Capaian Pembelajaran:	259
C. Penyajian Materi	259
1. Fungsi Pemilu	260
2. Pemilu yang Bebas dan Adil	262
3. Jenis Pemilu	263
4. Pemilu di Barat	271

D. Rangkuman Materi	273
E. Soal Latihan:	274
F. Sumber Bacaan.....	274

BAB 15: Pengembangan Masyarakat

A. Deskripsi Singkat	275
B. Capaian Pembelajaran:	275
C. Penyajian Materi	275
1. Politik sebagai Instrumen Pengembangan Masyarakat	276
2. Pengembangan Masyarakat melalui Partisipasi Politik	276
3. Politik dan Pembangunan Berkelanjutan.....	277
4. Tantangan dalam Hubungan Politik dan Pengembangan Masyarakat.....	278
D. Rangkuman Materi	279
E. Soal Latihan:	280
F. Sumber Bacaan.....	281

BAB 16: Kesimpulan.....	283
Daftar Pustaka	287
Index	292
Biografi	293

BAB 1

Karakteristik Politik

A. Deskripsi Singkat:

Bab ini menguraikan berbagai teori tentang pengertian, karakteristik, dan jenis fitur-fitur esensialnya.

B. Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami definisi politik
2. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik politik

C. Penyajian Materi

Pendahuluan

Pembaca studi politik kontemporer dihadapkan pada sejumlah pertanyaan: apa itu kekuasaan? Siapa yang berkuasa? Apa yang membedakan legitimasi? Apa yang membedakan kekuasaan dari pengaruh? Pemerintah suatu negara umumnya memiliki kekuatan politik. Ini menimbulkan pertanyaan tambahan tentang definisi negara. Apa definisi pemerintah? Apa saja jenisnya? Apa saja pilar-pilarnya? Apa saja lembaga negara yang tidak resmi? Bagaimana sebuah negara berhubungan dengan negara lain? Namun, pertanyaan paling penting adalah: Apa itu politik? Apa gejalanya? Bagaimanakah politik dibawa dari generasi ke generasi?

1. Pengenalan Politik

Politik adalah studi tentang kota, atau negara, karena kata Yunani polis berarti kota. Politik didefinisikan dalam kamus Bahasa Inggris sebagai ilmu yang berkaitan dengan bentuk, organisasi, dan administrasi negara, atau bagian dari negara, serta peraturan hubungannya dengan negara lain. Plato dan Aristoteles melihat politik dalam hal tujuan moral yang harus dicapai oleh para pengambil keputusan. Aristoteles melihat kebaikan tertinggi sebagai tujuan ilmu politik, karena keduanya berusaha untuk mencapai kebaikan bersama, kebajikan kewarganegaraan, dan kesempurnaan moral.¹ Meskipun Aristoteles berkonsentrasi pada tujuan moral yang harus dicapai oleh para pemimpin, dia tidak mengabaikan pentingnya struktur politik. Dia memberikan perhatian khusus pada bagaimana pejabat dipilih untuk memerintah negara, bagaimana otoritas mereka diberikan, dan tujuan atau kepentingan mereka. Beberapa tahun terakhir, banyak ilmuwan politik mengambil sikap yang sama dan menghubungkan tindakan politik dengan keyakinan moral. Mereka percaya bahwa politik terdiri dari perselisihan tentang sifat kehidupan yang baik. Mereka melihat politik sebagai seni hidup dan bekerja sama, meskipun mereka berpendapat bahwa kehidupan yang baik adalah mencapai kebebasan dan menggabungkannya dengan kebaikan.

Dahl, seorang ilmuwan politik, menganggap definisi politik diatas terlalu terbatas karena mengaitkannya dengan struktur negara. Oleh karena itu, ia mengubahnya menjadi setiap pola hubungan manusia yang konsisten yang melibatkan kekuasaan, aturan, atau otoritas. Dahl mengkritik ide Aristoteles tentang kemandirian negara sebagai cara untuk mencapai kehidupan yang baik. Dengan memasukkan pola perilaku yang berbeda dengan masyarakat nasional, definisinya memperluas hubungan politik. Meskipun demikian, ia mengikuti

¹ Aristoteles. *The Politics*, diedit dan diterjemahkan oleh Ernest Barker. New York: Oxford University Press, 1962; Bateman, Thomas, dkk. *Menantang Dunia: Bacaan dalam Politik Kontemporer*. Scarborough: Nelson Thomson Learning, 2000; Bennett, Stephen Earl. *Perestroika yang Kalah: Mengapa Gerakan Reformasi Terbaru dalam Ilmu Politik Harus Gagal*," PS: Ilmu Politik dan Politik, vol. 35 (2002).

Aristoteles dalam mendefinisikan dan mengamati peran atau posisi dalam sistem politik yang kompleks.²

Ilmuwan politik lainnya Easton secara eksplisit menjelaskan analisis Dahl. Identifikasi Dahl tentang tindakan politik sebagai tindakan yang secara otoritatif mengalokasikan nilai-nilai dalam masyarakat telah memberi banyak ilmuwan politik apa yang disebutnya sebagai panduan konvensional untuk analisis politik. Seperti Dahl, ia melihat politik sebagai seperangkat interaksi manusia, tetapi membatasinya dengan menekankan alokasi otoritatif untuk seluruh masyarakat. Lebih jauh lagi, Easton memusatkan perhatian, tidak hanya pada tujuan para pembuat kebijakan yang mencoba mengubah distribusi sumber daya atau nilai yang langka dalam masyarakat, tetapi juga pada hubungan otoritas atau kekuasaan yang terlibat di dalamnya.

Lasswell kembali menekankan proses alokasi nilai dan hasil kebijakan. Dia mendefinisikan politik sebagai sesuatu yang berkaitan dengan siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Definisi Lasswell yang luas memungkinkan orang untuk melihat politik dalam banyak konteks sosial, seperti organisasi negara. Definisi ini mencakup hubungan otoritas dan konsekuensi dari proses distribusi kekuasaan. Sebagian besar, perbedaan antara teori Easton dan Lasswell terletak pada penekanannya: teori Easton berfokus pada keseluruhan sistem politik, sedangkan teori Lasswell berfokus pada individu-individu yang memiliki kekuasaan.³

Terlepas dari perbedaan-perbedaan di antara definisi-definisi tersebut, ada beberapa kesamaan diantara semuanya. Pertama, mereka berpikir bahwa politik di mana pun melibatkan konflik yang melekat pada sifat manusia itu sendiri. Konflik dapat muncul, sebagian, dari kelangkaan. Konflik juga dapat muncul karena orang berbeda dalam nilai-nilai mereka. Apa yang dianggap baik oleh satu orang bisa jadi dianggap jahat oleh orang lain. Kedua, sebagian besar konflik politik adalah konflik kelompok. Konflik umumnya terjadi di antara

² Boulding, Kenneth E. *Tiga Wajah Kekuasaan*. Newbury Park, CA: Sage, 1989; Crick, Bernard. *In Defense of Politics (Membela Politik)*. Magnolia, Mass: Peter Smith Publisher, 1994.

³ Easton, David. *Sistem Politik: Sebuah Penyelidikan tentang Ilmu Politik*. Chicago University of Chicago Press, 1981.

kelompok-kelompok dan bukan di antara individu-individu. Ukuran kelompok dapat bervariasi dari satu keluarga hingga komunitas internasional. Terakhir, studi politik melibatkan pemahaman tentang bagaimana orang mengatur diri mereka sendiri dan konsekuensi dari proses politik. Salah satu alasan penting untuk mempelajari politik adalah untuk mencari tahu kondisi-kondisi dimana kelompok-kelompok dapat mencapai tujuan mereka secara damai dan efektif. Politik adalah sarana yang digunakan orang untuk memperdebatkan dan memutuskan nilai-nilai yang paling penting dalam masyarakat.⁴

Secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa politik mengacu pada semua kegiatan yang tujuan utamanya adalah salah satu atau beberapa hal berikut: untuk membentuk kembali atau mempengaruhi struktur atau proses pemerintahan; untuk mempengaruhi atau mengganti pemegang jabatan pemerintahan; untuk membentuk atau mempengaruhi implementasi kebijakan publik; untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kebijakan publik; atau untuk membentuk kembali atau mempengaruhi implementasi kebijakan publik.

2. Perwujudan Politik

Politik muncul disemua kelompok masyarakat dan ditunjukkan dengan berbagai cara. Politik adalah hasil dari perbedaan pendapat, kepentingan, dan kekuatan dalam masyarakat. Baik ilmuwan politik, masyarakat maupun mahasiswa dan mahasiswi memperhatikan aktivitas yang dilakukan dan tujuan yang diarahkan oleh keputusan tersebut. Berbagai asosiasi atau kelompok memiliki politik mereka sendiri. Politik terdiri dari pria dan wanita. Perilaku politik dan budaya politik, nilai-nilai politik, kelompok kepentingan, dan tingkat pemerintahan yang berbeda mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap orang-orang di negara tersebut pada waktu tertentu.

3. Perilaku Politik

Kegiatan politik pada dasarnya dimanifestasikan dalam perilaku politik masyarakat. Perilaku politik memiliki dua dimensi: psikologis dan sosial. Dari perspektif psikologis, perilaku politik ditemukan

⁴ Ibid.

dalam pemikiran, persepsi, penilaian, sikap, dan keyakinan. Respons masyarakat terhadap berbagai isu masyarakat dan kebijakan pemerintah dapat dilihat dari perilaku psikologis masyarakat. Gambaran dan sikap diam masyarakat akan menunjukkan pandangan politik mereka. Di sisi lain, perilaku sosial dapat dilihat dari aksi-aksi yang dilakukan, seperti mogok kerja, demonstrasi, kampanye pemilihan umum, dan sebagainya. Perilaku sosial sering kali terungkap sebagai agresi, kerja sama, kompromi, negosiasi, sikap, ketegasan, dominasi, dan hampir semua strategi manusia yang mengarah pada keputusan yang berdampak sosial.

4. Budaya Politik

Politik juga termanifestasi dalam budaya politik. Budaya politik adalah pola kepercayaan dan sikap individu yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. Budaya politik adalah sistem kepercayaan tentang pola interaksi politik dan lembaga-lembaga politik. Komponen utama dari budaya adalah: kebiasaan politik, kepercayaan politik, harapan politik, simbol-simbol politik, sikap politik, nilai-nilai politik, dan tradisi politik. Kebiasaan politik adalah konvensi dan praktik yang tetap dipraktikkan dalam proses politik. Keyakinan politik adalah keyakinan koheren yang terintegrasi dari pernyataan-pernyataan yang dapat diperbaiki. Misalnya, manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri, pemerintah harus membuat hukum, pemerintah selalu bekerja untuk orang kaya. Keyakinan politik dilambangkan dalam setiap masyarakat melalui bendera, lagu kebangsaan, dan monumen, yang berfungsi untuk mempertahankan komitmen masyarakat terhadap bangsa. Simbol-simbol ini menunjukkan elemen-elemen yang mewakili aspirasi negara.

Sikap politik adalah posisi yang sudah terbentuk sebelumnya dari masyarakat terhadap isu-isu politik, peristiwa, pemimpin, dan institusi. Nilai-nilai politik adalah penilaian nilai, apakah benar atau salah, dari masyarakat. Tradisi politik adalah praktik-praktik yang telah berlangsung lama dan terus menerus dalam dunia politik. Budaya politik berbeda dari satu sistem ke sistem lainnya tergantung pada tingkat partisipasi rakyat dalam proses politik. Menurut

Almond, sebuah sistem politik yang memungkinkan warganya untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik disebut sebagai budaya partisipan.⁵Di sisi lain, ketika masyarakat diizinkan untuk berpartisipasi secara terbatas seperti dalam sistem Komunis Cina, hal ini disebut sebagai budaya subjek. Namun, ketika masyarakat tidak memiliki kesempatan atau minat dalam proses politik, budaya tersebut disebut budaya politik parokial. Namun, mungkin saja ada budaya politik regional yang khas atau subkultur politik dalam satu sistem. Budaya politik regional adalah seperangkat nilai, kepercayaan, dan sikap yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah dan yang, sedikit banyak, membedakan mereka dari penduduk daerah lain. Ada tiga kualitas umum dari budaya politik. Pertama, politik dan sistem politik diterima secara luas, dan akibatnya warga negara mematuhi aturan dan regulasi sistem tersebut. Sebagai contoh, di Eropa umumnya, orang-orang tahu bahwa pemerintah dan parlemen mereka adalah lembaga yang sah. Kedua, masyarakat mengetahui aturan dan kebijakan dari sistem politik yang mereka ikuti. Orang Indonesia, misalnya, mengetahui sistem pemerintahan mereka dan operasinya. Terakhir, masyarakat mengharapkan perilaku tertentu yang pantas atau sesuai dari pemerintah mereka.

5. Nilai-nilai Politik

Nilai-nilai politik mengacu pada penilaian nilai masyarakat yang umumnya dianut bersama. Nilai-nilai dalam masyarakat memberikan masyarakat cara untuk menilai apakah mereka puas atau tidak puas dengan kinerja pemerintah. Nilai-nilai utama adalah kekuasaan, kekayaan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keadilan. Kekuasaan digunakan untuk menilai nilai pemerintah. Rakyat berharap bahwa kekuasaan harus digunakan dengan cara-cara tertentu. Rakyat mengevaluasi apakah kekuasaan digunakan atau disalahgunakan. Kekayaan digunakan untuk menilai nilai pemerintah. Rakyat memberikan penilaian apakah sumber daya negara digunakan dengan benar dan hati-hati. Mereka mengharapkan pelayanan kesehatan yang baik. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan

⁵ Almond, Gabriel Abraham. *Ventures in Political Science: Narratives and Reflections*. Lynne Rienner Publisher. 2002.

kesempatan yang sama dalam pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan mereka, masyarakat mengharapkan adanya jaminan pekerjaan. Terakhir, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mengharapkan keadilan dan supremasi hukum. Lipset membuat perbandingan antara nilai-nilai di Eropa dan Amerika.⁶ Menurutnya, orang Eropa lebih taat hukum dan mereka lebih mematuhi otoritas daripada orang Amerika. Sebaliknya, orang Amerika cenderung menghargai kebebasan pribadi yang sangat tinggi sehingga mereka cenderung menentang peraturan dan otoritas. Dengan demikian, orang Inggris lebih menghargai otoritas daripada orang Amerika. Demikian pula, orang-orang di Indonesia lebih menghargai otoritas daripada kebebasan pribadi. Di Inggris, warga negara lebih suka berpikir bahwa pemerintah mendapatkan otoritas dari rakyat. Setelah rakyat memberikan persetujuan, pemerintah memiliki hak yang sah untuk mengontrol perilaku rakyat. Pemerintah juga diharapkan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan standar perilaku tertentu.

6. Kepentingan yang saling bertentangan

Dalam sistem demokrasi modern, politik banyak dimanifestasikan dalam kegiatan kelompok penekan. Dalam masyarakat seperti ini, sejumlah besar kelompok ekonomi, sosial, agama, etnis, pekerjaan, dan kelompok-kelompok lain menghadapi masalah hubungan antara kepentingan mereka dan kepentingan para elit yang berkuasa. Kelompok-kelompok ini mengorganisir diri mereka secara bebas dan mengajukan tuntutan-tuntutan konkret. Mereka menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang mereka anggap tidak masuk akal. Mereka mengartikulasikan pandangan-pandangan rakyat dan mengampanyekan kebijakan-kebijakan baru. Sifat berkelanjutan dari aktivitas kelompok dalam memperoleh atau mencegah tindakan pemerintah mencerminkan sifat politik di negara tertentu pada waktu tertentu. Biasanya ada empat jenis kelompok: Kelompok asosiasional seperti serikat pekerja yang mewakili kepentingan yang dinyatakan oleh kelompok tertentu; Kelompok non-asosiasional yang kegiatannya tidak terorganisir dengan baik dan seperti banyak

⁶ Lipset, Seymour Martin. *Democracy in Europe and the Americas*. Congressional Quarterly. 1998.

kelompok etnis, regional dan pekerjaan bersifat terus menerus; Kelompok institusional seperti birokrasi dan militer yang dicirikan dengan basis organisasi yang formal dan kuat, dan kelompok anomi yang umumnya spontan. Kelompok asosiasional adalah kelompok yang berserikat dan kelompok non-asosiasional adalah kelompok yang tidak berserikat. Kelompok institusional melekat pada institusi pemerintah, misalnya pegawai negeri, tentara, dan dewan perwakilan rakyat. Kelompok anomi lahir secara spontan. Pada awal tahun 2024 ketika Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa paslon 2 Gibran, pencalonan sebagai calon wakil presiden putra dari Presiden Joko Widodo adalah konstitusional, kelompok pro dan anti segera melakukan demonstrasi dan unjuk rasa.

7. Tingkatan Pemerintahan

Politik akhirnya diwujudkan dalam tiga tingkat pemerintahan: lokal, provinsi dan nasional. Sifat politik berbeda di semua tingkatan. Isu-isu lokal tidak sama dengan isu-isu provinsi. Jelas, politik di tingkat kota berkisar pada isu-isu lokal. Bahkan di tingkat lokal, politik tidak sama di semua kota. Di setiap negara, biasanya ada kota madya. Setiap kota madya memiliki isu-isu yang unik dan politik rakyat dimanifestasikan dalam isu-isu mereka sendiri. Demikian pula, pemerintah provinsi juga berbeda dan setiap provinsi memiliki masalah dan isu-isu spesifiknya sendiri. Aktivitas politik berkisar pada isu-isu tersebut. Pemerintah nasional peduli dengan isu-isu nasional, seperti masalah keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Secara bertahap, pertumbuhan urbanisasi di seluruh dunia menciptakan isu-isu baru di tingkat lokal. Pergeseran kekuatan politik dan ekonomi ke pusat-pusat kota menjadi tidak terhindarkan. Semua ini akan menciptakan masalah-masalah manusia yang akan menuntut peningkatan tanggung jawab dan layanan dari pemerintah daerah. Di negara lain misalnya, provinsi memiliki kekuasaan khusus untuk urusan provinsi. Indonesia memiliki beberapa provinsi dan beberapa wilayah besar.⁷ Di Indonesia, provinsi juga memiliki beberapa

⁷ Dinihari, Kurniawan. *Buku Pintar 34 Provinsi Di Indonesia*. Diva Press. 2018.

kekuasaan, namun pemerintah pusat memiliki kendali atas sumber daya alam di negara tersebut dengan sistem desentralisasi.

8. Penerusan/Pengiriman Politik

Politik tidaklah statis. Politik adalah dinamis dan, oleh karena itu, diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Ide-ide baru dihasilkan dari dalam sistem politik atau diimpor dari luar. Politik ditransmisikan melalui proses yang dikenal sebagai sosialisasi politik. Ini adalah proses belajar tentang politik. Nilai-nilai politik, kepercayaan, dari budaya politik diwariskan kepada generasi berikutnya. Pembentukan dan pengembangan sikap dan keyakinan tentang sistem politik ini dimulai pada usia dini dan berlanjut sepanjang hidup. Lembaga-lembaga keluarga, sekolah, agama, pekerjaan, klub atau asosiasi, media massa, partai politik, dan badan legislatif adalah lembaga-lembaga sosialisasi politik.

Keluarga

Keluarga adalah institusi yang paling alami dan paling tidak formal. Keluarga merupakan lingkungan paling awal bagi pria dan wanita dan memberikan pengaruh formatif yang besar pada mereka. Selain menawarkan tempat tinggal dan makanan kepada anggotanya, keluarga juga memperkenalkan mereka pada aspek-aspek yang lebih luas dari kehidupan sosial. Di dalam keluarga, anak belajar sikap terhadap orang lain, termasuk mereka yang memiliki otoritas, baik di dalam maupun di luar keluarga. Keluarga adalah jendela pertama ke dunia luar bagi seorang anak.⁸ Di dalam keluargalah orang pertama kali membicarakan masalah-masalah masyarakat. Biasanya, jika itu adalah keluarga kelas pekerja, mereka akan mendukung langkah-langkah sosialis. Misalnya, keluarga kaya akan mendukung kebijakan kapitalistik. Pendukung partai pemerintah akan mendukung posisi pemerintah. Di sisi lain, pendukung partai oposisi akan mendukung posisi oposisi. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat pertama untuk memulai sebuah opini publik. Namun, pengaruh keluarga juga akan tergantung pada sifat sistem politik. Dalam demokrasi liberal,

⁸ Elder.L&Green.S. *The Politics of Parenthood*. Suny Press. 2012.

keluarga cenderung mendorong banyak nilai-nilai liberal sementara dalam sistem komunis, upaya propaganda terus-menerus dari pemerintah mencegah masuknya nilai-nilai liberal dalam keluarga. Demikian pula, dalam sistem politik Islam, keluarga Muslim tidak akan mengajarkan anak-anak mereka apa pun yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Institusi Pendidikan

Ketika anak-anak pergi ke sekolah maupun perguruan tinggi, mereka dipengaruhi oleh guru, dosen dan teman sebayanya.⁹ Jumlah sekolah maupun universitas seseorang juga mempengaruhi sikap politik. Seseorang akan mengubah pendapatnya ketika ia menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Rasa tanggung jawab yang lebih kuat biasanya berkembang seiring dengan pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ada hubungan yang kuat antara pendidikan formal seseorang dengan pendapat atau sikap politiknya. Umumnya, lulusan perguruan tinggi lebih toleran dan berpikiran terbuka dibandingkan dengan lulusan sekolah menengah atas, yang sering kali berpandangan parokial. Hal ini karena pendidikan membuat orang berpikiran terbuka dan karena orang yang berpendidikan umumnya menikmati pendapatan dan status yang lebih tinggi, mereka cenderung lebih tertarik pada kegiatan politik. Pendidikan adalah sebuah latihan dalam perluasan intelektual. Seorang warga negara dalam masyarakat yang dimurnikan dan dimuliakan oleh pendidikan, memiliki kapasitas untuk mengekspresikan tanpa rasa takut atau mendukung pendapatnya, untuk memiliki kebenaran dan menjauhi kepalsuan dan ketidakjujuran. Iklim seperti itu meningkatkan kualitas harapan dan perilaku masyarakat dan para pemimpinnya. Ini adalah anugerah dari pendidikan. Selain itu, sistem pendidikan itu sendiri memiliki efek penting pada proses sosialisasi. Sebagai contoh, ada sistem pendidikan terpusat di Indonesia di mana pemerintah memiliki kontrol langsung terhadap lembaga pendidikan. Mahasiswa diajarkan nilai-nilai toleransi yang sama untuk setiap kelompok etnis. Sementara di Amerika Serikat misalnya, pendidikan bersifat

⁹ Harahap, Ali Musa. *Youth and Campus Politics: Malaysian Experience: An Assesment of A Public University*. 2020.

desentralisasi. Setiap negara bagian memiliki sistem pendidikannya sendiri. Akibatnya, kontrol negara terhadap sekolah di Amerika Serikat memungkinkan adanya loyalitas regional, menyaksikan sikap segregasi rasial di negara bagian Selatan, sikap di mana sikap keluarga diperkuat oleh sekolah.

Pekerjaan

Institusi pendidikan, tidak diragukan lagi, merupakan media yang kuat untuk menghasilkan opini publik, tetapi mungkin tidak memiliki efek yang bertahan lama kecuali jika orang-orang tersebut dipekerjakan di jenis pekerjaan yang sama. Tempat kerja adalah forum yang sangat penting untuk opini publik karena para karyawan berbicara tentang isu-isu sosial-ekonomi dan politik selama jam rehat dan makan siang. Jenis pekerja yang sama biasanya akan memiliki pendapat yang sama terhadap isu yang sama. Pendapat kolektif dari para karyawan membantu merumuskan opini publik. Pengaruh sosialisasi orang tua dan guru biasanya mulai berkurang begitu mereka memasuki dunia kerja.

Lembaga-lembaga keagamaan

Agama memainkan peran yang sangat penting dalam politik. Akibatnya, orang-orang membicarakan isu-isu yang relevan ketika mereka pergi ke masjid dan tempat ibadah lainnya. Bahkan selama pemilihan eksekutif politik, lembaga-lembaga keagamaan biasanya memainkan peran penting. Oleh karena itu, para calon kandidat harus berbicara dengan sangat hati-hati selama kampanye pemilu. Lembaga sosialisasi yang paling penting dalam kategori ini adalah tempat ibadah. Pengaruhnya terhadap sikap politik tidak terlalu terlihat ketika ia memperkuat lembaga sosialisasi lainnya, tetapi peran tempat ibadah, memberikan gambaran tentang negara dan pendidikan, merupakan faktor penting dalam perilaku politik di seluruh negara.

Klub-klub atau asosiasi

Di setiap komunitas, ada berbagai jenis klub yang melintasi kelas sosial.¹⁰ Klub-klub tersebut dapat berupa klub olahraga, klub budaya, dan klub pemuda atau klub orang tua. Di klub-klub ini, orang memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain di seluruh kelas sosial berdasarkan minat mereka. Dalam pertemuan mereka, mereka berbicara tentang isu-isu politik dan sosial-ekonomi negara yang pada akhirnya akan menghasilkan opini publik.

Partai Politik

Setiap partai politik memiliki kantor dan cabang di seluruh negeri. Anggota dan masyarakat umum yang menghadiri pertemuan mendengarkan pemimpin mereka yang sering berkunjung dari kantor pusat. Para hadirin dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di negara tersebut dan mengambil keputusan tentang isu-isu politik dan sosial ekonomi kontemporer, yang mengarah pada perumusan opini publik. Partai-partai politik mengalihkan isu, memilih kandidat dan menyajikannya kepada para pemilih untuk menentukan pilihan mereka, menawarkan program dan kebijakan untuk dipertimbangkan dan mencari mandat mereka. Jika masyarakat menyukai program dan kebijakan partai tertentu, maka hal itu merupakan mandat elektoral bagi partai tersebut untuk merealisasikannya. Ini adalah ekspresi opini publik dan pilihan. Di banyak negara, partai pemerintah memberikan dukungan finansial kepada kelompok dan organisasi pemuda untuk memobilisasi opini massa kepada pemerintah.

Media Massa

Media massa mungkin merupakan media yang paling penting untuk sosialisasi politik.¹¹ Televisi, khususnya, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pikiran masyarakat di seluruh negara. Oleh karena itu, di banyak negara, pemerintah mengontrol media secara serius. Reporter televisi membawa gambaran visual dari sebuah isu kepada penonton. Cara penyajian isu tersebut memiliki

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

pengaruh yang serius terhadap pembentukan sikap seseorang. Oleh karena itu, di negara otoriter, rezim menyeleksi setiap laporan agar tidak menimbulkan citra negatif terhadap pemerintah. Naskah-naskah ceramah dan diskusi diserahkan kepada pihak pengawas jauh sebelum jadwal siaran, diperiksa dan bahkan dipangkas, jika pokok bahasannya tidak sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan rezim. Bahkan dalam sistem politik yang kompetitif, ada beberapa bentuk kontrol oleh badan-badan publik dan di mana-mana, dengan atau tanpa dukungan resmi; media digunakan untuk mengontrol atau memanipulasi serta memberi informasi dan hiburan.

Badan legislatif

Badan legislatif adalah lembaga penting dalam sistem politik demokratis modern. Lembaga ini memperdebatkan berbagai masalah bangsa yang mendesak. Warga negara bereaksi terhadap isu-isu ini baik secara negatif maupun positif. Orang-orang menjadi sadar akan isu-isu negara dari perdebatan yang sedang berlangsung di badan legislatif dan mengambil keputusan. Badan legislatif mencerminkan opini publik yang membentuk atau membentuknya. Namun, mereka menimbang opini atas semua tindakan publik sebelum akhirnya menjadi undang-undang. Penundaan adalah syarat penting dalam prosedur parlemen. Oposisi yang kuat dan bertanggung jawab dapat memaksa pemerintah untuk mengubah atau memodifikasi ketentuan-ketentuan asli suatu rancangan undang-undang atau bahkan membatalkan rancangan undang-undang itu sendiri sebagai akibat dari penolakan yang keras dan gigih dari masyarakat yang digerakkan oleh partai politik oposisi. Pemerintah yang kehilangan dukungan rakyat pada akhirnya akan kehilangan mayoritasnya pada pemilu berikutnya.

Politik dalam Sistem Komunis

Politik tidak beroperasi dengan cara yang sama dalam sistem komunis seperti halnya dalam sistem demokrasi. Dalam sistem ini, pertama, ada ideologi resmi yang tidak terbantahkan yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Kedua, ada satu partai massa yang dipimpin oleh orang-orang yang berdedikasi dan berkomitmen pada

ideologi tersebut. Tidak ada partai oposisi yang bisa eksis dalam sistem ini. Ketiga, semua sarana komunikasi dan media didedikasikan untuk rezim dan ideologi. Keempat, media massa adalah monopoli negara. Kelima, senjata juga merupakan monopoli negara. Terakhir, negara diatur berdasarkan prinsip ekonomi komando, yang berarti bahwa alat-alat produksi berada di bawah kendali dan kepemilikan negara. Politik dalam sistem komunis juga dimanifestasikan melalui perilaku politik, budaya politik, dan nilai-nilai politik. Semua ini dipandu oleh ideologi komunis dalam sistem komunis. Budaya politik dan nilai-nilai politik masyarakat dipengaruhi oleh ideologi. Karena tidak ada oposisi terhadap pemerintah, maka tidak ada pertanyaan untuk mengizinkan kelompok penekan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tidak ada perusahaan swasta, dan akibatnya, tidak ada serikat pekerja. Terdapat sentralisasi kekuasaan. Jadi, pemerintah di semua tingkat dikendalikan oleh partai komunis. Politik ditransmisikan kepada rakyat dari generasi ke generasi melalui aparat dan ideologi partai komunis yang sama. Tidak ada ruang untuk tumbuhnya pendapat yang beragam dalam sistem politik komunis.

D. Rangkuman Materi

Politik memiliki berbagai karakteristik yang mencerminkan dinamika dan kompleksitasnya dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, politik dapat dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama, baik dalam skala negara maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Karakteristik utama politik meliputi:

Kekuasaan dan Otoritas: Politik erat kaitannya dengan kekuasaan, baik itu dalam bentuk pengambilan keputusan yang sah maupun dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang berdampak pada banyak pihak. Otoritas politik adalah dasar yang memberi legitimasi pada tindakan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemimpin atau pemerintah.

Konflik dan Konsensus: Politik tidak terlepas dari konflik kepentingan antara individu, kelompok, atau negara. Namun, melalui proses politik, konflik tersebut dapat diselesaikan dengan mencapai

konsensus yang mengarah pada keputusan yang diterima banyak pihak. Proses ini juga melibatkan kompromi yang diperlukan untuk mencapai kestabilan.

Partisipasi: Karakteristik politik yang tak kalah penting adalah partisipasi, baik dalam bentuk pemilihan umum, perdebatan publik, atau bentuk keterlibatan lainnya. Partisipasi memungkinkan warga negara untuk ikut serta dalam menentukan arah kebijakan dan peraturan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Ideologi dan Nilai: Politik juga sangat dipengaruhi oleh ideologi dan nilai-nilai yang dianut oleh individu, kelompok, atau negara. Ideologi ini membentuk cara pandang terhadap dunia politik, mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam politik, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan.

Fleksibilitas dan Dinamika: Politik memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel, yang selalu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan sosial. Keadaan politik dapat berubah seiring berjalannya waktu, baik karena perubahan sosial, ekonomi, teknologi, maupun perkembangan global.

Dengan memahami karakteristik-karakteristik ini, kita dapat lebih memahami betapa pentingnya peran politik dalam membentuk struktur masyarakat, serta bagaimana politik mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Politik bukan hanya sekadar urusan pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang melibatkan semua pihak dalam prosesnya.

E. Soal Latihan:

1. Bagaimana consensus pakar memandang politik?
2. Apa itu transmisi politik?
3. Bagaimana realisasi manifestasi politik?
4. Bagaimana keluarga berperan dalam penerusan politik?
5. Bagaimana kesalahan fatal politik sistem komunis?

F. Sumber Bacaan

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Crick, Bernard. *In Defense of Politics*. Magnolia, Mass: Peter Smith Publisher, 1994

Dahl, Robert. *Modern Political Analysis*. New York: Prentice Hall, 1990.

Finifter, Ada, ed. *Political Science: The State of the Discipline*. Washington: American

Political Science Association, 1993.

Friedrich, Carl J. ed., *Authority*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958.

Goodin, Robert Hans-Dieter Klingemann, eds. *A New Handbook of Political Science*.

New York: Oxford University Press, 1998.

BAB 2

Ruang Lingkup Ilmu Politik

A. Deskripsi Singkat

Bab ini menguraikan definisi ilmu politik, berbagai ruang lingkup politik, mendefinisikannya, dan menjelaskan fitur-fitur esensialnya.

B. Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami definisi ilmu Politik
2. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup ilmu Politik

C. Penyajian Materi

Pendahuluan

Politik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Politik dapat ditemukan dalam pemerintahan suatu negara, asosiasi sipil, dan banyak organisasi lainnya. Ilmu politik adalah bidang akademis yang berhubungan dengan politik sebagai tema sentralnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami sifat dan ruang lingkup disiplin ilmu yang mempelajari politik dalam semua dimensinya.

1. Definisi Ilmu Politik

Konsepsi mengenai sifat dan cakupan ilmu politik telah berubah dari waktu ke waktu. Aristoteles menggunakan istilah ini dalam

arti yang sangat luas untuk mencakup semua institusi termasuk pemerintahan nasional, pemerintahan kota dan internasional, serta organisasi. Bagi Aristoteles, ilmu politik adalah ilmu utama karena ilmu ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mereka yang mengendalikan negara. Ketika kegiatan negara menjadi terbatas, ilmu politik didefinisikan ulang sebagai ilmu tentang negara atau cabang dari ilmu sosial yang berhubungan dengan teori, organisasi, pemerintahan, dan praktik negara. Beberapa pakar mendefinisikan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan negara, yang berusaha untuk memahami dan mengerti negara dalam kondisi-kondisi fundamentalnya, dalam sifat dasarnya, berbagai bentuk perwujudannya, dan perkembangannya.¹² Menurut pendapat lain, ilmu politik adalah ilmu pengetahuan, yang berhubungan dengan negara, yang berusaha untuk memahami dan mengerti negara dalam kondisi-kondisi fundamentalnya, dalam sifat dasarnya, berbagai bentuk manifestasinya, dan perkembangannya. Menurut pakar lainnya, ilmu politik adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang membahas dasar-dasar negara dan prinsip-prinsip pemerintahan. Beberapa juga mendefinisikan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki objek kepastian fakta-fakta politik dan pengaturannya dalam urutan sistematis sebagaimana ditentukan oleh hubungan logis dan sebab akibat yang ada di antara fakta-fakta tersebut.

Definisi ilmu politik di atas, bagaimanapun, dianggap sempit oleh banyak ilmuwan. Tidak diragukan lagi bahwa subjek utama studi dalam ilmu politik adalah negara dan pemerintah, tetapi tidak terbatas pada analisis negara saja; ilmu politik juga berhubungan dengan interaksi rakyat dengan pemerintah. Banyak lembaga informal, seperti partai politik dan kelompok kepentingan, yang mewakili rakyat. Ilmu politik juga mempelajari lembaga-lembaga ini. Ilmu politik juga dijelaskan sebagai studi tentang proses pembuatan keputusan publik dan tentang individu-individu dan lembaga-lembaga yang berpartisipasi dalam proses ini. Ilmu politik adalah studi tentang siapa mendapatkan apa, kapan, bagaimana. Siapa dalam definisi politik merujuk pada

¹² Easton, David, et.al. *The Development of Political Science*. New York: Routledge, 1991; Curzon, Mary H. ed. *Career and the Study of Political Science: A Guide for Undergraduates*. Washington, DC: American Political Science Association, 1991.

pemimpin politik, partai, kelompok kepentingan, dan pemilih, antara lain, yang berpartisipasi dalam proses politik. Bagaimana mengacu pada kegiatan seperti pemungutan suara, kampanye, dan lobi dalam permainan politik. Apa dalam definisi tersebut adalah apa yang dilakukan pemerintah sebagai hasil dari permainan atau kebijakan publik. Beberapa ahli, dalam definisi mereka tentang ilmu politik, tidak hanya mencakup institusi politik formal tetapi juga institusi politik informal seperti partai, media, dan opini publik. Dengan demikian, jelaslah bahwa ilmu politik tidak hanya mempelajari negara tetapi juga masyarakat secara keseluruhan sejauh mereka terkait dengan berbagai institusi negara.

2. Ruang Lingkup Ilmu Politik

Disiplin ilmu politik telah mengalami perubahan seiring dengan munculnya masalah-masalah baru di dunia dan metode-metode baru dalam penelitian politik. Karena perubahan ini, penekanan studi ilmu politik telah berkembang dari satu bidang khusus ke bidang lainnya. Jumlah mata kuliah dalam hubungan internasional dan administrasi publik pasca zaman perang modern telah meningkat, karena pemerintah modern telah menjadi lebih kompleks karena perluasan fungsi dan lembaga-lembaga mereka. Akibatnya, jumlah bidang studi khusus dalam ilmu politik juga meningkat. Secara umum, bidang-bidang ilmu politik meliputi:¹³

1. Administrasi publik
2. Teori politik
3. Perbandingan politik dan pemerintahan
4. Hubungan internasional

Teori Politik

Teori politik mengacu terutama pada sejarah ide-ide politik yang biasanya dimulai dengan orang-orang Yunani kuno dan meluas ke pemikir politik masa kini. Dengan demikian, Al-Mawardi, Al-Ghazali, ibn Khaldun, ibn Taymiyyah, Mawdudi, Sayyid Qutb

¹³ Winter, Herbert. *Political Science and Theory*. New York: HarperCollins College Publishers, 1992.

Plato, Aristoteles, al-Farabi, ibn Rushd, Santo Agustinus, Santo Thomas Aquinas Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Marx, Montesquieu, dan Weber, merupakan nama-nama besar di bidang teori politik. Teori politik juga mencakup filsafat politik yang tidak hanya berurusan dengan masalah fakta tetapi juga dengan masalah norma dengan tujuan dan juga ilmu. Terakhir, teori politik mencakup teori empiris di mana para ilmuwan mengembangkan proposisi-proposisi tentang hubungan-hubungan politik. Proposisi-proposisi ini kemudian diuji secara empiris dengan mengumpulkan informasi yang dapat diamati. Teori empiris tidak terbatas pada ahli teori politik. Teori empiris merupakan pendekatan dasar yang digunakan oleh hampir semua sarjana di setiap subbidang ilmu politik.

Hubungan Internasional

Fokus dalam bidang ilmu politik ini adalah pada topik-topik seperti kebijakan keamanan luar negeri dan nasional, diplomasi dan persaingan, kerja sama, dan peperangan di antara negara-negara. Bidang ini juga mencakup studi tentang hukum internasional dan organisasi internasional dan regional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Konferensi Islam, Liga Arab dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Para ilmuwan hubungan internasional mempelajari bagaimana negara dan organisasi supra-nasional seperti Uni Eropa dan perusahaan multinasional berinteraksi. Mereka meneliti alasan-alasan yang memotivasi negara untuk bertindak seperti yang mereka lakukan. Mereka juga mempelajari penyebab dan konsekuensi perang. Realitas saat ini tentang komunikasi instan, saling ketergantungan ekonomi, ideologi yang saling bertentangan, dan pengembangan senjata nuklir, dengan potensinya untuk menghancurkan semua kehidupan manusia, telah memberikan urgensi baru untuk memahami penyebab dan konsekuensi perang.

Perbandingan Politik dan Pemerintahan

Perbandingan politik dan pemerintahan merupakan sub bidang ilmu politik yang paling luas dan paling menantang. Bidang ini mempelajari persamaan dan perbedaan di antara negara-negara dalam hal badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, konstitusi,

hukum, organisasi administratif, kebijakan luar negeri, partai-partai politik dan prosesnya, fungsi-fungsi ekonomi, sosial, dan politik, serta budaya dan tradisinya. Para ahli perbandingan politik mencoba untuk menjelaskan, misalnya, mengapa suatu negara memiliki banyak partai politik sementara yang lain hanya memiliki sedikit partai politik; mengapa beberapa negara bersifat demokratis sementara yang lain tidak; dan mengapa beberapa negara kaya dan mengeksploitasi negara lain sementara yang lain miskin dan menderita penghinaan karena ketidakadilan yang terjadi pada mereka. Sebagai sebuah bidang studi, perbandingan politik menjadi sangat penting dengan munculnya negara-negara yang baru merdeka.

Administrasi Publik

Administrasi publik, secara umum, berhubungan dengan metode pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah telah menjadi mesin yang penting dengan aktivitas dan fungsi yang semakin meluas. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan personil yang terlatih, untuk kerja sama dan koordinasi yang lebih baik, manajemen dan pengawasan, untuk kinerja yang lebih efisien dari fungsi-fungsi pemerintah dan untuk organisasi pemerintah yang lebih baik. Hal-hal tersebut menjadi perhatian administrasi publik sebagai sebuah bidang studi khusus. Para sarjana administrasi publik juga memperhatikan pelaksanaan kebijakan publik. Mereka mengevaluasi berbagai jenis kebijakan publik dan menganalisis proses pembuatan kebijakan yang mengarah pada keputusan kebijakan dan implementasinya. Administrasi publik menghasilkan sumber pengetahuan tentang teknik dan metode pengelolaan dan administrasi pemerintahan dalam organisasi administrasi, administrasi personalia, administrasi keuangan atau fiskal, dan manajemen hubungan masyarakat yang baik.

3. Ilmu Politik dan Disiplin Ilmu Lain

Hubungan ilmu politik dengan cabang-cabang ilmu lain, terutama ilmu-ilmu sosial, membuat ilmu politik menjadi lebih bermakna dan signifikan karena mendapatkan kekuatan dan energi dari ilmu-ilmu tersebut. Ilmuwan politik yang sangat tertarik dengan sistem

politik menunjukkan ketertarikannya untuk mengetahui dampak dari sejarah, ekonomi, hukum, sosiologi, psikologi, dan sejenisnya terhadap sistem politik dan perilaku politik.

Ilmu Politik dan Filsafat

Filsafat telah memberikan kontribusi pada fleksibilitas ilmu politik dalam bidang filsafat politik. Teori-teori politik seperti asal-usul negara, individualisme, demokrasi, komunisme, pemisahan kekuasaan pemerintah, dan lain-lain hanyalah beberapa contoh dari filosofi pribadi mereka yang menganjurkannya. Teori-teori ini telah memperluas cakrawala pengetahuan para mahasiswa dalam mempelajari ilmu politik. Memang, filsafat politik telah menyajikan kepada manusia visi alternatif tentang negara. Studi ilmu politik tidak memiliki substansi tanpa filsafat politik yang menanamkan nilai-nilai tertentu dalam teori-teori politik.

Ilmu Politik dan Sejarah

Hubungan antara ilmu politik dan sejarah sangat erat. Setiap kali para ilmuwan politik membuat studi tentang suatu negara dan lembaga-lembaga politiknya, mereka bergantung pada sejarah untuk mengetahui asal-usul negara, pertumbuhan dan perkembangannya, dan lembaga-lembaganya. Analisis mengenai sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan negara mengharuskan para ilmuwan politik untuk mengandalkan fakta-fakta sejarah. Dengan demikian, pengetahuan tentang dasar-dasar historis negara akan membantu para pemikir politik dalam menganalisis dan menggambarkan fenomena politik saat ini, dan akibatnya memungkinkan mereka untuk memberikan, melalui pelajaran masa lalu, arah dan makna bagi masa depan. Beberapa ahli berpendapat bahwa sejarah tanpa ilmu politik tidak akan menghasilkan buah, dan ilmu politik tanpa sejarah tidak akan berakar. Perbedaan antara keduanya juga harus diperhatikan. Sejarawan biasanya mempelajari satu peristiwa atau fenomena tertentu secara seksama dengan mencari informasi dari dokumen, arsip, dan sumber-sumber lainnya. Ilmuwan politik akan mencoba membandingkan dan membedakan berbagai kasus dan mencoba mencari generalisasi. Sejarawan juga

membandingkan dan menggeneralisasi, dan dengan demikian, mereka mirip dengan ilmuwan politik.

Ilmu Politik dan Ekonomi

Ilmu politik juga berkaitan erat dengan ilmu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial atau cabang ilmu yang mempelajari masalah pengalokasian sumber daya yang langka untuk mencapai kepuasan optimal dari keinginan masyarakat yang tidak terbatas. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi, seorang mahasiswa ilmu politik memperoleh wawasan tentang kondisi ekonomi negara. Dia belajar bagaimana pemerintah membentuk dan menentukan kebijakan ekonomi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan nasional yang terbaik, yaitu kesejahteraan ekonomi masyarakat. Demikian pula, para pembuat kebijakan politik tidak dapat melepaskan diri dari istilah-istilah ekonomi tertentu seperti anggaran, pendapatan, negara kesejahteraan, tenaga kerja, pengangguran, modal, sistem moneter, pertumbuhan, zakāh, pajak, keuangan, mudārabah, musyarakah, utang, dan neraca pembayaran. Dari sudut pandang inilah beberapa mahasiswa politik menyatakan bahwa ekonomi menentukan politik; bahwa ekonomi membentuk lembaga-lembaga politik dan menetapkan batas-batas di mana pemerintah harus beroperasi. Yang lainnya berpandangan bahwa politik menentukan ekonomi. Namun, faktanya, politik dan ekonomi saling melengkapi dan melengkapi satu sama lain.

Ilmu Politik dan Sosiologi

Sosiologi adalah studi tentang masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah program ilmu sosial yang memperkaya ilmu politik dengan kontribusinya terhadap studi masalah sosial yang juga merupakan masalah pemerintah. Investigasi dan penyelidikan sosiolog tentang kejahatan, masalah hubungan perkawinan, kenakalan remaja, adalah data yang tersedia bagi para ilmuwan politik untuk dievaluasi, dan yang kemudian dapat menjadi subjek yang menarik dan dasar dari undang-undang. Sosiologi telah memberikan banyak kontribusi pada studi ilmu politik. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah sangat ditekankan. Siswa di bidang ini harus memiliki

pemahaman yang jelas tentang bagaimana negara menjalankan kekuasaan dan otoritasnya atas warga negaranya, dan mengapa hal tersebut diimbangi oleh warga negara dan kelompok individu lainnya dalam menikmati kebebasan dan kebebasan mereka. Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan politik, juga terkenal sebagai seorang sosiolog. Demikian juga, Seymour Martin Lipset, seorang sosiolog terkenal sebagai ilmuwan politik.

Ilmu Politik dan Hukum

Tidak kalah dekat dan tidak kalah kuno adalah hubungan antara Ilmu Politik dan ilmu hukum. Jika manusia ingin menjalani kehidupan bersama dan menjaga eksistensi komunitas itu sendiri, mereka harus menerima aturan perilaku tertentu. Peraturan yang dibuat oleh otoritas publik disebut hukum dan ini dirumuskan, dikelola, dan ditegakkan oleh pemerintah. Sebenarnya, yurisprudensi adalah sub-divisi dari ilmu politik, karena negara yang menciptakan dan memelihara kondisi hukum. Namun, sekarang ilmu ini diperlakukan sebagai studi yang terpisah karena luasnya cakupan dan studi khusus tentang hukum.

4. Apakah Ilmu Politik adalah sebuah ilmu?

Ilmu politik, seperti yang didefinisikan di atas, adalah studi ilmiah dan disiplin tentang ide, perilaku, institusi, dan kebijakan yang berkaitan dengan politik publik dan pemerintahan. Ilmu politik adalah disiplin ilmu yang beragam dan ada banyak ketidak-sepakatan tentang apa yang harus dicakup dan bagaimana cara mempelajarinya. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai pertanyaan apakah politik dapat dipelajari secara ilmiah.

Ada beberapa ilmuwan politik yang percaya bahwa politik tidak dapat dipelajari secara ilmiah. Mereka berpendapat bahwa studi politik berbeda dengan ilmu kimia atau biologi. Ilmu politik berurusan dengan manusia yang dinamis dan bukan dengan hal-hal yang statis seperti yang ditemukan dalam sains. Lebih jauh lagi, manusia tidak berperilaku seperti benda mati. Manusia itu unik karena kesadaran diri dan kapasitasnya untuk mengubah dan merencanakan perilaku. Argumen terkait adalah bahwa perilaku politik, dalam pengertian

historis, adalah unik dan tidak berulang. Perilaku tersebut bukanlah respons mekanis yang dapat direproduksi di laboratorium. Oleh karena itu, politik tidak dapat dipelajari secara ilmiah, dan ilmu politik tidak akan pernah menjadi ilmu pengetahuan dalam arti yang sebenarnya. Pendekatan ilmiah tidak akan menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi dalam politik. Namun, ada banyak orang yang percaya bahwa politik dapat dipelajari secara ilmiah. Para pendukung pendekatan ilmiah ini berargumen sebagai berikut:

1. Perilaku manusia itu kompleks, tetapi perilaku tersebut mengikuti pola yang teratur.
2. Pola-pola perilaku atau keteraturan ini dapat ditemukan dan diverifikasi melalui pengamatan yang cermat dan sistematis.
3. Berdasarkan pengamatan ini dan dengan menggunakan statistik dan matematika, hukum-hukum dapat dirumuskan tentang bagaimana politik beroperasi.

Ilmuwan politik yang menggunakan perangkat ilmiah untuk menganalisis politik menganut metode perilaku dan kemudian metode pasca-perilaku. Alih-alih mempelajari maksud dari konstitusi atau bagaimana lembaga-lembaga seharusnya bekerja, para ahli perilaku mempelajari apa yang sebenarnya terjadi. Penekanan mereka adalah pada analisis kuantitatif data. Penilaian nilai tidak sepenting pengumpulan dan analisis data.

Akan tetapi, para ilmuwan politik perilaku setuju bahwa ilmu politik adalah salah satu ilmu sosial. Seperti semua ilmu sosial lainnya, ilmu politik memiliki keterbatasan tertentu. Subjeknya adalah manusia, dan manusia memiliki karakter dan perilaku yang berbeda. Motif dan emosi manusia tidak dapat dipelajari di laboratorium yang terkendali seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan alam. Ilmuwan politik dipaksa untuk bergantung pada pengamatan, dan melanjutkan dengan asumsi. Oleh karena itu, kesimpulan yang dicapai dalam ilmu politik tidak bisa setepat dan seyakini ilmu alam. Oleh karena itu, ilmu politik tidak dapat disebut sebagai ilmu pasti seperti fisika. Ilmu politik bukanlah ilmu pasti seperti matematika. Ilmu politik adalah ilmu probabilitas. Ilmu politik adalah ilmu probabilitas. Dengan menerapkan metode ilmiah, ilmu politik dapat sampai pada

kesimpulan yang menyatakan bahwa dalam situasi yang sama, hasil yang sama dapat terjadi.

5. Fakta dan Nilai dalam Analisis Politik

Para ilmuwan politik juga membuat perbedaan penting antara fakta dan nilai. Fakta adalah sesuatu yang ada di dunia nyata. Bahwa Indonesia dan Amerika Serikat menggunakan sistem presidensial adalah sebuah fakta. Nilai didefinisikan sebagai seperangkat preferensi mental. Nilai adalah preferensi terhadap sesuatu. Jika kita menyetujui dewan rakyat Indonesia atau Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari dua majelis, kita sedang mengekspresikan sebuah nilai. Beberapa ilmuwan politik percaya bahwa studi politik seharusnya hanya berkaitan dengan hubungan-hubungan faktual. Mereka menganggap salah jika seorang ilmuwan politik menyarankan kebijakan apa yang lebih baik, kandidat mana yang harus didukung, atau apakah bentuk pemerintahan harus diubah. Penilaian nilai atas pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat didasarkan pada fakta-fakta yang disajikan oleh ilmuwan, tetapi analisisnya harus tetap kritis. Ilmuwan tidak boleh menjadi seorang advokat. Kata-kata harus dan seharusnya adalah istilah nilai dan ilmuwan disarankan untuk tidak menggunakan kata-kata ini dalam penelitian mereka.

Namun begitu tidak sedikit ilmuwan politik yang menentang posisi ini. Kelompok ini percaya bahwa tidak mungkin seorang ilmuwan bersikap netral secara sempurna dalam pekerjaannya. Nilai-nilai yang dianut seseorang pasti akan mempengaruhi topik yang dipilih untuk penelitian, fakta-fakta yang dikumpulkan, dan informasi yang dianalisis. Para ilmuwan politik Muslim contohnya percaya bahwa semua tindakan politik dipandu oleh beberapa nilai atau pertimbangan normatif. Mereka juga percaya bahwa semua ilmuwan politik memiliki sistem nilai atau konsepsi tentang tujuan manusia yang tepat. Ilmuwan politik Barat mendukung demokrasi dan kapitalisme. Ilmuwan politik Muslim percaya pada nilai-nilai seperti kedaulatan ilahi, pengetahuan, keadilan, dan politik partisipasi. Oleh karena itu, para ilmuwan politik Muslim menyarankan agar para ilmuwan membuat nilai-nilai mereka eksplisit dan tidak bersembunyi di balik

kedok netralitas nilai. Selain itu, seorang ilmuwan politik, seperti halnya warga negara lainnya, memiliki hak untuk mengadvokasi suatu tujuan selama orang-orang menyadari bahwa nilai-nilai tersebut akan membawa kebaikan orang banyak (*maslahat*).

6. Pendekatan dalam Studi Politik

Ilmuwan politik telah mengembangkan beberapa pendekatan untuk mempelajari politik termasuk filsafat politik, perilaku politik, dan pilihan publik. Filsafat politik adalah pendekatan tertua yang dapat didefinisikan sebagai studi tentang ide-ide politik. Pendekatan ini sebagian besar berurusan dengan pertanyaan normatif seperti bagaimana seharusnya manusia hidup. Para filosof politik sejak zaman Plato masa silam telah mengajukan pertanyaan, apakah keadilan itu? dan pemerintahan seperti apa yang terbaik untuk mewujudkan keadilan? Filsafat politik memberikan penekanan besar pada etika dalam membuat pilihan politik. Filsafat politik juga mengajarkan orang untuk menggunakan logika untuk mengetahui hasil dari suatu tindakan politik dan untuk mengantisipasi hasil yang mungkin terjadi dari suatu pilihan sosial.

Perilaku politik lebih bersifat empiris dan tidak terlalu normatif dibandingkan dengan filsafat politik. Mereka yang mempelajari perilaku politik tidak tertarik pada bagaimana warga negara seharusnya berperilaku, tetapi pada bagaimana mereka sebenarnya berperilaku. Mereka bertanya, siapa yang memilih? dan mengapa mereka memilih seperti itu? Pendekatan terhadap ilmu politik ini dimulai oleh penulis Yunani Thucydides yang mempelajari sebab dan akibat perang antara Athena dan Sparta pada abad ke-5 SM. Aristoteles (384-322 SM) juga menggunakan pendekatan ini dalam studinya tentang politik.¹⁴ Dia dianggap oleh banyak orang sebagai ilmuwan politik sejati yang pertama. Pendekatan perilaku telah menjadi salah satu budaya dominan dalam ilmu politik kontemporer. Pendekatan ini menggunakan berbagai teknik penelitian dan analisis statistik dengan menggunakan komputer untuk mempelajari persamaan dan perbedaan perilaku politik di berbagai negara dan budaya.

¹⁴ Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Pilihan publik didasarkan pada dua asumsi. Pertama, mengasumsikan bahwa para aktor politik adalah rasional dan mereka menghitung biaya dan manfaat dari tindakan mereka dan memilih salah satu yang mengarah pada hasil terbaik bagi mereka. Kedua, pendekatan ini mengasumsikan bahwa latar belakang kelembagaan di mana seseorang bertindak mempengaruhi akibat dan manfaat tersebut. Pendekatan pilihan publik menggunakan model-model abstrak, asumsi-asumsi mengenai perilaku manusia, dan kesimpulan logis berdasarkan model dan asumsi tersebut. Metode ini juga dikenal sebagai model pilihan rasional. Pendekatan ini meminjam metode dan model dari ilmu ekonomi dan cabang ilmu matematika yang disebut teori permainan. Ketiga pendekatan yang diuraikan di atas membantu kita memahami bagaimana masyarakat mengambil keputusan dan mengapa mereka melakukannya. Setiap pendekatan memiliki kekuatan dan kelemahan, tetapi semuanya membantu kita memahami dunia politik

D. Rangkuman Materi

Mengapa seorang mahasiswa atau mahasiswi harus mempelajari ilmu politik? Apa gunanya ilmu politik baginya di kemudian hari? Apakah ilmu politik akan membantu mahasiswa dalam mendapatkan pekerjaan, dalam menjadi lebih maju? Apakah mata kuliah ilmu politik bersifat praktis? Pertama-tama, harus dijelaskan bahwa tujuan utama dari kurikulum perguruan tinggi ilmu politik bukanlah untuk mempersiapkan mahasiswa untuk berkarir di bidang politik, mengajar, atau pegawai negeri. Tujuan utama ilmu politik adalah pelatihan kewarganegaraan. Tujuannya adalah untuk membekali mahasiswa agar dapat memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang demokratis. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi manusia dengan membantu mereka menyadari hak dan kewajiban mereka.

Namun, warga negara yang baik, yang berperilaku dan memberikan suara secara teratur, tidak lagi cukup baik. Kebajikan dan niat baik tidak akan membantu masyarakat berkembang dan bergerak ke arah yang sesuai. Mahasiswa juga harus menjadi warga

negara yang berpengetahuan luas. Mereka harus tahu bagaimana pemerintah mereka beroperasi, kepentingan dan kekuatan apa yang ada di balik kebijakan tertentu, apa hasil dari kebijakan tersebut, siapa perwakilan mereka yang terpilih, dan apa yang mereka perjuangkan. Ilmu politik berusaha untuk mengumpulkan dan memberikan pengetahuan dan pemahaman ini. Studi ilmu politik memungkinkan mahasiswa untuk memahami proses dan institusi pengambilan keputusan masyarakat. Pemahaman seperti itu sering kali mencakup mengetahui siapa yang membuat keputusan, untuk alasan apa dan untuk kepentingan siapa, serta bagaimana keputusan dapat didorong, dimodifikasi, atau dicegah oleh warga negara, sebagai anggota umat Islam atau sebagai anggota sistem sosial apa pun.

Namun, tujuan ilmu politik tidak terbatas pada penyediaan informasi yang relevan. Pengetahuan tentang ilmu politik berguna dalam beberapa cara lain. Mahasiswa dapat menggunakan pengetahuan mereka untuk mengajar kewarganegaraan dan politik di sekolah, perguruan tinggi dan universitas. Mereka juga dapat mengikuti karier sebagai politisi profesional. Meskipun pengetahuan ilmu politik tidak diperlukan untuk memasuki bidang politik, itu dianggap sebagai aset jika seseorang memiliki dasar yang memadai di bidang ini. Terakhir, mereka dapat bekerja di dalam birokrasi pemerintah seperti kementerian atau departemen negara, terutama yang berhubungan dengan perencanaan publik, integrasi nasional, pembangunan politik, persatuan nasional, pembuatan kebijakan dan layanan diplomatik.

E. Soal Latihan:

1. Bagaimana konsensus pakar memandang nilai dalam politik?
2. Apa saja hubungan ilmu politik dengan disiplin ilmu lainnya?
3. Bidang ilmu politik meliputi bidang apa saja? Jelaskan.
4. Bagaimana fakta dan nilai dalam analisis politik?
5. Bagaimana pendekatan dalam studi Politik?

F. Sumber Bacaan

Almond, Gabriel Abraham. *Ventures in Political Science: Narratives and Reflections*.

Lynne Rienner Publisher. 2002

Anshari, Endang Saifuddin, *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma*

dan Sistem Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2004

Aristoteles. *The Politics*, diedit dan diterjemahkan oleh Ernest Barker.
New York: Oxford

University Press, 1962.

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

BAB 3

Kekuasaan, Pengaruh dan Otoritas

A. Deskripsi Singkat

Bab ini menguraikan berbagai teori tentang konsep dasar kekuasaan, pengaruh, dan otoritas, mendefinisikannya, dan menjelaskan fitur-fitur esensialnya.

B. Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami definisi kekuasaan
2. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi pengaruh
3. Mahasiswa mampu memahami definisi otoritas

C. Penyajian Materi

Pendahuluan

Gagasan tentang kekuasaan merupakan hal yang sangat penting dalam politik. Tanpa kekuasaan, mustahil bagi pemerintah untuk mempertahankan hukum dan ketertiban serta menjalankan kebijakan-kebijakan untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan politik negara. Dalam masyarakat, gagasan tentang kekuasaan membangkitkan emosi yang besar, baik positif maupun negatif. Hal ini karena kekuasaan dapat digunakan untuk kebaikan seseorang, seperti halnya kekuasaan

dapat digunakan untuk mencabut hak orang lain. Berlawanan dengan pandangan umum, kekuasaan tidak selalu berdampak negatif. Kekuasaan juga tidak selalu identik dengan kekuatan fisik. Kekuasaan dapat mencakup kemampuan untuk menggunakan kekuatan fisik, tetapi kekuasaan juga dapat dilakukan dalam bentuk lain. Lalu, apakah kekuasaan itu?

1. Definisi Kekuasaan

Meskipun konsep kekuasaan merupakan inti dari politik, namun sering kali tidak didefinisikan dengan baik. Bahkan, terkadang kekuasaan, pengaruh, dan otoritas digunakan secara bergantian, untuk mengartikan hal yang sama. Kadang-kadang juga, perbedaan yang tidak tepat dan tidak benar dibuat di antara ketiga konsep ini. Definisi kekuasaan yang dapat diterima secara umum mendefinisikan kekuasaan sebagai kapasitas seorang individu, atau sekelompok individu, untuk memodifikasi perilaku individu atau kelompok lain sesuai dengan yang diinginkannya pemegang kekuasaan. Definisi ini dapat dinyatakan sebagai berikut: A memiliki kekuasaan atas B jika A dapat membuat B melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh B. Tersirat dalam definisi ini adalah gagasan bahwa A memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku B, dengan paksaan jika perlu. Seorang individu memegang kekuasaan sejauh ia mampu mengubah perilaku orang lain sesuai dengan keinginannya. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dari orang lain sesuai dengan keinginan seseorang.

Oleh karena itu, kekuasaan memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁵

1. Kekuasaan dalam konteks sosial bukanlah sesuatu yang dapat kita sentuh atau cium, tetapi merupakan bentuk hubungan sosial antara individu dan kelompok. Kekuasaan pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan (atau berpikir) sesuatu yang jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Konsep kekuasaan menyiratkan bahwa tindakan yang diambil oleh para pengikut dalam menanggapi keinginan pemegang

¹⁵ Friedrich, Carl J. ed., *Authority*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958.

kekuasaan bukanlah tindakan yang akan mereka lakukan jika mereka dibiarkan sendiri.

2. Kekuasaan bersifat transitif, terutama ketika dijalankan. Artinya, kekuasaan memiliki subjek (seseorang yang menerapkannya) dan objek (seseorang yang menjadi sasarannya). Tidak ada pemimpin jika tidak ada pengikut yang mau atau setidaknya mampu melakukan apa yang dia inginkan. Kekuasaan tidak ada dalam ruang hampa. Kekuasaan hanya bisa dijalankan dalam sebuah relasi.
3. Karena kekuasaan (yaitu kontrol) bersifat transitif ketika dijalankan, maka harus ada dua pandangan tentang kekuasaan: satu dilihat dari sudut pandang pemegang kekuasaan atau pihak berwenang, dan satu lagi dari sudut pandang mereka yang diberi kekuasaan.
4. Kekuasaan bersifat situasional. Tergantung pada situasi, keadaan dan posisi. Seseorang mungkin memiliki kekuasaan atas bawahannya ketika dia masih menjabat, tetapi tidak setelah dia meninggalkan pekerjaannya atau pensiun.

2. Potensi Kekuasaan

Kekuasaan pada dasarnya adalah kemampuan atau kapasitas seseorang untuk membuat orang lain bertindak (atau berpikir) dengan cara tertentu. Sebagai sebuah kemampuan atau kapasitas, kekuasaan bisa jadi sedang digunakan secara aktif atau tidak pada waktu tertentu. Ketika digunakan, kekuasaan itu sedang dijalankan, dan ketika tidak digunakan tetapi mampu digunakan, kekuasaan itu adalah potensi. Dalam politik, kekuasaan yang digunakan memiliki tiga bentuk: paksaan, bujukan, dan persuasi.

Paksaan adalah penggunaan ancaman sanksi berat oleh beberapa orang terhadap orang lain yang kehendaknya ingin dikendalikan oleh pemegang kekuasaan. Objek harus patuh atau sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Paksaan mencakup tekanan psikologis misalnya, teknik cuci otak yang digunakan oleh pemerintah terhadap para tahanan untuk mematahkan semangat mereka dan memeras pengakuan dari mereka dan penggunaan atau ancaman yang dapat dipercaya dari kekuatan fisik. Kekuatan paksaan selalu berbahaya,

tetapi terkadang juga penting untuk menjaga hukum dan ketertiban dalam masyarakat yang kompleks.

Bujukan adalah imbalan yang diberikan atau dijanjikan untuk bertindak sesuai keinginan pemegang kekuasaan. Imbalan dapat berupa psikologis, material, ekonomi atau politik. Medali untuk kepahlawanan, hibah tanah kepada pendukung militer, kontrak yang menguntungkan bagi anggota aktif organisasi adalah bujukan di tingkat individu. Imbalan dapat berupa bantuan militer, senjata, pinjaman atau hadiah. Sebagai contoh, Pakistan diberi hadiah besar oleh pemerintah Amerika Serikat atas bantuan mereka dalam menginvasi pahlawan Afghanistan pada tahun 2002. Bujukan sangat banyak dan beragam, baik dalam politik domestik maupun internasional. Sumber daya yang digunakan sebagai bujukan tidak pernah terbatas, dan memberi imbalan berupa jabatan tidak menjamin bahwa mereka akan dengan setia melindungi kepentingan pelindungnya daripada kepentingannya sendiri.

Persuasi sebagai kekuatan melibatkan penggunaan argumen dan informasi untuk membuat orang bertindak sesuai dengan keinginan pembujuk. Persuasi dapat berupa nasihat dan pemberian informasi atau menggunakan kebohongan dan penipuan, memutarbalikkan dan menahan informasi yang relevan untuk mempengaruhi targetnya. Sebagian besar pekerjaan organisasi internasional terdiri dari upaya berbagai delegasi untuk membujuk satu sama lain.

Oleh karena itu, kekuasaan dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengendalikan orang lain, dan pengendalian adalah tindakan nyata untuk membuat orang lain melakukan perintah seseorang. Pada tahap ini, ada banyak bentuk kontrol, yaitu ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan tindakan atau pikiran orang lain. Kekerasan adalah salah satu dari cara-cara ini, bersama dengan bujukan dan persuasi. Oleh karena itu, dalam sistem sosial yang stabil, individu yang memiliki kemampuan berbeda untuk mengendalikan orang lain dengan menggunakan salah satu atau semua cara pengendalian ini dapat dianggap berkuasa. Seperti halnya tindakan bepergian tidak boleh disamakan dengan cara bepergian misalnya, dengan mobil, kereta api, atau pesawat terbang, kita juga

tidak boleh menyamakan kekuasaan dengan cara-cara menjalankannya misalnya, melalui kekerasan dan bujukan.

3. Sumber-sumber Kekuasaan

Dalam analisis mereka mengenai kekuasaan, setidaknya lima sumber kekuasaan yang memunculkan lima jenis kekuasaan. Dasar-dasar kekuasaan ini tidak boleh disamakan dengan pelaksanaan kekuasaan yang sebenarnya. Mereka dapat dipandang sebagai indikator kekuasaan.¹⁶

Kekuatan Kekuasaan yang bersifat memaksa

Kekuatan mungkin merupakan sumber kekuasaan yang paling mudah dikenali. Hal ini karena mudah dilihat dan juga karena telah dikenal selama berabad-abad sebagai sumber kekuasaan yang sangat sukses dalam membuat individu melakukan apa yang diinginkan. Dikenal sebagai kekuatan paksaan, kekuatan ini didasarkan pada keyakinan pengikut bahwa pemimpin memiliki kekuatan untuk menghukumnya jika tidak patuh. Dalam hal kekuatan, pemerintah menikmati monopoli kekuatan fisik. Tidak ada individu atau organisasi yang dapat membawa senjata dan amunisi tanpa izin dari pemerintah. Bahkan dengan izin, kekuatan yang diperintahkan oleh seseorang atau organisasi sangat terbatas.

Kekayaan

Kekayaan dikenal sebagai sumber kekuasaan dan pengaruh yang efektif bagi mereka yang memilikinya. Hal ini sebagian karena mereka yang menguasai banyak kekayaan dapat memberikan sebagian kepada orang lain. Pada gilirannya, orang lain dapat memperoleh mata pencaharian atau membeli banyak sumber daya yang diinginkan masyarakat. Dengan demikian, mereka yang menguasai kekayaan dapat membuat banyak orang terikat dengan mereka sehingga mereka merasa berkewajiban untuk melakukan perintah orang kaya. Inilah yang dalam sosiologi politik disebut sebagai saling menguntungkan. Selain itu, kekayaan sering kali menjadi prasyarat

¹⁶ Friedrich, Carl J. ed., *Authority*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958.

keanggotaan kelompok sosial yang biasanya menjadi tempat para pemimpin dan pejabat pemerintah berasal. Mereka yang memiliki sarana utama untuk memproduksi dan mendistribusikan barang-barang masyarakat biasanya adalah yang paling berkuasa. Hal ini dikenal sebagai kekuasaan imbalan dan didasarkan pada keyakinan pengikut bahwa pemimpin memiliki sumber daya manfaat yang akan membantu pengikut dalam mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhannya. Patronasi politik adalah contoh yang umum. Setelah menjabat, banyak politisi dapat menempatkan pendukung setia mereka dalam pekerjaan pemerintah, memberikan kontrak pemerintah, dan sejenisnya.

Keahlian: Kekuatan Pakar

Keahlian telah memberikan kekuatan dan pengaruh kepada setiap individu. Hal ini terlihat jelas dalam pepatah pengetahuan adalah kekuatan. Dikenal sebagai kekuatan ahli atau informasi, kekuatan ini didasarkan pada keyakinan pengikut bahwa pemimpinnya memiliki informasi dan kemampuan yang unggul. Keahlian didasarkan pada kepemilikan informasi tentang cara kerja sesuatu. Dengan demikian, keahlian mencakup pengetahuan dan juga keterampilan yang berasal dari pengetahuan tersebut. Pasien mendengarkan dokternya dan melaksanakan rekomendasinya dengan harapan bisa sembuh; kesehatannya bergantung padanya. Profesor pergi ke teknisi ketika komputernya mengalami kerusakan atau tidak berfungsi. Orang tidak mempertanyakan keputusan politisi di bidang pertahanan nasional, karena mereka percaya bahwa perdana menteri atau presiden memiliki banyak informasi rahasia dan, oleh karena itu, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Karena pendapat mereka tentang subjek dalam spesialisasi mereka sangat mendalam dan meyakinkan, para ahli dari segala usia berpartisipasi secara efektif dalam membentuk keputusan penting masyarakat.

Posisi: Kekuasaan yang Sah

Posisi dalam organisasi adalah salah satu jalan yang paling pasti menuju kekuasaan. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagian besar terdiri dari organisasi-organisasi yang kompleks dan melalui

organisasi-organisasi itulah keputusan-keputusan dibuat dan diimplementasikan secara efektif. Organisasi, pada gilirannya, merupakan kompleksitas peran yang menentukan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu, ketika memegang jabatan tertentu, maka pemegang jabatan tersebut memiliki serangkaian fungsi atau masalah yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Dikenal sebagai kekuasaan yang sah, kekuasaan ini didasarkan pada keyakinan pengikut bahwa pemegang kekuasaan memiliki hak untuk mempengaruhinya dan dia memiliki kewajiban untuk mengikutinya. Kemampuan untuk membuat keputusan yang efektif memang merupakan esensi dari kekuasaan dan inilah yang diberikan oleh jabatan. Menjadi menteri kabinet, misalnya, biasanya memberikan kekuasaan yang lebih besar daripada posisi bawahan atau non-pemerintah. Jabatan tersebut bisa bersifat elektif atau ditunjuk. Seseorang bahkan mungkin dipekerjakan secara khusus sebagai manajer bank atau wakil rektor universitas. Yang penting adalah bahwa jabatan yaitu titik keputusan dalam sebuah organisasi merupakan sumber kekuasaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan tertentu.

Dukungan Populer: Kekuatan Referensial

Dukungan rakyat merupakan sumber kekuasaan yang penting karena berbagai alasan. Hal ini jelas penting di mana para pejabat pemerintah harus dipilih secara bebas dan populer. Dukungan rakyat juga memengaruhi penunjukan atau promosi seorang politisi dari, misalnya, anggota parlemen menjadi menteri. Hal ini karena organisasi politik, terutama pemerintah, ingin menjadi stabil, dan mereka yang tidak memiliki dukungan rakyat cenderung tidak stabil. Akhirnya, dukungan rakyat meminimalkan kebutuhan untuk menggunakan kekuasaan koersif atau kekuasaan imbalan untuk mendapatkan kepatuhan terhadap keputusan pemerintah. Dikenal sebagai kekuasaan rujukan, kekuasaan ini didasarkan pada identifikasi para pengikut dengan pemimpin.

Namun, perlu dicatat bahwa sumber-sumber kekuasaan yang disebutkan di atas pada dasarnya adalah potensi. Mereka dapat

membantu membuat orang melakukan apa yang tidak akan mereka lakukan. Mereka adalah sumber daya politik yang dapat digunakan secara maksimal. Oleh karena itu, kesadaran politik sangat penting dalam mengubah potensi ini menjadi kenyataan. Kesadaran politik, pada gilirannya, bergantung pada pendidikan, pengalaman politik, atau pada kesadaran untuk bersatu dengan orang lain dalam mencapai tujuan.

4. Kekuasaan dan Pengaruh

Bagaimana dengan pengaruh? Apa bedanya pengaruh dengan kekuasaan? Ada banyak kebingungan dalam ilmu-ilmu sosial mengenai perbedaan antara kekuasaan dan pengaruh. Kebanyakan orang berbicara tentang politik sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh. Bagi Lasswell dan Kaplan, kekuasaan adalah kontrol yang didukung oleh penggunaan atau ancaman kekerasan.¹⁷ Bagi mereka, kekuasaan adalah proses mempengaruhi kebijakan orang lain dengan bantuan aktual atau ancaman perampasan yang berat untuk ketidaksesuaian dengan kebijakan yang diinginkan. Bagi mereka, kekuasaan adalah kasus khusus dari penggunaan pengaruh. Kekuasaan dan pengaruh adalah sebagai pengganti ancaman atau janji. Pengaruh melibatkan semacam prediksi dalam bentuk nasihat, dorongan, peringatan, dan sebagainya... Sekarang seharusnya sudah jelas bahwa kekuasaan bertumpu pada kemampuan untuk memanipulasi sanksi positif atau negatif, sedangkan pengaruh tidak demikian.

Bagi beberapa pakar, sifat ancaman yang keras merupakan ciri khas kekuasaan, sementara bagi yang lain, ancaman adalah ancaman, baik keras maupun tidak. Selama menghasilkan kepatuhan, ancaman cambuk dan ancaman senjata pada dasarnya bersifat memaksa. Jadi, tidak banyak perbedaan makna antara kekuasaan dan pengaruh. Perbedaan antara konsep kekuasaan dan pengaruh sebagian besar hanya bersifat bahasa.

¹⁷ Lasswell, Harold. D. *Politik: Siapa yang Mendapat, Apa Kapan, Bagaimana*. New York: McGraw-Hill, 1936.

5. Kekuasaan dan Korupsi

Lord John Acton dari Inggris pernah mengatakan bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut korup secara absolut. Keyakinan ini telah menjadi hampir diabadikan dalam pemikiran politik Barat.¹⁸ Kebanyakan orang tidak ingin memberikan kekuasaan kepada individu mana pun, karena takut kekuasaan itu akan disalahgunakan. Memang benar bahwa penyalahgunaan kekuasaan telah terjadi di seluruh dunia, tetapi ada juga banyak penguasa yang berkuasa yang tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Kekuasaan adalah sarana, alat, yang dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan hal yang baik atau buruk. Orang jaman dulu percaya bahwa orang yang berakal sehat, yang tahu apa yang baik, tidak akan pernah menyalahgunakan kekuasaan dan orang yang tidak berakal sehat tidak boleh diberi kekuasaan. Efek dari ketakutan akan kekuasaan ini adalah bahwa banyak orang menjadi takut untuk memberikan kekuasaan kepada lembaga atau individu yang perlu melaksanakan tugas untuk menyediakan kesejahteraan umum masyarakat. Prinsip pemisahan kekuasaan yang dipraktikkan di Indonesia, misalnya, didasarkan pada asumsi bahwa setiap orang yang diberi kekuasaan cenderung menyalahgunakannya. Dikatakan bahwa jika kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif disatukan pada orang yang sama, atau pada badan yang sama, akan terjadi penyalahgunaan wewenang dan sistem akan menjadi tirani seperti yang terjadi pada monarki absolut.

Telah ditunjukkan oleh para pakar bahwa raja absolut tidak lebih jahat daripada raja yang kekuasaannya lebih terbatas. Mereka yang memiliki kekuasaan terbatas mungkin akan kesulitan mencapai tujuan yang mereka inginkan dan oleh karena itu, melalui korupsi, mereka akan berusaha meningkatkannya. Individu yang memiliki kekuasaan yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka tidak perlu menjadi tidak etis. Dengan demikian, pernyataan Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung korup adalah salah. Ini adalah penyederhanaan yang berlebihan dari fakta-fakta yang ada, karena

¹⁸ Lazarsky, C. *Power Tends To Corrupt*. Cornell University Press. 2012.

kekuasaan juga memuliakan; dan ketidakpercayaan juga merusak dan memuliakan.

6. Otoritas

Otoritas berkaitan erat dengan kekuasaan; otoritas bersifat formal atau legal yang dibedakan dari kekuasaan pribadi. Wewenang dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan yang sah sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ini adalah kekuasaan yang diberikan pada suatu posisi. Untuk aturan dasar yang diterima secara umum untuk pengoperasian sistem politik. contoh, Konstitusi Indonesia memberikan kekuasaan tertentu kepada Presiden. Hal ini memberinya wewenang, hak untuk memerintah dan dipatuhi oleh orang lain, ketika bertindak sesuai dengan yang disyaratkan oleh Konstitusi. Dengan otoritas yang melekat pada jabatannya, tindakan Presiden diterima secara sukarela oleh rakyat, dan arahnya dilakukan tanpa menggunakan kekerasan atau sanksi. Demikian juga, seorang petugas polisi yang menghentikan mobil yang melaju kencang di jalan raya memiliki kekuasaan yang sah: petugas tersebut memiliki wewenang untuk membuat pengemudi berhenti dan mengeluarkan surat tilang. Sebaliknya, seorang pembajak atau penjahat mungkin memiliki kekuasaan atas orang lain, namun ia tidak memiliki otoritas.

Ada dua hal yang terlibat dalam konsep otoritas: posisi, atau peran, dalam sebuah institusi, dan individu yang menduduki posisi tersebut. Peran berarti seperangkat harapan terpola tentang perilaku yang dilekatkan oleh anggota masyarakat pada suatu posisi presiden misalnya dalam suatu lembaga cabang eksekutif pemerintahan. Sebuah institusi adalah sekumpulan peran yang saling terkait yang dirancang untuk mengatur dan mengoordinasikan perilaku untuk menjalankan suatu fungsi. Otoritas melekat pada posisi-posisi ini. Seseorang memperoleh otoritas hanya dengan menduduki posisi tersebut. Otoritas berarti hak-hak yang disepakati untuk mengendalikan orang-orang tertentu dalam isu-isu tertentu dalam sistem politik. Otoritas, dalam pengertian ini, diberikan pada peran atau jabatan Presiden dan dapat dilakukan oleh siapa saja yang menduduki jabatan tersebut. Oleh karena itu, wewenang bersifat konstitusional dalam

pengertian yang lebih luas, yaitu diakui dan diterima sebagai perilaku/ harapan yang sah dari setiap orang yang memegang jabatan tersebut. Otoritas adalah kekuasaan yang secara populer atau konstitusional diakui sebagai hak atau sah. Singkatnya, otoritas adalah kekuasaan yang sah, hak untuk memberikan perintah yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Tidak ada pemerintahan yang dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya otoritas.

D. Rangkuman Materi

Setidaknya ada tiga jenis atau sumber otoritas: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Otoritas tradisional didasarkan pada adat istiadat atau tradisi kuno atau konvensi. Hal ini didasarkan pada perkembangan dan kegigihan kebiasaan kepatuhan selama beberapa generasi. Orang sering berasumsi bahwa norma-norma dan lembaga-lembaga politik yang mereka tumbuh besar adalah satu-satunya yang dapat dipahami, dan oleh karena itu, sudah pasti benar. Sebagian besar masyarakat yang meyakini hak ilahi pemerintah merupakan contoh dari otoritas tradisional.

Otoritas karismatik mengacu pada orang-orang yang mengikuti seorang pemimpin karena mereka percaya bahwa ia memiliki kualitas pribadi yang luar biasa yang menuntut kepatuhan mereka, seperti karunia, akses terhadap kebenaran yang diwahyukan secara ilahi, kepahlawanan, pesona pribadi, karunia pidato, atau karakter yang patut diteladani. Biasanya, pemimpin karismatik muncul hanya pada saat krisis sosial dan politik. Contoh terbaru dari pemimpin karismatik adalah Ayatullah Khomeini yang mengilhami pemberontakan besar-besaran dan sukses melawan monarki Iran yang bersenjata lengkap dan didukung oleh Amerika Serikat dan mendirikan Republik Islam Iran pada tahun 1979. Otoritas karismatik hanya bertahan selama keyakinan para pengikutnya tetap kuat. Otoritas ini pada dasarnya sangat tidak stabil tetapi dapat memiliki dampak politik yang sangat besar.

Otoritas legal-rasional didasarkan pada penerimaan aturan dan peraturan yang diartikulasikan secara publik dan berlaku di seluruh masyarakat yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang.

Ketaatan diperintahkan bukan oleh kebiasaan atau tradisi, melainkan oleh hukum. Contoh terbaik dari otoritas legal-rasional adalah birokrasi pemerintahan modern. Dalam otoritas legal-rasional, penekanannya adalah pada proses resmi dan perlunya melalui saluran yang tepat daripada memerintah sesuai dengan keinginan pribadi para pemimpin.¹⁹

Disini terlihat ada penekanan bahwa tidak ada sistem pemerintahan yang mewakili tipe murni dari salah satu dari ketiga jenis otoritas ini. Adalah mungkin untuk menemukan campuran dari dua atau semua jenis ini dalam satu periode. Seorang pemimpin bisa saja karismatik namun tetap bergantung pada birokrasi untuk menjalankan pemerintahan. Namun demikian, pola otoritas legal-rasional bisa ditemukan di semua masyarakat modern.

E. Soal Latihan:

1. Jelaskan pengertian ilmu politik.
2. Apa saja sumber-sumber kekuasaan?
3. Bagaimana konsensus pakar memandang kekuasaan?
4. Bagaimana definisi otoritas?
5. Apa saja potensi-potensi kekuasaan?

F. Sumber Bacaan

Easton, David. *Sistem Politik: Sebuah Penyelidikan tentang Ilmu Politik*. Chicago

University of Chicago Press, 1981.

Easton, David, et.al. *The Development of Political Science*. New York: Routledge, 1991.

Elder.L&Green.S. *The Politics of Parenthood*. Suny Press. 2012.

Elly Dar Chaidir, *Negara Hukum Demokrasi dan Konstalansi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

¹⁹ Ibid.

BAB 4

Teori Politik

A. Deskripsi Singkat

Bab ini menguraikan berbagai teori politik perkembangan disiplin ilmu lainnya, mendefinisikannya, dan menjelaskan fitur-fitur esensialnya.

B. Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami Teori Politik
2. Mahasiswa mampu menjelaskan Perkembangan Ilmu

C. Penyajian Materi

Pendahuluan

Sebelum kita membahas Teori Politik, kita harus membahas terlebih dahulu sebuah konsep yang bernama Ideologi karena biasanya sebuah Teori didahului dengan ideologi masing-masing kelompok di masyarakat. Istilah ideologi menggabungkan dua akar kata dalam bahasa Barat, yaitu *eidos* yang berarti kata dan *logos* yang berarti pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti kata-kata pengetahuan. Kata ideologi pertama kali digunakan oleh Barat pada awal abad kesembilan belas, tetapi tidak diketahui siapa yang sebenarnya menciptakan istilah tersebut. Secara umum diyakini

bahwa cendekiawan Barat yang menciptakan kata tersebut pada pergantian abad tersebut.

Bagi mereka, ideologi adalah sebuah studi tentang proses pembentukan ide. Dia ingin menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari proses ini untuk meningkatkan kehidupan manusia. Sebagian besar ilmuwan politik setuju bahwa ideologi penting dalam kehidupan kita. Seperti yang ditulis oleh pemikir Barat lainnya, bahwa ide-ide politik yang kuat di zamannya hampir semuanya merupakan bagian dari suatu ideologi atau ideologi lainnya. Tetapi kebanyakan dari kita memahami dunia politik, dan melakukan tindakan politik yang kita lakukan di bawah pengaruh ideologi tertentu. Sayangnya, para ilmuwan tidak sepakat mengenai arti dari istilah tersebut.

Menurut pemikir politik lainnya, ideologi adalah pendekatan yang sederhana dalam penyelesaian masalah. Baginya ideologi adalah sistem nilai atau sistem kepercayaan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh suatu kelompok. Sistem ini terdiri dari seperangkat sikap terhadap berbagai institusi dan proses dalam masyarakat. Baginya, ideologi memberikan gambaran kepada orang yang percaya tentang dunia sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya, dan, dengan demikian, mengatur kompleksitas dunia yang luar biasa menjadi sesuatu yang cukup sederhana dan dapat dimengerti.

Akan tetapi, beberapa pemikir Barat lainnya mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel terhadap ideologi. Bagi mereka, ideologi adalah sebuah agenda yang harus didiskusikan, pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan, hipotesis yang harus dibuat. Kita harus dapat menggunakannya ketika mempertimbangkan interaksi antara ide dan politik.

1. Karakteristik Ideologi

Jelas bahwa pihak-pihak yang berwenang tidak sepakat mengenai definisi ideologi. Yang pasti, ideologi tidak sama dengan ide. Sebaliknya, ideologi adalah sekumpulan ide yang secara logis berhubungan satu sama lain. Sebagai contoh, salah satu ide yang paling kuat dalam

ekonomi adalah keyakinan bahwa satu-satunya tujuan setiap orang dalam kehidupan ekonomi adalah untuk memperoleh kekayaan materi sebanyak mungkin. Namun, keyakinan tersebut hanyalah salah satu bagian, meskipun merupakan bagian yang penting, dari sekumpulan ide yang jauh lebih besar yang membentuk doktrin bahwa cara terbaik untuk mengatur sistem ekonomi adalah dengan mendasarkannya pada kepemilikan pribadi atas produksi dan distribusi barang dan jasa. Kumpulan ide yang lebih besar itu merupakan ideologi ekonomi yang disebut kapitalisme. Adalah mungkin untuk mengidentifikasi karakteristik tertentu dari sebagian besar ideologi. Pertama, karakteristik yang jelas dari sebagian besar ideologi adalah bahwa label mereka diakhiri dengan isme, seperti pada liberalisme, sosialisme, dan fasisme. Kedua, ideologi memberikan penjelasan untuk masalah-masalah dalam masyarakat kontemporer dan memberikan visi untuk masa depan. Ketiga, ideologi berorientasi pada tindakan. Ideologi tidak hanya memberikan gambaran tentang masyarakat yang baik, tetapi juga memberikan petunjuk terperinci untuk membangun masyarakat seperti itu. Ideologi berkomitmen untuk mengubah masyarakat agar menjadi lebih baik. Akhirnya, ideologi bertujuan untuk memobilisasi sejumlah besar orang yang tanpanya perubahan yang diinginkan tidak dapat terwujud. Ini juga merupakan alasan mengapa ideologi dinyatakan dalam bahasa yang sederhana dan lugas.

Menurut para ilmuwan Barat, ada empat kriteria utama untuk membedakan ideologi dengan gagasan

1. Ideologi bersifat komprehensif. Sebuah ideologi mencakup ide-ide tentang banyak hal besar, seperti tempat manusia di dunia, hubungan mereka dengan Tuhan atau sejarah, tujuan tertinggi masyarakat dan pemerintahan, sifat dasar manusia, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan sosial dan politik tertinggi. Ide-ide ini sedikit banyak terkait satu sama lain secara logis, dan sering kali ada organisasi besar yang percaya pada ide-ide ini dan berkomitmen untuk mewujudkannya.
2. Ideologi bersifat perfasih. Rangkaian ide yang terkait dengan ideologi tidak hanya telah dikenal sejak lama, tetapi juga telah

membentuk keyakinan dan tindakan politik banyak orang. Dengan demikian, orang telah berbicara tentang demokrasi, oligarki, dan autokrasi sejak abad kelima sebelum Masehi, dan gerakan-gerakan besar yang memobilisasi jutaan orang telah memperjuangkan ideologi-ideologi tersebut selama lebih dari ribuan tahun.

3. Ideologi-ideologi itu luas. Seperti yang dinyatakan di atas, ideologi diarahkan kepada massa. Oleh karena itu, seperangkat ide dipegang oleh sejumlah besar orang dan memainkan peran penting dalam urusan politik suatu negara.
4. Ideologi bersifat intensif. Kumpulan ide menuntut komitmen yang kuat dari banyak penganutnya dan secara signifikan mempengaruhi keyakinan dan tindakan politik.

2. Komponen-komponen Intelektual dari sebuah Ideologi

Ideologi adalah seperangkat gagasan tentang setidaknya lima hal dasar berikut ini.

Nilai-nilai

Nilai dapat didefinisikan sebagai seperangkat preferensi mental. Nilai merupakan objek atau situasi yang dianggap sangat penting, sesuatu yang dicari. Setiap ideologi mengidentifikasi beberapa nilai yang lebih penting daripada yang lain, dan nilai tertinggi memberikan kriteria yang digunakan untuk menilai semua ide, keyakinan, dan tindakan lainnya. Dengan demikian, demokrasi seharusnya didasarkan pada keyakinan bahwa realisasi penuh dari potensi manusiawi setiap orang hanya mungkin terjadi dalam sistem politik di mana setiap warga negara diberi hak yang sama untuk mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Demikian pula, ideologi sosialis nasional Adolf Hitler dan partai Nazi-Nya bertumpu pada keyakinan bahwa dunia akan berjalan dengan baik hanya jika ras Arya mengendalikan semua urusannya.

Visi Pemerintahan yang ideal

Setiap ideologi, menurut definisinya, memberikan visi untuk masa depan. Visi ini memberikan gambaran tentang seperti apa sebuah pemerintahan jika diorganisir dan dikelola dengan cara terbaik. Marxisme, misalnya, meramalkan masa depan di mana tidak akan ada kepemilikan pribadi, tidak ada perbedaan kelas, dan tidak ada kesempatan bagi satu kelas untuk mengeksploitasi kelas lainnya. Sebagai contoh lain, revolusi Iran yang dipimpin oleh pimpinannya waktu itu membayangkan masa depan yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan di mana semua sisa-sisa materialisme Barat dan ketidakbenaran dihapuskan selamanya.

Konsepsi tentang Hakikat Manusia

Setiap ideologi mengandung keyakinan tentang apa yang membuat orang, masyarakat, dan pemerintah berperilaku seperti yang mereka lakukan. Marxis, misalnya, berpendapat bahwa kapitalis mengeksploitasi pekerja, karena posisi mereka dalam sistem ekonomi sebagai pemilik alat produksi memaksa mereka untuk mengeksploitasi pekerja yang menggunakan alat produksi tersebut. Oleh karena itu, menurut Marx, satu-satunya cara untuk membuat para kapitalis memperlakukan para pekerja secara layak adalah dengan menghapuskan institusi kepemilikan pribadi dan dengan demikian menghancurkan sistem kapitalis yang pada dasarnya memaksa semua pemilik untuk mengeksploitasi semua pekerja. Liberalisme klasik, di sisi lain, berpendapat bahwa setiap warga negara adalah rasional dan, jika diberi semua informasi, akan membuat pilihan yang tepat karena itu adalah kepentingan mereka. Menyeleksi atau menyembunyikan beberapa fakta dan argumen dari warga negara adalah hal yang salah.

Strategi Aksi

Demikian pula, setiap ideologi memiliki strategi, rencana dasar yang komprehensif, untuk mengubah pemerintahan yang ada menjadi pemerintahan yang ideal. Dengan demikian, Marxisme berusaha untuk meningkatkan kesadaran kelas pekerja (kesadaran

bahwa pekerja akan selalu dieksploitasi di bawah kapitalisme) sampai pada titik di mana mereka akan menggulingkan kapitalisme dan menggantinya dengan sosialisme. Liberalisme berpendapat bahwa warga negara akan lebih baik jika campur tangan pemerintah dalam urusan pribadi ditekan seminimal mungkin. Mereka berpendapat bahwa pejabat publik seharusnya tidak mencoba untuk mengatur urusan bisnis, kontrak kerja, perilaku seksual, merokok, minuman keras, penggunaan obat-obatan terlarang, atau aspek-aspek lain dari kehidupan pribadi mereka.

Taktik Politik

Taktik politik terkait dengan strategi. Setiap ideologi menetapkan atau menganjurkan penggunaan cara-cara tindakan politik tertentu untuk melaksanakan strategi dasarnya. Dengan demikian, ideologi sosialis bertujuan untuk menghapuskan institusi kepemilikan pribadi dan menggantinya dengan masyarakat di mana semua properti dimiliki bersama dan produknya didistribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu taktik yang disarankan untuk menghapuskan kepemilikan pribadi adalah penggulingan kapitalisme dengan kekerasan. Namun, banyak kaum sosialis lainnya berpendapat bahwa satu-satunya taktik yang dapat diterima untuk mengakhiri kapitalisme adalah membujuk mayoritas rakyat untuk memilih pemerintahan sosialis yang akan, dengan metode damai dan konstitusional, memberlakukan undang-undang untuk menghapuskan kepemilikan pribadi.

3. Fungsi-fungsi Ideologi

Ideologi memiliki banyak fungsi. Beberapa dari fungsi-fungsi ini tercantum dalam pernyataan-pernyataan berikut.

1. Ideologi memenuhi kebutuhan psikologis dasar manusia seperti keamanan, kebebasan, dan komunitas. Ideologi sosial kita dengan sendirinya memenuhi banyak kebutuhan dasar manusia dengan memberi tahu kita cara memenuhinya. Ideologi memberi tahu kita bagaimana berhubungan dengan orang lain. Misalnya, ideologi

dapat memberi tahu kita bahwa agar aman secara finansial, kita harus agresif.

2. Sebuah ideologi memberi para penganutnya pemahaman tentang sejarah dan masyarakat serta petunjuk tentang hal-hal apa saja yang harus mereka perhatikan atau abaikan. Seorang liberal akan melihat sejarah sebagai perjalanan progresif menuju kesetaraan ekonomi dan sosial yang lebih besar dan pembebasan dari otoritas nilai-nilai dan institusi tradisional. Bagi Marxis misalnya, sejarah semua masyarakat yang ada adalah sejarah perjuangan kelas.
3. Ideologi sangatlah penting. Ini adalah tolok ukur, titik acuan. Tanpa sebuah perspektif untuk memahami dunia, kita tidak dapat beroperasi di dalamnya.
4. Ideologi itu kuat. Ideologi telah memberikan inspirasi untuk membawa beberapa pemerintahan ke dalam kekuasaan dan menjatuhkan pemerintahan yang lain dari kekuasaan. Hal ini karena ideologi mendefinisikan sistem politik tertentu, atau program aksi sosial sebagai sesuatu yang sah dan layak didukung. Orang-orang yang sangat percaya pada keabsahan moral sebuah gerakan atau rezim dapat dengan mudah dibujuk untuk bertindak dengan cara-cara yang berisiko atas nama gerakan tersebut.

Demikian juga, mereka yang memegang sebuah ideologi akan sering bekerja untuk mendiskreditkan dan melemahkan legitimasi gerakan dan rezim ideologis saingannya. Sebagai contoh, selama periode Perang Dingin, para pemimpin Soviet mencurahkan upaya dan sumber daya organisasi yang sangat besar untuk siaran propaganda, publikasi, dan pelatihan serta indoktrinasi aktivis politik dari seluruh dunia. Upaya-upaya ini digabungkan dalam kampanye tanpa henti untuk melemahkan legitimasi kelompok-kelompok politik dan pemerintah pro-Barat. Pada gilirannya, pemerintah Amerika Serikat, dengan cara yang terorganisir dengan baik dan konsisten, merespons dengan upaya serupa yang bertujuan untuk melemahkan gerakan dan rezim komunis. Pemerintah Amerika Serikat berhasil meruntuhkan pemerintahan Soviet pada tahun 1990.

4. Liberalisme Klasik

Nama liberalisme berasal dari bahasa Latin *liber* yang berarti bebas. Masyarakat harus sebebas mungkin dari campur tangan pemerintah. Seperti yang dirangkum dengan tepat oleh pemikir Barat, pemerintah yang terbaik adalah yang paling sedikit memerintah. Liberalisme mungkin merupakan ideologi yang dominan di negara-negara Barat modern. Memang, Fukuyama telah mengklaim bahwa runtuhnya komunisme berarti kemenangan rezim kapitalis liberal Barat dan akhir dari sejarah. Dia berpendapat bahwa demokrasi kapitalis liberal telah berhasil memecahkan masalah sosial, ekonomi dan politik.

Kata liberal dan liberalisme digunakan secara longgar untuk mengartikan banyak hal yang berbeda. Dalam ilmu politik, kata ini mengacu pada nilai-nilai tertentu seperti komitmen terhadap kebebasan individu, penentangan terhadap peran militer dalam politik, dan dukungan terhadap negara kesejahteraan. Pemahaman yang jelas tentang liberalisme membutuhkan pengetahuan tentang asal-usulnya. Liberalisme sebagai filosofi politik bermula pada abad ke-17 dengan tantangan terhadap teori hak ilahi tentang negara, yaitu klaim bahwa raja memerintah berdasarkan anugerah dari Tuhan. Kaum liberal berusaha membatasi kekuasaan negara dan memaksimalkan hak-hak individu. John Locke adalah eksponen awal dari cita-cita liberal. Idenya tentang kontrak sosial sangat jelas terkait dengan liberalisme dan mempengaruhi pemerintahan di Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan negara-negara lain. Locke diikuti oleh filsuf Skotlandia, Adam Smith, yang membantah kebijakan merkantilis tentang pengawasan pemerintah terhadap ekonomi dengan rencana-rencana, seperti monopoli, subsidi, tarif, dan pengekangan perdagangan lainnya. Dia menekankan pentingnya pasar bebas untuk memastikan perilaku ekonomi yang efisien dan efektif. Jeremy Bentham dan kemudian, John Stuart Mill, memberikan dukungan ideologis terhadap liberalisme. Mill meringkas kredo liberal sebagai berikut:

Satu-satunya bagian dari perilaku seseorang yang dapat diterima oleh masyarakat adalah yang menyangkut orang lain. Pada bagian yang hanya menyangkut dirinya sendiri, kemerdekaannya adalah

hak, mutlak. Atas dirinya sendiri, tubuh dan pikirannya sendiri, individu berdaulat.

Pandangan yang dikemukakan antara abad ke-17 dan ke-19 sering disebut sebagai liberalisme klasik atau liberalisme abad ke-19 untuk membedakannya dari liberalisme kontemporer. Meskipun terdapat banyak perbedaan di antara kaum liberal klasik, prinsip-prinsip utama liberalisme klasik adalah sebagai berikut:

Kebebasan Individu

Liberalisme adalah organisasi masyarakat yang memungkinkan dan mendorong kebebasan dan perkembangan individu. Institusi yang dapat membahayakan kebebasan pemerintah, gereja, dan tentara harus dikekang. Kaum liberal melihat tulisan-tulisan Mill untuk mendapatkan wawasan dalam mempertahankan kebebasan.

Rasionalitas

Kaum liberal percaya pada gagasan bahwa individu-individu pada dasarnya rasional. Individu dianggap memiliki nilai tertinggi dan nilai mereka dilihat dari kapasitas rasional mereka untuk mengatur dan membentuk kehidupan mereka sendiri. Kaum liberal berpendapat bahwa perang, terorisme, dan kejahatan disebabkan oleh ketidaktahuan, kondisi sosial yang buruk, dan takhayul. Jika orang menggunakan akal sehat, mereka akan dapat menyelesaikan sebagian besar masalah. Institusi yang menuntut ketaatan pada otoritas karena menghormati tradisi, wahyu, atau iman dan bukannya mengandalkan akal adalah ancaman bagi kemajuan sosial. Menurut pemikiran liberal, kejahatan akan dihilangkan ketika orang menjadi makmur dan mencapai posisi dalam masyarakat.

Kemajuan

Liberalisme juga dibedakan oleh kepeduliannya untuk mempromosikan kemajuan. Kaum liberal berpendapat bahwa dengan memperluas pengetahuan dan menyempurnakan akal budi, dan dengan memperbaiki kondisi ekonomi, umat manusia akan maju. Keyakinan akan kemajuan ini mengharuskan orang untuk

berpaling dari takhayul yang didasarkan pada doktrin agama atau patriotisme hafalan.

Pemerintahan Terbatas

Liberalisme didirikan atas dasar pemikiran bahwa perlindungan individu terhadap pembatasan pemerintah yang sewenang-wenang adalah yang terpenting. Mereka mengungkapkan permusuhan kaum liberal terhadap pemerintah sebagai berikut: Masyarakat di setiap negara adalah sebuah berkah, tetapi pemerintah, bahkan dalam kondisi terbaiknya, hanyalah sebuah kejahatan yang diperlukan. Oleh karena itu, kaum liberal menuntut perlindungan terhadap semua hak-hak sosial, hukum, dan politik melalui piagam, kontrak sosial, atau konvensi yang menguraikan, mendefinisikan, dan membatasi pelaksanaan kekuasaan pemerintah melalui hukum.

Kebebasan Ekonomi

Terakhir, kaum liberal klasik mendukung sistem perusahaan bebas, sebuah sistem ekonomi yang dicirikan oleh kepemilikan pribadi, kompetisi, ekonomi pasar, dan kebebasan mengambil keputusan manajerial. Slogan yang diadopsi untuk ekonomi yang tidak diatur adalah *laissez-faire*, *laissez passer* yang secara harfiah berarti biarkan saja, biarkan saja. Kaum liberal berpendapat bahwa kebebasan ekonomi dan kebebasan politik adalah hal yang esensial dalam masyarakat bebas. Individu harus bebas membelanjakan uang mereka sendiri seperti halnya mereka harus bebas memilih. Dalam membelanjakan uang dan memberikan suara, orang-orang mengekspresikan preferensi masing-masing, seperti yang dituntut oleh masyarakat yang bebas.

5. Liberalisme Modern

Liberalisme modern menerima prinsip-prinsip utama liberalisme klasik. Mereka percaya pada individualisme, rasionalitas, supremasi hukum, pemerintahan konstitusional, dan kedaulatan rakyat. Mereka setuju bahwa intervensi pemerintah dalam kehidupan moral, agama, dan intelektual masyarakat harus dijaga seminimal mungkin.

Namun, mereka mempertanyakan perlunya kebebasan ekonomi kapitalisme laissez-faire. Pada akhir abad ke-19, menjadi jelas bahwa pasar bebas tidak mengatur dirinya sendiri seperti yang dipikirkan Adam Smith. Persaingan tidak sempurna. Perusahaan-perusahaan besar menggerogoti perusahaan-perusahaan kecil yang kompetitif pada awal abad ke-19. Sistem ini tampaknya menghasilkan kelas bawah yang sangat miskin. Yang terburuk, terjadi depresi ekonomi yang berulang-ulang di mana kaum miskin dan kelas pekerja sangat menderita. Singkatnya, masyarakat laissez-faire memiliki beberapa aspek negatif.

Pemikir Barat prihatin dengan aspek negatif laissez-faire yang merusak kebebasan. Oleh karena itu, mereka memikirkan kembali liberalisme pada tahun 1880-an dan meminta pemerintah untuk turun tangan menjaga kebebasan. Alih-alih kebebasan dari yang murni negatif, harus ada sejumlah kebebasan untuk yang positif. Mereka menyebutnya sebagai kebebasan positif. Demikian pula, para pemikir Prancis, terutama Emile Durkheim, menekankan peran negara dalam menyediakan kondisi sosial yang memungkinkan kebebasan berkembang. Kaum liberal modern menyebut liberalisme klasik sebagai liberalisme negatif karena liberalisme merupakan filosofi yang berusaha membebaskan individu manusia dari penindasan raja-raja absolut, ekonomi feodal, dan agama-agama resmi. Seperti yang dikatakan mereka pada awalnya, menjadi bebas berarti tidak menjadi budak, tidak dihalangi untuk melakukan apa yang ingin dilakukan dan tidak dipaksa untuk melakukan apa yang tidak disukai. Akan tetapi, kaum liberal modern menekankan liberalisme positif. Menurut mereka, tidak ada artinya menjamin kebebasan berpendapat jika orang tidak dapat memberi makan keluarganya atau mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan demikian, liberalisme yang benar seharusnya tidak hanya mencegah pemerintah mencampuri kebebasan masyarakat, tetapi juga mengharuskan pemerintah untuk bertindak secara positif untuk melindungi masyarakat dari kesulitan ekonomi dan kesulitan-kesulitan lainnya sehingga mereka dapat bebas menikmati kebebasan mereka.

Dengan tujuan mengusir pemerintah dari pasar, kaum liberal modern menganjurkan agar pemerintah kembali masuk, kali ini untuk melindungi masyarakat dari sistem ekonomi yang terkadang tidak adil. Mereka meminta pemerintah untuk menjaga persaingan dalam menghadapi monopoli dan memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh kapitalisme yang tidak terkendali. Mereka meminta undang-undang upah dan jam kerja, hak untuk membentuk serikat pekerja, asuransi pengangguran dan kesehatan, dan meningkatkan kesempatan pendidikan untuk semua. Untuk melakukan hal ini, mereka bersedia mengenakan pajak yang lebih tinggi pada orang kaya daripada kelas pekerja. Ini adalah liberalisme Amerika Serikat abad ke-20, liberalisme Woodrow Wilson dan Franklin D. Roosevelt. Mereka menginginkan sebuah negara kesejahteraan yang menjamin setiap warga negara mendapatkan kondisi minimum untuk hidup layak sebagai sebuah keadilan dasar. John Maynard Keynes dan Sir William Beveridge adalah arsitek liberal negara kesejahteraan di Inggris.

6. Konservatisme Klasik

Istilah konservatisme berasal dari kata Perancis *conservateur*. Ini adalah label yang diberikan kepada para sarjana Prancis yang menuntut kembali ke kondisi pra-revolusioner setelah jatuhnya Napoleon I. Konservatisme, bagaimanapun, telah digunakan berarti reaksioner, gradualis, moderat, dan lambat. Sebagai politik Sebagai sebuah filosofi politik, konservatisme berasal dari bagian akhir abad ke-18, meskipun akarnya dapat ditelusuri ke para filsuf di Yunani kuno. Pendiri konservatisme dianggap sebagai filsuf Inggris Edmund Burke, penulis Refleksi tentang Revolusi di Prancis yang diterbitkan pada tahun 1790. Burke adalah seorang pemikir penting karena beberapa alasan. Dia membantu menemukan yang tidak rasional dalam perilaku manusia. Dia melihat bahwa institusi seperti makhluk hidup hidup; mereka tumbuh dan beradaptasi dari waktu ke waktu. Dan yang paling penting, ia melihat bahwa revolusi cenderung berakhir dengan buruk, karena masyarakat tidak dapat secara instan dibuat ulang sesuai dengan perintah akal sehat manusia. Kita juga harus mempertimbangkan ide-ide dari Thomas Hobbes dan David Hume

untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang konservatisme. Konservatisme tradisional (di Inggris Raya disebut Toryisme) berarti melestarikan nilai-nilai dan institusi tradisional masyarakat terhadap perubahan radikal. Mereka percaya bahwa masyarakat harus dijalankan, seperti yang selalu dijalankan, oleh keluarga kerajaan dan bangsawan. Lebih baik untuk melihat konservatisme klasik konservatisme klasik sebagai seperangkat prinsip-prinsip umum yang adalah sebagai berikut.

Hasrat yang Tidak Rasional

Tidak seperti kaum Liberal, yang terlalu percaya pada akal sehat manusia, kaum konservatif percaya bahwa manusia hanya sebagian yang rasional; mereka juga memiliki hasrat yang sangat tidak rasional. Untuk menahannya, masyarakat selama bertahun-tahun telah mengembangkan tradisi, institusi, dan standar moralitas, seperti monarki dan gereja yang mapan. Membongkar institusi-institusi ini, mengingat dorongan irasional manusia, akan menyebabkan kekacauan yang pada gilirannya akan berakhir dengan tirani yang lebih buruk.

Kata teori berasal dari kata asli Yunani *theoria* yang secara harfiah berarti melihat, atau memandang, atau menerima. Para ahli teori, atau teoretikus, adalah orang yang perannya adalah melihat. Teori politik kemudian dapat dilihat sebagai visi yang sangat pribadi dari seorang individu tentang realitas politik yang ingin dijelaskan oleh teorinya. Teori politik sebagian besar merupakan upaya untuk mencari kebenaran sebagaimana pemikir melihatnya. Para ahli teori politik mempertimbangkan fakta-fakta pemerintahan dan masyarakat selengkap mungkin. Mereka memberi makna dan arti pada sekumpulan data. Mereka menyarankan solusi untuk masalah yang dihadapi masyarakat, yang akan memandu para pengambil keputusan dalam perumusan dan penegakan kebijakan publik yang baik.

Kita dapat membagi teori politik ke dalam tiga periode: Kuno, Abad Pertengahan dan Modern. Kemudian, ada teori-teori kontemporer Barat dan Islam. Teori-teori politik klasik membahas politik dari sudut pandang moral yang luas. Teori mereka bersifat normatif. Teori politik kontemporer ditemukan dalam tulisan-tulisan Harold Lasswell,

David Easton, Gabriel Almond, dan lainnya. Teori ini dikenal juga sebagai teori ilmiah, teori positivis, atau teori perilaku. Teori-teori ini berusaha menjelaskan dan memprediksi fenomena politik melalui penelitian empiris, strategi dan teknik. Teori politik Islam mengacu pada tulisan-tulisan pemikir Muslim seperti al-Farabi, al-Ghazali, ibn Khaldun, Mawdudi, dan lainnya. Teori-teori mereka berdiri di atas dasar yuridis syariat dan berkaitan dengan tatanan masyarakat, keamanan dan kebahagiaannya. Teori politik Islam didasarkan pada logika yang disimpulkan dari cita-cita dan prinsip-prinsip Islam seperti yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

7. Teori Politik Klasik

Teori Klasik mengacu pada karya-karya yang ditulis oleh para pemikir politik besar seperti Plato, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Rousseau, dan Marx. Beberapa karya klasik yang terkenal adalah Republik karya Plato, Politik karya Aristoteles, The Prince karya Machiavelli, Leviathan karya Hobbes, Kontrak Sosial karya Rousseau, dan Das Kapital karya Marx. Para pemikir klasik menggunakan pendekatan historis, logis, atau filosofis untuk mempelajari politik. Karya-karya klasik memberi kita pengetahuan tentang institusi politik dan konflik dari berbagai masyarakat dalam sejarah. Mereka mendiskusikan beberapa masalah yang sangat signifikan dengan cara yang logis dan dengan demikian mengajarkan kita seni berpikir sistematis dan rasional tentang masalah politik. Tulisan-tulisan mereka merupakan bagian penting dari studi politik pada periode kontemporer. Teori-teori politik dapat dibagi menjadi tiga periode: Kuno, Abad Pertengahan, dan Modern.

Pemikir Politik Kuno

Di antara para pemikir politik kuno, yang paling terkenal adalah Plato dan Aristoteles.²⁰

²⁰ Heinaman, Robert. *Plato and Aristotle Ethics*. Ashgate Publishing. 2003.

Plato

Plato dianggap oleh sebagian orang sebagai peletak dasar ilmu politik. Ia lahir pada tahun 428 SM dari keluarga bangsawan Athena, dan meninggal pada tahun 347 SM. Gagasan-gagasan politiknya yang utama ditemukan dalam tiga karyanya, yaitu, *The Republic*, *The Statesman*, dan *The Laws*. *The Republic*, yang merupakan karya terbesarnya, membahas tentang politik, etika, filsafat, dan pendidikan. Republik memberi kita penjelasan yang rinci dan radikal tentang sistem politik yang adil dan ideal, sebuah model untuk segala zaman. Plato ingin menunjukkan bagaimana seharusnya negara itu pada prinsipnya. Dia berpendapat bahwa pemerintahan terbaik adalah pemerintahan yang mencerminkan kapasitas alamiah manusia. Manusia terdiri dari tubuh, pikiran, dan roh (sifat yang penuh semangat atau keberanian). Demikian juga, negara harus mencakup tiga kelas orang: Produsen (mencerminkan tubuh) untuk memasok kebutuhan fisik rakyat; Prajurit (mencerminkan roh) untuk mempertahankan negara; dan, Wali/filosof (mencerminkan pikiran) yang mencari ketinggian akal untuk memerintah negara dan mengatur kesejahteraan rakyat. Negara idealnya didasarkan pada konsepsi keadilan, pendidikan, dan Komunisme

Keadilan

Menurut Plato, keadilan berarti “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.” Dengan kata lain, setiap individu harus ditempatkan pada posisi yang tepat. Setiap orang harus diizinkan untuk bekerja di tempat yang paling cocok untuknya. Adalah tanggung jawab kelas yang berkuasa untuk mengatur tugas setiap individu sedemikian rupa untuk mengamankan kesatuan negara. Pembagian kerja dan spesialisasi tugas diperlukan untuk mengamankan kesatuan negara.

Pendidikan

Untuk memilih posisi yang paling sesuai bagi seseorang, yaitu untuk memastikan keadilan, Plato mengembangkan skema pendidikan. Para penguasa harus memiliki pengetahuan yang luas. Pendidikan

adalah sarana yang efektif untuk menghasilkan pengetahuan dan negara yang harmonis. Plato percaya bahwa fungsi pendidikan adalah untuk membuat setiap individu berguna dan cocok secara sosial dan ekonomi. Kebajikan, menurut Plato, adalah pengetahuan dan hal ini dapat diajarkan melalui sistem pendidikan yang efektif. Plato membagi skema pendidikan menjadi dua bagian: Pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Skema pendidikannya bersifat sistematis dan progresif. Pendidikan dasar akan dimulai pada usia enam tahun dan akan berlanjut hingga usia sembilan tahun. Pendidikan tinggi akan dimulai sekitar usia sembilan tahunan dan akan berlanjut hingga usia tiga puluhan tahun. Pendidikan dasar terutama akan berkonsentrasi pada senam untuk melatih tubuh, dan musik untuk melatih pikiran. Pendidikan tinggi hanya untuk mereka yang lulus pendidikan dasar dan ini dimaksudkan untuk siswa terpilih untuk posisi tertinggi di kelas wali. Mereka akan diajarkan mata pelajaran-mata pelajaran pilihan.

Komunisme

Pendidikan saja tidak dapat menjamin keadilan dan tidak dapat membuat negara bebas dari korupsi. Oleh karena itu, Plato mengembangkan skema komunisme yang diperlukan untuk membebaskan kelas penguasa dari korupsi. Kelas penguasa, yaitu para prajurit dan penjaga tidak dapat memiliki keluarga dan properti pribadi. Mereka akan tinggal di barak dan makan di meja makan bersama. Semua harus mengucapkan kata milikku dan milikmu secara bersamaan. Plato percaya bahwa komunisme properti akan diperlukan karena penyatuan kekuatan politik dan ekonomi akan membuat kelas penguasa menjadi egois dan korup. Hal ini akan berakibat fatal bagi kesatuan politik dan efisiensi negara. Keluarga juga harus dihapuskan karena alasan yang sama. Jika kelas penguasa diizinkan untuk memiliki keluarga, hal ini dapat menyebabkan egoisme. Dengan demikian, keluarga dan kepemilikan pribadi tidak memiliki tempat bagi kedua kelas tersebut dalam negara ideal Platonis.

Komunisme Plato tidak ada hubungannya dengan struktur ekonomi masyarakat karena ia masih mengizinkannya untuk kelas

produsen. Tujuan Plato bukanlah untuk membangun sosialisme, melainkan aristokrasi intelektual. Jelas, alasan Plato sebagian besar bersifat spekulatif dan negara idealnya terlihat totaliter. Plato bersalah karena bertindak ekstrem. Dia menetapkan bagi para penguasa dan kelas militer ide yang keterlaluan tentang kepemilikan bersama atas properti dan istri.

Aristoteles

Aristoteles adalah murid dari Plato, namun ia berbeda pendapat dengan gurunya dalam banyak hal. Aristoteles berusaha menggambarkan dan menjelaskan mengapa peristiwa-peristiwa tertentu terjadi di dunia politik, selain merumuskan tatanan politik yang ideal. Karya besar Aristoteles adalah *Politics* yang didasarkan pada pengamatan terhadap sekitar ratusan pemerintahan Yunani. Dia kemudian mengklasifikasikan pemerintahan-pemerintahan ini berdasarkan jumlah orang yang memerintah. Untuk ini ia menambahkan dasar etika: kepentingan yang dilayani oleh para penguasa. Aristoteles bertanya: Bagaimana kita bisa mengetahui kehidupan yang baik dan masyarakat yang baik? Siapa yang harus memerintah raja, orang kaya, bangsawan, militer, dan seluruh rakyat? Setelah melihat politik dari perspektif moral ini, Aristoteles menentukan rezim terbaik.

Sifat Dasar Negara

Menurut Aristoteles, negara adalah sebuah perkumpulan manusia. Dia menyatakan, manusia pada dasarnya adalah hewan politik. Makhluk yang dapat hidup di luar negara, menurutnya, adalah binatang atau dewa. Negara mencakup semua jenis asosiasi di dalam dirinya sendiri tetapi asosiasi ini bukan untuk kehidupan semata tetapi untuk tindakan mulia. Negara adalah yang tertinggi dari semua asosiasi dan oleh karena itu tujuannya adalah untuk memastikan kebajikan dan keadilan. Seperti yang dia katakan, ketika kita sampai pada asosiasi terakhir dan sempurna, yang terbentuk dari sejumlah desa, kita telah mencapai sebuah asosiasi yang dapat dikatakan telah mencapai puncak kemandirian penuh.

Negara Terbaik

Negara idealnya adalah komunitas yang setara. Kekayaan dan kemiskinan yang ekstrem tidak diinginkan karena penyebab revolusi yang paling umum adalah keinginan kuat manusia akan kesetaraan. Dengan demikian, menurut Aristoteles, kelas menengah yang kuat tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin memberikan dasar terbaik untuk negara yang ideal. Sebuah pemerintahan kelas menengah adalah negara yang terbaik. Demokrasi Aristoteles adalah demokrasi langsung dari sebuah negara kota kecil. Menurut Aristoteles, bentuk ekstrim dari demokrasi adalah mobokrasi di mana orang miskin, yang dipimpin oleh para demagog, menyalahgunakan kebebasan politik. Aristoteles menekankan nilai moderasi dan stabilitas negara.

Pentingnya Konstitusi

Aristoteles percaya bahwa setiap negara harus memiliki konstitusi. Inti dari negara adalah konstitusi. Negara berubah dalam identitasnya ketika ada perubahan dalam konstitusi yang pada dasarnya adalah cara hidup yang dipilih negara untuk dirinya sendiri. Keberadaan konstitusi saja tentu saja tidak cukup. Konstitusi harus membatasi kekuasaan pemerintah yang merupakan esensi dari konstitusionalisme. Harus ada aturan hukum yang mengatur bagaimana negara akan diatur. Ia menempatkan kedaulatan hukum di atas kedaulatan pribadi rakyat dan percaya bahwa hukum dan bukan orang per orang yang seharusnya menjadi penguasa tertinggi di negara mana pun. Pemerintah harus dipilih sesuai dengan aturan hukum dalam konstitusi.

Warga negara

Aristoteles juga mengindikasikan bahwa setiap orang yang lahir di suatu negara belum tentu menjadi warga negara. Menurutnya, warga negara adalah orang yang secara aktif berpartisipasi dalam pemerintahan. Untuk mendapatkan kewarganegaraan, seseorang harus memiliki kapasitas untuk memerintah dan diperintah. Orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi seperti itu bukanlah warga negara. Dalam hal ini, kelas pekerja bukanlah warga negara meskipun

mereka sangat penting untuk kelangsungan hidup negara. Namun, kita harus memperhitungkan fakta bahwa konsepsi kewarganegaraan yang dikemukakannya adalah dalam konteks negara kota dengan demokrasi langsung.

Revolusi

Aristoteles juga percaya bahwa setiap orang harus diberikan bagiannya masing-masing. Jika ada rasa ketidakadilan yang terjadi di negara mana pun, revolusi kemungkinan besar akan terjadi di negara tersebut. Oleh karena itu, ia memperingatkan para penguasa bahwa mereka harus berhati-hati dalam memastikan rakyat mendapatkan bagiannya, atau setidaknya memperlakukan mereka secara setara. Jika tidak, setiap kejadian yang mengarah pada ketidaksetaraan pada akhirnya dapat menjadi penyebab revolusi di dalam sebuah negara.

Perbudakan

Hampir semua gagasan Aristoteles dihargai. Namun, Aristoteles juga membenarkan perbudakan, yang secara luas dikritik. Aristoteles percaya bahwa perbudakan adalah hal yang alamiah. Wanita secara alamiah lebih rendah daripada pria dan, oleh karena itu, mereka harus dikecualikan dari kekuasaan politik. Kelas pekerja tidak memiliki kapasitas intelektual dan, oleh karena itu, mereka memiliki mentalitas budak. Budak dan orang asing tidak memiliki andil dalam pemerintahan.

8. Pemikir Politik Abad Pertengahan

Plato dan Aristoteles menggunakan akal sebagai panduan mereka untuk menentukan sistem pemerintahan di mana orang yang baik akan menjadi warga negara yang baik. Namun, pada abad pertengahan, para pemikir Barat menjadikan ketuhanan sebagai dasar dari tulisan-tulisan mereka. Sebagian besar pemikir politik Eropa menjadikan agama sebagai panduan mereka untuk menentukan sistem politik terbaik. Para pemikir Muslim mempertimbangkan iman dan akal dalam tulisan-tulisan mereka.

Pada abad pertengahan, ada banyak pemikir politik tetapi yang paling terkenal adalah Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Santo Agustinus percaya bahwa negara terbaik adalah negara yang dipimpin oleh Paus. Kekuatan politik harus tetap berada di tangan Gereja, bukan negara. Menurutnya, manusia hidup dalam dua kota: Kota Tuhan dan Kota Bumi.²¹ Kedua kota tersebut merupakan bagian dari alam semesta ilahi. Kota Tuhan adalah yang terbaik karena kedamaian, keharmonisan, dan keadilan ditemukan di kota Tuhan. Sebaliknya, warga kota bumi tidak sempurna dan terkutuk. Warga kota akan menjadi sempurna hanya jika mereka diperintah oleh Paus yang merupakan wakil Tuhan. Santo Agustinus berpendapat, pemerintahan diperlukan karena keberdosaan manusia dan hanya ketika kita tidak berdosa, barulah kita dapat diperintah oleh Tuhan. Bagi Agustinus, pemerintahan adalah kejahatan yang diperlukan dibuat perlu oleh kejahatan, yang setidaknya menghasilkan ketertiban internal bagi umat manusia yang berdosa. Thomas Aquinas setuju dengan Santo Agustinus bahwa Gereja diperlukan untuk menjamin kebaikan yang kekal, namun pada saat yang sama, seperti Aristoteles, ia percaya bahwa negara diperlukan untuk menyediakan kondisi-kondisi bagi kehidupan yang baik. Dengan demikian, Aquinas menggabungkan akal budi dan iman dalam pemikirannya yang disebut skolastik. Dia mencoba mengintegrasikan wahyu dengan akal. Aquinas percaya bahwa fungsi negara adalah untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang bijak demi keselamatan abadi. Namun, manusia tidak dapat mencapai keselamatan tanpa bimbingan Gereja. Memang benar bahwa manusia adalah hewan sosial dan, oleh karena itu, negara adalah hal yang alamiah bagi manusia, namun hanya Gereja yang memiliki otoritas spiritual universal. Menurut Aquinas, manusia dibimbing oleh empat jenis hukum: a) hukum universal; b) hukum abadi; c) hukum alam; dan d) hukum manusia. Hukum universal adalah hukum ilahi dan, oleh karena itu, sempurna. Dalam hukum manusia, ada kemungkinan kesalahan. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa seorang penguasa sekuler dapat berfungsi

²¹ Kempshall, M.S. *The Common Good In Late Medieval Political Thought*. Oxford University Press. 1999.

dengan baik hanya jika ia memerintah di bawah bimbingan Gereja. Gereja sebagai pemandu pengendali negara, otoritas Kepausan lebih tinggi daripada otoritas duniawi.

Pemikir-pemikir Muslim

Secara garis besar, kita dapat mengklasifikasikan para pemikir Muslim ke dalam tiga kategori: para ahli hukum seperti al-Mawardi (w.1058) dan al-Ghazali (w.mm); para filsuf seperti al-Farabi (w.950); dan para ahli sejarah seperti Ibn Khaldun (w.1406).²²

Abu al-Hassan al-Mawardi, seorang penduduk asli Basrah, memperoleh status tertinggi dalam layanan peradilan. Ia banyak menulis tentang hukum dan politik. Bukunya yang terkenal, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Tata Cara Pemerintahan), merupakan salah satu risalah ilmiah pertama tentang ilmu politik dan administrasi negara dalam sejarah Muslim. Al-Mawardi berpendapat bahwa institusi kekhalifahan atau imamah adalah persyaratan yang diperlukan dalam Syariah. Ia didirikan untuk menggantikan kenabian dalam mempertahankan iman dan mengatur dunia. Imamah dilembagakan melalui pemilihan oleh para pemilih yang memenuhi syarat. Para kandidat juga harus memiliki kualifikasi tertentu seperti: 'Adalah (keadilan), 'Ilm (pengetahuan tentang tradisi), kondisi fisik dan mental yang sehat, keberanian dan tekad untuk melindungi wilayah Islam, dan keturunan Quraisy. Para pemilih harus memiliki 'Adalah dan memahami kualifikasi Khalifah. Imam juga dapat ditunjuk melalui penunjukan, yakni, ia dapat dicalonkan oleh seorang imam yang berkuasa. Dengan kata lain, setiap Khalifah bisa menunjuk penggantinya sendiri atau Amir bisa menunjuk seorang imam, namun karakter elektoral institusi ini tetap terjaga. Keberadaan dua imam pada saat yang sama adalah ilegal. Al-Mawardi berpendapat bahwa sekali seseorang terpilih sebagai imam, ia tidak dapat dicopot dari jabatannya kecuali jika ia terbukti melakukan kerusakan moral atau jika ia memiliki pendapat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

²² Black, Anthony. *The History of Islamic Political Thought From The Prophet To The Present*. Edinburgh University Press. 2011.

agama, atau jika ia kehilangan kemampuan mental dan kemampuan pribadinya untuk mengawasi dan mengarahkan urusan-urusan negara.

Khalifah bertanggung jawab, antara lain, untuk menjaga dan mempertahankan keimanan, memberikan keadilan dan menyelesaikan semua perkara sesuai dengan Syariah, memelihara hukum dan ketertiban, menjaga hak-hak dasar dan menegakkan hukum pidana Al-Qur'an, dan mempertahankan perbatasan dari serangan asing untuk menjamin keamanan hidup, anggota badan dan harta benda kaum Muslim, dan non-Muslim di negara Islam.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali lahir di Tus dan dididik di bawah bimbingan utama al-Juwayni. Ia diterima dengan baik di istana Nizam al-Mulk, wazir agung Saljuk, dan diangkat menjadi guru di Madrasah Nizam saat berusia 34 tahun. Al-Ghazali menghasilkan banyak karya berharga, di antaranya Aliqtisod fi al-itiqod (Proporsi yang Benar dalam Keyakinan) dan Ihya Ulumuddin (Kebangkitan Kembali Ilmu-ilmu Agama). Al-Ghazali menjelaskan bahwa imamah tidak diperlukan oleh akal, tetapi terutama oleh hukum ilahi, seperti yang telah dinyatakan oleh al-Mawardi sebelumnya. Dia mengatakan lebih lanjut bahwa imamah diperlukan karena hal itu bermanfaat dan menjauhkan kehancuran di dunia ini. Al-Ghazali menganggap tatanan agama yang baik bergantung pada tatanan dunia yang baik, yang pada gilirannya bergantung pada seorang imam yang ditaati. Dia berpendapat bahwa tanpa adanya kekhalifahan, tidak ada Keputusan qodi, tidak ada kontrak dan tidak ada wasiat yang sah, karena kekuasaan semua qodi dan pejabat pemerintah berasal dari Khalifah. Al-Ghazali memberikan daftar panjang yang mirip dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh al-Mawardi, meskipun dengan sedikit modifikasi, mungkin untuk menyesuaikan dengan situasi politik umum pada masanya. Dengan demikian, kemampuan untuk berjihad dikondisikan oleh kepemilikan kekuasaan dan keberanian; Kifayah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan administrasi yang kompeten, dapat dipenuhi dengan dukungan para ahli dan wazir yang teliti; dan persyaratan ilmu, pengetahuan, dapat dipenuhi dengan nasihat dan keahlian para ulama. Al-Ghazali menambahkan rasa takut kepada Allah,

cara hidup yang saleh, dan menahan diri dari praktik-praktik yang meragukan sebagai kualitas moral yang dibutuhkan oleh seorang Imam. Kemudian, ia menganggap tidak hanya keturunan dari suku Quraisy tapi juga Abbasiyyah sebagai kualifikasi yang diperlukan bagi seorang Imam. Al-Ghazali menetapkan tiga cara untuk memilih Khalifah, yaitu dengan penunjukan Nabi, dengan penunjukan Khalifah yang berkuasa, dan dengan penunjukan pemegang kekuasaan yang sebenarnya, yaitu Sultan. Alternatif ketiga lazim digunakan pada masa al-Ghazali dan, oleh karena itu, merupakan pengakuan hukum atas praktik yang sudah ada. Penunjukan untuk pengangkatan seorang Khalifah harus didukung dengan baiat yang harus dilakukan oleh orang-orang besar dan orang-orang yang penting yaitu dari ahl hal wal aqd, yaitu orang-orang yang memiliki kualifikasi agama dan dunia yang baik.

Jelaslah bahwa al-Ghazali telah mengembangkan teori multilateral tentang kekhalifahan yang di dalamnya terdapat tiga elemen utama: Khalifah, Sultan, dan Ulama. Khalifah memiliki otoritas institusional, Sultan memiliki otoritas konstitusional, dan ulama dihormati karena otoritas fungsional syariah. Masing-masing elemen memegang beberapa aspek otoritas di balik pemerintahan Islam dan masing-masing menjalankan fungsi yang dibutuhkan oleh otoritas tersebut. Abu Nasr Muhammad bin Tarkham al-Farabi adalah seorang Turki. Karya-karyanya yang terkenal adalah Kitāb Aro Ahl al-Madinah al-Fadilah (Buku tentang Pandangan Masyarakat Kota yang Unggul) dan al-Siyasat al-Madaniyyah (Buku tentang Administrasi Sipil). Al-Farabi berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan area yang luas dari keselarasan antara filsafat politik klasik dan Islam. Menurut al-Farabi, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial; mereka bekerja untuk kesejahteraan masyarakat dan dalam jangka panjang mengabdikan kepada negara. Orang-orang yang tinggal di sebuah negara disebut bangsa. Kota tempat anggota masyarakat bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan pada kenyataannya adalah negara kota yang ideal, masyarakat adalah masyarakat yang ideal, dan bangsa adalah bangsa yang ideal.

Al-Farabi menegaskan posisi dominan Syariah sebagai satu-satunya penjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Negara yang ideal dipimpin oleh seorang filsuf yang ia samakan dengan Imam. Imam adalah yang paling sempurna di antara para anggotanya, dan merupakan filsuf sekaligus nabi. Imam menugaskan kepada setiap warga negara tugas-tugas khusus mereka. Ia memberi mereka hukum-hukum, dan memerintahkan mereka dalam perang. Nabi itu sempurna secara moral dan intelektual, dan oleh karenanya, hanya dia yang memenuhi syarat untuk membantu manusia sebagai warga negara untuk mencapai takdir kemanusiaannya yang sejati. Penguasa semacam ini harus memiliki kesehatan yang baik dan organ-organ tubuh yang sempurna, kecerdasan dan kebijaksanaan, ingatan yang baik, kehati-hatian dan bakat, kefasihan, pengabdian kepada pendidikan, pembelajaran, kebenaran dan keadilan. Imām atau Kepala Negara kedua yang menggantikan imam pertama haruslah seorang filsuf, berpandangan jauh ke depan, berpengalaman, mengetahui adat istiadat dan ritual, mampu memutuskan perkara hukum, dan menguasai seni perang yang utama dan yang tidak utama. Al-Farabi sangat mementingkan pengembangan filsafat. Jika kebijaksanaan tidak menjadi bagian dari negara, sementara syarat-syarat lain terpenuhi seluruhnya, kota akan menjadi lebih baik tanpa seorang pemimpin, tetapi akan mengalami kehancuran. Ketiadaan filsafat berarti kebodohan dan negara tanpa filsafat akan menjadi negara yang bodoh atau tidak sempurna. Bahkan, bagi al-Farabi, negara tanpa seorang filsuf yang dapat dipercaya akan binasa dalam waktu singkat. Al-Farabi sangat mempengaruhi para penulis selanjutnya. Di antara mereka adalah ibn Sina, yang juga menghubungkan negara ideal Islam dengan pemikiran filsuf Plato. Ibnu Rushd juga mempertahankan supremasi syariah sebagai hukum yang diwahyukan dan Islam setara dengan konstitusi negara ideal Plato.

Ibnu Khaldun lahir di Tunis pada tahun 1332. Dia adalah seorang hakim dari Mazhab Maliki dan menjabat sebagai negarawan yang melayani beberapa penguasa Muslim di Afrika Utara. Karyanya yang terkenal, Muqaddimah (Prolegomena), merupakan buku tentang ilmu sejarah, sosiologi, dan politik. Dia menyebutnya sebagai ilmu budaya,

sebuah penyelidikan ilmiah tentang bagaimana manusia benar-benar hidup di masa lalu, dan sebab-sebab alamiah yang menentukan cara-cara pergaulan dan perilaku manusia.

Ibnu Khaldun percaya bahwa organisasi sosial diperlukan dan melekat pada sifat alamiah manusia. Manusia harus bekerja sama satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka akan makanan, pakaian dan perumahan, keamanan dan pertahanan. Hubungan yang erat ini menghasilkan perasaan solidaritas dan tanggung jawab bersama. Solidaritas ini disebut oleh ibn Khaldun sebagai *asobiyah* yaitu ikatan antara anggota suku yang sama berdasarkan ikatan darah, tradisi keluarga, dan agama, yang dikutip dengan tegas oleh Al Qur'an surat AlFath ayat 26 dan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Khaldun menjadikannya sebagai dasar dari semua kekuatan politik. Negara muncul melalui *Asobiyah*. Penguasa tidak membutuhkan agama untuk melegitimasi atau mengesahkan kedaulatannya. Sebuah negara berdaulat didirikan melalui penaklukan kota-kota oleh orang-orang primitif yang disatukan oleh *Asobiyah*. Esensinya adalah kekuatan kasar dan kekuatan koersif yang tidak dapat dilawan oleh lawan. Kekuasaan adalah dasar dari negara dan instrumen yang diperlukan untuk menahan otoritas yang tanpanya manusia tidak akan ada. Negara kekuasaan adalah tujuan dengan kehidupannya sendiri, dan merupakan unit politik dan sosial yang memungkinkan peradaban manusia.

Ibnu Khaldun telah mengantisipasi banyak penulis Barat lainnya ketika ia mengusulkan hukum alamiah dan perlu dari pertumbuhan, kedewasaan, dan kemunduran negara. Proses ini tersebar dalam lima tahap. Pertama pendirian penguasa dengan dukungan *Asobiyah*; Kedua konsolidasi di mana penguasa mendirikan dinasti dengan tentara bayaran dan birokrasi administratif yang terorganisir; Ketiga kemewahan di mana penguasa dan para pengikutnya mulai hidup dalam kemewahan dan negara dicirikan oleh kemakmuran ekonomi, pengeluaran yang besar untuk pekerjaan umum, dan mempercantik kota-kota; Keempat kepuasan di mana penguasa dan yang dikuasai menjadi berpuas diri, menikmati kesenangan hidup; dan Kelima pemborosan, kenyamanan dan kemewahan, serta keburukan moral

yang mengarah pada disintegrasi dan keruntuhan. Akhirnya, kekuasaan direbut dari dinasti yang berkuasa oleh dinasti baru yang dibantu oleh Asobiyah yang baru. Ibnu Khaldun membatasi usia alamiah sebuah negara secara umum adalah tiga generasi atau ratusan tahun.

9. Pemikir Politik Modern

Di Barat, terobosan dari politik berbasis agama terjadi dengan munculnya Niccolo Machiavelli yang dianggap sebagai bapak ilmu politik modern.²³ Machiavelli berdiri di perbatasan antara abad pertengahan ketika gereja mendominasi pemikiran dan institusi dan abad modern ketika pemikiran dan institusi sekuler atau non-agama menjadi lebih unggul. Pangeran Machiavelli adalah tokoh klasik realisme politik modern. Dia memisahkan politik dari agama. Machiavelli adalah seorang realis yang percaya bahwa menggunakan segala cara kekerasan, penipuan, pengkhianatan, intrik, dan pembunuhan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Menurutnya, penguasa tidak hanya berada di luar hukum, tetapi juga di luar moralitas. Tidak ada standar untuk menilai tindakannya kecuali keberhasilan kebijaksanaan politiknya. Penguasa harus memiliki hati singa dan otak rubah. Penguasa harus menggunakan kekejaman, kecurangan, pembunuhan atau cara lain untuk mencapai tujuan. Tujuan menghalalkan segala cara. Ini disebut Machiavellisme. Dalam kata-katanya, Seorang pangeran, oleh karena itu, tidak boleh keberatan menanggung tuduhan kekejaman demi menjaga rakyatnya tetap bersatu dan setia; karena, dengan contoh yang sangat sedikit, dia akan lebih berbelas kasih daripada mereka yang, karena kelembutan yang berlebihan, membiarkan kekacauan muncul, yang darinya muncul pertumpahan darah dan perkosaan, karena hal tersebut pada umumnya melukai seluruh masyarakat, sementara eksekusi yang dilakukan oleh pangeran hanya melukai individu. Machiavelli tidak hanya menceraikan etika dari politik, tetapi juga menundukkan etika ke dalam politik. Teori politik Machiavelli adalah amoral.

²³ Jones, Tudor. *Modern Political Thinkers And Ideas An Historical Introduction*. Routledge. 2002.

Seperti Machiavelli, Thomas Hobbes percaya bahwa pemerintahan tidak berasal dari Tuhan, melainkan dari manusia. Manusia, dalam keadaan alamiah (yaitu, dalam kondisi alamiah mereka sebelum menjadi beradab), hidup dalam keadaan perang melawan satu sama lain. Kehidupan mereka menyendiri, miskin, jahat, kejam, dan singkat. Mereka bersatu dan membentuk pemerintahan untuk melindungi diri mereka sendiri dari kekerasan. Hobbes mengusulkan agar warga negara membuat kontrak sosial dengan seorang Leviathan, penguasa yang kuat. Penguasa akan memberikan keamanan sebagai imbalan atas kesetiaan rakyat kepadanya dan menerima haknya untuk memerintah. Penguasa bukanlah pihak dalam kontrak ini dan, oleh karena itu, ia dapat melakukan apa pun yang ia sukai. Rakyat tidak dapat mencabut kontrak tersebut dan mereka tidak memiliki hak untuk memberontak terhadap penguasa. Dengan cara ini, Hobbes menciptakan sebuah monarki yang absolut dan tidak bertanggung jawab.

Hobbes adalah penegak yang paling tidak kenal kompromi terhadap kekuasaan kedaulatan yang tidak dapat dibagi. Dia percaya bahwa kekuasaan kedaulatan tidak dapat dibagi dengan rakyat. Selain itu, rakyat tidak dapat mengubah bentuk pemerintahan karena mereka telah melembagakan sebuah persemakmuran melalui kontrak sosial dan mereka berkewajiban untuk menghormati hubungan tersebut daripada membuat perjanjian baru di antara mereka sendiri. Penguasa telah diberi kekuasaan tunggal, dan dia adalah hakim tunggal untuk memutuskan apa yang diperlukan untuk perdamaian dan pertahanan rakyatnya. Singkatnya, Hobbes memberikan kekuasaan yang absolut, mahakuasa, permanen, universal, dan tidak dapat dicabut kepada raja.

John Locke, yang juga percaya pada gagasan kontrak sosial, mengajukan gambaran yang berbeda tentang pemerintahan. Bagi Locke, pemerintah didirikan atas persetujuan rakyat. Penguasa diberi tanggung jawab untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan harta benda. Rakyat dapat memberontak dan menyingkirkan penguasa, jika ia gagal memenuhi tugasnya. Kontrak ini bersifat bersyarat dan penguasa tidak diberi kekuasaan absolut. Gagasan Locke mengarah pada teori kedaulatan rakyat. Locke adalah seorang konstitusionalis.

Pertama-tama, ia tidak pernah menggunakan istilah kedaulatan, melainkan menggunakan istilah kekuasaan tertinggi. Kedua, kekuasaan tertinggi ini tidak terletak di tangan satu orang, melainkan di tangan rakyat. Mereka adalah sumber utama dari semua kekuasaan.

Badan legislatif, yang membuat undang-undang, harus menjadi otoritas tertinggi. Otoritas eksekutif tunduk pada legislatif. Dalam pengertian ini, ada satu badan tertinggi, yaitu badan legislatif yang menjadi bawahan dari badan-badan lainnya. Namun, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi bahkan untuk menghapus atau mengubah badan legislatif ketika mereka menemukan badan legislatif tidak dapat bertindak sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Ketika badan legislatif tidak sedang bersidang, eksekutif dapat disebut sebagai yang tertinggi. Namun, Locke menunjukkan bahwa eksekutif dan legislatif adalah yang tertinggi dalam lingkup yang terbatas. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, Locke dianggap sebagai bapak demokrasi liberal.

Jean Jacques Rousseau, yang juga menulis tentang kontrak sosial, memperluas gagasan Locke tentang kedaulatan rakyat. Bagi Rousseau, manusia membuat kontrak di antara mereka sendiri untuk memperbaiki masyarakat dan menikmati kebebasan manusia. Dengan kontrak ini, masing-masing menyerahkan semua haknya kepada masyarakat dan berada di bawah kendali tertinggi kehendak umum. Secara politis dan kolektif, mereka menjadi anggota masyarakat dan berdaulat sendiri, dan secara individual mereka menjadi subjek. Dengan demikian, kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu dalam Kehendak Umum, kedaulatan tidak akan pernah bisa diasingkan. Adalah mungkin untuk mengirimkan kekuasaan, tetapi bukan kehendak.

Rousseau tidak memiliki tempat dalam teorinya bagi para filsuf politik yang telah membagi-bagi kedaulatan karena mereka mengubah otoritas kedaulatan menjadi sejumlah bagian yang saling terhubung seolah-olah mereka membuat manusia, mengambil bagian yang berbeda dari beberapa tubuh. Kehendak Umum Rousseau haruslah benar dan karenanya sempurna. Rousseau benar-benar menolak otoritas pemerintah. Kebebasan alamiahnya diandaikan. Negara

menyatukan semua individu yang tetap bebas seperti sebelumnya. Setiap individu menyerahkan dirinya kepada kontrol semua orang dan bukan kepada orang tertentu. Dengan demikian, Rousseau telah menyatukan kedaulatan absolut dari Thomas Hobbes dan persetujuan rakyat dari John Locke dalam doktrin kedaulatannya. Teori Rousseau sangat berguna dalam pengembangan demokrasi.

Karl Marx menawarkan pandangan yang sepenuhnya berlawanan dengan demokrasi liberal. Marxisme telah sangat mempengaruhi banyak orang. Karl Marx mengklaim bahwa ia mengembangkan teorinya berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam sejarah. Dia berpendapat bahwa tindakan manusia setiap saat didominasi oleh motif ekonomi. Oleh karena itu, perkembangan masyarakat manusia ditentukan oleh interaksi kekuatan-kekuatan ekonomi. Tesis utamanya adalah bahwa sejarah semua masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Konflik kelas pada akhirnya akan membawa kaum proletar kelas pekerja untuk menggulingkan kaum borjuis kelas kapitalis dan menciptakan sebuah masyarakat baru di mana tidak akan ada lagi perbedaan antara si kaya dan si miskin. Pada akhirnya, negara dan lembaga-lembaganya akan layu. Teori Marx yang meramalkan peristiwa ini, dikenal sebagai materialisme dialektis. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sebagian besar ilmuwan politik menyatakan bahwa komunisme telah mati. Namun, komunisme tidak bisa disamakan dengan Marxisme.

10. Teori-teori Politik Kontemporer

Arti penting yang diperoleh oleh teori-teori klasik selama berabad-abad berangsur-angsur menurun. Para ilmuwan politik tidak puas dengan cara politik dipelajari di masa lalu. Mereka ingin mempelajari politik secara ilmiah. Pencarian mereka akan pengetahuan ilmiah tentang politik melahirkan apa yang dikenal sebagai behavioralisme. Dengan kata lain, mereka menganjurkan studi tentang fenomena politik melalui metode perilaku. Behaviouralisme menekankan studi ilmiah, objektif, dan bebas nilai tentang fenomena politik yang dikondisikan oleh lingkungan. Oleh karena itu, ilmu politik baru ini menghindari pertanyaan-pertanyaan moral atau etis dan mencoba

untuk menyatakan semua fenomena dalam hal perilaku manusia yang dapat diamati. Ilmu politik baru ini berkaitan dengan metodologi dan observasi, klasifikasi, dan pengukuran.²⁴ Ilmu ini meminjam teknik-teknik penelitian dari biologi, matematika, fisika, dan ilmu-ilmu alam serupa lainnya. Kemudian para ilmuwan politik merasa tidak puas dengan disiplin ilmu ini karena mereka lebih mementingkan teknik daripada masalah sosial. Oleh karena itu, behavioralisme digantikan dengan post-behavioralisme yang meminta para ilmuwan politik untuk membuat penelitian mereka relevan dan bermakna bagi masalah sosial kontemporer yang mendesak. Post-behavioralisme menyarankan agar ilmuwan politik bertanggung jawab dan terlibat dalam mengubah masyarakat untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Bagaimanapun, karena revolusi ini, sejumlah besar skema teori dan desain penelitian dikembangkan. Pendekatan sistem, fungsionalisme struktural, budaya politik, dan sosialisasi politik adalah beberapa teori yang perlu dibahas secara singkat.

Pendekatan sistem dalam studi politik pertama kali dikembangkan oleh David Easton. Menurut Easton, sistem politik terdiri dari semua institusi, proses dan interaksi yang melaluinya nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif dalam masyarakat. Sistem politik menerima masukan dari masyarakat. Masukan terdiri dari tuntutan untuk kebijakan tertentu dan ekspresi dukungan. Dukungan termasuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan dukungan untuk pemerintah dan para pemimpinnya. Sistem politik mengubah masukan menjadi keluaran. Keluaran terutama terdiri dari undang-undang, perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan sejenisnya, yang diumumkan oleh pihak berwenang. Keluaran tersebut kemudian diumpungkan kembali ke masyarakat untuk menghasilkan masukan baru.

Para ilmuwan politik menggunakan model sistem dalam beberapa cara. Pertama, mereka mengidentifikasi masalah-masalah publik yang penting. Kedua, mereka mengidentifikasi orang-orang yang memberikan input sistem. Ketiga, mereka memeriksa bagaimana

²⁴ Kymlicka, W. *Contemporary Political Philosophy An Introduction*. Oxford University Press. 2001.

keputusan dibuat. Terakhir, mereka memeriksa sejauh mana output memuaskan permintaan warga negara. Dengan demikian, model sistem merupakan pendekatan yang penting dan berguna untuk mempelajari politik.

Fungsionalisme struktural mencoba memahami struktur-struktur dalam sistem politik melalui fungsi-fungsinya. Menurut Almond, setiap sistem politik harus menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Ilmuwan politik kemudian harus mencari mekanisme yang melaluinya fungsi-fungsi ini dijalankan. Dengan kata lain, seseorang mencari struktur dengan mengajukan pertanyaan tentang fungsi-fungsi tersebut.

Menurut Almond, semua sistem politik harus menjalankan dua rangkaian fungsi: fungsi input dan fungsi output. Fungsi input adalah sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Fungsi keluarannya adalah pembuatan aturan, penerapan aturan, dan peradilan aturan. Fungsi-fungsi input dilakukan oleh sub-sistem non-pemerintah, masyarakat dan lingkungan umum. Fungsi output dilakukan oleh struktur pemerintahan seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Almond menegaskan bahwa penting untuk menemukan dan mengkarakterisasi semua fungsi-fungsi tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang memadai tentang sistem politik. Fungsi-fungsi yang disebutkan di atas kemudian dimodifikasi menjadi tiga jenis: fungsi kapabilitas, fungsi konversi dan pemeliharaan sistem, dan fungsi adaptasi.

Budaya politik adalah bagian dari budaya umum. Budaya politik dapat dianggap sebagai sub-budaya yang dipengaruhi oleh budaya umum. Budaya politik dapat didefinisikan sebagai pola sikap dan orientasi individu terhadap politik di antara anggota sistem politik. Budaya politik terdiri dari sikap politik, nilai-nilai, perasaan, informasi dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota komunitas politik. Hal ini tercermin dalam ideologi suatu bangsa, dalam sikap terhadap sistem politik dan para pemimpinnya, dalam tugas-tugas kewarganegaraan, dan sejenisnya. Menurut Almond dan Powell, ada tiga jenis orientasi individu: kognitif, afektif, dan evaluatif. Orientasi kognitif mengacu pada pengetahuan dan kepercayaan yang dimiliki

orang tentang berbagai karakteristik sistem politik. Sebagai contoh, seberapa banyak, warga negara Republik Islam Indonesia mengetahui tentang struktur politik nasional mereka? Orientasi afektif berarti perasaan loyalitas, patriotisme, dan sejenisnya mengenai sistem politik, personel dan kinerjanya. Sebagai contoh, apakah sebagian besar warga Indonesia merasa kagum terhadap sistem politik mereka secara keseluruhan atau terhadap kepribadian presiden? Orientasi evaluatif melibatkan penilaian dan opini mengenai sistem politik dan biasanya melibatkan kombinasi nilai atau standar dengan informasi dan perasaan. Misalnya, bagaimana warga negara mengevaluasi kinerja pemerintah mereka.

Ada tiga jenis budaya politik. Tipe pertama disebut budaya politik parokial, di mana masyarakat memiliki sedikit atau tidak memiliki kesadaran akan sistem politik mereka. Orang-orang dengan orientasi seperti ini tidak berharap bahwa politik akan membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Tipe budaya politik ini terdapat pada masyarakat tradisional yang sederhana. Tipe kedua adalah budaya politik subjek di mana masyarakat biasanya pasif. Warga negara sadar akan output dari pemerintah, tetapi mereka tidak berperan dalam input. Mereka tidak berpartisipasi karena mereka merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan memberikan pengaruh. Tipe terakhir adalah budaya politik partisipan yang ditemukan di masyarakat yang sangat maju di mana rakyat mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik. Tidak ada budaya politik yang cocok dengan salah satu tipe di atas. Sebaliknya, masing-masing merupakan campuran, terdiri dari proporsi yang berbeda antara warga negara parokial, subjek, dan partisipan serta sikap-sikapnya. Prevalensi relatif dari setiap tipe menentukan jenis budaya politik yang ada.

Sosialisasi politik hanyalah salah satu aspek dari proses sosialisasi secara umum yang dialami oleh setiap orang pada tingkat tertentu. Sosialisasi politik pada dasarnya adalah proses pengajaran dan pembelajaran tentang semua aspek sistem politik. Melalui proses sosialisasi politik, anak-anak dan, pada tingkat yang lebih rendah, orang dewasa menyerap sikap, kepercayaan, informasi, dan penilaian mengenai politik. Singkatnya, mereka memperoleh orientasi kognitif,

afektif, dan evaluatif terhadap sistem politik. Proses ini dilakukan melalui berbagai agen sosialisasi termasuk keluarga, kelompok sebaya, sekolah, media, dan pengalaman orang dewasa.

D. Rangkuman Materi

Teori-teori politik merupakan fondasi yang penting untuk memahami dinamika kekuasaan, pemerintahan, dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Setiap teori politik menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana seharusnya struktur politik dibangun, siapa yang berhak memegang kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan tersebut sebaiknya dijalankan. Dalam kesimpulannya, beberapa poin utama yang dapat diambil dari kajian teori-teori politik adalah:

1. **Keberagaman Perspektif:** Teori-teori politik mencerminkan keberagaman cara pandang tentang politik, mulai dari teori klasik seperti liberalisme, konservatisme, dan sosialisme, hingga teori-teori modern seperti feminisme politik, teori postmodern, atau teori kritis. Masing-masing teori ini memberikan penekanan pada aspek yang berbeda, seperti kebebasan individu, pemerataan sosial, atau penekanan pada struktur sosial dan ekonomi.
2. **Perkembangan Seiring Waktu:** Teori politik berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Pemikiran-pemikiran politik yang muncul dalam berbagai periode sejarah selalu berusaha menjawab tantangan dan kondisi masyarakat pada masanya. Oleh karena itu, teori-teori politik tidak bersifat statis, tetapi terus beradaptasi dengan perubahan zaman.
3. **Kritik terhadap Struktur Kekuasaan:** Banyak teori politik, terutama yang bersifat kritis, berfokus pada analisis dan kritik terhadap struktur kekuasaan yang ada, baik itu dalam bentuk negara, sistem pemerintahan, maupun hubungan sosial. Teori-teori ini berusaha mengungkap ketidakadilan atau ketimpangan yang ada dalam struktur politik dan ekonomi serta mengusulkan alternatif solusi.
4. **Teori sebagai Alat Pemahaman dan Praktik:** Teori-teori politik tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga sangat relevan dalam praktik politik sehari-hari. Melalui teori politik, kita dapat

memahami mekanisme kekuasaan, hubungan antar negara, serta bagaimana kebijakan publik dibentuk dan diterapkan. Dengan demikian, teori-teori politik juga memberikan dasar bagi para praktisi politik, pembuat kebijakan, dan warga negara dalam berpartisipasi aktif dalam proses politik.

5. **Kontroversi dan Perdebatan:** Setiap teori politik pasti memiliki pendukung dan penentangannya, serta sering kali menimbulkan perdebatan. Perbedaan pandangan ini adalah hal yang wajar dalam ilmu politik, karena sifat politik yang kompleks dan tidak ada satu jawaban tunggal untuk persoalan politik.

Secara keseluruhan, teori-teori politik menawarkan berbagai perspektif yang memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana politik berjalan dan bagaimana seharusnya kekuasaan digunakan. Mempelajari teori-teori ini membantu kita untuk berpikir kritis terhadap sistem politik yang ada dan dapat menjadi alat untuk memperbaiki dan menyempurnakan tatanan politik yang ada di masyarakat.

E. Soal Latihan:

1. Apa yang dimaksud dengan teori politik?
2. Uraikan legasi pemikir-pemikir kuno Barat.
3. Jelaskan faktor yang mempengaruhi gagasan-gagasan para pemikir politik.
4. Bagaimana teori liberalism klasik dan konservatif klasik berbeda?
5. Bagaimana prinsip fundamental teori politik kontemporer?

F. Sumber Bacaan

Jones, Tudor. *Modern Political Thinkers And Ideas An Historical Introduction*. Routledge. 2002.

Kempshall, M.S. *The Common Good In Late Medieval Political Thought*. Oxford University Press. 1999.

Kymlicka, W. *Contemporary Political Philosophy An Introduction*. Oxford University Press. 2001.

Lasswell, Harold. D. *Politik: Siapa yang Mendapat, Apa Kapan, Bagaimana*. New York: McGraw-Hill, 1936.

BAB 5

Sifat dan Karakteristik Negara

A. Deskripsi Singkat

Bab ini menguraikan berbagai sifat dan karakteristik negara, mendefinisikannya, dan menjelaskan fitur-fitur esensialnya.

B. Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami Sifat Negara
2. Mahasiswa mampu menjelaskan Karakteristik Negara

C. Penyajian Materi

Pendahuluan

Perhatian utama ilmu politik adalah negara. Negara merupakan institusi yang alamiah karena berakar pada realitas kodrat manusia. Negara juga merupakan institusi yang diperlukan karena negara merupakan sarana yang memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan berjuang untuk kehidupan yang baik. Manusia membutuhkan negara untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam dan untuk menjadi apa yang diinginkannya. Tanpa negara, ia tidak dapat mencapai tingkat kepribadiannya yang penuh karena akan terjadi kekacauan dan kekacauan. Oleh karena itu, negara sangat diperlukan untuk keberadaan dan perkembangannya. Istilah negara, dapat dicatat, adalah produk abad enam belas. Tetapi negara telah

ada kapan pun dan di mana pun manusia hidup dalam masyarakat yang terorganisir.

1. Definisi Negara

Perlakuan sistematis terhadap hakikat negara dimulai dengan para filsuf Yunani. Manusia, kata Aristoteles, pada dasarnya adalah makhluk politik; sudah menjadi kodratnya untuk hidup dalam sebuah polis, di mana ia dapat mencapai sifat moralnya yang tertinggi. Negara, bagi Plato, seperti halnya Aristoteles, ada untuk tujuan mencari kebaikan bersama dan kesempurnaan moral. Bagi mereka, negara tidak hanya sekedar asosiasi politik tetapi juga berfungsi sebagai komunitas keagamaan dan agen sosialisasi.²⁵

Dimulai dengan Niccolo Machiavelli (1469-1527 M), penekanan dan asumsi berubah. Para ahli teori kini memandang manusia sebagai makhluk yang mementingkan diri sendiri yang memiliki hasrat yang terus-menerus dan gelisah akan kekuasaan demi kekuasaan yang hanya berhenti pada saat kematian. Akibatnya, fokusnya bergeser dari moralitas dan kebajikan menjadi kekuasaan dan otoritas. Hal ini berlaku untuk Karl Marx (1818-1883) dan Max Weber (1864-1920), yang keduanya mempengaruhi para ahli teori negara kontemporer. Baik Marx maupun Weber mengasumsikan populasi, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan sebagai ciri-ciri negara yang sudah jelas dan tidak perlu diuraikan lagi. Oleh karena itu, mereka melanjutkan ke analisis kelas atau kelompok negara dan perilakunya. Bagi Marx, negara adalah produk dari kontradiksi kelas dan perjuangan kelas dan dikendalikan oleh kelas yang dominan secara ekonomi.

Bagi Max Weber, negara adalah komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah di suatu wilayah. Robert Dahl, yang dipengaruhi oleh Weber, memandang negara sebagai kumpulan individu yang menduduki posisi peran pemegang otoritas pemerintahan dan bertindak sebagai sebuah kelompok yang memerintah. Yang lain mendefinisikan negara sebagai organisasi politik yang memiliki kekuasaan yang diatur

²⁵ Elly Dar Chaidir, *Negara Hukum Demokrasi dan Konstalansi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

secara teritorial dan mampu memobilisasi sarana kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan tersebut.

2. Elemen-elemen Negara

Terlepas dari perbedaan penekanan, para ilmuwan politik sepakat bahwa istilah negara mengacu pada kumpulan orang yang menduduki wilayah tertentu di bawah pemerintahan yang terorganisir dan tidak tunduk pada kontrol dari luar. Mereka adalah kelompok-kelompok orang yang tinggal di suatu wilayah, dan menjalankan kontrol atas, suatu wilayah tertentu. Mereka terbagi menjadi pemerintah dan rakyat; penguasa dan yang dikuasai.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa negara memiliki empat elemen: penduduk, wilayah, pemerintah, dan kedaulatan. Atribut-atribut ini merupakan esensi dari kenegaraan. Menurut beberapa ahli, atribut-atribut ini paling banter merupakan model atau tipe ideal yang hanya dimiliki oleh sedikit negara. Tidak ada negara yang memiliki keempat atribut ini, dan beberapa negara yang baru terbentuk di dunia tidak memiliki beberapa di antaranya. Namun demikian, keempat atribut tersebut menawarkan titik awal yang berguna dalam mempelajari negara.

Populasi

Populasi dan tanah adalah titik awal dari setiap diskusi tentang negara. Rakyatlah yang membentuk negara, tanpa mereka tidak akan ada negara. Tetapi populasi harus cukup besar untuk membentuk sebuah negara dan mempertahankannya. Anggota dari satu keluarga tidak dapat membentuk sebuah negara; harus ada serangkaian keluarga. Populasi negara terdiri dari dua kelompok, warga negara dan orang asing, penduduk yang bukan warga negara pada saat tinggal. Warga negara adalah orang yang secara resmi diakui berdasarkan hukum sebagai anggota negara. Secara teori, konsep kewarganegaraan menyiratkan kewajiban di pihak negara dan warga negara. Secara umum, kewarganegaraan dapat diperoleh melalui kelahiran *jus soli* atau hukum tanah. Setiap orang yang lahir di tanah negara termasuk ruang udara dan perairan teritorialnya

secara otomatis berhak atas kewarganegaraan. Sebagian besar negara berbahasa Inggris menganut hukum tanah. Metode lain untuk memperoleh kewarganegaraan disebut jus sanguinis hukum darah. Dalam hal ini, kewarganegaraan dianggap sebagai warisan, dan pada saat lahir seseorang memperoleh kewarganegaraan orang tuanya. Sebagian besar negara bagian di benua Eropa menganut hukum darah. Masing-masing negara juga menetapkan aturan untuk naturalisasi, proses hukum di mana seseorang yang awalnya tidak berhak atas kewarganegaraan dapat menjadi warga negara. Namun, tidak ada batasan yang dapat ditempatkan pada jumlah orang yang membentuk negara. Perbedaan jumlah penduduk, dengan hal-hal lain yang tetap sama, tidak membuat perbedaan dalam sifat negara, meskipun pendapat mengenai ukurannya bervariasi dari waktu ke waktu. Populasi di negara-negara berkisar dari Vatikan dengan populasi sekitar seribuan orang hingga Cina dengan populasi lebih dari miliaran orang.

Wilayah

Tidak akan ada negara tanpa wilayah yang tetap. Negara pertama kali berkembang di Eropa Barat pada abad ketujuh belas ketika benteng pertahanan didirikan untuk menggambarkan dan mempertahankan batas-batas baru mereka. Saat ini, hampir seluruh daratan di dunia, termasuk danau dan sungai di pedalaman, diklaim oleh negara. Tidak ada negara tanpa wilayah yang sah dan tidak ada wilayah yang bukan bagian dari negara lain. Satu-satunya pengecualian utama adalah Antartika. Wilayah negara sering secara keliru diasumsikan hanya mencakup daratan. Di bawah hukum internasional kontemporer, wilayah negara dianggap meluas hingga ke lautan, ruang udara, dan bawah tanah. Mayoritas negara sekarang menerima batas dua belas mil laut untuk perairan teritorial di bawah kedaulatan penuh negara. Wilayah bawah laut juga penting dengan munculnya anjungan pengeboran minyak lepas pantai dan kemungkinan penambangan bahan mentah lainnya di bawah laut. Negara juga mengontrol ruang udara di atas wilayahnya serta sumber daya di bawah tanahnya. Tanah, air, dan ruang udara di dalam wilayah teritorial yang ditentukan merupakan wilayah Negara. Oleh karena itu, wilayah mencakup

batas-batas geografis negara, sungai dan danau, sumber daya alam yang dimilikinya, dan ruang udara di atasnya.

Pemerintahan

Tujuan manusia hidup bersama tak akan terwujud jika mereka tak terorganisir dengan baik dan menerima aturan-aturan tertentu. Badan yang dibentuk untuk menegakkan aturan perilaku tersebut dan memastikan kepatuhan disebut pemerintah. Pemerintah adalah lembaga yang melaluinya kebijakan-kebijakan negara dirumuskan dan dijalankan. Menurut Max Weber, pemerintah adalah lembaga yang memiliki monopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah di dalam suatu wilayah.²⁶ Pemerintah adalah fokus dari tujuan bersama dari orang-orang yang menduduki wilayah tertentu dan melalui media inilah kebijakan umum ditentukan, urusan bersama diatur dan kepentingan bersama dipromosikan. Tanpa pemerintah, masyarakat Perpaduan tidak akan memiliki kohesi dan sarana untuk melakukan tindakan kolektif. Mereka akan membagi diri mereka ke dalam kelompok-kelompok, partai-partai dan bahkan perkumpulan-perkumpulan yang saling bertikai dan dengan demikian menciptakan kondisi kekacauan, bahkan perang saudara. Oleh karena itu, sangat penting bahwa harus ada otoritas bersama dan tatanan yang konsekuen di mana pun orang tinggal. Ini adalah prasyarat kehidupan manusia dan dengan demikian, pemerintah adalah elemen penting dari negara. Negara tidak dapat dan tidak akan ada tanpa adanya pemerintah, apa pun bentuk pemerintahannya. Pemerintah menggunakan kekuatan koersif mereka (atau mengancam untuk menggunakan kekuatan tersebut) untuk menjamin ketertiban dalam negeri, menjaga keamanan eksternal, dan mempromosikan kesejahteraan kolektif penduduk.

Kedaulatan

Kedaulatan negara adalah fitur yang paling penting dan dapat dibedakan. Kedaulatan mengacu pada sumber otoritas dalam masyarakat. Konsep ini bersifat legal dan bukan praktis. Doktrin kedaulatan menegaskan bahwa negara adalah kekuatan pengambil

²⁶ Ibid.

keputusan tertinggi dalam batas-batas geografis dan tunduk pada otoritas eksternal hanya dengan persetujuannya. Kedaulatan adalah milik badan yang memiliki hak untuk membuat undang-undang bagi suatu negara. Di Indonesia, misalnya, badan ini adalah DPR yang merupakan badan pembuat undang-undang tertinggi. Kedaulatan negara memiliki dua aspek, kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Kedaulatan internal mengacu pada hak negara untuk membuat undang-undang yang berlaku di dalam batas-batasnya. Otoritas ini tidak dapat dibagi dengan negara lain dan tidak ada anggotanya yang berada di dalam wilayahnya yang dapat berutang kepatuhan kepada negara lain. Setiap negara tidak tergantung pada negara lain. Kehendaknya adalah kehendaknya sendiri, tidak terpengaruh oleh kehendak otoritas eksternal lainnya. Kedaulatan eksternal adalah pengakuan dalam hukum internasional bahwa sebuah negara memiliki yurisdiksi kewenangan atas suatu wilayah. Ini berarti negara bertanggung jawab atas yurisdiksi tersebut dalam hukum internasional. Dari doktrin kedaulatan muncul prinsip kesetaraan hukum negara-negara. Oleh karena itu, setiap negara harus memiliki penduduk, wilayah yang pasti, pemerintahan yang sah, dan kedaulatan. Pasca tahun 1946, jumlah negara telah meningkat. Sebagian besar negara baru ini muncul di Afrika, tetapi banyak juga yang muncul di Eropa Timur.

3. Bangsa, Negara, dan Negara-Bangsa

Ada kecenderungan di antara orang-orang untuk menggunakan kata bangsa, negara, dan rakyat untuk mengartikan hal yang sama. Meskipun ketiga kata ini saling berkaitan, ketiganya berbeda dan memiliki arti yang berbeda dalam ilmu politik. Kata bangsa berasal dari kata Latin *nation* yang berarti lahir. Hal ini memberikan istilah ini makna rasial atau etnis. Dalam arti aslinya, kata ini menandakan asal geografis seseorang, tempat kelahiran mereka. Namun, kata bangsa umumnya digunakan untuk menggambarkan komunitas etnis, bahasa atau budaya, atau bahkan ras. Kata ini mengacu pada sekelompok besar orang yang disatukan oleh ikatan hubungan darah, bahasa dan sastra yang sama, tradisi dan sejarah yang sama.

Sekelompok orang dapat membentuk sebuah bangsa bahkan tanpa adanya faktor-faktor obyektif ini. Yang diperlukan dari sebuah bangsa adalah sentimen memiliki bersama atau sekadar kesamaan pikiran. Sebagai contoh, orang Indonesia merupakan sebuah bangsa, meskipun mereka tidak berbicara dalam bahasa yang sama atau menganut agama yang sama. Di sisi lain, orang Indonesia dan Malaysia menganut agama yang sama, tetapi mereka mengklaim sebagai bangsa yang terpisah. Beberapa ahli bersikeras bahwa kata bangsa memiliki makna rasial atau etnografis. Bangsa adalah sekumpulan orang yang disatukan oleh keturunan yang sama dan bahasa yang sama. Istilah ras dan kebangsaan adalah dua istilah yang berbeda. Bangsa tidak memiliki arti rasial.

Kata negara sebagaimana didefinisikan di atas adalah suatu masyarakat yang terorganisir berdasarkan hukum dalam suatu wilayah tertentu, yang menjalankan kedaulatan internal dan eksternal. Negara adalah unit politik yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan urusannya sendiri. Bangsa, di sisi lain, adalah orang-orang yang secara psikologis terikat bersama dengan kehendak bersama untuk hidup bersama. Negara adalah sebuah unit politik, sedangkan bangsa adalah sebuah entitas budaya dan psikologis. Sebuah negara dicirikan oleh kedaulatan, sebuah bangsa mungkin memiliki kedaulatan atau tidak. Sekelompok orang dapat terus menjadi sebuah bangsa meskipun mereka tidak memiliki atau mempertahankan karakter kedaulatan mereka; kedaulatan, bagaimanapun, adalah fitur yang paling penting dari negara. Dengan demikian, Indonesia adalah sebuah negara. Orang-orang Yahudi tidak membentuk sebuah negara karena mereka bukan sebuah unit politik. Palestina adalah sebuah bangsa, tetapi Palestina belum menjadi sebuah negara karena belum memiliki kedaulatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus diingat, bukanlah sebuah bangsa atau negara. Ini adalah organisasi negara-negara, oleh karena itu disebut Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kata negara-bangsa mengacu pada sebuah institusi politik yang menggabungkan konsep bangsa dan negara. Ini mengacu pada sebuah negara yang dihuni oleh orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai sebuah bangsa karena berbagi budaya, sejarah, bahasa,

etnis, atau faktor lainnya. Struktur sistem negara-bangsa menuntut pemajuan kepentingannya sendiri dengan mengesampingkan dan, terkadang, mengorbankan kepentingan yang lain. Meskipun ada beberapa kasus di mana bahasa atau agama cenderung bertepatan dengan batas-batas negara, sangat jarang ditemukan negara-bangsa dalam arti yang sebenarnya. Di Afrika dan Asia, keduanya umumnya tidak bertepatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa batas-batas negara ditarik oleh kekuatan kolonial yang pergi untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, banyak kebangsaan tinggal di satu negara dan sebaliknya satu negara telah dibagi menjadi banyak negara. Di Timur Tengah, orang-orang Kurdi merupakan minoritas di Turki, Irak, dan Iran.

Para ilmuwan politik berpendapat bahwa negara-negara multi-budaya atau multi-nasional memiliki peluang yang lebih kecil untuk mempertahankan demokrasi dan stabilitas. Secara khusus, mereka telah menemukan bahwa negara-negara multi nasional menderita konflik politik yang intens karena keinginan bangsa-bangsa untuk membentuk negara mereka sendiri. Banyak contoh yang dapat disebutkan perang antara Pakistan Timur dan Barat yang mengakibatkan munculnya Bangladesh adalah beberapa kasus yang terkenal. Contoh lain termasuk upaya wilayah Chechnya untuk melepaskan diri dari Rusia; kerusuhan di antara suku Kurdi di Irak, Iran, dan Turki; dan perang etnis berdarah di Bosnia, Kroasia, dan Kosovo pada tahun sembilan puluhan.²⁷

Para pemimpin yang memerintah negara-negara multikultural sadar akan masalah yang diciptakan oleh bangsa mereka sendiri. Negara-negara ini menderita legitimasi karena rakyatnya memberikan kesetiaan kepada kelompok mereka sendiri dan bukan kepada negara. Negara juga tidak dapat membuat warga negara mematuhi hukum negara dan membayar pajak yang diwajibkan. Akibatnya, para pemimpin negara-negara ini telah mencoba menanamkan rasa kebangsaan di antara para anggota negara. Dengan kata lain, para pemimpin negara-negara ini telah mencoba untuk menghubungkan

²⁷ Jones, Laurence and Edward Olson. *Political Science Research: A Handbook of Scope and Method*. New York: Harper Collins College Publishers, 1996.

konsep negara dan bangsa secara bersamaan. Mereka mencoba mempromosikan perasaan kebangsaan yang sama di antara warga negara mereka untuk melihat negara mereka berubah menjadi negara-bangsa. Inilah salah satu alasan mengapa orang menyebut negara sebagai negara-bangsa.

4. Asal Usul Negara

Sangat sulit untuk mengetahui secara pasti asal mula negara ini. Tidak ada bukti-bukti sejarah yang dapat menunjukkan dengan pasti asal mula negara. Namun, para filsuf politik telah merumuskan beberapa teori untuk menjelaskan asal-usulnya. Ini termasuk: teori Tuhan, teori paksaan, dan teori kontrak sosial. Beberapa filsuf percaya bahwa negara berevolusi dari waktu ke waktu. Teori-teori ini menjelaskan asal-usul negara dan juga memberikan alasan mengapa manusia harus hidup dalam negara dan mengapa mereka harus mematuhi otoritas negara.²⁸

Teori Asal Dari Tuhan

Penjelasan tertua dan paling sederhana mengenai asal-usul negara diberikan dalam kerangka asal-usul ketuhanan. Teori ini berpendapat bahwa:

1. negara diciptakan oleh Tuhan,
2. para penguasa diangkat oleh Tuhan dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan,
3. penguasa atau Raja harus ditaati sebagai kewajiban agama, dan
4. ketidaktaatan terhadap perintah penguasa adalah dosa dan akan mengundang hukuman Tuhan.

Oleh karena itu, penguasa menggabungkan kekuatan spiritual dan duniawi. Teori ini memunculkan hak ketuhanan raja yang muncul sebagai seorang lalim dengan otoritas yang tidak terkendali. Secara sederhana, teori ini menganjurkan “teokrasi”. Teori ini didukung oleh sebagian besar agama termasuk Kristen. Teori ini telah menyebabkan konflik antara Gereja dan Negara di Eropa selama abad pertengahan.

²⁸ Lasswell, Harold. D. *Politik: Siapa yang Mendapat, Apa Kapan, Bagaimana*. New York: McGraw-Hill, 1936.

Sejak abad ke-19, teori ini telah kehilangan banyak dukungan dengan munculnya sekularisme. Telah diasumsikan secara keliru oleh kebanyakan orang bahwa Islam menganut negara teokratis. Dalam Islam, setiap manusia, bukan hanya penguasa, tapi digambarkan sebagai khalifah Tuhan. Kekuasaan berasal dari Tuhan, namun didelegasikan kepada rakyat untuk dijalankan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Oleh karena itu, beberapa orang menyebutnya sebagai teo-demokrasi.

Teori Kekuatan

Teori ini berpendapat bahwa negara muncul melalui kekerasan. Teori ini didasarkan pada konsepsi tentang sifat alamiah manusia. Menurut mereka, manusia, adalah hewan sosial dan memiliki hasrat untuk berkuasa. Yang lebih kuat menangkap yang lemah dan menjalankan otoritas atasnya. Secara bertahap, dia memperluas wilayah kekuasaannya dan pada akhirnya dia akan menjadi seorang Raja. Secara sederhana, teori ini menyatakan sebagai berikut:

1. Kekuatan adalah fitur penting dari negara.
2. Negara lahir dari kekuatan.
3. Kekuatan digunakan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban internal dan mengamankannya dari agresi eksternal.

Dengan demikian, teori ini menelusuri asal-usul dan perkembangan negara pada kekerasan dan membenarkan otoritasnya pada pepatah kekuatan adalah benar. Teori ini terlalu menekankan pada prinsip kelangsungan hidup yang terkuat. Berbahaya untuk menggunakan prinsip seperti itu dalam eksistensi internal negara. Sebagian besar ahli percaya bahwa kekuatan mungkin penting untuk menjaga hukum dan ketertiban, tetapi itu jelas bukan dasar negara. Lebih jauh lagi, tidak ada negara yang dapat bertahan lama dengan kekerasan kecuali didukung oleh persetujuan dari rakyatnya.

Teori Kontrak Sosial

Teori ini berpendapat bahwa negara muncul melalui kontrak atau perjanjian di antara masyarakat. Teori ini, meskipun berasal dari para filsuf Yunani, dikaitkan dengan Thomas Hobbes dan John

Locke pada abad tujuh belas dan Jean-Jacques Rousseau pada abad delapan belas. Teori ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manusia pada awalnya hidup dalam keadaan alamiah.
2. Keadaan alam yang imajiner ini bersifat pra-sosial dan karenanya merupakan kondisi perang abadi atau pra-politik karena tidak adanya otoritas yang diakui bersama. Singkatnya, itu bukan masyarakat yang terorganisir.
3. Untuk keluar dari kondisi yang tidak memuaskan dan tidak dapat ditoleransi ini, orang-orang membuat kontrak dengan sesamanya.
4. Sebagai hasil dari kontrak, perjanjian atau kesepakatan di antara orang-orang dalam masyarakat sipil didirikan di mana hukum negara berlaku.

Teori kontrak sosial telah dikritik karena tidak historis, tidak logis dan keliru. Tidak historis karena tidak ada catatan dalam sejarah manusia tentang negara yang pernah dibuat berdasarkan kontrak. Tidak logis karena tidak mungkin orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang negara dapat membentuk sebuah negara. Hal ini keliru karena hak-hak tidak mungkin ada tanpa negara dan orang-orang tidak dapat menyerahkan hak-hak yang tidak mereka miliki.

Sebagaimana dapat dilihat, teori-teori tentang Asal-Usul Ilahi, Kekuatan dan Kontrak Sosial sebagai penjelasan tentang asal-usul negara bersifat spekulatif. Masing-masing teori ini mengandung beberapa unsur kebenaran dan membantu kita dalam memahami bagaimana dan mengapa Negara muncul. Namun, teori-teori ini tidak dapat diterima sebagai dasar asal mula negara. Hanya teori Historis atau Evolusioner yang dapat diterima oleh komunitas cendekiawan.

Teori Historis atau Evolusi

Secara sederhana, teori ini berpendapat bahwa negara muncul sebagai hasil dari evolusi alamiah. Negara berevolusi secara bertahap sebagai hasil dari kebutuhan manusia akan ketertiban dan perlindungan. Seorang pemikir Muslim, Ibnu Taimiyah, berpendapat bahwa ada kecenderungan alamiah yang melekat pada diri manusia yang mendorongnya untuk bekerja sama dengan sesama makhluk demi

kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Kesejahteraan bersama ini tidak dapat dicapai tanpa adanya tatanan sosial yang membutuhkan otoritas untuk mengarahkannya. Argumen sosiologis ini telah dikembangkan secara lebih rinci oleh pemikir Muslim Ibnu Khaldun. Sebagaimana yang dikembangkan oleh para pemikir politik Barat, teori evolusi historis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, manusia pada dasarnya adalah ciptaan sosial. Sejak awal sejarah manusia, mereka hidup bermasyarakat.

Kedua, negara adalah hasil dari pertumbuhan, sebuah evolusi yang lambat dan mantap yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Ketiga, keluarga adalah bentuk masyarakat yang paling awal, dan kekerabatan atau hubungan darah adalah dasar masyarakat.

Keempat, kabilah Seiring berjalannya waktu, keluarga berkembang menjadi klan, klan menjadi suku, dan suku menjadi masyarakat yang lebih besar. Agama menjadi dasar organisasi sosial.

Kelima, perang dan migrasi juga memainkan peran penting dalam pembentukan negara.

Keenam akhirnya, kesadaran politiklah yang memainkan peran paling penting dalam membangun negara.

Proses evolusi negara tidaklah seragam. Perbedaan lingkungan alam dan temperamen masyarakat memunculkan bentuk dan pola negara yang berbeda. Namun, dapat dikatakan bahwa negara telah berevolusi melalui tahapan-tahapan berikut. Pertama, ada negara kesukuan. Ini diikuti oleh kekaisaran oriental, negara kota Yunani, kekaisaran Romawi, tahap feodal, dan akhirnya negara-bangsa.

Negara di Barat

Asal-usul dan perkembangan negara-bangsa di Eropa merupakan hasil dari proses kompleks yang terjadi antara abad sepuluh dan sembilan belas. Namun, penandatanganan Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 dan Revolusi Perancis pada tahun 1789 merupakan dua peristiwa bersejarah yang masing-masing menandai dimulainya periode

baru dalam pembentukan negara.²⁹ Perjanjian Westphalia memulai era negara teritorial di mana orang-orang mengalihkan kesetiaan mereka dari cita-cita persemakmuran Kristen universal Kristenisasi ke tanah air. Revolusi Prancis memulai era negara nasional di mana negara menjadi diidentifikasi dengan kelompok kebangsaan tertentu, dan nasionalisme menjadi sistem kepercayaan yang dominan di dunia. Dalam kedua kasus tersebut, tugas pembangunan negara dan pembangunan bangsa dilakukan oleh kelompok kepemimpinan yang berhutang kekuasaan, status, dan kekayaan pada eksistensi negara berdaulat. Pada paruh kedua abad sembilan belas, pembentukan negara-negara di Eropa dalam bentuknya yang modern telah selesai kecuali untuk perubahan-perubahan yang dibawa oleh dua Perang Dunia. Perkembangan negara di Barat memakan waktu beberapa abad, dan para pembangun negara di Barat bebas dari tekanan untuk berkembang dengan cepat, yang kini dihadapi oleh para pemimpin negara berkembang.

Negara di bawah Ideologi Komunis

Filosofi politik dasar dari negara komunis adalah Marxisme-Leninisme, yang mengklaim memiliki teori negara yang koheren dan komprehensif. Mereka menolak teori hak ilahi, kontrak sosial, serta teori paksaan dan kekerasan tentang asal mula negara.³⁰ Mereka percaya bahwa umat manusia terikat oleh hukum perkembangan sosial dan bahwa masyarakat manusia berkembang melalui lima tahap zaman perkembangan. Tahap-tahap ini adalah zaman primitif-komunal, zaman budak, zaman feodal, zaman kapitalis, dan akhirnya zaman sosialis-komunis. Zaman terakhir dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, negara sosialis adalah organisasi transisi yang mempersiapkan masyarakat tanpa kelas. Pada bagian kedua, di bawah komunisme penuh, negara akan layu. Dengan terbentuknya masyarakat tanpa kelas dan penghapusan kepemilikan pribadi, negara akan menjadi tidak diperlukan.

²⁹ Bateman, Thomas, et.al. *Menantang Dunia: Bacaan dalam Politik Kontemporer*. Scarborough: Nelson Thomson Learning, 2000.

³⁰ Crick, Bernard. *In Defense of Politics*. Magnolia, Mass: Peter Smith Publisher, 1994.

Komunisme runtuh sebelum sempat mencapai tahap akhir evolusi. Sebelum keruntuhannya, komunis berhasil mengembangkan sistem negara yang sangat kuat-mekanisme negara yang sering disebut sebagai totaliter mencari kontrol sebanyak mungkin atas semua aspek masyarakat. Secara teoritis, negara-negara Komunis menolak nasionalisme sebagai ciptaan kaum borjuis pemilik properti dalam kapitalisme, tetapi pada kenyataannya mereka mengakui keberadaannya. Pembagian utama Uni Soviet, yaitu belasan republik konstituen, didasarkan pada kewarganegaraan. Beberapa negara komunis berbentuk federal, misalnya Yugoslavia dengan enam republik. Negara-negara partai komunis lainnya memilih untuk membentuk organisasi kesatuan, misalnya, Polandia, Jerman Timur, dan Hongaria.

D. Rangkuman Materi

Negara sebagai entitas politik memiliki berbagai sifat dan karakteristik yang membedakannya dari organisasi atau kelompok lain dalam masyarakat. Sifat dan karakteristik ini mencerminkan peran negara dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu bangsa. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan tentang sifat dan karakteristik negara adalah:

1. **Kekuasaan yang Sah:** Salah satu karakteristik utama negara adalah memiliki kekuasaan yang sah dan diakui oleh masyarakat internasional. Kekuasaan ini terwujud dalam kemampuan negara untuk mengatur, mengendalikan, dan menegakkan hukum serta kebijakan yang berlaku di dalam wilayahnya. Negara memiliki hak untuk memaksakan aturan-aturannya, baik melalui kekuatan militer, polisi, maupun lembaga-lembaga lainnya.
2. **Wilayah yang Tertentu:** Negara memiliki wilayah yang jelas, yang menjadi batas-batas di mana kekuasaan negara berlaku. Wilayah ini bisa berupa daratan, laut, dan udara yang diakui oleh negara lain. Keberadaan wilayah ini menjadi syarat penting bagi eksistensi suatu negara.
3. **Penduduk yang Tertata:** Negara memiliki penduduk yang tinggal di wilayahnya. Penduduk ini dapat terdiri dari berbagai etnis,

agama, dan kelompok sosial, tetapi tetap berada dalam satu struktur sosial dan politik yang diatur oleh negara. Interaksi antara individu dan negara dalam hal hak dan kewajiban membentuk hubungan yang krusial dalam negara.

4. **Sistem Pemerintahan:** Negara memiliki suatu bentuk pemerintahan yang mengatur jalannya negara, baik itu republik, monarki, demokrasi, atau sistem pemerintahan lainnya. Sistem pemerintahan ini mengatur pembagian kekuasaan, baik di tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang bekerja untuk memastikan terlaksananya hukum dan kebijakan negara.
5. **Kedaulatan:** Kedaulatan adalah karakteristik penting yang menunjukkan bahwa negara memiliki otoritas tertinggi di dalam wilayahnya dan tidak dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh negara lain. Kedaulatan ini mencakup kedaulatan internal (kemampuan negara mengelola urusan dalam negeri) dan kedaulatan eksternal (kemampuan negara berinteraksi dengan negara lain di panggung internasional).
6. **Tujuan untuk Kesejahteraan Umum:** Negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warganya. Melalui kebijakan publik, negara berusaha mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik yang menguntungkan bagi rakyat, termasuk menyediakan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan sosial.
7. **Sistem Hukum dan Keadilan:** Negara memiliki sistem hukum yang menjadi dasar bagi penyelesaian konflik, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan keadilan. Hukum di negara bertindak sebagai pemandu untuk kehidupan bernegara, yang mengatur hubungan antar individu, kelompok, dan negara itu sendiri.

Secara keseluruhan, negara memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan sosial, menjaga stabilitas politik, serta memfasilitasi perkembangan ekonomi dan sosial. Sifat dan karakteristik negara yang terorganisir dan sah, serta memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat, membuat negara menjadi elemen yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Soal Latihan:

1. Bagaimana sifat dan karakteristik negara?
2. Bagaimana prinsip-prinsip dasar negara?
3. Bagaimana tantangan negara-negara di dunia pada umumnya?
4. Bagaimana pengertian bangsa, negara, dan bangsa negara?
5. Bagaimana konsensus pakar meninjau konsep negara?

F. Sumber Bacaan

Milgram, Stanley. *Ketaatan pada Otoritas: Sebuah Pandangan Eksperimental*. New York: Harper & Row, 1974.

Mustaqim, Abdul, Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad), Yogyakarta: *Jurnal Analisis*, Vol. XI, No. 1, Juni 2011.

Morton, Rebecca. *Methods and Models: A Guide to the Empirical Analysis of Formal Models in Political Science*. New York: Oxford University Press, 1999.

Syafiie, Inu Kencana. *Alqur'an Dan Ilmu Politik*. Rineka Cipta Jakarta. 1996.

BAB 6

Konstitusi dan Pemerintahan Konstitusional

A. Deskripsi Singkat

Bab ini menguraikan berbagai teori tentang konstitusi dan pemerintahan konstitusional, mendefinisikannya, dan menjelaskan fitur-fitur esensialnya.

B. Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami konsep Konstitusi
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Konstitusional

C. Penyajian Materi

Pendahuluan

Di zaman modern ini, setiap negara memiliki konstitusi. Pertanyaannya adalah: apakah konstitusi itu? Berbagai definisi konstitusi diberikan oleh berbagai ahli. Aristoteles, bapak ilmu politik, mendefinisikan konstitusi sebagai cara hidup yang dipilih oleh negara untuk dirinya sendiri. Kata Yunani untuk konstitusi, politeia, pada dasarnya berarti segala bentuk pemerintahan. Enam bentuk pemerintahan menurut Aristoteles adalah konstitusi. Namun, saat ini, konstitusi dipahami dalam arti yang lebih sempit. Menurut

Strong, konstitusi adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan di antara keduanya. Ini adalah totalitas hukum yang kompleks yang mewujudkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang melaluinya masyarakat diorganisir, diatur, dan disatukan. Secara sederhana dapat disebut sebagai sistem institusi fundamental. Menurut pemikir Barat, konstitusi adalah pilihan aturan hukum yang mengatur pemerintahan negara tersebut dan yang telah diwujudkan dalam sebuah dokumen.³¹ Oleh karena itu, konstitusi adalah dokumen yang menjabarkan elemen-elemen dasar pemerintahan, kekuasaan elemen-elemen tersebut, persyaratan untuk memegang jabatan nasional, dan berbagai hak dan keistimewaan warga negara. Namun, konstitusi Inggris tidak berbentuk dokumen. Oleh karena itu, mereka mengatakan ini tentang Konstitusi Inggris: kumpulan hukum, institusi, dan adat istiadat, yang berasal dari prinsip-prinsip nalar tertentu yang tetap yang membentuk sistem umum, yang dengannya masyarakat setuju untuk diatur. Konstitusi adalah hukum dasar negara. Konstitusi memiliki prioritas di atas hukum pemerintah lokal, negara bagian, dan nasional. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang menentukan organisasi atau struktur pemerintahan, mendistribusikan kekuasaan, dan menentukan hubungan di antara organ-organ pemerintahan. Konstitusi juga menentukan hak dan kewajiban warga negara. Lebih tepatnya, konstitusi adalah kumpulan aturan dan peraturan formal dan efektif yang mengatur rakyat dan lembaga-lembaga formal suatu negara.

1. Metode Penetapan Konstitusi

Konstitusi adalah dokumen fundamental bagi hampir semua negara saat ini. Namun, metode pengadopsian konstitusi telah berubah sepanjang sejarah. Ada empat metode yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk mendapatkan konstitusi. Metode-metode tersebut adalah: 1) Dekrit Raja, 2) Evolusi, 3) Revolusi, dan 4) pembuatan yang disengaja melalui Majelis Konstituante.³²

³¹ Winter, Herbert. *Political Science and Theory*. New York: Harper Collins College Publishers, 1992.

³² Albert, Richard. *Constitutional Amendments. Making, Breaking, and Changing Constitution*.

Sebagian besar negara bersifat teokratis di masa lalu. Mereka diperintah oleh raja yang absolut. Seiring berjalannya waktu, entah karena penguasa percaya bahwa kekuasaan pemerintah dan cara pelaksanaannya harus didefinisikan secara lebih formal/legal atau karena tuntutan rakyat dan ketakutan akan revolusi, maka Raja mengumumkan sebuah dokumen formal di mana Raja setuju untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan prinsip dan aturan tertentu. Konstitusi semacam itu disebut konstitusi berdasarkan Keputusan Raja atau dekrit kerajaan. Raja mempertahankan kekuasaan yang sama dalam konstitusi, tetapi warga negara memandangnya sebagai janji atau kontrak Raja. Konstitusi yang diberikan oleh Napoleon dari Perancis pada tahun 1799 adalah contoh konstitusi semacam itu.

Tidak seperti Indonesia, Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis. Inggris memiliki konstitusi tidak tertulis yang telah berevolusi secara bertahap. Dengan demikian, sebuah konstitusi dapat muncul sebagai hasil evolusi bertahap. Ketika monarki absolut runtuh di banyak negara di dunia, raja secara bertahap mengalihkan kekuasaannya kepada perwakilan rakyat. Seiring berjalannya waktu, pengalihan kekuasaan secara penuh kepada rakyat pun terjadi. Banyak undang-undang yang disahkan seperti Magna Carta, dan Bill of Rights di Inggris Raya yang memberikan bentuk akhir pada konstitusi Inggris. Konstitusi Inggris benar-benar terdiri dari kumpulan dokumen yang telah berkembang selama berabad-abad.

Banyak konstitusi yang lahir setelah revolusi besar. Ketika rakyat tidak puas dengan sistem politik yang ada, revolusi terjadi karena mungkin itulah satu-satunya cara untuk mengubah sistem tersebut. Setelah revolusi berhasil, para revolusioner menyusun sebuah konstitusi dan menyerahkannya kepada rakyat untuk disetujui. Konstitusi Uni Republik Sosialis Soviet pada tahun 1917, Konstitusi Mesir pada tahun 1954, dan Konstitusi Iran pada tahun 1979 adalah contoh konstitusi semacam itu.

Terakhir, sebagian besar konstitusi modern sengaja dibuat setelah pembentukan negara baru. Biasanya, setelah kemerdekaan, setiap negara akan membentuk majelis konstituante yang anggotanya dipilih

oleh rakyat. Tugas utamanya adalah menyusun sebuah konstitusi. Setelah konstitusi dirancang, rakyat diminta melalui referendum atau melalui perwakilan mereka di Majelis untuk menerima atau menolak rancangan konstitusi tersebut. Konstitusi Malaysia, Kanada, India, Bangladesh, dan Amerika Serikat adalah contoh konstitusi semacam itu.

2. Klasifikasi Konstitusi

Sebagian besar negara memiliki konstitusi. Namun, konstitusi-konstitusi tersebut berbeda dalam hal sifat dan metode amandemennya, yaitu metode untuk mengubah ketentuan-ketentuan tertentu dalam Konstitusi. Atas dasar ini, Konstitusi bisa tertulis atau tidak tertulis dan fleksibel atau kaku.³³

Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis

Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang sebagian besar prinsip-prinsip dasar organisasi pemerintahan dituliskan dalam sebuah dokumen atau serangkaian dokumen. Sebagai contoh, konstitusi Indonesia adalah konstitusi tertulis. Dalam setiap konstitusi ini, prinsip-prinsip dasar mengenai legislatif, eksekutif dan yudikatif dan kekuasaan mereka, hak-hak dasar warga negara dan bahkan prosedur untuk mengubah konstitusi ditulis dengan jelas dalam sebuah dokumen.

Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang sebagian besar aturan dan peraturan mendasar mengenai struktur pemerintahan atau hak-hak dasar dan kebebasan tidak tertulis dalam sebuah dokumen. Aturan-aturan tersebut mungkin tersebar di berbagai dokumen atau ditemukan dalam penggunaan, kebiasaan, tradisi, dan konvensi negara. Konstitusi Inggris adalah contoh yang mencolok dari jenis konstitusi ini. Banyak orang bingung dengan tidak adanya konstitusi tertulis di Inggris. Lalu, mengapa negara-negara merasa perlu untuk menyusun konstitusi formal? Ada tiga alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, konstitusi diperlukan ketika negara-negara membuat baru dengan institusi-institusi mereka, seperti ketika India,

³³ Ibid.

Pakistan, memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia kedua. Kedua, negara mungkin terdiri dari kelompok-kelompok orang yang berbeda satu sama lain karena ras, agama, atau bahasa. Untuk menggabungkan semua orang di dalam negara, setiap kelompok harus diberi jaminan bahwa identitasnya akan dipertahankan. Ketiga, di negara-negara besar, orang-orang di berbagai daerah mungkin memiliki kepentingan dan kebutuhan tertentu yang mereka rasa tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah di ibukota yang terpencil. Di sini, beberapa bentuk federalisme mungkin terjadi, yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian yang diatur dalam konstitusi tertulis. Tak satu pun dari pertimbangan ini yang berlaku untuk Inggris.

Akan tetapi, perlu disebutkan bahwa meskipun mungkin ada perbedaan yang jelas antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis, setiap konstitusi tertulis memiliki beberapa elemen tidak tertulis dan demikian pula setiap konstitusi tidak tertulis memiliki beberapa elemen tertulis. Sebagai contoh, meskipun konstitusi Amerika Serikat tertulis, organisasi partai politik, metode pencalonan dan pemilihan Presiden, dan prosedur Kongres bergantung pada penggunaan. Demikian pula, meskipun konstitusi Inggris tidak tertulis, Bill of Rights tahun 1689, Undang-Undang tahun 1919 dan 1949 yang membatasi kekuasaan House of Lords dan banyak ketentuan lainnya tertulis. Singkatnya, perbedaan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis paling-paling hanya dalam hal derajat, bukan jenis.

Dibandingkan dengan konstitusi tidak tertulis, konstitusi tertulis memiliki lebih banyak keuntungan. Konstitusi tertulis bersifat pasti, jelas, dan berbeda. Tidak mudah untuk melanggar konstitusi tertulis oleh pemerintah. Warga negara dapat membaca dan mengetahui ketentuan-ketentuan dalam konstitusi. Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah. Khususnya, dalam sistem federal, konstitusi harus tertulis karena pembagian kekuasaan antara pusat dan provinsi harus ditulis dengan jelas dalam sebuah dokumen. Di sisi lain, konstitusi yang tidak tertulis tidak pasti dan juga tidak dapat membedakan antara undang-undang dasar dan undang-undang biasa.

Konstitusi yang fleksibel juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jenis konstitusi ini bersifat dinamis. Konstitusi ini mampu memenuhi tuntutan-tuntutan baru masyarakat. Konstitusi ini dapat mengatasi perubahan sosial, ekonomi dan politik dengan cepat. Dengan kata lain, konstitusi yang fleksibel dapat beradaptasi dengan perubahan atau keadaan darurat. Revolusi dapat dihindari. Akan tetapi, pada saat yang sama, ada bahaya serius dalam konstitusi yang fleksibel. Jika terlalu fleksibel, maka pemerintah atau pihak mana pun yang berkuasa dapat mengubah konstitusi sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, konstitusi dapat menjadi tidak stabil, dan akibatnya, kemajuan sosial dan politik suatu negara dapat terpengaruh. Hak-hak dasar warga negara mungkin tidak dilindungi. Dalam sebuah federasi, konflik juga dapat terjadi antara pusat dan provinsi.

Membandingkan kelebihan dan kekurangan konstitusi yang kaku dan fleksibel, seseorang dapat dengan mudah mengatakan bahwa konstitusi terbaik adalah konstitusi yang merupakan campuran dari keduanya. Konstitusi haruslah sedemikian rupa sehingga meskipun memungkinkan adanya perubahan-perubahan, namun tetap menjamin bahwa perubahan-perubahan itu tidak akan dilakukan sampai ada kepastian bahwa perubahan-perubahan itu merupakan perbaikan-perbaikan yang nyata dan sesuai dengan perubahan yang nyata, dan bukan hanya perubahan yang bersifat sementara, dalam keinginan politik rakyat. Di sisi lain, prosedur amandemen seharusnya tidak terlalu rumit dan berlarut-larut.

Proses amandemen harus sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan waktu. Kemajuan dan pembangunan hanya dapat dijamin di negara-negara dengan konstitusi yang kaku dengan metode amandemen yang cukup mudah.

Sebuah konstitusi yang berguna dan membantu masyarakat berkembang dikenal sebagai konstitusi yang baik. Sebuah konstitusi yang baik harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, ketentuan-ketentuan dalam konstitusi harus pasti dan jelas maknanya untuk menghilangkan ambiguitas, perselisihan atau keraguan.³⁴

³⁴ Abidin, Zainal Ahmad, *Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2014.

Kedua, sebuah konstitusi harus tertulis. Sebuah konstitusi tertulis lebih sedikit menimbulkan kontroversi dibandingkan dengan kebiasaan dan praktik-praktik yang tidak tertulis.

Ketiga, sebuah konstitusi yang baik haruslah komprehensif. Konstitusi bisa singkat tetapi mencakup semua bidang pemerintahan. Prinsip-prinsip fundamental harus ditulis. Tidak perlu membahas setiap detail karena terlalu banyak detail akan menimbulkan kerumitan yang tidak perlu dan akan membuat konstitusi menjadi tidak relevan untuk situasi di masa depan.

Keempat, sebuah konstitusi yang baik harus memasukkan semua hak-hak dasar rakyat. Konstitusi juga harus menunjukkan cara-cara untuk melaksanakan hak-hak ini. Pada kenyataannya, sebagian besar konstitusi memiliki daftar panjang hak-hak dasar dan kebebasan warga negara. Pada saat yang sama, konstitusi juga memuat ketentuan-ketentuan untuk melanggar atau menanggukkan hak-hak fundamental dalam keadaan tertentu. Daftar hak-hak dasar dan kebebasan mungkin terlihat mengesankan di atas kertas, tetapi jika ada cara dan sarana untuk melanggar hak-hak warga negara oleh rezim, maka itu tidak dapat dianggap sebagai konstitusi yang baik. Banyak pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kapan sebuah pertemuan damai menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan memberlakukan pembatasan terhadap pers. Di Myanmar, pemerintah memiliki kontrol virtual atas semua media berita di negara tersebut. Konstitusi Jerman memberikan hak untuk memiliki properti pribadi, asalkan kepemilikan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Di negara-negara seperti Inggris, terdapat jaminan konstitusional untuk melindungi hak-hak sipil warga negara. Namun, di banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dan khususnya di dunia Muslim, terdapat pelanggaran berat terhadap hak-hak fundamental.

Kelima, konstitusi harus membatasi kekuasaan pemerintah. Keberadaan konstitusi tidak berarti bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh peraturan dan undang-undang. Tujuan membatasi kekuasaan pemerintah dan lembaga-lembaganya adalah untuk mencegah penumpukan kekuasaan dan untuk menjamin perlindungan

hak-hak warga negara dari campur tangan sewenang-wenang dari pegawai negeri. Sejumlah perangkat konstitusional dapat dibentuk untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Sistem saling memeriksa, kontrol yudisial, pembagian kekuasaan antara pusat dan provinsi, adalah beberapa perangkat konstitusional untuk membatasi kekuasaan pemerintah.

Keenam, sebuah konstitusi harus dapat diamendemen secara hukum tanpa terlalu banyak kesulitan. Sebuah konstitusi harus stabil dan pada saat yang sama fleksibel. Stabilitas dan fleksibilitas adalah dua syarat utama sebuah konstitusi yang baik. Oleh karena itu, sebuah konstitusi harus cukup fleksibel untuk mengizinkan perubahan ketika diperlukan; pada saat yang sama, modifikasinya tidak boleh terlalu mudah sehingga mengorbankan stabilitas. Prosedur untuk mengubah konstitusi harus dimaksudkan untuk mencegah perubahan konstitusi yang sewenang-wenang. Setiap konstitusi memiliki formula khusus untuk amandemen. Di Swiss, setiap amandemen terhadap konstitusi harus disetujui oleh para pemilih dalam sebuah referendum. Di Swedia, amandemen dapat dilakukan oleh badan legislatif nasional, tetapi badan legislatif tersebut harus dibubarkan diikuti dengan pemilihan umum untuk mendapatkan badan legislatif baru yang harus menyetujui amandemen sebelumnya dalam bentuk yang sama. Di Amerika Serikat, setiap amandemen yang disahkan oleh Kongres harus diratifikasi oleh tiga per empat badan legislatif negara bagian. Di Malaysia, setiap amandemen yang disahkan oleh parlemen harus disetujui oleh beberapa negeri bagian yang memiliki lima puluh persen dari total populasi.

Akhirnya, konstitusi yang baik harus sesuai dengan kondisi aktual negara. Konstitusi itu harus memenuhi cita-cita, harapan, dan aspirasi rakyat. Jika tidak, akan ada bahaya revolusi yang terus-menerus. Konstitusi harus menyediakan kerangka kerja untuk mencapai harapan dan aspirasi rakyat. Pemerintah harus semakin memenuhi harapan publik yang tinggi tentang apa yang menjadi kepentingan umum dalam lingkungan politik dan ekonomi yang terus berubah. Kebajikan publik didasarkan pada cita-cita demokratis,

di mana kesetaraan politik membutuhkan pertimbangan pendapat setiap orang, dan mencari kemaslahatan dan partisipasi publik.

3. Pemerintahan Konstitusional

Keberadaan sebuah konstitusi saja tidak menjamin bahwa sistem politik itu konstitusional. Tidak ada jaminan konstitusionalisme hanya karena ada konstitusi. Semua negara merdeka, baik yang demokratis maupun otoriter, menganggap pengesahan sebuah konstitusi sebagai persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan pengakuan penuh sebagai badan hukum di dunia. Afrika juga mengadopsi konstitusi selama rezim apartheid. Jadi, konstitusi sebagai selebar kertas tidak menjamin konstitusionalisme.

Konstitusionalisme adalah konsep modern yang menginginkan tatanan politik yang diatur oleh hukum dan peraturan. Ini berarti supremasi hukum dan bukan individu. Hal ini dapat diidentifikasi dengan sistem kekuasaan yang terbagi. Seperti yang ditunjukkan oleh Friedrich, konstitusionalisme dengan membagi kekuasaan memberikan sistem pembatasan yang efektif atas tindakan pemerintah. Konstitusionalisme, dengan demikian, berarti keberadaan konstitusi di suatu negara yang tujuannya untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak yang diperintah, dan mendefinisikan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

Pemerintahan konstitusional berarti pemerintahan yang terbatas. Dengan kata lain, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh aturan-aturan konstitusional. Kekuasaan pemerintah dibatasi dan prosedurnya ditetapkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahan konstitusional juga disebut pemerintahan terbatas. Sebagai contoh, Konstitusi Amerika Serikat melarang Presiden, bahkan selama masa perang, untuk menyita atau menasionalisasi industri tanpa persetujuan Kongres

Di beberapa negara memiliki lebih dari beberapa konstitusi tidak satu pun yang masih aktif. Konstitusi-konstitusi ini menjadi kewajiban bagi para penguasa teokratis, dan akibatnya, banyak di antaranya ditangguhkan atau ditulis ulang sesuai keinginan rezim. Kekuatan

rezim untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan konstitusional menjadi tidak dapat diatasi dan praktik mengesampingkan konstitusi untuk memenuhi kebutuhan rezim menjadi praktik yang umum. Oleh karena itu, rezim-rezim tersebut tidak dapat dianggap sebagai pemerintahan konstitusional hanya karena mereka memiliki konstitusi. Sebuah pemerintahan konstitusional harus memiliki ketentuan-ketentuan tentang: kebebasan fundamental jaminan konstitusional atas kebebasan hati nurani, berekspresi, pers, berkumpul dan berserikat; hak-hak demokratis misalnya, semua orang dewasa memiliki hak untuk memilih); hak-hak mobilitas kebebasan untuk berpindah-pindah di dalam dan di luar negeri; hak-hak hukum orang-orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan; hak-hak kesetaraan hukum tanpa memandang jenis kelamin, agama, warna kulit, dan ras; dan hak-hak untuk mendapatkan pendidikan orang-orang harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan minimal sampai tinggi.

D. Rangkuman Materi

Secara historis, ide pemerintahan konstitusional tumbuh dari penyalahgunaan kekuasaan oleh raja-raja di Eropa pada abad lima belas dan enam belas. Konstitusionalisme adalah seruan rakyat untuk menyingkirkan monarki absolut. Individu harus dilindungi dari kontrol pemerintah yang berlebihan. Pemerintah adalah kejahatan yang diperlukan. Manusia menerima pemerintahan yang terbatas untuk menyelamatkan diri dari anarki. Jatuhnya monarki absolut di Eropa menyebabkan munculnya pemerintahan terbatas. Namun, pada abad dua puluh, pertumbuhan pesat jumlah negara bangsa di negara berkembang yang mengadopsi rezim otoriter menantang gagasan pemerintahan terbatas yang dilindungi oleh konstitusi. Selain itu, ekspansi yang cepat dari kegiatan pemerintah memungkinkan banyak pemerintah mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, ada kekhawatiran global terhadap pelanggaran hak asasi manusia di banyak negara. Oleh karena itu, konstitusionalisme telah mendapatkan minat akademis yang baru. Konstitusionalisme adalah satu-satunya cara untuk melindungi hak-hak rakyat. Konstitusionalisme menegaskan bahwa tidak ada pejabat publik yang boleh menggunakan wewenang tanpa batas atau memerintah tanpa pertanggungjawaban

kepada rakyat. Individu harus dijamin dengan hak-hak dan kebebasan tertentu yang tidak dapat dicabut.

Konstitusionalisme sangat kuat di beberapa negara maju dan lemah di beberapa negara lainnya. Hal ini kuat di Inggris, tetapi lemah di Perancis. Demikian pula, konstitusionalisme kuat di beberapa negara berkembang seperti India dan Bangladesh, tetapi lemah di Pakistan dan Cina dan di banyak negara lainnya. Di Inggris, terdapat tradisi panjang yang menghormati supremasi hukum dan perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Namun, bahkan di negara-negara ini selama keadaan darurat, konstitusi dapat ditangguhkan. Inggris Raya tidak mengadakan pemilihan umum selama Perang Dunia kedua. Demikian pula, India memberlakukan aturan darurat dan menangguhkan hak-hak fundamental berkali-kali setiap kali terjadi masalah Provinsi Timur Laut, dan Benggala Barat. Banyak negara, meskipun merupakan negara konstitusional, sedikit lebih lemah dalam mengamati konstitusionalisme karena undang-undang pemilihan umum, khususnya, dimanipulasi untuk menguntungkan partai yang sedang berkuasa. Selain itu, dapat dipahami bahwa partai yang berkuasa akan memanipulasi laporan berita di televisi dan radio publik untuk meningkatkan peluang pemilihannya, dan kedutaan negara di luar negeri sering mencoba memanipulasi pemungutan suara tanpa kehadiran untuk membantu partai yang berkuasa. Akhirnya, di samping manipulasi terhadap aturan-aturan politik elektoral ini, beberapa kali pada abad dua puluh para pemimpin mencoba merebut kekuasaan; beberapa kali mereka berhasil. Demikian pula di Cina dan Korea Utara, lebih dari satu juta orang terbunuh dan sekali lagi beberapa ratus orang terbunuh.

E. Soal Latihan:

1. Jelaskan definisi konstitusi.
2. Bagaimana metode penetapan konstitusi?
3. Bagaimana mengupayakan konstitusi yang baik ?
4. Bagaimana klasifikasi konstitusi?
5. Bagaimana konsensus pakar memandang pemerintahan konstitusional?

F. Sumber Bacaan

- Abidin, Zainal Ahmad, *Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta:Pustaka AlKautsar, 2014.
- Albert, Richard. *Constitutional Amendments. Making, Breaking, and Changing Constitution*. Oxford University Press. 2019.
- Ali, Muhammad Mumtaz. *Issues in Islamization of Human Knowledge Civilization Building Discourse of Contemporary Muslim Thinkers*. IIUM Press. 2014.
- AlMawardi, I. (2014). *Al Ahkam Al Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi: Darul Falah.
- Almond, Gabriel Abraham. *A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science*. Newbury Park, Calif.: Sage. 1990.

BAB 7

Lembaga-lembaga Pemerintahan

A. Deskripsi Singkat

Bab ini menguraikan berbagai teori tentang lembaga-lembaga pemerintahan, mendefinisikannya, dan menjelaskan fitur-fitur esensialnya.

B. Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami Lembaga pemerintahan
2. Mahasiswa mampu menjelaskan Fitur lembaga pemerintahan

C. Penyajian Materi

Pendahuluan

Sejak zaman Aristoteles, secara umum telah diterima bahwa kekuasaan politik harus dibagi di antara tiga cabang pemerintahan. Satu cabang akan memberlakukan aturan umum masyarakat dalam bentuk undang-undang yang akan dijalankan atau diimplementasikan oleh cabang lain dan cabang ketiga akan melihat apakah undang-undang tersebut dapat diterapkan dalam situasi tertentu dan juga akan menentukan apakah eksekutif telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan undang-undang. Cabang pertama disebut Legislatif, cabang kedua disebut Eksekutif, dan cabang ketiga disebut Yudikatif.³⁵

³⁵ Boulding, Kenneth E. *Tiga Wajah Kekuasaan*. Newbury Park, CA: Sage, 1989.

1. Badan Legislatif

Badan legislatif tidak diragukan lagi menempati posisi tertinggi di antara ketiga badan pemerintahan. Fungsi-fungsi eksekutif dan yudikatif didasarkan pada undang-undang yang disahkan oleh legislatif. Hukum harus ada sebelum keputusan dapat diberikan atau eksekutif dapat mengambil tindakan. Nelson W. Polsby berpendapat bahwa badan legislatif berbeda dengan eksekutif dan yudikatif dalam beberapa hal. Badan legislatif adalah badan resmi pemerintah; beranggotakan banyak orang; dipilih langsung oleh warga negara; anggotanya secara formal setara; mereka mengambil keputusan dengan berunding mengenai alternatif-alternatif; dan mereka mendaftarkan keputusan dengan menghitung suara para anggotanya. Namun, badan legislatif merupakan ciptaan yang relatif baru di antara ketiga organ tersebut.

Di masa lalu, raja adalah satu-satunya eksekutif, legislatif, dan hakim. Seiring berjalannya waktu, lembaga legislatif lahir. Raja Inggris membentuk Dewan Agung yang terdiri dari para ksatria, burgess, dan anggota klerus. Dewan ini bertugas memberikan nasihat kepada Raja dan akhirnya badan penasihat ini menjadi House of Commons dan majelis para bangsawan menjadi House of Lords. Demikian pula, di Prancis, Kaisar menciptakan lembaga Estates General yang terdiri dari para bangsawan, ulama, dan rakyat jelata yang akhirnya menjadi Majelis Nasional. Selama masa monarki, kekuasaan mereka terbatas tetapi secara bertahap setelah jatuhnya monarki absolut, lembaga legislatif telah menduduki posisi yang paling signifikan. Semua negara lain di dunia juga mengikuti model Eropa. Sebagian besar negara di dunia saat ini memiliki beberapa bentuk badan legislatif dengan pengecualian beberapa negara seperti Arab Saudi dan Oman. Hampir semua negara merasakan perlunya majelis legislatif baik sebagai instrumen legitimasi rezim atau benar-benar badan pembuat undang-undang yang efektif.

Organisasi Badan Legislatif: Unicameralisme dan Bikameralisme

Struktur badan legislatif bervariasi dari satu negara ke negara lain. Bisa saja berbentuk unikameral atau bikameral. Ketika hanya

ada satu majelis dalam badan legislatif, sistem organisasi ini disebut unikameral. Namun, ketika badan legislatif diorganisir menjadi dua majelis, maka sistem ini disebut sistem bikameral. Norwegia, Bangladesh, Selandia Baru, Finlandia, dan Denmark memiliki sistem unikameral, sedangkan Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris memiliki sistem bikameral. Hampir dua pertiga badan legislatif dunia saat ini bersistem unikameral. Pada abad delapan belas, sistem unikameral disukai karena diyakini bahwa hukum adalah kehendak rakyat dan rakyat tidak dapat memiliki dua kehendak yang berbeda untuk satu hal yang sama.³⁶ Namun, keyakinan ini tidak dapat bertahan lama. Segera disadari bahwa kamar tunggal itu tidak seimbang. Opini publik segera mendukung bilateralisme. Mayoritas negara-negara Eropa memilih dua kamar. Dengan demikian, sebelum Perang Dunia kedua, sebagian besar negara memiliki badan legislatif bikameral. Namun, setelah Perang Dunia kedua, sebagian besar negara merdeka yang baru muncul di Asia dan Afrika memilih badan legislatif unikameral.

Metode yang biasanya digunakan untuk badan legislatif unikameral atau majelis rendah dalam badan legislatif bikameral dalam sistem demokrasi hampir seragam dan sederhana. Para anggota dewan dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan didasarkan pada prinsip hak pilih orang dewasa yang universal. Namun, dalam badan legislatif bikameral, komposisi majelis kedua atau majelis tinggi bervariasi dari satu negara ke negara lain. Dalam kebanyakan kasus, para anggotanya dicalonkan atau di beberapa negara, mereka dipilih secara langsung atau tidak langsung. Di Inggris, keanggotaan House of Lords bersifat turun-temurun. Di Indonesia, mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Di Malaysia, mereka sebagian dipilih secara tidak langsung dan sebagian lagi ditunjuk oleh Kepala Negara. Di India, mereka dipilih secara tidak langsung. Banyak pakar yang keberatan dengan prinsip turun-temurun atau dicalonkan seperti di Inggris dan Kanada.

³⁶ Zubaidi, Achmad dan Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2007.

Baik badan legislatif unikameral maupun bikameral memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada aturan yang baku untuk menjelaskan alasan memilih badan legislatif unikameral atau bikameral oleh negara tertentu. Itu tergantung pada kebutuhan, tujuan dan kemampuan sebuah sistem politik. Sementara Indonesia telah mengadopsi badan legislatif unikameral untuk kontrol politik yang terpusat, Bangladesh memilih hal yang sama tetapi untuk alasan ekonomi. Swedia memilih sistem unikameral pada tahun 1971, sementara Pakistan dan Spanyol kembali ke sistem bikameral pada tahun 1973 dan 1977. Namun, secara umum, ada sejumlah alasan mengapa menguntungkan bagi sebuah sistem politik untuk mengadopsi sistem unikameralisme atau bilateralisme. Keuntungan komparatif badan legislatif unikameral dan bikameral.

Contoh, untuk Unikameral lainnya memungkinkan tindakan yang cepat sedangkan Bikameral dapat memberikan pemeriksaan terhadap legislasi yang tergesa-gesa dan tidak dipertimbangkan dengan baik. Unikameral dapat menghindari terhalangnya kehendak rakyat sedangkan bikameral dapat menghindari despotism. Bikameral memungkinkan kejelasan tanggung jawab cabinet sedangkan bikameral membantu opini publik untuk mengkristal dengan melakukan penundaan. Unikameral dapat mengurangi duplikasi sedangkan bikameral merefleksikan kehendak rakyat.

Unikameral menghindari kemungkinan terjadinya konflik rumah di antara dua kamar sedangkan bikameral membantu membagi beban kerja. Unikameral lainnya lebih murah sedangkan bikameral memudahkan melakukan revisi yang berguna dan cerma. Unikameral dipilih secara populer oleh rakyat sedangkan bikameral memungkinkan representasi dari berbagai kelas dan kelompok. Unikameral dalam satu rumah mempertahankan keseragaman di negara sedangkan bikameral memperhitungkan kebutuhan mereka.

Kelebihan-kelebihan Badan Legislatif Bikameral

Sistem badan legislatif bikameral dipertahankan dengan berbagai alasan. Pertama, majelis pertama yang dipilih secara populer mungkin terlalu tergesa-gesa dan perlu diperiksa oleh badan yang tidak terlalu

impulsif dan lebih berpengalaman. Majelis kedua berfungsi sebagai pemeriksa undang-undang yang tergesa-gesa, terburu-buru, dan tidak dipertimbangkan dengan baik. Dalam meloloskan undang-undang, majelis pertama mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan rancangan undang-undang tersebut secara rinci, atau mungkin disahkan berdasarkan garis partai. Kamar kedua berdiri melawan potensi bahaya ini. Kamar ini meninjau RUU secara menyeluruh dan, jika perlu, dapat mengirimkannya ke majelis pertama untuk dipertimbangkan kembali. Negara terselamatkan dari legislasi yang tergesa-gesa atau kediktatoran partai.³⁷

Kedua, kamar kedua sangat penting bagi keamanan kebebasan. Satu kamar saja bisa menjadi lalim. Pakar menunjukkan, perlunya dua kamar didasarkan pada keyakinan bahwa kecenderungan bawaan sebuah majelis adalah untuk menjadi penuh kebencian, tirani, dan korup, yang perlu dicek dengan adanya majelis lain yang memiliki otoritas yang sama. Jika tidak, kehidupan dan kebebasan rakyat akan terancam. Keberadaan rumah kedua adalah jaminan kebebasan dan perlindungan terhadap despotisme satu rumah.

Ketiga, memang benar bahwa majelis kedua memberikan penundaan dengan menambahkan satu langkah lagi dalam proses pengesahan RUU. Namun, penundaan ini bisa menjadi berkah karena memberikan kesempatan kepada publik untuk mendiskusikan suatu masalah dan merumuskan pendapat mereka tentang masalah tersebut. Bahkan, ini merupakan keuntungan yang cukup besar karena keputusan dewan yang dipilih secara populer harus dipikirkan kembali. Jeda waktu ini mendidik opini publik, dan membuat pemerintah rentan terhadap reaksi publik.

Keempat, sistem legislatif bikameral adalah barometer yang tepat untuk opini publik. Sebelum masa jabatannya berakhir, satu kamar bisa saja tidak selaras dengan opini publik. Setelah terpilih, para anggota tidak boleh meminta keputusan dari rakyat atas pertanyaan apa pun. Namun, jika ada dua kamar dan para anggotanya dipilih pada dua waktu yang berbeda, akan ada aliran opini publik yang konstan. Badan legislatif akan mencerminkan kehendak rakyat setiap saat.

³⁷ Ibid.

Kelima, saat ini di sebagian besar negara, majelis rendah atau *lower house* yang terpilih dibanjiri pekerjaan. Mereka harus berurusan dengan isu-isu besar yang sering kali rumit dan terspesialisasi. Akibatnya, satu kamar dibebani dengan begitu banyak beban kerja sehingga tidak bisa menangani semua masalah. Dalam situasi ini, majelis kedua dapat membebaskan majelis pertama dari banyak tugas berat sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang penting.

Keenam, majelis pertama terdiri dari wakil-wakil yang terpilih. Umumnya, pemilihan umum adalah urusan yang sulit dan merepotkan, dan akibatnya, para cendekiawan, akademisi, atau intelektual tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Ada juga orang-orang berbakat yang malu mengikuti pemilu. Namun, mereka dapat menyumbangkan pengetahuan mereka kepada bangsa. Selain itu, mungkin ada seorang negarawan yang memiliki semangat independen dan kepribadian luar biasa yang gagal mendapatkan suara rakyat. Dalam kedua kasus tersebut, bangsa ini akan kehilangan orang-orang bijak ini. Orang-orang seperti itu bisa mendapatkan kursi di kamar kedua baik melalui kerja sama terbatas atau pencalonan. Itulah yang membuat perlunya kamar kedua.

Ketujuh, kamar kedua menyediakan sarana yang nyaman untuk memberikan perwakilan bagi berbagai kelas dan kepentingan dan menjamin representasi minoritas, kelompok-kelompok profesional dan kejuruan. Semua kelas atau kepentingan harus diberi kesempatan untuk mewakili mereka di badan legislatif. Jika tidak, keluhan-keluhan dari beberapa kelompok tidak akan tertangani. Jika hanya ada satu majelis, semua kelas perwakilan mungkin tidak akan terpilih. Jadi, beberapa kelas akan tetap tidak terwakili. Namun, jika ada kamar kedua, ini menyediakan sarana representasi bagi semua golongan masyarakat.

Akhirnya, sistem bikameral sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan federal. Federalisme berarti kombinasi kekuatan sentripetal dan sentrifugal. Majelis pertama mewakili bangsa secara keseluruhan. Dalam hal ini, majelis kedua bisa mewakili provinsi. Hal ini diperlukan untuk melindungi unit-unit yang lebih kecil dari

dominasi unit yang lebih besar. Selain itu, wakil-wakil dari unit-unit itu bisa berbicara mewakili provinsi mereka di badan legislatif nasional. Bikameralisme, dengan demikian, menjamin semangat kompromi di antara berbagai provinsi dalam sebuah federasi.

Di beberapa negara, badan legislatif bikameral sangat cocok untuk memberi saran kepada majelis rendah mengenai kebutuhan provinsi. Di Jerman, majelis tinggi yang terdiri atas anggota-anggota dari berbagai provinsi, memberi saran kepada majelis rendah mengenai dampak-dampak yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan dari sebuah undang-undang tertentu di berbagai provinsi. Demikian pula, di India, majelis tinggi yang terdiri dari anggota-anggota dari negara-negara bagian memberikan saran kepada majelis rendah mengenai efek-efek yang mungkin timbul dari sebuah legislasi nasional di tingkat provinsi. Di negara multibahasa atau multietnis seperti Indonesia, bikameralisme sangat efektif karena perwakilan di majelis tinggi memberikan representasi politik kepada berbagai kelompok di tingkat nasional.

Manfaat Badan Legislatif Unikameral

Badan legislatif unikameral dipertahankan karena beberapa alasan. Pertama, sistem ini memungkinkan tindakan yang cepat. Sistem bikameral membuat proses pembuatan undang-undang menjadi sangat kompleks dan menciptakan penundaan yang tidak perlu dalam pengesahan undang-undang. Hal ini mungkin tidak berbahaya dalam keadaan normal, tetapi dalam situasi darurat, kamar kedua dapat menciptakan penundaan yang tidak diinginkan dalam pengesahan undang-undang.³⁸

Kedua, badan legislatif unikameral biasanya bekerja sesuai dengan kehendak rakyat karena mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam banyak kasus, kamar kedua mewakili unsur-unsur konservatif. Kadang-kadang, mereka menjadi batu sandungan bagi banyak reformasi sosial yang sungguh-sungguh diinginkan oleh rakyat.

³⁸ Lijphart, Arend. *Pattern of Democracy*. Yale University Press. 2012.

Ketiga, tidak benar bahwa dalam badan legislatif unikameral tidak ada pengawasan terhadap majelis pertama atau tidak ada cara untuk merevisi undang-undang yang dibuat dengan tergesa-gesa dan tidak dipertimbangkan dengan baik. Legislasi modern tidak secara tiba-tiba menemukan tempatnya di parlemen. Hampir setiap rancangan undang-undang melewati diskusi dan perdebatan yang menyeluruh. Revisi yang diperlukan dilakukan oleh pemerintah melalui konsultasi sebelumnya.

Keempat, sebagian besar konsultasi di kamar kedua mengulangi argumen yang sudah disampaikan di kamar pertama. Terdapat duplikasi upaya karena kedua kamar berusaha untuk mendapatkan informasi yang sama dengan memperdebatkan pertanyaan yang sama. Hal ini merupakan pemborosan waktu, uang, dan energi. Dikatakan bahwa jika kamar kedua setuju dengan kamar pertama, itu berlebihan; jika tidak setuju, ini menjengkelkan.

Kelima, berbeda dengan sistem unikameral, sistem bikameral rumit dan tanggung jawabnya terbagi-bagi. Ketika kedua kamar dipilih dan memiliki kekuatan yang sama, konflik tidak dapat dihindari. Khususnya, jika mayoritas anggota kedua majelis berasal dari dua partai, hasil yang tak terelakkan mungkin adalah kebuntuan dalam pengesahan undang-undang. Bahkan jika keduanya tidak terpilih, ada kemungkinan kecemburuan dan persaingan antara kedua majelis. Dengan demikian, persaingan antara dua rumah menjadi perhatian bersama.

Keenam, sistem unikameral lebih murah. Sistem bikameral menimbulkan biaya yang besar karena adanya dualisme dalam mesin legislatif. Negara-negara miskin tidak mampu menanggung pengeluaran ini. Untuk negara kecil, kesatuan, dan miskin, sistem unikameral adalah yang terbaik.

Ketujuh, untuk representasi berbagai kelas dan kelompok dalam badan legislatif, tidak perlu ada kamar kedua. Perlindungan semacam itu bisa diberikan melalui perlindungan konstitusional dan dengan penyediaan peradilan yang independen.

Kedelapan, juga tidak benar bahwa sistem bikameral sangat penting bagi sebuah federasi. Di zaman modern, para wakil rakyat dipilih berdasarkan garis partai, bukan berdasarkan garis negara bagian. Misalnya, di Amerika Serikat, wakil-wakil kedua majelis dipilih berdasarkan garis partai. Jadi, pada akhirnya hal itu tidak banyak berpengaruh bagi provinsi-provinsi. Yang paling penting dalam sebuah federasi adalah distribusi kekuasaan yang harus dijamin oleh konstitusi.

Terakhir, tidak ada suara bulat mengenai organisasi kamar kedua. Di negara-negara yang memiliki dua kamar, ada banyak diskusi tentang pembentukan kembali kamar kedua. Sebagai contoh, ada banyak diskusi tentang komposisi Senat. Keberadaan Senat selalu dipertanyakan.

Terlepas dari kritik terhadap sistem bikameral dan dukungan terhadap sistem unikameral, bikameralisme lebih populer jika suatu negara mampu menerapkannya. Sistem unikameral jelas lebih murah tetapi diinginkan untuk memiliki kamar kedua meskipun mahal karena di zaman modern ini masalah-masalahnya sangat kompleks dan memerlukan analisis yang menyeluruh. Saat ini, yang tampaknya penting bukanlah penghapusan kamar kedua melainkan reformasi dan reorganisasi.

Ukuran dan Masa Jabatan Badan Legislatif

Ukuran dan masa jabatan badan legislatif bervariasi dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Ukurannya dalam banyak kasus ditentukan oleh representasi konstituensi. Beberapa negara menggunakan metode representasi fungsional di mana orang-orang dipilih berdasarkan pekerjaan mereka. Misalnya, di Irlandia, di antara puluhan anggota, beberapa orang dipilih dari panel khusus yang terdiri atas para kandidat yang mewakili pelayanan publik dan kepentingan-kepentingan lain, seperti tenaga kerja, perbankan, industri, pertanian, kesenian dan bahasa, dan enam orang dipilih dari universitas. Yang lainnya dinominasikan oleh Perdana Menteri. Dalam kebanyakan kasus, ukurannya ditentukan oleh populasi atau wilayah. Dengan kata lain, total populasi dibagi rata dengan jumlah

tertentu. Atau seluruh wilayah dibagi rata dengan jumlah tertentu. Di Inggris, jumlah kursi di House of Commons ditentukan oleh jumlah penduduk, diputuskan oleh komisi independen beranggotakan tiga orang setiap sepuluh tahun sekali jika belum berubah. Berdasarkan laporan sensus, jumlah anggota House of Commons diputuskan menjadi ratusan orang pada tahun sembilan puluhan. Rata-rata, setiap anggota parlemen mewakili hampir puluhan ribu orang. Banyak negara dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit di negara-negara berkembang memiliki lebih sedikit kursi di parlemen mereka. Beberapa negara Afrika masing-masing memiliki puluhan kursi di majelis nasional mereka. Di sisi lain, negara-negara berpenduduk lebih banyak seperti Cina maupun Indonesia masing-masing memiliki ribuan dan ratusan anggota di badan legislatif mereka.

Seperti halnya ukuran, lamanya masa jabatan legislatif DPR terpilih juga berbeda di setiap negara. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memiliki masa jabatan empat tahun. Australia, Selandia Baru, dan Meksiko memiliki badan legislatif dengan masa jabatan tiga tahun. Di Indonesia, India, Bangladesh, Prancis, Italia, Inggris, para anggotanya dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Dalam banyak sistem politik, majelis tinggi tidak memiliki masa jabatan yang sama karena sistem perwakilan yang berbeda dan juga metode yang berbeda dalam memilih wakil-wakil untuk majelis tinggi dan majelis rendah. Di beberapa negara, anggota majelis tinggi diangkat seumur hidup. Di Jamaika, mereka ditunjuk untuk masa jabatan terbatas. Di Belanda, mereka dipilih secara tidak langsung untuk masa jabatan tetap. Namun, di Amerika Serikat mereka dipilih secara langsung oleh rakyat.

Fungsi-fungsi Badan Legislatif

Secara umum, ada persepsi umum bahwa fungsi badan legislatif adalah membuat undang-undang. Tetapi dalam praktiknya, badan legislatif modern lebih dari sekadar badan pembuat undang-undang. Badan ini harus menjalankan berbagai fungsi termasuk: pertama Pembuatan undang-undang; kedua Perwakilan; ketiga Pengawasan;

keempat Keuangan; kelima Pemilu; keenam Peradilan; ketujuh Penyelidikan dan interpelasi; dan delapan Amandemen Konstitusi.³⁹

Pembuatan Undang-Undang

Fungsi utama badan legislatif, sesuai dengan namanya, adalah membuat undang-undang atau mengubah atau mengganti undang-undang yang lama. Dengan kata lain, badan legislatif membuat undang-undang. Dalam sebagian besar sistem modern, undang-undang diperkenalkan dalam bentuk rancangan undang-undang oleh seorang menteri atau anggota badan legislatif. Karena dalam sistem parlementer, partai yang memiliki mayoritas di parlemen membentuk kabinet, maka setiap rancangan undang-undang dari seorang menteri harus mendapat persetujuan dari parlemen. Namun, badan legislatif, sebagai sebuah badan, membahas dan memperdebatkan RUU yang melewati beberapa tahap pembacaan dan komite sebelum menjadi undang-undang. Bahkan dalam sistem presidensial, seperti di Amerika Serikat, inisiasi undang-undang berasal dari cabang eksekutif di mana salah satu lembaga membuat rancangan undang-undang dan kemudian memperkenalkan rancangan undang-undang tersebut di Kongres. Otoritas terakhir pembuatan undang-undang, tentu saja, terletak di tangan legislatif. Di Amerika Serikat, Kongres hampir semua RUU yang dipertimbangkan berasal dari eksekutif. Salah satu dari banyak lembaga menyusun proposal dan meminta anggota yang simpatik untuk memperkenalkan RUU tersebut di Kongres. Di Indonesia, semua undang-undang yang penting dan kontroversial berasal dari pemerintah, meskipun ada juga yang berasal dari swasta. Hal yang sama juga terjadi di tempat lain. Rancangan undang-undang juga dapat diperkenalkan oleh anggota swasta. Namun, peluang keberhasilannya sangat kecil karena urgensi RUU dari pemerintah. Karena alasan ini, beberapa negara bahkan tidak mengizinkan anggota perorangan untuk mengajukan rancangan undang-undang mereka sendiri. Sebagai contoh, di parlemen Jerman, anggota perorangan yang berniat untuk memperkenalkan sebuah RUU harus membentuk fraksi, yaitu kelompok yang terdiri dari setidaknya dua belas anggota sebelum RUU tersebut dapat diperkenalkan. Hal ini memastikan

³⁹ Ibid.

adanya dukungan untuk RUU tersebut. Di beberapa negara, seperti di Prancis dan Belgia, undang-undang dasar konstitusional ditempatkan di luar kompetensi hukum badan legislatif. Sebagian besar badan legislatif memiliki ketentuan untuk menutup pembahasan RUU apa pun melalui metode penutupan, dan penundaan. Ketentuan-ketentuan ini tertanam kuat di beberapa konstitusi seperti di Perancis, tetapi di beberapa negara lain seperti di Norwegia, Denmark, Swedia, dan Belanda, tidak ada ketentuan seperti itu.

Representasi

Secara umum, badan legislatif di semua negara demokratis dianggap sebagai forum utama opini publik. Badan legislatif mewakili rakyat dalam pemerintahan. Menurut Pitkin, representasi berarti “menghadirkan sesuatu yang tidak ada tetapi tidak secara harfiah hadir. Ia harus dihadirkan secara tidak langsung, melalui perantara; ia harus dihadirkan dalam arti tertentu, namun tetap tidak hadir secara harfiah. Inilah yang dilakukan oleh badan legislatif dalam sistem demokrasi. Para anggota badan legislatif adalah perwakilan dari masyarakat. Mereka mewakili dan menyuarakan keluhan masyarakat. Para anggota sering mengunjungi konstituen mereka, daerah pemilihan, untuk mendengarkan orang-orang dari daerah pemilihannya dan membawa isu-isu dan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke lantai legislatif. Di Indonesia, setiap perwakilan mewakili hampir puluhan ribu orang. Banyak sekali orang yang tidak dapat berbicara dengan pemerintah secara langsung. Badan legislatif merupakan kompromi politik dari demokrasi langsung dan tidak langsung di negara-negara modern yang kompleks. Dalam badan legislatif demokratis modern, perwakilan didasarkan pada tiga prinsip: otorisasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Otorisasi berarti bahwa seorang wakil adalah orang yang diberi hak oleh konstituen untuk bertindak atas namanya. Akuntabilitas berarti bahwa para wakil bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemilihan umum, inisiatif, referendum, petisi, penarikan kembali, jajak pendapat, dan pemungutan suara di badan legislatif. Tanggung jawab adalah cara perwakilan bertindak. Tanggung jawab para anggota adalah bertindak demi kepentingan terbaik konstituennya.

Pengawasan

Peningkatan kekuasaan dan kewenangan eksekutif secara bertahap telah menyebabkan badan legislatif memperluas kewenangannya untuk memeriksa dan mengawasi cabang pemerintahan eksekutif. Dalam sistem demokrasi modern, badan legislatif mengawasi pemerintahan dengan tajam dan kritis. Mungkin benar bahwa legislasi diprakarsai oleh eksekutif, tetapi legislatif memiliki kekuatan potensial untuk menolak RUU tersebut. Lebih penting lagi, bahkan jika meloloskan RUU tersebut, legislatif memiliki kekuatan untuk memantau kegiatan pemerintah untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut diimplementasikan dengan benar dan efektif. Jam bertanya ada di setiap sistem politik. Meskipun mungkin saja menteri mendapatkan dukungan dari mayoritas di badan legislatif karena hubungan dengan partai, para menteri harus sangat berhati-hati dalam menjawab pertanyaan. Secara khusus, partai oposisi dapat mengajukan pertanyaan dengan cara yang sangat buruk dan jika menteri gagal menjawab dengan memuaskan, hal ini dapat merugikan partai yang berkuasa pada pemilu berikutnya. Di Jepang, partai-partai oposisi dapat mengajukan pertanyaan kepada para menteri sebelum diajukan ke sidang. Pihak oposisi dapat mempermalukan, menunda, atau bahkan mengubah rancangan undang-undang yang disponsori pemerintah. Sebelum pemilihan umum tahun 2003 yang diadakan pada bulan November, Perdana Menterinya saat itu berjanji untuk mengirim pasukan Jepang ke Irak, namun pihak oposisi dengan keras menentang keputusan tersebut. Akibatnya, Partai Demokratik Jepang yang beroposisi mendapat suara besar di daerah perkotaan. Partai ini bahkan menandingi di beberapa kubu tradisional pedesaan, menggarisbawahi ketidakpuasan pemilih dan gelombang dukungan untuk perubahan. Oleh karena itu, setelah pemilu, meskipun PM terpilih, ia membatalkan gagasan untuk mengirim pasukan ke Irak. Para anggota kabinet bertanggung jawab setiap saat kepada badan legislatif dalam sistem parlementer. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pemerintahan dalam sistem parlementer seperti di Malaysia. Hal ini sering terjadi di Italia. Namun, di beberapa negara hal ini tidak terjadi dengan cara yang sama. Sebagai contoh, di Swiss,

pemerintah tidak dapat dijatuhkan oleh pemungutan suara yang tidak menguntungkan di badan legislatif, namun konflik di badan legislatif dapat menyebabkan perubahan kebijakan pemerintah. Bahkan dalam sistem presidensial seperti di Amerika Serikat, penunjukan menteri luar negeri memerlukan persetujuan Senat.

Keuangan

Badan legislatif juga menjalankan fungsi-fungsi keuangan tertentu. Fakta dari demokrasi perwakilan adalah kontrol dan regulasi keuangan nasional oleh badan legislatif. Secara umum, saat ini diakui di semua negara bahwa tidak ada pajak yang boleh dipungut atau pengeluaran yang disahkan tanpa persetujuan dari perwakilan rakyat. Teori tidak ada pajak tanpa perwakilan mengakui supremasi badan legislatif dalam meningkatkan pendapatan dan memberikan pengeluaran. Sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah dikontrol dan ditentukan oleh badan legislatif. Fungsi keuangan utama badan legislatif adalah penyajian, pertimbangan, dan pengesahan anggaran.

Di setiap sistem, anggaran membutuhkan persetujuan dari badan legislatif. Di Amerika Serikat, perang hanya dapat dideklarasikan dengan persetujuan Senat karena perang pada akhirnya akan menghabiskan banyak uang. Namun, kurangnya waktu dan informasi khusus menghambat kontrol keuangan yang efektif. Di Malaysia, auditor yang merupakan pegawai parlemen melakukan audit atas pengeluaran pemerintah. Laporan tersebut memastikan bahwa uang dibelanjakan dengan benar. Tentu saja, di beberapa sistem politik, seperti di Perancis dan Jerman, eksekutif dapat melangkahi atau mengesampingkan persetujuan legislatif atas anggaran dengan perintah eksekutif.

Pemilihan Umum

Di beberapa negara, badan legislatif bertindak sebagai electoral college untuk memilih pimpinan eksekutif, yaitu Kepala Negara. Di India, anggota-anggota terpilih dari kedua majelis parlemen membentuk sebuah lembaga elektoral untuk memilih Presiden

negara tersebut. Badan legislatif Swiss tidak hanya memilih Dewan Eksekutif tetapi juga para hakim Mahkamah Agung. Di Amerika Serikat, Kongres bertemu dalam sidang gabungan setiap empat tahun sekali untuk menghitung perolehan suara elektoral bagi Presiden dan Wakil Presiden. Jika tidak ada kandidat yang mendapatkan mayoritas suara elektoral untuk Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memilih, setiap negara bagian yang memberikan suara sebagai satu kesatuan, Presiden dari antara tiga kandidat dengan tiga suara tertinggi. Jika tidak ada kandidat yang mendapatkan mayoritas suara elektoral untuk Wakil Presiden, Senat memilih dua kandidat dengan jumlah suara terbanyak.

Yudikatif

Badan legislatif di banyak negara menjalankan fungsi-fungsi yudisial tertentu. Beberapa badan legislatif memiliki kekuasaan untuk mengadili perilaku pejabat administratif.⁴⁰ Di Inggris, House of Lords adalah pengadilan banding tertinggi. Selain itu, hakim hanya dapat diberhentikan dengan surat gabungan dari kedua Majelis Parlemen kepada Mahkota. Senat di Amerika Serikat berperan sebagai pengadilan pemakzulan untuk mengadili Presiden dan Wakil Presiden. Senat Perancis dalam konstitusi lama tahun 1875 diberdayakan untuk duduk sebagai Pengadilan Tinggi untuk mengadili Presiden dan para Menteri untuk kejahatan-kejahatan besar. Di India, salah satu dari kedua majelis ini dapat mengajukan tuntutan pemakzulan terhadap Presiden. Selain itu, Parlemen juga memiliki kekuasaan untuk memindahkan hakim-hakim di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi atas dasar perilaku buruk dan ketidakmampuan yang terbukti.

Penyelidikan dan Interpelasi

Badan legislatif kadang-kadang berfungsi sebagai organ penyelidikan. Badan ini melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum. Sering kali menunjuk komisi penyelidikan yang berkaitan dengan pertanian dan industri atau untuk mengetahui penyebab kerusakan sosial, atau kekerasan

⁴⁰ Ibid.

massa, dll. Komisi penyelidikan semacam itu mengumpulkan informasi, menerima memorandum, mendengarkan bukti, dan membuat rekomendasi. Komisi-komisi kerajaan di Inggris telah menjadi yang paling efektif dalam menggalang opini publik mengenai masalah-masalah ekonomi dan sosial yang rumit dan dalam menemukan data-data riil yang menjadi dasar bagi kebijakan publik yang dapat dibentuk secara cerdas.

Mengubah Konstitusi

Di beberapa negara, badan legislatif memainkan peran paling penting dalam membuat dan mengubah konstitusi. Lembaga legislatif diberi kewenangan ini karena dianggap sebagai lembaga perwakilan rakyat yang sah, dan juga konstitusi asli dirancang oleh lembaga legislatif. Jadi, sudah sepantasnya jika badan legislatif diberi wewenang untuk memainkan peran penting dalam proses reformasi konstitusi. Badan legislatif biasanya terlibat dalam tiga jenis metode untuk mengubah konstitusi. Pertama, melalui pemungutan suara langsung dari para anggota legislatif saja. Di beberapa negara, metode ini membutuhkan persetujuan dengan suara bulat dan dalam beberapa pertanyaan legislatif tertentu, diperlukan suara mayoritas. Metode kedua melibatkan usulan amandemen oleh badan legislatif, diikuti dengan ratifikasi oleh konvensi konstitusional. Metode ketiga melibatkan usulan dari badan legislatif, diikuti dengan ratifikasi dari negara-negara bagian. Di Indonesia dan Amerika Serikat serta di banyak negara lain, proses amandemen harus dimulai di badan legislatif. Persetujuan amandemen tergantung pada dukungan dari sejumlah anggota legislatif yang berbeda di setiap negara. Sebagai contoh, di Indonesia, dapat mengajukan amandemen dengan dua pertiga suara, namun harus diratifikasi oleh pihak-pihak berwenang agar dapat disetujui.

Kemunduran Badan Legislatif

Terlepas dari pentingnya lembaga legislatif, dalam beberapa tahun terakhir, lembaga legislatif tampaknya kehilangan kekuasaan dari eksekutif. Situasi ini terus berlanjut. Kekuasaan telah bergeser dari legislatif ke eksekutif. Fitur penting yang paling penting pada abad dan

dua satu adalah menurunnya kekuasaan legislatif. Pada abad kedelapan belas dan sembilan belas, badan legislatif adalah organ yang paling kuat. Supremasi legislatif secara bertahap memudar dan digantikan oleh kepemimpinan eksekutif. Inti dari kekuasaan politik saat ini terletak pada organ eksekutif pemerintahan. Kepemimpinan eksekutif tidak dapat ditandingi terlepas dari sistem parlementer atau presidensial. Dalam sistem parlementer, eksekutif memprakarsai, memandu, dan mengemudikan legislasi. Ketika pemerintah memutuskan sebuah kebijakan, departemen yang tepat melaksanakannya baik dengan tindakan administratif atau dengan mengajukan rancangan undang-undang baru kepada legislatif untuk membuat undang-undang yang terkait dengan kebijakan tersebut. Kabinet adalah instrumen yang memandu badan legislatif untuk bertindak dengan cara tertentu. Kabinetlah yang merencanakan program legislatif dan membawa rencana-rencana tersebut ke badan legislatif pada awal masa sidangnya. Seorang menteri biasanya memperkenalkan rancangan undang-undang di badan legislatif dan kemudian para anggota berpartisipasi dalam diskusi. Oleh karena itu, kabinet adalah pemimpin dalam badan legislatif dan pada kenyataannya, kabinet membuat undang-undang dengan saran dan persetujuan badan legislatif. Kabinet merencanakan kebijakan, keputusan, dan rancangan undang-undang tentang semua hal penting. Hal ini menjadi perhatian badan legislatif untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Selain itu, dalam sistem Presidensial, legislatif memegang kekuasaan yang kuat. Dalam sistem seperti itu, Presiden bukan hanya kepala eksekutif tetapi juga eksekutif. Presiden sebenarnya adalah pemimpin partai dan kepala legislator. Namun, ada pemeriksaan kembali kekuasaan di antara ketiga organ pemerintahan, seperti yang ada di Amerika Serikat; secara teoritis, Presiden tidak dapat melakukan apa pun yang ingin dia lakukan tanpa izin dari Kongres. Pada kenyataannya, Presiden jauh lebih berkuasa daripada organ-organ lainnya. Presiden memiliki akses langsung ke Kongres karena ia memiliki kekuatan konstitusional untuk mengirim pesan, merekomendasikan tindakan, memanggil sesi khusus dan memveto rancangan undang-undang. Presiden dapat memobilisasi opini publik

dengan berbicara langsung kepada publik melalui radio dan televisi yang dapat memaksa badan legislatif untuk menerima sudut pandang Presiden meskipun badan legislatif tidak setuju.

Kekuatan badan legislatif telah menurun karena berbagai alasan. Pertama, karena legislatif tidak memiliki waktu untuk membahas semua masalah, beberapa di antaranya didelegasikan kepada eksekutif. Eksekutif bertindak seperti badan legislatif ketika mengeluarkan Dekrit, dan Perintah. Kedua, meskipun dasar-dasar hukum diputuskan oleh legislatif, departemen yang sesuai diberi kewenangan untuk menerapkan hukum sesuai dengan situasi.

Ketiga, karena perluasan layanan sosial, eksekutif telah memperoleh banyak kekuasaan. Ini disebut adjudikasi administratif. Ini menyiratkan penyelidikan dan penyelesaian perselisihan yang melibatkan properti pribadi berdasarkan hukum dan fakta oleh badan administratif. Keempat, panggilan darurat untuk tindakan cepat untuk menjaga keamanan negara dari serangan eksternal juga telah meningkatkan kekuasaan eksekutif. Taktik dan strategi militer tidak mungkin didiskusikan di lembaga legislatif. Ketidakstabilan dalam politik internasional meningkatkan kekuatan eksekutif.

Kelima, sangat sedikit anggota legislatif yang memiliki keahlian teknis. Mereka tidak memiliki pengetahuan dalam hal-hal teknis. Dalam kehidupan pribadi mereka adalah para profesional yang berbeda-pengusaha, dokter, guru, petani, pengacara, dan lain-lain. Mereka hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali dalam hal penelitian independen. Dalam banyak kasus mereka tidak memiliki informasi. Mereka harus bergantung pada pejabat administratif dan, akibatnya, mereka dipengaruhi oleh keputusan-keputusan eksekutif.

Keenam, di sebagian besar negara, para anggota tidak harus hadir di lembaga legislatif. Mereka sering tidak hadir dalam sidang. Sekali dicalonkan, mereka biasanya akan terus terpilih. Masalah ketidakhadiran membuat eksekutif menjadi kuat.

Akhirnya, kerja aktif partai-partai politik telah menghasilkan perpaduan kekuasaan eksekutif dan legislatif di semua sistem. Disiplin partai dalam semua sistem modern sangat kuat. Para anggota harus

mendukung keputusan mitra eksekutif mereka; jika tidak, mereka bisa dicoret dari daftar partai pada pemilihan berikutnya. Karena semua alasan ini, badan legislatif telah kehilangan kemewahan dan signifikansinya.

Badan Legislatif dalam Sistem Komunis

Badan legislatif dalam sistem komunis tidak beroperasi dengan cara yang sama seperti halnya dalam sistem demokrasi. Badan ini mungkin berasal dari kerangka kerja konstitusional tetapi fungsinya sangat berbeda. Para anggota badan legislatif dipilih; mereka bertemu secara teratur, berpidato, memberikan suara pada undang-undang yang diusulkan, dan secara resmi memberlakukan undang-undang. Namun, jika dilihat lebih dekat, badan legislatif tidak lain adalah lembaga yang melegitimasi kebijakan dan aturan pemerintah. Badan legislatif berada di bawah partai Komunis. Para anggotanya tampaknya dipilih tetapi karena tidak ada kompetisi, pemilihan anggota legislatif tidak ada artinya. Mereka adalah anggota yang dipilih sendiri dari partai Komunis. Mereka tidak dapat meloloskan undang-undang apa pun yang bertentangan dengan ideologi partai Komunis. Tidak ada partai oposisi di negara ini. Tidak mungkin bagi para anggota untuk dipilih sebagai anggota legislatif tanpa persetujuan dari Ketua partai. Badan legislatif hanyalah stempel karet untuk keputusan yang dibuat oleh partai dan memiliki otonomi atau kedaulatan yang sangat kecil dalam proses pembuatan kebijakan negara. Diskusi dan perdebatan hanyalah window dressing untuk komunitas internasional. Biasanya, semuanya sudah diputuskan oleh eksekutif atau di tingkat partai. Hanya ada sedikit ruang untuk memperdebatkan rancangan undang-undang tertentu di legislatif. Akibatnya, semua sistem komunis yang ada memiliki badan legislatif unikameral. Cina memiliki badan legislatif unikameral, Kongres Rakyat Nasional, yang merupakan badan legislatif terbesar di dunia. Anggota dipilih setiap lima tahun sekali, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keputusan Partai Komunis Cina. Tugas mereka hanyalah seremonial belaka.

Di tempat lain, dalam setiap sistem politik Islam misalnya, Syuro dan Khalifah harus berkonsultasi. Dengan Syuro ini dalam mengambil

keputusan. Syuro memiliki kekuasaan untuk memberhentikan Khalifah. Kekhalifahan dimulai, menurut Hasan al-Turabi, sebagai “lembaga konsultatif yang dipilih. Kemudian, ia merosot menjadi pemerintahan otoriter yang turun-temurun, atau yang dirampas. Majelis konsultatif atau legislatif ini harus dipulihkan dan, menurut Muhammad Iqbal, harus memiliki hak untuk menafsirkan dan menerapkan ijtihad yang kemudian akan menjadi konsensus otoritatif masyarakat *ijma*. Dengan cara ini saja kita dapat membangkitkan semangat hidup yang tertidur dalam sistem hukum kita dan memberikannya pandangan evolusioner. Cendekiawan Muslim memahami lembaga legislatif dalam istilah *Ahl al-Hal wa alAqd* dan Syuro. Kedua lembaga ini, yaitu Syuro dan *Ahl al-Hal wa alAqd* sebagian besar merupakan dua lembaga yang berbeda; yang pertama berukuran lebih kecil daripada yang kedua. Kedua lembaga ini kadang-kadang bergabung untuk menjalankan fungsi-fungsi penting tertentu seperti memilih khalifah.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa badan legislatif harus terdiri dari perwakilan dan mayoritas dari mereka. Harus dipilih oleh rakyat. Namun, badan ini harus terdiri dari sekelompok ahli Syariah dan juga yurisprudensi modern. Badan legislatif akan menjalankan fungsi eksekutif dan musyawarah. Dalam hal legislasi, perbedaan harus dibuat antara Syariah dan non-Syariah. Prinsip-prinsip dasar konstitusional yang ada di dalam Al Qur'an dan Sunnah merupakan syariah, dan oleh karena itu bersifat permanen. Dengan kata lain, prinsip-prinsip tersebut tidak dapat diubah. Namun, mungkin ada beberapa masalah yang tidak tercakup dalam Al Qur'an dan Sunnah dan tunduk pada modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan keadaan yang berubah. Pada dasarnya badan legislatif adalah untuk memberlakukan arahan eksplisit dari syariah dan untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan syariah.

2. Badan Eksekutif

Badan Eksekutif adalah yang tertua dari semua organ pemerintahan. Badan eksekutif sudah ada sejak lima ribu tahun yang lalu. Tidak ada lembaga legislatif atau yudikatif yang terpisah pada zaman kuno. Semua kekuasaan diintegrasikan ke dalam satu

tangan, yaitu di tangan raja. Raja dibantu oleh dewan penasihat, namun ia sendiri adalah eksekutif tertinggi, legislator, dan juga hakim. Dengan kata lain, ada sentralisasi kekuasaan. Lembaga legislatif dan yudikatif lahir belakangan. Saat ini, eksekutif memiliki kekuasaan dan otoritas yang besar dalam sistem politik mana pun. Cabang pemerintahan eksekutif tetap berada di pusat kekuasaan pemerintahan sejak kelompok-kelompok mulai membentuk pemerintahan dalam masyarakat.

Eksekutif

Dalam setiap sistem politik, kekuasaan eksekutif tertinggi tetap berada di tangan seorang individu atau sekelompok kecil elit. Namun, komposisi eksekutif sangat luas. Sebenarnya, ini mengacu pada seluruh cabang sistem politik bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan negara, dan bertanggungjawab atas penentuan aturan umum. Di sebagian besar negara, eksekutif adalah administrator tertinggi di kantor pemerintahan. Dalam pengertian yang lebih luas, eksekutif berarti semua pejabat pemerintah kecuali mereka yang bertindak dalam kapasitas legislatif dan yudikatif. Dalam pengertian ini, eksekutif adalah gabungan dari semua pejabat atau lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan kehendak negara sebagaimana kehendak tersebut telah dirumuskan dan diekspresikan dalam bentuk hukum. Dalam pengertian ini tidak hanya mencakup kepala pemerintahan tetapi juga seluruh staf pejabat, baik yang tinggi maupun yang rendah, yang terkait dengan administrasi urusan publik negara. Mereka dikenal sebagai pegawai negeri. Mereka merupakan cabang administratif pemerintah.

Dalam arti sempit, eksekutif hanya berarti kepala pemerintahan, kepala eksekutif negara, anggota kabinet atau dewan menteri. Pegawai negeri sipil, misalnya, sekretaris, wakil sekretaris, petugas polisi, hakim. Yang melaksanakan hukum dan perintah dan menjalankan administrasi secara rinci adalah eksekutif nonpolitik atau eksekutif permanen. Tugas utama mereka adalah menegakkan hukum. Di sisi lain, eksekutif politik dipilih untuk beberapa tahun tertentu seperti Presiden Amerika atau tetap menjabat selama partai tempat mereka

berasal dapat menguasai mayoritas di legislatif seperti di Inggris.⁴¹ Pada kenyataannya, kedua kelompok ini mereka yang melihat bahwa hukum ditegakkan dengan benar dan mereka yang benar-benar menegakkannya sebenarnya adalah dua bagian integral dari mesin yang sama yang membentuk departemen eksekutif.

Jenis-jenis Eksekutif

Ada beberapa jenis eksekutif. Mereka dapat dikelompokkan di bawah tiga kepala: (1) Nominal dan Riil, (2) Parlementer dan Presidensial, dan (3) Tunggal dan Jamak atau Kolegial.

Eksekutif Nominal dan Eksekutif Riil

Dalam bentuk pemerintahan parlementer, ada kepala eksekutif nominal dan eksekutif riil. Eksekutif nominal berarti bahwa seorang pria, baik secara turun-temurun sebagai Raja Malaysia atau terpilih sebagai Presiden Indonesia, adalah kepala eksekutif dalam teori tetapi tidak dalam kenyataan. Idealnya, kekuasaan eksekutif berada di tangan eksekutif nominal, tetapi pada kenyataannya kekuasaan tersebut dijalankan oleh presiden dan anggota kabinet. Di Malaysia, secara teori, Raja adalah kepala eksekutif tetapi dalam praktiknya Perdana Menteri adalah eksekutif yang sebenarnya. Demikian pula, Raja Inggris hanyalah stempel karet.

Eksekutif Parlementer dan Eksekutif Presiden

Dalam bentuk eksekutif parlementer, kekuasaan berada di tangan Perdana Menteri yang merupakan pemimpin partai mayoritas di legislatif. Di sisi lain, dengan Eksekutif Presidensial, kekuasaan eksekutif yang sebenarnya terletak di kantor Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Sistem yang pertama juga dikenal sebagai sistem Perdana Menteri dan sistem yang kedua disebut Sistem Presidensial. Di Indonesia, anggota eksekutif tertinggi negara adalah Presiden, sedangkan di Malaysia, dan Inggris, anggota eksekutif tertinggi disebut Perdana Menteri.

⁴¹ Lipset, Seymour Martin. *Democracy in Europe and the Americas*. Congressional Quarterly. 1998.

Di setiap sistem, ada Kepala Negara yang merupakan Ketua dewan penasihat sementara Kepala Pemerintahan adalah ketua komite atau partai yang aktif. Setiap cabang memiliki klasifikasi dan nama khusus. Baik Eksekutif Parlementer maupun Eksekutif Presidensial memiliki kelebihan dan kekurangan. Eksekutif parlementer, pertama-tama, menjamin keharmonisan dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif yang sangat penting untuk administrasi. Kedua, kementerian-kementerian yang efisien selalu berhubungan dengan legislatif, di mana partai oposisi meninjau setiap kebijakan pemerintah dengan hati-hati. Pemerintah perlu waspada terhadap apa yang baik untuk negara. Ketiga, oleh karena itu, pemerintah tidak boleh lalim. Pemerintah tidak dapat mengadopsi kebijakan yang tidak disukai oleh publik. Namun, eksekutif parlementer juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, umur jabatan eksekutif ini tidak pasti. Setiap saat bisa terjadi mosi tidak percaya sehingga eksekutif harus mengundurkan diri. Jadi, sulit untuk mengadopsi kebijakan jangka panjang dan konsisten. Kedua, pemerintah akan selalu mengadopsi kebijakan yang akan menguntungkan partai dan para pendukungnya.

Sebaliknya, eksekutif presidensial bebas dari kontrol legislatif. Presiden dipilih untuk masa jabatan tertentu. Selama periode tersebut, Presiden bebas mengambil kebijakan yang masuk akal, berkesinambungan, dan konsisten untuk kesejahteraan rakyat. Kedua, kepastian dalam masa jabatan Presiden membuat sistem politik lebih efisien, independen, dan cukup berani untuk mengambil langkah-langkah yang benar-benar baik untuk negara. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, kurangnya kerja sama antara kantor Presiden dan badan legislatif terkadang menciptakan kebuntuan dalam pemerintahan. Di Indonesia, misalnya, sering terjadi konflik antara Presiden dan dewan rakyat. Kedua, dalam sistem ini, ada kemungkinan terjadinya kediktatoran. Karena eksekutif tidak diperiksa secara teratur oleh legislatif, negara dapat diatur sesuai dengan keinginan satu orang.

Eksekutif Tunggal dan Jamak atau Kolegial

Eksekutif tunggal berarti kekuasaan eksekutif dipegang oleh satu orang. Dalam jenis eksekutif ini, tanggung jawab tidak terbagi. Sebagai contoh, Presiden Amerika Serikat adalah eksekutif tunggal. Di sisi lain, eksekutif jamak atau kolegial berarti bahwa kekuasaan eksekutif tidak diberikan kepada satu orang, tetapi kepada dewan anggota; setiap anggota memiliki status yang kurang lebih sama dan tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Kekuasaan eksekutif dibagi di antara sejumlah orang. Sebagai contoh, eksekutif Swiss adalah eksekutif jamak atau kolegial. Otoritas eksekutif federasi Swiss dijalankan oleh komisi yang terdiri dari tujuh orang yang dikenal sebagai Bundesrat atau Dewan Federal yang dipilih setiap empat tahun sekali oleh Majelis Federal. Dalam sistem parlementer, meskipun kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet, Perdana Menteri tetap berkuasa penuh, dan hal ini mencegah sistem ini menjadi jenis eksekutif jamak.

Eksekutif tunggal memiliki beberapa keuntungan penting. Pertama, sistem ini menjamin kesatuan dan integritas dalam sistem yang sangat penting untuk efisiensi. Kedua, dalam sistem jenis ini, pengambilan keputusan menjadi mudah dan cepat. Namun, di bawah sistem ini, konsentrasi kekuasaan di satu tangan dapat menimbulkan despotisme. Oleh karena itu, banyak orang berpikir bahwa eksekutif jamak lebih baik. Memang benar bahwa eksekutif jamak tidak dapat menunjukkan ketepatan waktu dalam pengambilan keputusan, tetapi tidak ada bahaya otokrasi atau kediktatoran satu orang. Anggota eksekutif yang berbeda yang memiliki status dan kekuasaan yang sama dapat saling memeriksa satu sama lain dan dengan demikian menyelamatkan bangsa dari tirani satu orang. Selain itu, sistem ini juga lebih efisien karena kebijaksanaan terletak pada banyak penasihat. Singkatnya, setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada sistem yang sempurna atau secara universal baik atau buruk. Semuanya tergantung pada sifat negara dan, oleh karena itu, kesesuaian setiap sistem akan berbeda dari satu negara ke negara lain.

Cara Memilih Eksekutif

Salah satu masalah yang paling penting mengenai eksekutif adalah pertanyaan tentang bagaimana cara memilih kepala eksekutif. Ada lima metode yang berbeda dalam memilih kepala negara yang telah dipraktikkan. Kelima metode tersebut adalah: (1) Prinsip Keturunan, (2) Pemilihan langsung, (3) Pemilihan oleh Dewan Pemilihan, (4) Pemilihan tidak langsung oleh badan legislatif, dan (5) Pencalonan.

Prinsip Keturunan - menggunakan rotasi jabatan

Prinsip turun-temurun dikaitkan dengan pemerintahan monarki. Masa jabatan adalah seumur hidup dan suksesi berlangsung dari ayah ke putra/putrinya. Arab Saudi dan Inggris, antara lain, adalah contoh yang baik dari pemerintahan monarki. Prinsip turun-temurun adalah hasil dari kondisi historis dan bukan pilihan yang disengaja dari rakyat. Argumen terbesar yang mendukung prinsip ini adalah bahwa eksekutif bebas dari perselisihan partai. Ini memberikan lebih banyak stabilitas, keabadian dan kesinambungan pada sistem. Keberatan terbesar terhadap prinsip ini adalah bahwa tidak ada kepastian bahwa orang yang kompeten akan dijamin sebagai kepala eksekutif. Sistem ini merasionalisasi masa lalu.

Pemilihan Umum Langsung

Menurut sistem ini, eksekutif tertinggi dipilih secara langsung oleh rakyat. Sistem ini memberikan hak kepada rakyat untuk memilih Kepala Eksekutif mereka yang harus mewakili keinginan mereka dan menikmati kepercayaan mereka. Prinsip ini didukung karena berbagai alasan. Pertama, pada dasarnya sistem ini bersifat demokratis; kedua, sistem ini merupakan sarana yang baik untuk memberikan pendidikan politik kepada para pemilih. Sistem seperti itu merangsang minat dalam urusan publik. Namun, ada bahaya serius dalam sistem ini. Para pemilih biasa mungkin tidak bisa memilih orang yang tepat untuk jabatan penting seperti itu. Para pemilih bisa dengan mudah dipengaruhi oleh para penghasut. Para pemilih dapat dengan mudah disesatkan. Selain itu, sistem ini membagi negara menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan yang menciptakan ketegangan politik,

kepahitan, dan persaingan politik. Dalam situasi seperti ini, orang yang terpilih sebagai Kepala Eksekutif gagal menjaga netralitas yang sangat penting bagi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pemilihan oleh sebuah Dewan Perwakilan Rakyat

Ini adalah sebuah sistem di mana Kepala Eksekutif dipilih oleh sebuah dewan pemilih yang dipilih oleh rakyat. Di Amerika Serikat, misalnya, Presiden dipilih oleh anggota-anggota sebuah electoral college di mana setiap negara bagian memiliki perwakilan sebanyak jumlah anggota di kedua majelis Kongres. Keuntungan dari metode ini adalah pilihan eksekutif berada di tangan orang-orang yang lebih memenuhi syarat untuk menilai daripada massa. Ketika pilihan akhir berada di tangan sejumlah kecil perwakilan, pemilihannya cenderung cerdas. Namun, semua ini hanyalah teori belaka. Pemilihan-pemilihan itu hanya bersifat tidak langsung dalam nama. Karena para pemilih utama memberikan suara sesuai dengan garis partai, hanya ada sedikit perbedaan antara pemilihan langsung dan tidak langsung. Hanya ada sedikit bukti bahwa para wakil yang membentuk sebuah electoral college menggunakan penilaian independen mereka. Mereka hanyalah agen-agen sebuah partai. Pemilihan Presiden Amerika Serikat adalah contoh terbaik praktik ini.⁴²

Pemilihan oleh Badan Legislatif

Pemilihan eksekutif tertinggi oleh badan legislatif adalah jenis lain pemilihan tidak langsung. Di Swiss kepala negara dipilih oleh anggota badan legislatif. Gagasan yang mendasari metode ini adalah bahwa pemilihan harus dilakukan oleh mereka yang paling memenuhi syarat untuk melakukan penilaian dalam urusan-urusan publik. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, para anggota badan legislatif cenderung melakukan seleksi yang lebih baik terhadap para kandidat daripada para pemilih biasa. Kedua, sistem ini juga bebas dari keburukan-keburukan pemilihan umum seperti kegembiraan dan kepahtan yang umumnya menyertai pemilihan langsung. Ketiga, sistem ini membangun hubungan dan kerja sama yang erat antara

⁴² Ibid.

eksekutif dan legislatif. Namun, sistem ini tidak lepas dari kekurangan. Pertama, anggota legislatif yang memilih eksekutif tertinggi tidak bebas dari politik partai dan, akibatnya, mereka memilih kandidat partai mereka sendiri dari pada yang terbaik. Kedua, eksekutif dalam sistem ini tidak dapat menjalankan otoritas independennya karena ia ditunjuk berdasarkan garis partai. Ketiga, metode ini juga sangat mengganggu fungsi normal lembaga legislatif.

Fungsi-fungsi Eksekutif

Negara modern biasanya kompleks. Setiap negara harus menjalankan banyak fungsi untuk memenuhi kebutuhan warganya. Fungsi eksekutif yang paling mendasar adalah fungsi yang berhubungan dengan kegiatan penting administrasi sehari-hari. Negara sekarang dianggap sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Departemen eksekutif menjalankan fungsi-fungsi utama negara. Secara garis besar, fungsi-fungsi penting eksekutif dapat disebutkan sebagai pertama Administrasi internal; kedua Administrasi eksternal; ketiga Fungsi militer; keempat Fungsi legislatif; kelima Fungsi yudikatif; dan keenam Fungsi-fungsi lainnya.

Administrasi Internal

Tugas utama departemen eksekutif adalah memastikan hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Ia harus menjaga perdamaian dan keamanan internal. Untuk itu, eksekutif bergantung pada sejumlah besar pegawai negeri sipil dan polisi. Eksekutif merumuskan kebijakan dan setelah kebijakan tersebut disetujui oleh legislatif, adalah tanggung jawab eksekutif untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Secara sederhana, eksekutif melaksanakan. Dalam semua sistem politik, kebijakan publik adalah hasil dari apa pun yang ingin dilakukan oleh eksekutif. Menaikkan atau menurunkan pajak, mengurangi atau menambah anggaran pertahanan, memberikan bantuan luar negeri kepada negara berkembang, mendanai penelitian, dan sejenisnya adalah contoh-contoh kebijakan publik. Semua kebijakan dan program baru diprakarsai oleh para eksekutif. Setelah kebijakan diadopsi, eksekutif mengawasi pelaksanaannya. Berbagai departemen dan lembaga dipercayakan dengan tanggung jawab khusus dan setiap departemen

menjalankan hukum negara yang berada di bawah yurisdiksinya. Eksekutif tertinggi mengkoordinasikan kegiatan berbagai departemen dan lembaga. Eksekutif tertinggi menunjuk sekretaris dan pejabat tinggi lainnya untuk mengepalai berbagai departemen. Di Amerika Serikat, sekretaris ditunjuk oleh Presiden. Di Inggris sekretaris utama ditunjuk oleh Perdana Menteri yang merupakan Kepala Eksekutif yang sebenarnya. Para eksekutif tertinggi membela kebijakan publik melalui pidato mereka di radio dan televisi, dan dalam pernyataan di konferensi pers dan surat kabar.

Administrasi Eksternal

Semua negara bagian bersifat independen, tetapi setiap negara bagian saling terkait dengan negara bagian lainnya. Eksekutif bertanggung jawab untuk memastikan interaksi timbal balik di antara negara-negara untuk perdamaian dan keamanan. Tanggung jawab eksekutif terletak di Kementerian Luar Negeri atau Urusan Eksternal. Pelaksanaan hubungan luar negeri meliputi hal-hal berikut: pertama mengirim dan menerima diplomat; kedua mengakui negara baru; ketiga membangun atau memutuskan hubungan diplomatik; keempat menentukan dan menerapkan kebijakan luar negeri; dan kelima menegosiasikan perjanjian dan kesepakatan. Di beberapa negara, kekuasaan pembuatan perjanjian dari eksekutif tunduk pada persetujuan dan ratifikasi legislatif, seperti di Amerika Serikat. Namun, di sebagian besar negara, eksekutif tertinggi menjalankan tingkat kebebasan dalam kebijakan luar negeri. Dalam perang Falklands pada tahun 1982, Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari parlemen untuk mengirim pasukan. Demikian pula, dalam Krisis Rudal Kuba pada tahun 1962, Presiden Kennedy hanya memiliki sedikit waktu untuk berkonsultasi dengan Kongres Amerika. Konstitusi Perancis tahun 1958 juga memberikan kekuasaan yang sama kepada Presiden Perancis, ketika ada ancaman yang serius dan segera terhadap lembaga-lembaga Republik, kemerdekaan bangsa, integritas wilayahnya atau pemenuhan kewajiban internasionalnya, dan fungsi reguler otoritas publik konstitusional telah terputus, Presiden Republik mengambil langkah-langkah yang diperlukan oleh situasi.

Fungsi Militer

Salah satu tanggung jawab penting eksekutif adalah mengamankan integritas teritorial negara dan melindungi negara dari agresi eksternal, dan jika perlu, berperang. Eksekutif tertinggi adalah Kepala Staf di setiap negara di dunia. Namun, kekuasaan yang sebenarnya dijalankan oleh sebuah departemen di bawah kendalinya, yang disebut Departemen Pertahanan dan Perang yang menentukan kekuatan dan organisasi angkatan bersenjata negara. Kepala Eksekutif menunjuk para jenderal dan komandan di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selama perang, kekuatan eksekutif meningkat pesat karena eksekutif dapat mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara. Eksekutif dapat memanggil tentara untuk melindungi kepentingan negara. Di Kanada, Pertahanan Nasional berada di bawah kendali Menteri Pertahanan yang merupakan ketua Dewan Pertahanan yang bertemu seminggu sekali dengan penasihat sipil dan militer. Menteri Pertahanan harus siap untuk menjawab setiap pertanyaan yang berkaitan dengan Pertahanan Kanada dan pertahanan dan pasukan penjaga perdamaian di Parlemen. Di Amerika Serikat, Presiden adalah Panglima Angkatan Bersenjata dan karenanya memiliki kekuasaan yang luas terhadap militer.

Fungsi Legislatif

Eksekutif, kadang-kadang, melakukan beberapa fungsi legislatif. Eksekutif memanggil, menunda, dan memprorogandakan sidang badan legislatif. Mengumumkan perintah dan peraturan. Ini adalah semacam kekuasaan tambahan dari legislasi yang berbentuk keputusan. Di banyak negara, eksekutif memiliki kekuasaan untuk memveto rancangan undang-undang yang disahkan oleh legislatif, seperti di Indonesia di mana Presiden dapat menggunakan hak veto penangguhan atas rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR. Eksekutif memberikan informasi yang diperlukan kepada legislatif mengenai kebutuhan negara dan mengirimkan penggunaannya. Eksekutif memprakarsai setiap rancangan undang-undang sebelum dibahas di badan legislatif untuk menjadi undang-undang. Setelah RUU disahkan oleh legislatif, RUU tersebut harus mendapat persetujuan

dari kepala eksekutif untuk menjadi undang-undang. Meningkatnya berbagai kegiatan negara telah memaksa parlemen selama beberapa tahun terakhir untuk mendelegasikan kekuasaan legislatif yang luas kepada eksekutif. Hal ini tidak dapat dihindari di negara modern dan telah menambah kekuasaan eksekutif secara signifikan.

3. Fungsi Yudikatif

Eksekutif sering kali menjalankan beberapa fungsi yudikatif. Biasanya di sebagian besar pemerintahan, eksekutif diharuskan untuk mengawasi administrasi pengadilan dan menjamin keadilan dan ketidakberpihakan dalam peradilan bagi warganya. Oleh karena itu, kepala eksekutif menunjuk para hakim di sebagian besar negara. Selain menunjuk hakim, eksekutif memiliki dua kekuasaan yudisial yang penting: memberikan pengampunan dan memberikan amnesti. Kekuasaan yudisial yang paling penting dari kepala eksekutif adalah kekuasaan untuk memberikan pengampunan kepada seorang terpidana. Raja di Malaysia misalnya memiliki kekuasaan ini. Hal ini terkadang menjadi penting untuk menghindari kematian orang yang sangat penting atau orang yang mungkin dihukum secara politik. Hal ini juga mencegah kemungkinan malpraktek peradilan. Kekuasaan eksekutif yang penting lainnya dalam masalah yudisial adalah memberikan amnesti kepada sekelompok orang, biasanya pelanggar politik. Presiden Jimmy Carter memberikan amnesti kepada para desertir militer Amerika Serikat pada Perang Vietnam. Kadang-kadang, eksekutif menawarkan amnesti kepada imigran ilegal dan pengungsi politik. Sejak Perang Dunia II, Kanada dan Jerman telah memberikan amnesti kepada hampir ratusan ribu orang yang mengklaim sebagai pengungsi.

Fungsi Lainnya

Fungsi-fungsi di atas dianggap sebagai fungsi-fungsi penting. Selain itu, eksekutif juga menjalankan fungsi-fungsi lain: Pertama, berbagai departemen dan lembaga menawarkan layanan dan fungsi perizinan kepada masyarakat. Departemen Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Transportasi, dan Komunikasi menawarkan layanan utilitas

publik, dan memberlakukan pembatasan hukum pada produksi dan penjualan berbagai komoditas. Kedua, eksekutif tertinggi adalah simbol persatuan di negara ini. Eksekutif tertinggi berada di atas politik partai. Mereka membina persatuan dan kesinambungan dalam sebuah negara. Mereka adalah simbol hidup bangsa dan bertindak untuk negara secara independen. Kepala negara membuka sidang parlemen dan memberikan sumpah kepada para eksekutif terpilih, dan menghadiri acara-acara publik. Dalam sistem parlementer, jika pemimpin mayoritas tidak diputuskan, kepala negara dapat memutuskan siapa yang harus menjadi perdana menteri. Situasi ini terjadi pada tahun 2000an, ketika terjadi perselisihan mengenai kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim. Ketiga, kepala eksekutif politik merupakan pusat dari kepemimpinan fungsional dalam semua sistem politik. Keberhasilan setiap negara bergantung pada kualitas dan kompetensi yang tinggi dari kepemimpinan ini. Eksekutif politik harus secara efektif memimpin negara dan rakyat. Ruang lingkup eksekutif telah meningkat sedemikian rupa sehingga ada mengatakan, ribuan peraturan dan perintah tahunan, rencana kegiatan yang terperinci dan terkini dari semua negara modern, mengungkapkan bagaimana negara memusatkan perhatian pada setiap individu dorongan-dorongan mereka ke dalam jalinan benang merah keberadaannya. Negara ada di mana-mana, hampir tidak menyisakan celah.

Pembahasan badan-badan di atas terbatas pada sistem demokrasi liberal. Dalam sistem Komunis atau bahkan dalam sistem otoriter, sifat badan berbeda. Sementara badan otoriter didominasi oleh orang perorangan, eksekutif komunis dipimpin oleh sebuah partai. Contoh terbaik dari eksekutif otoriter adalah pemerintahan militer. Penguasa membayangi semua cabang pemerintahan lainnya. Karakteristik utama eksekutif komunis adalah segala sesuatu diprakarsai oleh partai. Pemerintah berada di bawah eksekutif partai. Eksekutif politik menggunakan aparat partai untuk menegakkan kebijakannya. Partai Komunis yang terdiri dari pejabat tinggi partai sebenarnya memerintah negara. Ada ikut campur kekuasaan partai komunis dengan birokrasi negara yang tercermin dalam presidium atau dewan negara. Jadi,

pada analisis terakhir, kekuasaan eksekutif dalam sistem politik komunis tetap berada di tangan satu atau beberapa orang saja. Ada perpaduan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Di Uni Soviet, Stalin meraih kekuasaan tertinggi melalui kontrolnya atas birokrasi partai dan kekejamannya dalam menghadapi saingan-saingan partai

D. Rangkuman Materi

Supremasi dewan perwakilan rakyat secara bertahap memudar dan digantikan oleh kepemimpinan eksekutif. Inti dari kekuatan politik saat ini terletak pada organ eksekutif pemerintah. Kepemimpinannya tidak dapat ditandingi terlepas dari sistem parlementer atau presidensial. Dalam sistem parlementer, lembaga ini memprakarsai, memandu, dan mengemudikan legislasi. Ketika kabinet memutuskan sebuah kebijakan, departemen yang tepat melaksanakannya baik dengan tindakan administratif atau dengan mengajukan rancangan undang-undang baru kepada legislatif untuk membuat undang-undang yang terkait dengan kebijakan tersebut. Dengan demikian, legislasi adalah pelayan administrasi dan kabinet adalah instrumen yang memandu badan legislatif untuk bertindak dengan cara tertentu. Kabinetlah yang merencanakan program legislatif dan membawa rencana tersebut ke badan legislatif pada awal masa sidang. Seorang menteri biasanya memperkenalkan rancangan undang-undang di badan legislatif dan kemudian para anggota berpartisipasi dalam diskusi. Oleh karena itu, kabinet adalah pemimpin legislatif dan pada kenyataannya membuat undang-undang dengan saran dan persetujuan legislatif. Kabinet merumuskan kebijakan, membuat keputusan, dan menyusun rancangan undang-undang tentang semua hal penting yang diminta oleh parlemen, hanya saja parlemen memberikan efek pada keputusan dan kebijakan tersebut dengan mempertimbangkannya dan mengambil suara yang diperlukan.

Dalam sistem presidensial, Presiden bukan hanya kepala eksekutif, tetapi ia juga kepala eksekutif. Presiden, pada kenyataannya, adalah pemimpin partai, kepala legislator, dan kepala simbolis bagi publik. Memang benar bahwa mungkin ada evaluasi dan monitoring kekuasaan di antara tiga organ pemerintahan, seperti yang ada di

Indonesia; pada kenyataannya Presiden jauh lebih berkuasa daripada organ-organ lainnya. Presiden memiliki akses langsung ke dewan perwakilan rakyat karena ia memiliki kekuatan konstitusional untuk mengirim pesan, merekomendasikan tindakan, memanggil sesi khusus dan memveto RUU. Presiden memiliki ruang lingkup untuk memobilisasi opini publik dengan berbicara langsung kepada publik melalui radio dan televisi yang dapat memaksa badan legislatif untuk menerima sudut pandang Presiden meskipun badan legislatif tidak setuju.

Kepemimpinan eksekutif kuat karena berbagai alasan. Pertama, legislatif mendelegasikan banyak tanggung jawabnya kepada eksekutif karena legislatif tidak memiliki waktu untuk membahas semua masalah. Eksekutif bertindak seperti legislatif ketika mengeluarkan Keputusan, Peraturan dan Perintah. Kedua, meskipun undang-undang utama disahkan oleh legislatif, departemen yang tepat diberi wewenang untuk menerapkan undang-undang tersebut sesuai dengan situasi. Ketiga, perluasan layanan sosial juga menyebabkan pertumbuhan yurisdiksi yudisial eksekutif. Hal ini disebut dengan peradilan administratif yang berarti penyelidikan dan penyelesaian sengketa yang melibatkan properti pribadi berdasarkan hukum dan fakta oleh badan administratif. Keempat, keadaan darurat yang mengharuskan tindakan cepat untuk menjaga keamanan negara dari serangan luar juga telah meningkatkan kekuasaan eksekutif. Badan legislatif tidak tepat untuk membahas taktik dan strategi militer. Ketidakstabilan dalam politik internasional meningkatkan kekuatan eksekutif. Akhirnya, pertumbuhan partai-partai politik telah menghasilkan perpaduan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam semua sistem.

E. Soal Latihan:

1. Apa saja lembaga-lembaga pemerintahan yang tersedia dalam suatu negara?
2. Bagaimana yudikatif menjalankan program kerjanya?
3. Bagaimana konsensus memandang Lembaga eksekutif?
4. Bagaimana peran dan fungsi lain badan legislatif?

5. Bagaimana kinerja badan-badan ini semua dalam menjalankan perannya masing-masing?

F. Sumber Bacaan

Boulding, Kenneth E. *Tiga Wajah Kekuasaan*. Newbury Park, CA: Sage, 1989.

Lasswell, Harold. D. Politik: *Siapa yang Mendapat, Apa Kapan, Bagaimana*. New York: McGraw-Hill, 1936.

Lasswell, Harold D. and Kaplan, Abraham. *Power and Society*. New Haven: Yale University Press, 1950.

Lazarsky, C. *Power Tends To Corrupt*. Cornell University Press. 2012.

Lijphart, Arend. *Pattern of Democracy*. Yale University Press. 2012.

Lipset, Seymour Martin. *Democracy in Europe and the Americas*. Congressional Quarterly. 1998.

BAB 8

Ketentaraan

A. Deskripsi Singkat

Bab ini menguraikan berbagai teori tentang ketentaraan dalam politik, mendefinisikannya, dan menjelaskan fitur-fitur esensialnya.

B. Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami konsep Ketentaraan
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Ketentaraan dalam politik

C. Penyajian Materi

Pendahuluan

Sejak berakhirnya Perang Dunia kedua, intervensi militer sering terjadi di banyak negara Dunia Ketiga, terutama di Dunia Muslim. Informasi menunjukkan bahwa pada tahun 1980-an, separuh dari Dunia Muslim secara langsung berada di bawah kekuasaan militer dan separuhnya lagi berada di bawah dominasi militer. Terdapat dua puluhan kudeta di Afrika, lima belas di Amerika Latin, dua puluhan di Timur Jauh, dan empat belas di Timur Tengah dari tahun 1962 hingga 1980an. Di dunia Barat, militer juga cukup dominan dalam politik, tetapi dalam sistem tersebut, militer mengendalikan politik dari belakang layar seperti yang dapat ditemukan dalam sistem politik Amerika Serikat saat ini. Di masa lalu, tentu saja, di Barat, militer juga biasa mengambil alih kekuasaan secara langsung. Di Prancis, Napoleon melakukan kudeta yang sukses. Di Spanyol, ada puluhan kudeta militer yang berhasil dan tidak berhasil antara tahun 1914 dan 1923.

1. Dunia Barat

Dari perspektif Barat, militer dianggap sebagai politik, dan hubungan sipil-militer dicirikan oleh kontrol dan supremasi sipil. Oleh karena itu, militer tidak hanya memiliki posisi tunduk, tetapi juga dibatasi untuk tidak mengembangkan ambisi untuk merebut kekuasaan politik. Sistem politik Barat mempertahankan budaya sipil tingkat tinggi. Sistem-sistem ini terutama didominasi oleh para politisi yang berkuasa melalui perjuangan kompetitif yang rumit di sepanjang garis partai untuk jangka waktu tertentu. Para anggota angkatan bersenjata tidak diharapkan atau diorientasikan untuk campur tangan dalam pemilihan umum, politik. Bahkan kebijakan pertahanan nasional pada umumnya berada di tangan para pemimpin sipil yang terpilih. Para sarjana Barat percaya bahwa faktor-faktor yang berkontribusi pada pemisahan kekuasaan yang jelas antara otoritas sipil dan militer dan akibatnya pengecualian tentara dari politik sipil berasal dari tradisi agama yang menganjurkan pemisahan kekuasaan sipil dan militer, dan preferensi historis Barat terhadap sistem politik yang demokratis.

Mayoritas besar orang di Barat berakar pada agama Kristen. Norma-norma sekularisme, yang muncul dari tradisi Kristen, mengembangkan konsep pemisahan Gereja dan Negara. Kemudian, Protestan menambahkan bahwa perlawanan terhadap penguasa, dalam segala situasi, adalah jahat. Oleh karena itu, pemberontakan atau kudeta terhadap otoritas yang terpilih secara konstitusional dilarang.⁴³

Perkembangan politik di Barat telah berkontribusi pada pertumbuhan demokrasi liberal, demokrasi. Tradisi politik yang demokratis lebih jauh telah mencegah segala jenis perlawanan militer terhadap, atau pengambilalihan kekuasaan sipil. Secara historis, ada tiga perkembangan ada tiga perkembangan di Barat: lembaga-lembaga sipil yang kuat; lembaga-lembaga militer yang relatif lebih lemah; dan militer yang integral, permeabel, atau terfragmentasi yang integral, dapat ditembus, atau terpecah-pecah. Sistem-sistem politik

⁴³ Almond, Gabriel Abraham. *Ventures in Political Science: Narratives and Reflections*. Lynne Rienner Publisher. 2002.

Barat telah mengembangkan institusi-institusi sipil yang kuat. sipil yang kuat. Para sarjana seperti Huntington dan Finer berpendapat bahwa militer lebih cenderung untuk campur tangan dalam politik jika institusi-institusi politik lemah dan kurang legitimasi.

Memang benar bahwa di Barat kontemporer, militer tidak mengambil alih kekuasaan secara mengambil alih kekuasaan secara langsung, tetapi hubungan sipil-militer didasarkan pada berbagai dan hubungan informal antara para profesional militer dan elit sipil, dan melibatkan banyak interaksi politik. Juga, agama Kristen tidak pernah mengharuskan pemisahan kekuasaan sipil dari militer. Secara historis, di Eropa, kekuasaan sipil dan militer tetap berada di tangan yang sama. Faktanya adalah bahwa di masa lalu, sistem militer di Barat telah melewati fase-fase penting fase perkembangan dan perubahan. Tujuan utama militer, yaitu adalah untuk memenangkan perang, tetap sama, tetapi cara untuk mencapai tujuannya telah berubah. Militer telah secara signifikan merambah bidang sosial-politik dari sistem politik Barat, dan semakin dipengaruhi oleh nilai-nilai, sikap, keterampilan, dan harapan-harapan kehidupan sipil. Juga, persyaratan teknologi pertahanan dan peperangan yang kompleks persyaratan teknologi pertahanan dan peperangan di era modern, menyediakan keamanan global, dan menjaga dari potensi pemaksaan telah meningkatkan kekuatan tawar-menawar elit militer, bahkan memberikan mereka kekuatan *veto*.

Dunia Komunis

Dalam sistem politik Komunis, tentara sangat dominan. Mereka tetap berada di belakang layar dalam keadaan normal. Namun, selama krisis institusional dan ekonomi, militer secara langsung campur tangan dalam politik. Pada tahun 1991, militer memainkan peran dominan di Polandia. Pemerintah memberlakukan darurat militer dan sebagai konsekuensinya, militer mengambil alih pengawasan langsung atas beberapa sektor ekonomi. Militer juga mengambil bagian aktif dalam badan pengambilan keputusan Partai Komunis Polandia. Pada tahun 1989, militer juga mengintervensi politik Rumania secara langsung. Terjadi revolusi anti-komunis populer yang signifikan terhadap rezim

represif Ceausescu. Militer diminta oleh rezim untuk membubarkan para pengunjuk rasa dan menembaki mereka. Para jenderal militer menolak untuk melaksanakan perintah pemerintah; mereka justru berpihak pada para demonstran. Dinas polisi rahasia berjuang untuk rezim, tetapi pada akhirnya, militer mengambil alih kendali. Di bekas negara Uni Soviet, militer ikut campur tangan dalam politik pada tahun 1991. Saat itu, negara ini sedang mengalami krisis ekonomi yang parah. Selain itu, secara politis, Uni Soviet kehilangan kendali tidak hanya di dalam Republik, tetapi juga di banyak negara Eropa Timur yang menjadi sekutunya. Rencana Gorbachev dan runtuhnya komunisme tidak dilihat oleh militer sebagai perkembangan positif bagi mereka. Oleh karena itu, sekelompok perwira militer melakukan kudeta yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan. Namun, upaya kudeta ini gagal karena ini bukanlah kudeta militer klasik; kudeta ini diprakarsai dan didukung oleh sebagian kecil perwira militer. Ada elemen-elemen reformis di dalam tubuh militer. Mereka berdiri di belakang Presiden Boris Yeltsin. Sejumlah perwira tetap mangkir dan beberapa di antaranya menolak untuk menjalankan perintah. Para perancang kudeta tidak memiliki rencana yang koheren, dan akibatnya, kudeta itu gagal.

D. Rangkuman Materi

Secara umum, di banyak negara pascakolonial di Dunia Ketiga, dan di beberapa negara Muslim pada khususnya, ada kecenderungan di antara para pemimpin sipil untuk meremehkan jumlah kekuatan yang diperlukan untuk mempertahankan negara kolonial. Sebagai contoh, merasa bahwa mereka harus mengarahkan energinya, dan menghabiskan lebih banyak uang untuk pembangunan ekonomi, perluasan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan tindakan-tindakan lain yang lebih positif yang terkait dengan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, militer diberi prioritas yang lebih rendah daripada kategori lain dalam anggaran nasional. Akan tetapi, tentara tidak terbiasa menjalankan peran pembangunan pada masa penjajahan, dan oleh karena itu, mereka dipandang oleh pemerintah sipil sebagai pemboros sumber daya yang langka. Militer tidak dapat menerima perubahan nasib ini, karena mereka telah menikmati banyak hak istimewa di

bawah pemerintahan kolonial. Ketika terjadi krisis anggaran, para prajurit mulai mempertimbangkan untuk mengambil alih kekuasaan. Keluhan dari tentara yang memberontak adalah bahwa rezim-rezim sipil telah secara drastis merongrong kinerja militer dengan tidak memberikan perlengkapan, perumahan, dan seragam yang memadai kepada tentara, dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian, upaya untuk meminimalkan peran politik tentara dengan mempertahankan otoritas sipil di negara kolonial yang dulunya dikendalikan oleh Eropa secara langsung bertanggung jawab atas intervensi militer dalam politik sipil.

Tampaknya, pemerintahan kolonial secara langsung bertanggungjawab atas pengambilalihan militer di Dunia Ketiga pasca kolonial, yang mencakup beberapa negara Muslim. Selama masa pemerintahan kolonial, jenis pemerintahan yang diberlakukan di negara-negara ini jelas mengisolasi tentara dari masyarakat. Tentara dibangun sebagai institusi yang terlalu maju yang memiliki keunggulan dan monopoli atas hukum dan ketertiban. Di negara pasca kolonial, tentara mempertahankan keunggulannya. Institusi sipil, sebaliknya, sangat lemah selama pemerintahan pasca kolonial karena tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Akibatnya, di negara-negara pasca kolonial, ketika lembaga-lembaga sipil yang terbelakang gagal mengelola ekonomi dan administrasi, militer yang lebih maju mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, kebangkitan militer di banyak negara Muslim secara langsung berhubungan dengan periode panjang pemerintahan kolonial.

E. Soal Latihan:

1. Mengapa ketentaraan muncul dalam politik?
2. Jelaskan dinamika ketentaraan dalam politik suatu negara.
3. Bagaimana konsensus pakar memandang ketentaraan?
4. Apa urgensi ketentaraan dalam politik?
5. Bagaimana peran ketentaraan di perpolitikan Indonesia?

F. Sumber Bacaan

Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok penekan*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1984.

Milgram, Stanley. *Ketaatan pada Otoritas: Sebuah Pandangan Eksperimental*. New York: Harper & Row, 1974.

Mustaqim, Abdul, Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad), Yogyakarta: *Jurnal Analisis*, Vol. XI, No. 1, Juni 2011.

Morton, Rebecca. *Methods and Models: A Guide to the Empirical Analysis of Formal Models in Political Science*. New York: Oxford University Press, 1999.

Nasionalisme

A. Deskripsi Singkat

Bab ini menguraikan berbagai teori tentang nasionalisme, mendefinisikannya, dan menjelaskan fitur-fitur esensialnya.

B. Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami konsep Nasionalisme
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Nasionalisme Lanjutan

C. Penyajian Materi

Pendahuluan

Nasionalisme adalah contoh penting dari ideologi politik modern. Ideologi ini menekankan pada elemen-elemen umum di antara sekelompok orang dan mengklaim hak untuk memerintah sendiri secara nasional. Nasionalisme telah digabungkan dengan berbagai macam ideologi dan gerakan lain dan dieksploitasi oleh para pemimpin politik untuk tujuan tertentu. Nasionalisme telah digunakan untuk melegitimasi perjuangan melawan pemerintahan kolonial. Hal ini telah digunakan sebagai instrumen oleh beberapa negara untuk memaksakan kekuasaan mereka pada negara lain. Hal ini juga telah digunakan untuk menggulingkan rezim yang sedang berkuasa serta untuk menciptakan rasa kebangsaan di

antara masyarakat yang beragam. Apa itu nasionalisme? Apa saja fitur-fiturnya yang esensial? Apa saja fungsinya? Apa perbedaannya dengan etnisitas? Bagaimana seorang nasionalis berperilaku di arena internasional? Apakah nasionalisme sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dalam bab ini.

1. Definisi Nasionalisme

Nasionalisme sering kali bersifat samar dan misterius, dan oleh karena itu, orang mendefinisikannya dengan cara yang berbeda-beda. Pemikir Barat mendefinisikannya sebagai perpaduan emosional modern dari dua fenomena, yaitu patriotisme dan kebangsaan. Menurut pandangan populer ini, adalah kombinasi yang bervariasi dari kepercayaan dan kondisi yang sebagian didasarkan pada mitos dan sebagian lagi pada realitas dan bagi mereka, ini adalah keadaan pikiran, suatu tindakan kesadaran, identifikasi individu terhadap dirinya sendiri dengan kelompok di mana kesetiaan individu tersebut dirasa sebagai kewajiban terhadap negara-bangsa. Namun, rasa nasionalis ini, dalam tingkat yang cukup besar, telah didefinisikan secara kontras kepada mereka yang asing. Hal ini pada dasarnya merupakan perasaan menggemukkan kebencian dan kemarahan yang ditujukan kepada kelompok pesaing. Dalam beberapa kasus, ciri-ciri terpenting yang dipilih oleh kaum nasionalis adalah kesamaan warisan genetik, atau ras, tetapi hal ini selalu digabungkan dengan ciri-ciri budaya, terutama bahasa, agama, sastra, kesenian rakyat, adat istiadat, dan tradisi. Kesadaran nasional juga dapat berkembang dari orang-orang yang berbagi wilayah, pengalaman sejarah, atau institusi politik yang sama dalam jangka waktu yang lama. Para ahli sepakat bahwa meskipun faktor-faktor obyektif sangat penting untuk pembentukan kebangsaan, elemen yang paling penting adalah kehendak bersama yang hidup dan aktif. Nasionalisme tidak boleh disamakan dengan kelompok etnis, yang dalam pengertian yang paling umum mengacu pada kategori dasar manusia yang ditandai oleh kesatuan ras dan budaya.

Menurut pemikir Barat, doktrin nasionalis menyatakan bahwa umat manusia secara alamiah terbagi dalam bangsa-bangsa, bahwa

bangsa-bangsa dikenal melalui karakteristik tertentu yang dapat dipastikan, dan satu-satunya bentuk pemerintahan yang sah adalah pemerintahan sendiri yang bersifat nasional. Istilah kuncinya disini adalah nation, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti kelahiran. Bangsa menyiratkan, dengan demikian, kumpulan orang yang menjadi milik bersama karena sifat-sifat umum yang mereka miliki sejak lahir, yang diperoleh dari keluarga dan budaya ketika tumbuh dewasa atau hanya karena kehendak bersama. Hal ini menunjukkan bahwa nasionalisme dalam banyak hal lebih mirip dengan identitas agama daripada ideologi seperti konservatisme atau sosialisme.⁴⁴

Dalam istilah politik, sebuah bangsa memiliki pemerintahannya sendiri atau, jika tidak, kaum nasionalis yang tidak puas dapat mengklaim mewakili kepentingan politiknya. Tujuan mereka adalah untuk mencapai pemerintahan sendiri secara nasional, atau setidaknya semacam status politik khusus dalam kerangka kerja pemerintahan yang lebih besar. Sebagai contoh, orang Indonesia yang berbahasa Belanda, yang sebagian besar tinggal di Belanda, secara tradisional dianggap sebagai kelompok etnis yang berbeda di dalam negara Belanda. Dalam beberapa dekade terakhir, gerakan separatis telah muncul yang mengklaim hak kebangsaan bagi mayoritas penutur bahasa Belanda di negara ini.

2. Asal-usul dan Pengaruh Nasionalisme

Ideologi nasionalisme sangat modern. Rasa kebangsaan yang meluas dalam batas-batas negara yang jelas tampaknya telah berkembang pada abad ke-17 di antara orang-orang Prancis dan Inggris. Sebagai sebuah ideologi, nasionalisme muncul dari perpaduan berbagai ide dan peristiwa di Eropa dari tahun 1789 hingga 1815. Periode ini dimulai dengan Revolusi Prancis dan mencakup penaklukan kekaisaran Napoleon dan kekalahan terakhirnya oleh kekuatan-kekuatan Eropa yang anti-Prancis. Secara ideologis, rezim revolusioner menolak semua klaim tradisional atas otoritas politik, warisan, dan penaklukan. Sebaliknya, mereka percaya bahwa prinsip kedaulatan

⁴⁴ Crick, Bernard. *In Defense of Politics*. Magnolia, Mass: Peter Smith

Publisher, 1994; Dahl, Robert. *Modern Political Analysis*. New York: Prentice Hall, 1990.

pada dasarnya ada pada bangsa. Tidak seorang pun dapat menjalankan otoritas yang tidak berasal dari kedaulatan tersebut. Klaim ini ditulis dengan jelas dalam Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara, yang diadopsi pada tahun 1789 oleh Majelis Nasional.

Ideologi ini membuat takut para raja di Eropa, yang pada awalnya dipimpin oleh Hapsburg Austria, dan mengancam rezim revolusioner. Para pemimpin rezim revolusioner menyerukan persatuan nasional dan pengorbanan total dari tentara rakyat yang sangat besar. Angkatan bersenjata Prancis tidak hanya berhasil mempertahankan negaranya, tetapi juga menaklukkan wilayah-wilayah besar di Eropa, menyebarkan doktrin kedaulatan rakyat dan pembebasan dari otoritas agama dan politik tradisional. Namun, di bawah kekuasaan militer Napoleon Bonaparte, Prancis dipandang oleh banyak orang Spanyol, Italia, Prusia, Austria, dan Rusia sebagai penindas asing yang harus dilawan dan diusir. Ironisnya, Prancis mengobarkan dan mengintensifkan perasaan nasional di negara-negara Eropa lainnya, dan para penguasa tradisional mengeksploitasinya untuk memobilisasi populasi mereka melawan pasukan Napoleon. Meskipun para pemenang mencoba mengembalikan tatanan lama setelah 1815, mereka tidak dapat lagi membendung kekuatan baru ideologi dan gerakan nasionalis.

Sebagai contoh, sebagian besar wilayah Italia termasuk dalam Kekaisaran Hapsburg Austria, dan gerakan nasionalis Italia yang menginginkan pengusiran semua penguasa asing mulai aktif pada tahun 1830-an. Ideologi nasionalisme Italia yang paling terkenal, Giuseppe Mazzini (1805-1872), mendirikan Italia Muda, sebuah organisasi revolusioner yang berkomitmen untuk mencapai republik Italia yang bersatu dan merdeka. Mazzini menyatakan bahwa populasi manusia terlalu besar dan oleh karena itu, individu-individu dapat berhubungan secara langsung dengan orang lain hanya melalui bangsa-bangsa yang telah dibagi oleh Tuhan. Di Eropa, raja-raja yang egois telah mengabaikan batas-batas alam seperti sungai-sungai besar dan pegunungan yang dimaksudkan Allah untuk menandai batas-batas negara tertentu “hari ini, mungkin tidak ada negara selain Inggris dan Prancis yang batas-batasnya sesuai dengan rancangan ini.”

Mazzini mendesak banyak orang di Eropa untuk menyadari persatuan dan takdir mereka, membuang monarki asing, menciptakan pemerintahan mereka sendiri yang bebas, dan bekerja secara harmonis satu sama lain untuk mewujudkan tujuan Tuhan dalam membawa umat manusia ke zaman baru yang penuh kebahagiaan dan kepuasan. Mazzini menyerukan kepada rakyat Italia untuk menolak segala bentuk individualisme, untuk menenggelamkan diri mereka sendiri, bahkan sampai pada titik pengorbanan total, dalam gerakan nasionalis besar yang pada akhirnya akan membawa semua bangsa menuju kejayaan.

Ideologi serupa diartikulasikan oleh orang Jerman, Polandia, Rusia, dan Serbia, serta oleh para juru bicara yang memproklamirkan diri dari hampir semua kelompok etnis di Eropa pada abad ke-19, terutama mereka yang masih tergabung dalam kekaisaran Habsburg dan Ottoman (Turki) yang terdiri dari berbagai etnis. Pada tahun 1870, sebuah negara Jerman yang bersatu telah muncul. Pada akhir abad ke-19, peta Eropa telah berubah secara signifikan dengan munculnya negara-negara baru.

Gerakan nasionalis dan agitasi di Balkan dan tempat lain di Eropa Timur menyebabkan Perang Dunia Pertama (1914-1918). Selama perang tersebut, Presiden AS Woodrow Wilson menyatakan penentuan nasib sendiri bukanlah sekadar ungkapan. Ini adalah prinsip tindakan yang harus dilakukan. Perang ini berakar pada pengabaian hak-hak bangsa-bangsa kecil dan kebangsaan yang tidak memiliki persatuan dan kekuatan untuk membuat klaim yang baik untuk menentukan kesetiaan mereka sendiri dan bentuk kehidupan politik mereka sendiri.

Meskipun Wilson bermaksud agar hak penentuan nasib sendiri secara nasional hanya berlaku di Eropa, hak tersebut menyebar ke wilayah lain dan diambil oleh para pemimpin gerakan anti-kolonial di India Britania, Indocina Prancis, dan Hindia Belanda. Upaya-upaya nasionalis membantu membuat Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, dan Portugal menyerahkan kendali atas koloni-koloni mereka. Pada periode pasca-Perang Dunia II, kekuatan kolonial yang tersisa diusir dari wilayah luar negeri mereka. Pada tahun 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa diadopsi yang berjanji untuk menghormati “prinsip

persamaan hak dan penentuan nasib sendiri bagi semua orang” (Pasal I, ayat 2).

3. Penggunaan dan Penyalahgunaan Nasionalisme

Nasionalisme telah digunakan oleh banyak orang untuk tujuan yang beragam. Seperti yang dijelaskan oleh banyak pemikir Barat. Menurut mereka, nasionalisme bukanlah sebuah ideologi yang sudah ditentukan atau jenis gerakan politik yang dapat dijelaskan secara tepat dan ditransfer secara keseluruhan dari satu tempat ke tempat lain. Sebaliknya, nasionalisme adalah beberapa ide sederhana tentang hubungan antara negara dan budaya yang pertama kali muncul sebagai respons terhadap prestise negara-negara seperti Prancis dan Inggris. Ide ini diadopsi dan diadaptasi oleh para pemimpin politik di berbagai situasi yang menekankan elemen-elemen yang sangat berbeda dari model aslinya. Dengan cara ini, jenis-jenis nasionalisme berkembang biak dan masing-masing pada gilirannya dapat menjadi model bagi jenis-jenis lain yang pada gilirannya juga meminjam dan memodifikasi ide tersebut. Gagasan bahwa pengakuan politik atas budaya yang terpisah dapat digunakan untuk membela berbagai macam kepentingan.

Nasionalisme telah menjadi ideologi yang terhubung dengan berbagai macam kepentingan politik-politik dan kepentingan ekonomi. Hal ini telah dikaitkan erat dengan pembebasan nasional dari aturan-aturan asing. Nasionalisme juga telah dikaitkan dengan ideologi dan gerakan imperialisme, rasisme, fasisme, nazisme, sosialisme, dan komunisme. Bahkan yang dianggap sebagai pelaksana negara-negara merdeka dalam melayani kemanusiaan mendesak negara untuk memperluas misi peradaban kepada masyarakat yang mungkin kurang masyarakat Asia yang kurang beradab. Mereka percaya bahwa beberapa bangsa dibenarkan untuk mendominasi yang lain selama bangsanya yang menjadi tuan dan bukan korban.

Nasionalisme telah digunakan, sepanjang sejarah, oleh para pemimpin politik yang ambisius yang ingin merebut kekuasaan atau mereka yang baru saja naik ke tampuk kekuasaan. Sebagai contoh, para pencetus nasionalisme Jerman pada akhir abad ke-18 adalah para

intelektual muda dari keluarga sederhana. Mereka merasa frustrasi karena tidak mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan, yang umumnya diperuntukkan bagi putra-putra bangsawan. Selain itu, para pemuda yang terpinggirkan secara sosial ini membenci dan iri dengan pengaruh bahasa, sastra, ide, dan intelektual Prancis di tanah Jerman, terutama di istana Prusia di bawah kepemimpinan Frederick Agung. Oleh karena itu, mereka mengidealkan bahasa Jerman dan menyerukan sebuah komunitas budaya yang ideal di mana mereka akan memainkan peran utama.

Nasionalisme sebagai dukungan untuk elit pemerintahan baru jelas terlihat di sebagian besar negara yang muncul dari bekas kekaisaran kolonial Eropa sejak Perang Dunia II. Ketika negara-negara tersebut awalnya berada di bawah kendali Eropa, mereka bukanlah negara-bangsa. Di Afrika sub-Sahara abad ke-19, misalnya, ada sekitar ribuan kelompok budaya-linguistik yang berbeda, yang terorganisir secara politis ke dalam kelompok-kelompok suku, kepala suku, kerajaan, dan kekaisaran dalam persaingan memperebutkan koloni Afrika pada akhir abad itu, bangsa Eropa pemerintah menetapkan klaim teritorial mereka dengan batas-batas yang ditarik secara sewenang-wenang. Unit-unit administratif kolonial ini sering kali memasukkan musuh-musuh etnis yang mematikan dan memecah belah anggota dari kelompok etnis yang sama. Ketika para pemimpin gerakan nasionalis anti-kolonial memperoleh kemerdekaan untuk negara-negara bentukan Eropa ini dan menjadi elit pemerintahan yang baru, mereka selalu bersikeras bahwa batas-batas kolonial harus dihormati sebagai batas-batas teritorial negara baru mereka. Setelah menggunakan ideologi nasionalis untuk menginspirasi dan memimpin gerakan kemerdekaan, mereka berharap hal itu juga akan menciptakan rasa kebangsaan yang sama di antara masyarakat mereka yang beragam. Sekou Toure, pemimpin negara Guinea di Afrika Barat, dengan percaya diri meramalkan ketika ia mengambil alih kekuasaan dari Prancis: "Dalam tiga atau empat tahun, tidak ada yang akan mengingat persaingan suku, etnis, atau agama yang, di masa lalu, menyebabkan begitu banyak kerusakan pada negara kita dan penduduknya."

Harapan tersebut terbukti meleset jauh dari kenyataan, tidak hanya di Afrika tetapi juga di sebagian besar Dunia Ketiga. Ilmuwan politik Crawford Young percaya, bagaimanapun juga, bahwa kebijakan dan ideologi nasionalis telah dikombinasikan dengan beberapa keefektifan di beberapa negara, seperti Indonesia, Nigeria, Kamerun, dan Kenya, sehingga kesadaran nasional telah berkembang.

Etnonasionalisme

Nasionalisme sering kali digabungkan dengan etnisitas sehingga melahirkan apa yang dikenal sebagai Etnonasionalisme yang telah menjadi penyebab ketegangan yang terus menerus di negara-negara yang baru saja merdeka. Etnonasionalisme adalah keyakinan bahwa masyarakat harus diperintah hanya oleh penguasa dari kelompok etnis yang sama. Ini adalah klaim bahwa sebuah kelompok etnis adalah sebuah bangsa yang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri secara politik. Ketika kita mempertimbangkan bahwa lusinan kelompok etnis yang sadar diri dikompres ke dalam batas-batas sekitar ratusan entitas nasional yang berbeda, kita segera melihat potensi revolusioner dari kebanggaan etnis dan pertahanan diri.

Konflik etnis, yang terkadang parah dan penuh kekerasan, telah menghancurkan sebagian besar negara yang baru merdeka dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai contoh, dari tahun 1967 hingga 1970, kelompok etnis Ibo yang besar berusaha untuk memisahkan diri dari Nigeria dan mendirikan negara merdeka Biafra yang secara numerik lebih dominan. Upaya ini ditentang oleh pemerintah Nigeria dengan dukungan Uni Soviet dan negara-negara besar Barat.

Sebaliknya, pada tahun 1971, para pemimpin Bengali di Pakistan Timur mendeklarasikan pemisahan diri dari Pakistan Barat sebagai negara baru yang berdaulat, Bangladesh. Namun, Bangladesh tetap menjadi satu-satunya contoh di Dunia Ketiga tentang penentuan nasib sendiri yang berhasil dilakukan oleh etnonasionalis pada periode pascakolonial. Demikian pula, Timor Timur berhasil memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999.

Nasionalisme juga merupakan senjata ideologis yang penting dalam perjuangan kompetitif di antara kelompok-kelompok etnis

untuk memperebutkan kekuasaan dan sumber daya. Di Timur Tengah, perjuangan etnonasionalis untuk menguasai wilayah yang sama telah berlangsung selama beberapa dekade. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengklaim mewakili sebuah bangsa yang dirampas tanah airnya dan bertekad untuk mendapatkan kembali negaranya. Menentang klaim tersebut, Israel meyakini bahwa negara mereka adalah tanah air yang sah bagi orang-orang Yahudi yang telah lama diasingkan dan secara brutal menyangkal kebangsaan yang berbeda dari orang-orang Arab Palestina.

Nasionalisme Quebec Prancis-Kanada misalnya telah berkembang bersama dengan komunitas intelektual baru yang cukup besar dari warga Kanada yang berbahasa Prancis. Bahkan negara Inggris yang lama telah ditantang oleh kebangkitan nasionalisme Skotlandia dan Wales sejak tahun tujuh puluhan, terutama dalam melayani gerakan-gerakan yang memprotes kemerosotan ekonomi Skotlandia dan Wales. Nasionalisme dalam berbagai bentuk tampaknya akan tetap menjadi ciri khas dunia politik tanpa batas waktu. Hal ini masih dapat memberikan fokus emosional yang kuat untuk keluhan dan kebencian terhadap dominasi asing. Selama masih ada kelompok-kelompok etnis yang anggotanya merasa kesal terhadap dominasi asing dan menarik perhatian pada keunikan mereka, nasionalisme akan tetap ada. Seperti halnya semua ideologi politik penting lainnya, bentuknya yang tepat pada waktu dan tempat tertentu akan terus bergantung pada strategi dan nasib mereka yang menggunakan atau menentangnya dalam perjuangan untuk meraih kekuasaan. Komunitas global bersifat kompleks dan saling bergantung. Tindakan suatu negara atau individu terhadap negara lain mempengaruhi kehidupan masyarakat di belahan dunia mana pun. Dunia mencari perdamaian global, penghapusan konflik dan kerangka kerja hubungan internasional yang damai.

4. Nasionalisme dan hubungan internasional

Dengan dimulainya peradaban Sumeria, rasa memiliki suatu bangsa mulai menyebar ke seluruh dunia. Secara bertahap, peradaban Mesir, India, Cina, Ibrani, Fenisia, Yunani, Maya, dan Aztec lahir.

Namun, selama peradaban-peradaban ini tidak ada aturan sistematis untuk melakukan perilaku hubungan internasional, mereka dipandu oleh agresi dan jenis pertukaran tertentu dalam skala yang sangat terbatas. Selain itu, tidak ada aturan kerangka kerja untuk hubungan internasional.

Peradaban India dan Cina serupa, karena ada beberapa kontak di antara mereka. Namun, dunia Yunani secara geografis lebih luas daripada India atau Cina. Sementara India dan Cina tetap terisolasi dari seluruh dunia, orang-orang Yunani melakukan perjalanan dan penjelajahan. Selama 800 SM-322 SM, melalui penjelajahan mereka, orang-orang Yunani menemukan negara-negara lain di India, yaitu pantai Baltik, Spanyol, dan pantai Barat Laut Afrika dan mampu melakukan aktivitas perdagangan dengan pemerintah negara-negara ini dalam prosesnya, orang-orang Yunani membawa tiga bahan hubungan internasional. Mereka adalah: (a) pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara lain, (b) prosedur standar untuk menyatakan perang, dan (c) arbitrase dan konsiliasi melalui pihak ketiga, yaitu melalui proses tawar-menawar diplomatik. Pada dasarnya, peradaban Yunani memberikan penjelasan yang rasional tentang politik.

Setelah runtuhnya peradaban Yunani, peradaban Romawi yang kuat lahir dan berlanjut hingga tahun 436 M. Dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi, wilayah-wilayahnya dibagi menjadi dua unit yang jelas, yaitu Barat dan Timur. Bagian Barat dibagi menjadi beberapa unit politik, yang didominasi oleh agama Kristen, dan akhirnya pada pertengahan abad ke-17, semuanya berada di bawah kendali lima dinasti-Inggris, Prancis, Rusia, Austria, dan Spanyol. Bagian Timur berpindah ke tangan dua kelompok yang berbeda-Bizantium yang diperintah oleh Yunani dan Arab. Selama periode ini, Islam tiba di dunia Arab dan secara bertahap menyebar ke belahan dunia lainnya. Setelah berabad-abad, kekaisaran Bizantium dan Arab diambil alih oleh Turki Utsmaniyah yang berkuasa hingga akhir Perang Dunia I. Pada akhir Perang, Turki Utsmaniyah memberi jalan kepada negara baru yang disebut Turki pada tahun 1923.

Di bagian Barat, lima dinasti menandatangani Perjanjian Westphalia dan beberapa aturan hubungan internasional dikembangkan. Para raja sepakat bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan negara lain. Mereka akan menjadi mitra yang setara, dan jika perlu, mereka akan menyelesaikan perselisihan mereka melalui cara-cara damai. Selama periode ini, semua dinasti mulai menjajah negara-negara, terutama di Asia. Keseimbangan kekuatan yang dikembangkan melalui Perjanjian Westphalia, bagaimanapun, terus berlanjut hingga Revolusi Prancis pada tahun 1789. Aturan klasik keseimbangan kekuatan dipatahkan oleh ekspansi teritorial Napoleon. Napoleon melanggar perjanjian dan ingin menaklukkan seluruh Eropa. Kekuatan Eropa lainnya akhirnya dapat mengalahkan Napoleon pada Perang Waterloo. Pada tahun 1856, semua dinasti termasuk Prancis bertemu di Wina dan melalui Kongres Wina membentuk Konsili Eropa.

Semangat Kongres Wina tidak bertahan lama; hanya berlangsung hingga tahun 1876. Pada tahun 1870-an selama revolusi industri, jatuhnya monarki absolut dan akibatnya kebangkitan nasionalisme massa dan meningkatnya perbedaan di antara para elit penguasa, semua negara kecil di Eropa mulai memisahkan diri dari lima dinasti. Akhirnya, pada abad ke-19, penyatuan politik Jerman dan Italia terjadi. Semua negara kecil, yang pernah ditelan oleh lima dinasti, mulai bersiap-siap untuk membalas dendam. Dalam prosesnya, Eropa secara jelas terbagi menjadi dua blok yang jelas: di bawah kepemimpinan Jerman dan di bawah kepemimpinan Inggris. Puncak terakhir dari konflik ini adalah pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, yang berlanjut hingga tahun 1919. Setelah tahun 1920, meskipun ada upaya untuk perdamaian internasional melalui Liga Bangsa-Bangsa, tiga kekuatan baru muncul di kancah internasional - Fasisme, Nazisme, dan Komunisme. Jadi, perdamaian tidak kunjung datang. Pada tahun 1939, dunia siap menghadapi Perang Besar lainnya Perang Dunia II. Setelah Perang, negara-negara besar menyadari bahwa kolonialisme harus diakhiri dan mekanisme tertentu harus dikembangkan untuk perdamaian dan keamanan internasional. Akibatnya, negara-negara di Asia dan Afrika menjadi merdeka dan

aturan-aturan diplomasi, kebijakan luar negeri, dan sebagainya, mulai muncul dalam hubungan internasional

Konsep-Konsep Utama dalam Hubungan Internasional

Ada banyak konsep yang dibahas secara rinci dalam mata kuliah hubungan internasional. Beberapa konsep dasar tersebut adalah Kepentingan Nasional, Kekuatan Nasional, Kebijakan Luar Negeri, Diplomasi, Propaganda, Keamanan Nasional, dan Perdamaian Internasional.

Kepentingan Nasional

Kekuatan internasional merupakan inti dari politik internasional dalam mengejar kekuasaan politik global, setiap negara mengejar kepentingan nasionalnya. Ini berarti negara-negara mengejar apa yang baik untuk negara mereka secara keseluruhan dalam urusan dunia. Hal ini membuat peran negara dalam politik global menjadi egois. Sebuah negara dapat memberikan bantuan luar negeri kepada negara lain, namun di balik bantuan tersebut, ada motif kepentingan pribadi yang ingin menjadi baik dan populer di mata negara lain. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan definisi obyektif dari kepentingan nasional. Setiap negara melihat berbagai hal dalam politik internasional dari sudut pandangnya masing-masing. Sebagai contoh, pada tahun 1994, Hongaria bekerja sama dengan Amerika untuk bergabung dengan NATO, namun ketika Perancis dan Amerika meminta Hongaria untuk menggunakan wilayahnya untuk menghukum pembantaian artileri Serbia di Bosnia, Hongaria menolak untuk memenuhi permintaan tersebut karena Hongaria memperhitungkan hubungannya di masa depan dengan Serbia. Jadi, sulit untuk mengatakan apakah hal ini didasarkan pada kepentingan nasional atau kepentingan pribadi Hongaria.

Kepentingan nasional dapat dibagi menjadi empat kategori. Keempat kategori tersebut adalah a) vital versus sekunder; b) sementara versus permanen; c) spesifik versus umum; dan d) saling melengkapi versus bertentangan. Kepentingan vital adalah kepentingan yang secara serius mengancam kehidupan suatu negara yang dapat menyebabkan perang. Sebaliknya, kepentingan sekunder adalah sesuatu yang

tidak mendesak. Dengan kata lain, sebuah negara memiliki waktu untuk memutuskan dan oleh karena itu, dapat bernegosiasi dan berkompromi atas kepentingan sekundernya. Kepentingan permanen adalah sesuatu yang berlangsung selama berabad-abad, misalnya, niat Amerika untuk mempertahankan hegemoninya di seluruh dunia. Sebaliknya, kepentingan sementara adalah kepentingan yang hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu, misalnya, pendudukan Amerika di Irak pada tahun 2003. Sementara kepentingan khusus mengacu pada satu bidang seperti sanksi terhadap Irak, kepentingan umum berhubungan dengan sejumlah isu seperti deklarasi universal hak asasi manusia. Akhirnya, ketika negara-negara memiliki tujuan yang sama seperti berpartisipasi dalam gerakan melawan terorisme internasional, hal ini dapat disebut sebagai kepentingan yang saling melengkapi, namun ketika ada konflik tujuan dalam mengejar kepentingan tersebut, seperti perselisihan antara Amerika Serikat dan Prancis/Jerman/Rusia dalam masalah berperang melawan Irak pada tahun 2003, maka hal ini dapat disebut sebagai kepentingan nasional yang saling bertentangan. Dua negara yang bersekutu bisa saja memiliki kepentingan yang sama.

Kekuatan Nasional

Perebutan kekuasaan bersifat universal dalam ruang dan waktu serta merupakan salah satu ciri terpenting dalam politik internasional. Secara historis, kekuatan nasional telah didefinisikan sebagai sebuah atribut, yaitu kepemilikan kekuatan. Namun, di zaman modern, kekuatan nasional didefinisikan dalam hal hubungan daripada atribut. Saat ini, kepemilikan kekuatan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya unsur kekuatan nasional. Ini bisa menjadi salah satu unsur, tetapi ada juga pertanyaan tentang persuasi negara lain dalam hal manfaat ekonomi, bantuan militer atau bantuan asing. Ini adalah hubungan kekuasaan antara dua aktor politik di mana A memiliki kemampuan untuk mempengaruhi B untuk melakukan sesuatu. Artinya, A memiliki kekuatan atas B atau kekuatan nasional A lebih besar daripada B. Lerche percaya bahwa kekuatan nasional adalah kapasitas sebuah negara untuk memberikan pengaruh koersif kepada negara lain dan mampu menolak pengaruh yang diberikan oleh

negara lain kepadanya. Menurut Padelford, “Kekuatan nasional dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara yang digunakan untuk memajukan kepentingan nasionalnya dan mencapai tujuan nasionalnya.

Elemen-elemen Kekuatan Nasional

Elemen-elemen kekuatan nasional terdiri dari dua jenis: berwujud dan tidak berwujud. Unsur-unsur yang berwujud bersifat permanen dan unsur-unsur yang tidak berwujud bersifat sementara. Unsur-unsur berwujud yang utama adalah: pertama geografi, kedua populasi, ketiga sumber daya alam, keempat kapasitas industri, dan kelima organisasi militer. Elemen-elemen tidak berwujud yang utama adalah: pertama kepemimpinan, stabilitas politik, ketiga rencana ekonomi, keempat kohesivitas sosial, kelima posisi strategis, dan keenam efisiensi diplomatik. Faktor yang paling stabil yang menjadi dasar kekuatan sebuah negara adalah geografi. Elemen-elemen geografi adalah ukuran, lokasi, topografi, dan iklim negara. Ukuran negara sangat penting. Semakin besar wilayahnya, semakin besar kemungkinan kekuatan negara tersebut akan semakin besar. Saat ini, Cina, Rusia Amerika, dianggap sebagai kekuatan besar. Semuanya memiliki wilayah yang sangat luas. Lokasi juga penting. Misalnya sebuah negara yang dikelilingi oleh pegunungan seperti Afghanistan atau Swiss, tidak terlalu rentan dibandingkan dengan negara datar yang terletak di dataran yang luas dan tidak memiliki batas-batas alam yang kuat.

Politik internasional juga berkaitan dengan manusia. Sumber daya manusia dari setiap negara berpengaruh langsung pada kekuatan nasionalnya. Populasi adalah kekuatan besar. Tentu saja, tidak benar bahwa negara yang paling padat penduduknya adalah yang paling kuat. Sebagai contoh, meskipun Bangladesh memiliki populasi yang lebih besar daripada Jerman, Bangladesh tidak sekuat Jerman. Sangatlah penting untuk memiliki penduduk yang sehat, terlatih, cukup makan, dan berpengetahuan luas daripada penduduk yang kurang gizi, buta huruf, tidak terampil, dan berpenyakit. Kualitas penduduk lebih penting daripada kuantitas.

Kehidupan ekonomi suatu negara terutama ditentukan oleh kepemilikan, atau ketiadaan, sumber daya alam. Kepemilikan sumber daya seperti batu bara, besi, uranium, minyak, karet, bauksit, dan lain-lain sangat penting untuk produksi industri. Swasembada pangan juga penting. Metal sebagian besar tersedia di negara-negara besar, Cina, Prancis, dan Rusia dan Amerika. Namun, hanya memiliki sumber daya alam tidaklah cukup. Negara tersebut harus memiliki kapasitas industri untuk memanfaatkan mineral atau sumber daya tersebut. Sebagai contoh, Kongo memiliki banyak uranium, tetapi tidak memiliki tenaga nuklir. Di sisi lain, negara-negara kuat seperti Jepang, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat bergantung pada minyak bumi dari negara-negara Timur Tengah. Kualitas dan kapasitas produktif dari pabrik-pabrik industri, pengetahuan para ilmuwan, keterampilan para insinyur, kegeniusan para ilmuwan, organisasi manajerial semua ini adalah faktor-faktor yang menjadi dasar dari kapasitas industri suatu negara.

Manifestasi kekuatan nasional yang paling jelas dan langsung tersedia adalah kekuatan militer. Ukuran, organisasi, kualitas, dan kepemimpinan militer berkontribusi pada kepemilikan kekuatan nasional suatu negara. Kekuatan militer dapat diukur dalam hal jumlah tentara, ketersediaan peralatan dan persenjataan militer, dan dana yang dihabiskan untuk pertahanan. Tidak diragukan lagi bahwa kesiapan, pelatihan, sikap moral personel militer terhadap pemerintah mereka, asal-usul sosial-ekonomi angkatan bersenjata, kualitas, dan sumber peralatan biasanya mempengaruhi kinerja angkatan bersenjata dalam situasi tertentu.

Selain faktor-faktor berwujud di atas, elemen-elemen yang tidak berwujud juga turut memberikan kontribusi terhadap kepemilikan kekuatan nasional suatu negara. Efektivitas dalam kepemimpinan sangat mempengaruhi kekuatan suatu negara. Semua kekuatan besar memiliki pemimpin yang kuat. Churchill, Roosevelt, Stalin, Mao Zedong, Kennedy, de Gaulle, Tunku Abdul Rahman, Mahathir telah memberikan dampak yang mendalam pada sejarah dunia. Stabilitas dan kohesivitas sosial sebuah negara juga sangat penting. Negara bangsa yang bersatu secara internal biasanya lebih kuat dibandingkan

dengan negara bangsa yang terpecah-pecah berdasarkan ras, agama, wilayah, dan budaya. Negara yang tidak stabil secara politik tidak akan pernah makmur. Sistem politik yang stabil membutuhkan rencana ekonomi nasional jangka panjang juga untuk menjadi mandiri. Karena kurangnya pembangunan ekonomi, sebuah negara mungkin akan bergantung pada negara lain. Ketergantungan ekonomi suatu negara pada negara lain membuatnya bergantung secara politik di kancha internasional. Elemen kekuatan nasional yang tak berwujud yang terakhir adalah diplomasi. Diplomasi yang berkualitas tinggi akan membawa tujuan dan sarana kebijakan luar negeri menjadi selaras dengan sumber daya kekuatan nasional yang tersedia. Hal ini akan memanfaatkan sumber daya tersembunyi dari kekuatan nasional dan mengubahnya secara penuh dan aman menjadi realitas politik.

5. Nasionalisme Lanjutan

Kebijakan Luar Negeri

Kekuatan nasional tercermin dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Tidak ada negara yang dapat bertahan hidup saat ini tanpa mengembangkan hubungan luar negeri dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini mengarah pada perumusan kebijakan luar negeri. Menurut Roseanau, “politik luar negeri adalah seperangkat keputusan administratif yang diambil atas nama negara yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu di arena internasional. Dengan kata lain, luar negeri dalam kebijakan luar negeri berlaku untuk apa pun di luar batas-batas hukum suatu negara tertentu dan kebijakan didefinisikan sebagai panduan tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu negara untuk dirinya sendiri.”

Tujuan dan Sasaran Kebijakan Luar Negeri

Dalam berbagai tahap peradaban manusia, tujuan kebijakan luar negeri telah berbeda. Pada masa primitif, perluasan wilayah dan kelangsungan hidup adalah tujuan utama tujuan. Pada Abad Pertengahan, tidak hanya kelangsungan hidup dan perluasan wilayah, tetapi ekspansi agama juga menjadi tujuan kebijakan luar

negeri negara. Selama Kekaisaran Romawi Kekaisaran Romawi, tujuan kebijakan luar negeri adalah untuk menciptakan komunitas Kristen yang bersatu serta memperluas wilayah. Pada abad delapan belas, ada tiga tujuan utama tujuan ekspansi dinasti, komersial, dan kolonial. Pada masa sekarang, tujuan kebijakan luar negeri terbagi menjadi tiga kategori: Tujuan Inti, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Tujuan inti adalah: pertama mempertahankan diri sebagai sebuah unit politik; kedua membela negara-negara tetangga; ketiga mempertahankan wilayah-wilayah yang strategis dan sangat penting; dan keempat mendukung kelompok-kelompok etnis, bahasa, dan agama di seluruh dunia. Tujuan jangka menengah adalah: pertama perbaikan situasi ekonomi; kedua meningkatkan prestise nasional, misalnya pengembangan industri dan perluasan wilayah; dan ketiga perluasan diri yang dicapai dengan menduduki suatu wilayah atau mencari jalan masuk ke dalam pengadaan bahan baku negara lain. Tujuan jangka panjangnya adalah: pertama mempertahankan solidaritas ideologi; kedua mendukung pengendalian senjata; dan ketiga membangun Tatanan Ekonomi Baru.

Faktor-faktor Kebijakan Luar Negeri

Dalam hubungan internasional kontemporer, biasanya negara-negara mengikuti salah satu dari tiga jenis kebijakan luar negeri berikut ini: Isolasi, Non-blok, atau Koalisi/ Aliansi. Pilihan-pilihan kebijakan di atas bergantung pada lima faktor: a) struktur sistem internasional atau posisi negara dalam sistem internasional; b) kebutuhan ekonomi negara, dalam hal ini b) kebutuhan ekonomi negara, dalam hal bahan baku, dll.; c) ancaman yang dirasakan; d) lokasi geografis negara; dan e) kepemimpinan. Kebijakan isolasi ditentukan oleh rendahnya tingkat keterlibatan dalam sebagian besar isu-isu internasional, sehingga menciptakan tingkat transaksi diplomatik dan komersial yang rendah transaksi diplomatik dan komersial. Negara-negara yang tidak merasakan adanya ancaman mengikuti kebijakan isolasi; mereka mandiri dan dilindungi oleh hambatan geografis. Di sisi lain, negara-negara yang mengejar kebijakan non-blok tidak mandiri dan bergantung pada bantuan asing. Negara-negara yang berbagi nilai-nilai ekonomi yang sama, mandiri dan memiliki ancaman

atau ketidakamanan yang sama, biasanya membentuk aliansi atau koalisi. Demikianlah yang terjadi pada periode Perang Dingin, AS membentuk koalisi dengan negara-negara Eropa Barat, sementara bekas Uni Soviet membentuk aliansi dengan negara-negara komunis Eropa Timur. Namun, aliansi tersebut dapat hancur ketika terjadi konflik kepentingan di antara mitra koalisi.

Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri

Siapa yang membuat kebijakan luar negeri? Secara umum, ada tiga jenis keputusan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh sebuah negara: keputusan pragmatis yang merupakan hasil dari informasi rinci jangka panjang; keputusan krisis yang dibuat selama masa-masa ancaman besar; dan keputusan taktis yang mengarah pada perubahan keputusan pragmatis. Ada lima variabel yang menentukan keputusan kebijakan luar negeri. Variabel-variabel tersebut adalah variabel idiosinkratik, peran, birokrasi, nasional, dan sistemik. Idiosinkratik menyiratkan persepsi individu dari pengambil keputusan tertinggi. Variabel ini biasanya berkaitan dengan keputusan-keputusan krisis. Peran menandakan peran para pemangku jabatan, pemerintah dan kekuatan-kekuatan yang bersekutu. Variabel ini biasanya berkaitan dengan keputusan pragmatis. Birokrat terutama departemen intelijen atau anggota Kementerian Luar Negeri. Variabel ini juga berkaitan dengan keputusan-keputusan pragmatis. Negara mengacu pada sejumlah besar atribut nasional yang mempengaruhi hasil kebijakan luar negeri. Variabel ini berkontribusi pada keputusan pragmatis dan taktis. Variabel sistemik mengacu pada variabel-variabel di luar negara yang keputusan kebijakan luar negerinya dibuat. Hal ini mencakup kebijakan dan tindakan negara lain. Semua faktor ini berkontribusi pada perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Setelah kebijakan luar negeri dibuat, biasanya dieksekusi melalui empat metode utama: politik, yaitu melalui diplomasi, perjanjian, dan pakta; ekonomi, yaitu melalui bantuan luar negeri, kontrol tarif, embargo, dll.; propaganda, yaitu melalui propaganda, media, dan militer, yaitu melalui penggunaan kekuatan, angkatan bersenjata, dll.

Diplomasi

Kebijakan luar negeri suatu negara diimplementasikan melalui diplomasi. Di zaman modern, diplomasi merupakan instrumen penting dalam politik internasional. Istilah diplomasi berasal dari kata Yunani. Istilah ini memiliki beragam arti dalam literatur hubungan internasional. Beberapa penulis memandangnya sebagai seni melakukan negosiasi dalam proses pelaksanaan kebijakan luar negeri, yang lain menggunakannya secara bergantian dengan kebijakan luar negeri yang melibatkan seluruh proses hubungan luar negeri, atau yang lain lagi melihatnya sebagai proses atau metode yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, menurut Satow, diplomasi adalah aplikasi dari kecerdasan dan kepandaian serta kebijaksanaan dalam pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara merdeka. Di sisi lain, Nicholson mendefinisikan diplomasi sebagai pelaksanaan kebijakan luar negeri melalui negosiasi. Singkatnya, diplomasi adalah media yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan luar negeri.

Asal-usul Diplomasi

Sejarah diplomasi telah ada sebelum hubungan internasional modern selama berabad-abad. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke Cina kuno, India dan Mesir ketika diplomasi terutama melibatkan penyampaian pesan dan peringatan, pengajuan kasus, dan transfer hadiah dari satu kepala suku ke kepala suku lainnya. Semua praktik diplomatik kasar ini disempurnakan dan dilembagakan di Yunani dan Romawi kuno. Para utusan tidak hanya menjadi pembawa pesan, tetapi juga negosiator. Namun, utusan permanen pertama baru dibentuk pada abad ke-14 di bawah sistem negara merdeka di wilayah yang sekarang disebut Italia. Sejak saat itu, diplomasi telah melalui empat tahap yang berbeda. Tahap pertama disebut tahap diplomasi “bilateral” di mana para diplomat sebagian besar adalah agen raja. Selain itu, dalam sistem tersebut, pertukaran terjadi antara dua negara dan tidak melibatkan banyak negara. Proses diplomasi bilateral terus berlanjut hingga penandatanganan Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Dengan adanya perjanjian ini, terjadi pula perubahan dalam praktik

diplomasi. Tidak lagi bersifat bilateral, melainkan menjadi multilateral yang melibatkan lebih dari dua negara. Diplomasi multilateral ini merupakan tahap kedua dari diplomasi, yang terus berlanjut hingga akhir abad ke-18. Pada kuartal terakhir abad delapan belas, dua revolusi-Perancis dan Amerika-membawa perubahan dalam gaya diplomasi. Ada rasa partisipasi rakyat yang semakin meningkat dalam keputusan negara serta tumbuhnya rasa kerja sama di antara negara-negara. Kedua faktor ini membawa pada varian lain dari diplomasi yang melibatkan partisipasi tidak hanya beberapa negara, tetapi juga sejumlah besar negara dalam gaya reuni konferensi. Diplomasi konferensi membantu pembentukan organisasi-organisasi tertentu, seperti Palang Merah Internasional, Persatuan Pos Internasional, dan Asosiasi Turis Internasional, dll. Universal Postal Union adalah pencapaian pertama dari gaya diplomasi ini. Kongres Wina pada tahun 1855, Konferensi Den Haag pada tahun 1907, Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1920, Konferensi PBB pada tahun 1945, Konvensi Jenewa pada tahun 1961, Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001, dan sebagainya, merupakan contoh gaya diplomasi Konferensi. Namun, di samping itu, pada periode pasca Perang Dunia II, terdapat pula pertumbuhan jenis diplomasi keempat. Pertumbuhan komunikasi internasional dan hubungan telepon telah mengarah pada perkembangan “diplomasi pribadi”. Saat ini, kepala negara atau pemimpin melakukan negosiasi langsung, bertemu dan mendiskusikan masalah daripada melalui agen-agen diplomatik.

Misi Diplomatik

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 membagi kepala misi diplomatik ke dalam tiga kategori umum. Dua kategori pertama terdiri dari duta besar/komisaris tinggi dan menteri. Para diplomat ini secara resmi diserahkan kepada kepala negara tuan rumah. Kategori ketiga terdiri dari kuasa usaha. Para diplomat ini diakreditasi oleh menteri luar negeri negara tuan rumah. Pembentukan misi tidak otomatis. Hal ini terjadi setelah adanya persetujuan bersama dari pemerintah yang terlibat. Duta besar dan

menteri mewakili kepala negara dari negara pengirim dan diterima oleh kepala negara dari negara penerima.

Semua diplomat memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan tertentu. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, para diplomat selalu dianggap seperti berada di tanah airnya sendiri. Kedua, hak-hak istimewa tersebut memberikan kebebasan bagi para diplomat untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Diplomat yang terakreditasi dengan baik biasanya menerima empat jenis kekebalan dan keistimewaan. Mereka kebal dari penuntutan; pejabat kepolisian negara tuan rumah tidak dapat menangkap mereka; agen penegak hukum setempat tidak dapat menegakkan hukum di tempat dan kediaman kedutaan; dan mereka kebal dari pajak lokal. Namun demikian, para diplomat diharapkan untuk mematuhi peraturan dan regulasi negara tuan rumah. Seorang diplomat tidak boleh terlibat dalam urusan politik internal negara tuan rumah dan juga tidak boleh memberikan bantuan keuangan apa pun kepada partai politik setempat. Dalam kasus-kasus tersebut, diplomat dapat dideportasi ke negara asalnya.

Fungsi Diplomat

Para diplomat menjalankan berbagai macam fungsi. Fungsi-fungsi tersebut berkisar dari kegiatan rutin hingga keputusan-keputusan sulit selama masa krisis. Para diplomat biasanya menjalankan empat jenis fungsi: perlindungan warga negara, perwakilan, pelaporan, dan negosiasi. Melindungi nyawa dan harta benda warga negara pengirim di negara penerima adalah fungsi rutin. Dalam keadaan darurat, misi perlu membantu warga negara mereka sendiri. Fungsi rutin juga mencakup pencatatan kelahiran, kematian, dan pernikahan, penerbitan, pengesahan, dan penggantian paspor warga negara pengirim yang tinggal di negara penerima. Fungsi substantif dari misi diplomatik adalah pelaporan dan negosiasi. Laporan dari para diplomat adalah bahan baku kebijakan luar negeri. Para diplomat biasanya mengumpulkan informasi melalui tiga jalur: jurnal lokal, surat kabar, pesta hiburan, dan pertemuan langsung dengan para menteri. Pada dasarnya, apa yang dilaporkan ke negara asal dapat

disebut sebagai informasi intelijen. Fungsi substantif terakhir dan utama dari para diplomat adalah negosiasi. Para diplomat mengatur panggung, waktu dan proses negosiasi antara para pemimpin dan negara. Negosiasi melibatkan pengiriman pesan antara kementerian luar negeri dari negara pengirim dan negara penerima. Terlepas dari sifat pesan yang diberikan, banyak hal yang bergantung pada cara dan gaya penyampaian. Dengan demikian, proses negosiasi merupakan hal yang penting dalam tingkat kebijakan dan implementasi diplomasi.

Pada masa sekarang ini, struktur dan instrumen diplomasi berubah. Meskipun sebagian besar negara melaksanakan tanggung jawab diplomatik formal mereka melalui misi diplomatik mereka, semakin banyak lembaga pemerintah yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Pertumbuhan teknologi telah mengurangi peran penting para duta besar dan staf mereka menjadi hampir tidak berarti.

Instrumen Ekonomi dari Kebijakan Nasional

Transaksi ekonomi internasional telah menjadi komponen penting dalam kehidupan modern dan tujuan kesejahteraan pemerintah. Selain keamanan, prestise, dan otonomi, pemerintah mencari akses ke pasar dan sumber pasokan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik mereka. Namun, transaksi ekonomi terkadang menimbulkan konflik serius ketika satu negara menggunakannya sebagai instrumen untuk melawan negara lain. Dalam banyak kasus, negara maju menggunakannya sebagai instrumen hukuman terhadap negara berkembang. Kadang-kadang, tentu saja, instrumen ekonomi dapat berupa bantuan atau dukungan seperti pencairan bantuan luar negeri atau pemberian tarif yang menguntungkan. Teknik-teknik pemaksaan dari instrumen ekonomi ada banyak. Yang utama di antaranya adalah sebagai berikut:

Tarif

Hampir setiap negara di dunia memberlakukan pajak pada produk buatan luar negeri untuk meningkatkan pendapatan dan untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan asing.

Namun, terkadang, tarif yang berlebihan dikenakan pada produk negara tertentu sebagai bujukan atau hukuman kebijakan luar negeri.

Kuota

Pemerintah dapat menetapkan kuota dan bukan tarif untuk mengendalikan impor komoditas tertentu dari negara tertentu.

Boikot

Pemerintah juga dapat mengorganisir boikot perdagangan untuk menghilangkan impor komoditas tertentu atau keseluruhan produk ekspor yang dijual oleh negara yang diboikot.

Embargo

Pemerintah yang ingin menghukum negara tertentu dapat melarang perusahaannya sendiri untuk melakukan transaksi dengan organisasi bisnis di negara tersebut yang menjadi sasaran embargo.

Daftar hitam

Pemerintah menggunakan daftar hitam untuk mengidentifikasi organisasi komersial yang melakukan bisnis dengan negara target. Sebagian besar pemerintah Muslim telah mempertahankan daftar hitam terhadap perusahaan-perusahaan asing yang melakukan bisnis dengan Israel.

Perizinan

Lisensi ekspor dan impor diperlukan untuk transaksi bisnis dan lisensi tersebut dapat diberikan atau ditolak.

Pembekuan Aset

Dalam ekonomi global ini, banyak individu, perusahaan, dan pemerintah sering kali menyimpan aset di luar negeri. Jika cukup besar, aset tersebut dapat menjadi sandera. Pada tahun 1979, Amerika Serikat membekukan aset Iran senilai hampir miliaran sebagai pembalasan atas penyanderaan di Kedutaan Besar AS di Teheran setelah revolusi Iran.

Dumping

Terkadang, pemerintah menjual produk mereka di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok produk untuk memenuhi persaingan. Perdagangan luar negeri dilakukan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga produk dalam perdagangan internal.

Pembelian Pre-emptive

Terkadang, pemerintah membeli seluruh jumlah produk tertentu dari suatu negara untuk menipu negara musuh yang ditargetkan agar tidak memiliki produk tersebut. Seluruh substansi dari prinsip pre-emptive buying terletak pada pengalihan pasokan dari musuh terlepas dari pertimbangan komersial.

Menangguhkan Bantuan

Negara-negara donor dapat memanipulasi jumlah dan jenis bantuan luar negeri dan pemberian materi militer untuk tujuan politik yang dapat memiliki dampak penting pada kemampuan negara untuk mempertahankan diri. Pemerintah memilih instrumen terbaik yang tersedia sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, jenis kerentanan ekonomi yang dihadapi oleh negara sasaran dan biaya serta risiko komparatif dari berbagai teknik. Dalam semua hubungan internasional, pemerintah yang memanipulasi instrumen-instrumen ini berusaha untuk mengubah sikap dan perilaku, baik dalam maupun luar negeri, dari pemerintah target.

Propaganda

Dengan berkembangnya komunikasi massa, propaganda media telah menjadi instrumen yang sangat berguna dalam mempengaruhi opini dunia. Kurang lebih setiap pemerintah menggunakan propaganda sebagai sarana untuk mempengaruhi opini publik baik di dalam maupun di luar negeri. Propaganda pada dasarnya melibatkan proses persuasi, dan tidak selalu benar. Hal ini lebih bergantung pada pemilihan fakta, penjelasan parsial dan jawaban yang telah ditentukan. Setelah target diputuskan, para propagandis menggunakan

berbagai teknik khusus dalam menyampaikan pesan-pesannya. Di antara mereka, yang paling menonjol adalah Propagandis yang melekatkan simbol yang sarat emosi pada seseorang atau negara. Propagandis mengaitkan himbauan mereka dengan stereotip yang sudah ada pada audiens

Keamanan Nasional dan Perang

Keamanan nasional adalah konsep yang sangat penting dalam politik internasional. Keamanan nasional berarti jaminan integritas teritorial dan kedaulatan suatu negara. Pemerintah harus melawan setiap tekanan eksternal terhadap kedaulatannya. Negara harus bebas dari segala jenis kecemasan psikologis. Dalam sejarah hubungan internasional, banyak pemerintah yang melancarkan perang agresi atau intervensi militer yang signifikan di luar negeri dan mengklaim bahwa kebijakan mereka dirancang untuk mempertahankan atau melestarikan keamanan nasional. Ini adalah alasan untuk intervensi Amerika di Irak pada tahun 1990 dan di Afghanistan pada tahun 2001. Semua negara mempertahankan kekuatan militer, sehingga negara dapat menghadapi ancaman di masa depan. Ancaman tersebut dapat berupa kejahatan, pemberontakan, pemisahan diri, revolusi, terorisme, atau bahkan perang.

Dengan demikian, atas nama keamanan nasional, perang telah sering terjadi dalam sejarah politik dunia. Kadang-kadang, perang tersebut berbentuk perang saudara, perang terbatas, dan perang konvensional atau bahkan perang internasional, perang total atau perang nuklir. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang definisi perang yang sebenarnya. Quincy Wright mengatakan, "Setiap konflik bersenjata antara dua atau lebih negara adalah perang." Charles Hodges menunjukkan bahwa "penggunaan kekuatan bersenjata yang terorganisir untuk melawan suatu negara untuk mencapai tujuannya adalah perang." Singkatnya, perang adalah perjuangan di antara unit-unit politik, di dalam dan di antara negara-negara yang melibatkan kekuatan tempur yang terorganisir, dan mengakibatkan jatuhnya korban yang cukup banyak.

Perang dapat terjadi karena sejumlah alasan. Sejarah menunjukkan serangkaian penyebab perang. Sebuah tinjauan literatur tentang penyebab perang mengungkapkan setidaknya tujuh faktor utama atau kondisi yang bertanggung jawab atas pecahnya perang. Mereka adalah agresi manusia, fatalisme elit dan populer mengenai perang, konspirasi kelompok kecil, imperialisme ekonomi, ekspansionisme dan irredentisme nasionalis, ketidakmampuan sistemik, dan siklus umum sejarah.

Agresi Manusia

Banyak orang percaya bahwa perang berakar pada sifat dasar manusia. Pemikir politik terkenal seperti Hobbes dan Machiavelli percaya bahwa manusia pada dasarnya egois dan agresif. Lingkungan internasional tidak memiliki penegakan normatif dan politik seperti yang dimiliki oleh masyarakat sipil, dan oleh karena itu, tidak mampu mengekang kecenderungan manusia untuk melakukan kekerasan dalam skala global.

Fatalisme Elite dan Populer serta Kesalahan Persepsi

Robert Jervis berpendapat bahwa kesalahan persepsi, gambaran yang terdistorsi, perhatian yang selektif terhadap bukti-bukti yang mendukung keyakinan atau kesalahpahaman seseorang, berpikir dan bereaksi dengan analogi historis, mengasosiasikan kesatuan tujuan dan kekompakan kebijakan dengan musuh yang dianggap sebagai lawan oleh para pengambil keputusan, dapat menyebabkan perang.

Konspirasi Kelompok Kecil

Terkadang pemerintah atau sebuah kelompok di dalam pemerintahan berkonspirasi untuk menimbulkan konflik bersenjata. Novelis Inggris H.G. Wells menekankan perilaku aneh para kepala pemerintahan dalam penafsirannya tentang asal-usul dua perang besar. David Bergamini menunjukkan bagaimana “konspirasi kekaisaran” Jepang bertanggung jawab untuk mengobarkan perang pada tahun 1939.

Imperialisme Ekonomi

Perjuangan untuk merebut pasar baru atau untuk mengendalikan sumber bahan baku baru mendorong pemerintah untuk memulai usaha imperialis yang tak pelak lagi menghasilkan konflik bersenjata. Imperialisme tidak hanya membawa perang melawan rakyat calon koloni, tetapi juga perang melawan kekuatan kolonial saingannya.

Ekspansionisme Nasionalis

Negara-negara yang berusaha untuk memperluas kontrol teritorial mereka dan mendominasi negara lain secara ekonomi dan politik menunjukkan nasionalisme ekspansionis. Di sisi lain, nasionalisme ekspansionis ditunjukkan oleh kelompok-kelompok orang yang mencari penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan dari kendali politik negara-negara yang ada. Nasionalisme Jerman bertanggung jawab atas Perang Dunia II. Varian lain dari nasionalisme ekspansionis adalah irredentisme, di mana sebuah negara mengklaim hak historis atas sebagian wilayah negara lain dan kesamaan etnis dengan penduduk di wilayah tersebut. Sebagai contoh, Siprus diklaim oleh Turki (secara geografis) dan Yunani (secara etnis). Ekspresi nasionalisme juga dapat berupa separatisme ketika sekelompok orang di suatu wilayah negara berjuang untuk merdeka dari negara tuan rumah, seperti wilayah Mindanao-Sulu di Filipina. Semua hal ini dapat menyebabkan perang.

Ketidakmampuan Sistemik

Perang dapat dengan mudah terjadi jika sistem global lemah. Secara historis, sistem perimbangan kekuatan, baik bipolar maupun multipolar, telah membantu meminimalkan ketegangan antar pemerintah. Namun, setiap kali tidak ada keseimbangan kekuatan, konflik bersenjata menjadi tidak terhindarkan. Tidak adanya Perang Besar yang terbuka sejak tahun 1945 menunjukkan keberhasilan sistem global.

Siklus Umum Sejarah

Akhirnya, perang adalah sebuah siklus sejarah. Dalam sistem global, entah bagaimana satu atau dua kekuatan menjadi dominan, namun lambat laun negara hegemonik menjadi rentan terhadap tantangan dari negara lain, yang berujung pada perang. Ibnu Khaldun menulis, “Tujuan dari peradaban adalah budaya dan kemewahan. Ketika peradaban mencapai tujuan tersebut, ia akan berubah menjadi rusak dan mulai pikun, seperti yang terjadi pada kehidupan alamiah makhluk hidup.” Penjelasan di atas tentang penyebab perang memberikan gambaran kepada kita bahwa perang dapat terjadi karena berbagai alasan. Hal ini memunculkan tiga jenis teori: perang dipandang sebagai sesuatu yang tak terelakkan, perang dipandang sebagai sesuatu yang tidak disengaja, dan perang dipandang sebagai aktivitas kriminal yang direncanakan.

Perdamaian Internasional

Batu kunci dari politik internasional modern adalah dorongan untuk menciptakan perdamaian internasional. Penghapusan konflik bersenjata dan penguatan cara-cara penyelesaian konflik merupakan faktor dalam mempromosikan perdamaian internasional. Kunci utama dari formula untuk menghindari kekerasan internasional adalah memperkuat komitmen, dan mesin untuk penyelesaian sengketa secara damai. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan perkembangan logis dari langkah-langkah yang harus diikuti oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Cara-cara tradisional untuk penyelesaian sengketa secara damai adalah negosiasi, jasa baik, mediasi, penyelidikan, konsiliasi, arbitrase, dan adjudikasi.

Negosiasi adalah langkah pertama. Negosiasi melibatkan diskusi langsung antara atau di antara para pihak yang bersengketa. Jasa-jasa baik melibatkan bantuan pihak ketiga yang hanya menawarkan saluran komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi juga melibatkan pihak ketiga, tetapi dengan saran penyelesaian. Konsiliasi mirip dengan mediasi kecuali untuk perbedaan hukum bahwa pihak ketiga adalah komisi atau badan internasional yang bantuannya telah diminta untuk menemukan solusi yang memuaskan pihak-pihak

yang bersengketa. Arbitrase adalah cara untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum pada suatu kontroversi dalam batas-batas yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Panel hakim atau arbiter dibentuk berdasarkan perjanjian khusus dari pihak-pihak yang terlibat atau berdasarkan perjanjian arbitrase yang sudah ada. Terakhir, adjudikasi atau penyelesaian yudisial adalah proses pengajuan sengketa ke pengadilan internasional untuk diputuskan. Pengadilan akan memutuskan sengketa tersebut. Semua cara penyelesaian sengketa secara damai ini bisa saja gagal. Ketika semua cara damai telah habis, pihak mana pun dapat membawa masalah ini ke Dewan Keamanan. Dewan Keamanan sendiri juga dapat mulai membahas masalah tersebut.

Jika Dewan memutuskan bahwa ada ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi, maka Dewan memutuskan suatu tindakan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian. Pertama, Dewan Keamanan menerapkan sanksi ekonomi, komunikasi, dan diplomatik. Jika gagal, maka Dewan Keamanan menggunakan cara-cara militer untuk memulihkan perdamaian. Namun, pada kenyataannya, penerapan sanksi menjadi sangat sulit karena sebelum sanksi dapat diterapkan, harus ada “(1) kesepakatan bahwa agresi atau ancaman terhadap perdamaian telah terjadi; (2) identifikasi pihak yang bersalah; dan (3) kebulatan suara atau persetujuan di antara semua anggota tetap Dewan Keamanan bahwa tindakan tersebut diperlukan.” Namun, terlepas dari hambatan-hambatan ini, sarana-sarana tersebut diperlukan untuk pemeliharaan perdamaian internasional.

D. Rangkuman Materi

Argumen-argumen yang dikemukakan di atas menjadi dasar bagi para cendekiawan Muslim seperti Sayyid Mawdudi, Hassan al, Sayyid Qutb, dan lainnya untuk mengambil sikap tegas menentang segala bentuk nasionalisme. Bagi mereka, nasionalisme adalah akar dari semua bencana dan masalah yang dihadapi umat manusia saat ini. Mereka bahkan menolak penggunaan nasionalisme sebagai alat untuk memobilisasi opini massa untuk melawan dominasi asing.

Nasionalisme, dengan penekanannya pada kedaulatan rakyat, sekularisme dan partikularisme sempit, bertentangan dengan sistem berbasis syariah dan universalisme Islam. Nasionalisme menciptakan semangat intoleransi. Ini adalah prevalensi perasaan pahit dan kebencian di antara orang Prancis dan Jerman yang sebagian bertanggung jawab atas dua Perang Dunia. Setiap anak di Prancis diajarkan setelah tahun 1871 bahwa mereka harus membalas dendam terhadap Jerman yang telah mempermalukan Prancis pada tahun 1871. Jika setiap kelompok nasional mengikuti kebijakan imperialis, pasti akan ada konflik dan kepahitan. Patriotisme atau kecintaan terhadap negara, telah ditunjukkan, tidak pernah buruk tetapi tidak boleh diarahkan ke saluran yang sempit untuk mempengaruhi kepentingan negara lain. Jika cinta terhadap negara sendiri menyiratkan kebencian terhadap negara lain, nasionalisme semacam itu pasti akan menghalangi perkembangan manusia. Dengan kata lain, nasionalisme harus berjalan seiring dengan Internasionalisme.

Internasionalisme adalah perasaan bahwa seseorang bukan hanya anggota negaranya tetapi juga warga dunia. Perasaan seperti itu mendorong kerja sama yang damai di antara negara-negara di dunia. Internasionalisme menyiratkan sebuah masyarakat internasional di mana negara-negara bangsa hidup dalam keharmonisan dan kedamaian satu sama lain. Ini membayangkan kerja sama dan koordinasi internasional dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Internasionalisme tidak berarti penghapusan negara-bangsa. Sebaliknya, Internasionalisme bergantung pada keberadaan negara-bangsa. Apa yang dituntutnya adalah bahwa dalam hal kedaulatan eksternal, negara-negara harus siap untuk menerima batasan-batasan tertentu untuk mempromosikan perdamaian internasional. Internasionalisme meminta penggantian prinsip keamanan nasional dengan prinsip keamanan kolektif dan prinsip kekuatan yang benar dengan prinsip supremasi hukum.

Dalam praktiknya, Internasionalisme meminta dari negara-negara hal-hal berikut ini:

1. Negara-negara harus terikat oleh keputusan-keputusan organisasi internasional dalam hal-hal yang mempengaruhi negara-negara lain.
2. Negara-negara harus setuju untuk tidak menggunakan perang untuk menyelesaikan perselisihan.
3. Negara-negara harus mencegah tindakan agresi terhadap dirinya sendiri atau negara lain dan membantu korban agresi dengan cara apa pun yang memungkinkan.

Para pengkritik menunjukkan bahwa Internasionalisme tidak dapat berkembang selama negara-bangsa masih ada. Nasionalisme adalah tantangan besar bagi Internasionalisme. Negara-negara telah melanggar hukum internasional untuk melindungi kepentingan nasional yang sempit. Dengan demikian, Afghanistan dan Irak telah diinvasi pada tahun 2002 oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk menjustifikasi kepentingan nasional. Negara-negara juga menolak mediasi internasional sebagai pelanggaran terhadap konsep kedaulatan nasional. Setiap keputusan yang dibuat oleh organisasi internasional, yang tidak sesuai dengan kepentingan suatu negara, dianggap merendahkan kedaulatan nasional. Fanatisme ideologis negara-negara nasional telah membuat mereka tidak dapat didamaikan dengan perdamaian dunia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa nasionalisme dan Internasionalisme tidak konsisten satu sama lain.

Namun, orang-orang di seluruh dunia percaya bahwa negara-bangsa harus bekerja sama untuk mencapai perdamaian dunia. Tidak ada yang tidak konsisten dalam mencintai negara sendiri dan mencintai negara tetangga. Kecintaan terhadap negara sendiri tidak boleh menuntut penghancuran negara lain. Ada kesadaran bahwa perang menjadi semakin merusak dan tanpa adanya Internasionalisme, ada kemungkinan umat manusia akan benar-benar hancur. Internasionalisme muncul sebagai kekuatan yang kuat di dunia. Terobosan ilmiah terutama dalam teknologi komunikasi telah menyempatkan jarak dan waktu dan telah menghubungkan seluruh dunia. Ada terlalu banyak saling ketergantungan ekonomi sehingga dunia disebut sebagai desa global. Kesatuan dunia dalam bidang budaya dan ekonomi telah membuat orang berpikiran internasional.

Ancaman perang nuklir telah membuat orang-orang bergantung pada organisasi internasional untuk melindungi mereka.

E. Soal Latihan:

1. Jelaskan definisi nasionalisme.
2. Bagaimana suatu negara memulai nasionalisme?
3. Bagaimana nasionalisme memperpanjang tujuannya diranah hubungan internasional?
4. Bagaimana konsensus memandang konsep nasionalisme?
5. Bagaimana situasi nasionalisme di Indonesia? Berikan pandangan kritis anda.

F. Sumber Bacaan

Dahl, Robert. *Modern Political Analysis*. New York: Prentice Hall, 1990.

Dault, Adhyaksa, *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Dinihari, Kurniawan. *Buku Pintar 34 Provinsi Di Indonesia*. Diva Press. 2018

Easton, David. *Sistem Politik: Sebuah Penyelidikan tentang Ilmu Politik*. Chicago University of Chicago Press, 1981.

Easton, David, et.al. *The Development of Political Science*. New York: Routledge, 1991.

BAB 10

Feminisme

A. Deskripsi Singkat

Bab ini menguraikan berbagai teori tentang feminisme dalam politik, mendefinisikannya, dan menjelaskan fitur-fitur esensialnya.

B. Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami konsep Feminisme
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Feminisme Dalam Politik

C. Penyajian Materi

Pendahuluan

Feminisme adalah istilah kolektif untuk sistem kepercayaan dan teori yang menekankan hak-hak perempuan dan posisi mereka dalam masyarakat. Istilah “feminisme” umumnya digunakan untuk gerakan hak-hak perempuan, yang mengampanyekan kesetaraan politik, sosial, dan ekonomi sepenuhnya antara perempuan dan laki-laki. Gerakan ini berakar pada humanisme abad ke-18 dan Revolusi Industri. Feminisme bukanlah sebuah ideologi tunggal. Seiring berjalannya waktu, beberapa sub-jenis ideologi Feminisme telah berkembang. Gelombang pertama, yang dimulai sekitar tahun 1800, sebagian besar berkaitan dengan mendapatkan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki. Gelombang kedua, yang dimulai

pada akhir 1960-an, terus memperjuangkan kesetaraan, tetapi juga mengembangkan berbagai teori dan pendekatan yang menekankan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Baru-baru ini, generasi baru feminis telah memulai feminisme gelombang ketiga yang radikal dan ekstrem. Bab ini mempelajari feminisme dan melihatnya dari perspektif Islam.

1. Feminisme

Para feminis disatukan oleh gagasan bahwa laki-laki dan perempuan harus setara secara politik, ekonomi dan sosial. Ini adalah inti dari semua teori feminisme. Terkadang, definisi ini juga disebut sebagai feminisme inti atau teori feminis inti. Feminis menegaskan kesetaraan mutlak dan tanpa syarat antara pria dan wanita, tidak memandang perbedaan anatomi. Para feminis masa kini menentang peran sosial apa pun yang ditentukan oleh jenis kelamin. Mereka menyangkal adanya perbedaan biologis yang melekat antara pria dan wanita berdasarkan jenis kelamin yang menentukan bahwa istri harus menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi ibu, serta suami sebagai pencari nafkah. Mereka menuntut penghapusan institusi pernikahan, rumah tangga dan keluarga.

Mereka menuntut upah yang sama, pendidikan yang sama dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Mereka bersikeras bahwa semua perempuan harus diberi hak untuk mengontrol penuh kehidupan reproduksi mereka, dan karenanya meminta kontrasepsi gratis dan aborsi sesuai permintaan pada setiap tahap kehamilan. Mereka menegaskan kebebasan seksual perempuan sepenuhnya dan bahwa pengasuhan anak harus menjadi tanggung jawab publik. Mereka menuntut hak perempuan untuk menentukan seksualitasnya sendiri dan mengakhiri diskriminasi terhadap lesbian.

Pemikiran feminis telah berhasil menarik perhatian publik terhadap ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dan struktur dalam masyarakat yang meremehkan dan menindas perempuan. Hal ini telah mengarah pada pertimbangan kembali peran perempuan di tempat kerja, yang menghasilkan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan upah dan kesempatan yang sama. Selain itu, feminisme

juga telah mengidentifikasi dan mengatasi masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Feminisme juga telah berhasil menantang persepsi tentang keterampilan perempuan, dengan hasil bahwa beberapa perempuan memasuki area non-tradisional pekerjaan perempuan seperti industri konstruksi.

Pendekatan terhadap Feminisme

Di Barat, ada dua kelompok teori umum, liberal dan Marxis, yang peduli dengan isu ini. Islam memiliki pendekatannya sendiri dalam menangani hak-hak dan keistimewaan perempuan. Pada bagian berikut, ketiga pendekatan tersebut-liberal, Marxis, dan Islam-dijelaskan secara rinci.

Kaum barat tentang Ferninisme

Marry Wollstonecraft dianggap feminis pertama yang dikenal dalam sejarah. Dalam bukunya *A Vindication of the Rights of Women* (1792), ia menentang konvensi pada masa itu bahwa satu-satunya tujuan perempuan adalah melahirkan dan membesarkan anak serta menyenangkan laki-laki. Ia sangat kritis terhadap praktik subordinasi sosial-ekonomi perempuan dalam masyarakat. Ia menuntut persamaan hak bagi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan administrasi.

Akan tetapi, ide-ide Wollstonecraft baru menjadi populer pada abad ke-19 melalui tulisan-tulisan Harriet Taylor dan John Stuart Mill. Dalam bukunya *Enfranchisement of Women* (1851), Harriet Taylor sangat mendukung perempuan yang sudah menikah untuk memiliki kehidupan dan karier sendiri. Dia berpendapat bahwa akan lebih baik “jika perempuan mendapatkan dan memiliki hak untuk memiliki, sebagian dari pendapatan keluarga. “Dia bahkan mengusulkan bahwa begitu perempuan diberi hak sipil dan politik penuh, tidak akan ada keharusan untuk menikah.⁴⁵

Meskipun sepenuhnya mengakui permohonan Taylor untuk membuka kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan hak pilih, pendidikan dan pekerjaan, John Stuart Mill percaya pada persahabatan

⁴⁵ Badran, M. *Feminism In Islam: Secular and Religious Convergences*. Oneworld publications. 2013.

antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan. Persahabatan seperti itu tidak hanya diinginkan untuk kepuasan emosional tetapi juga penting untuk perkembangan masyarakat manusia. Dalam bukunya *The Subjection of Women* (1869), Mill dengan jelas menyatakan bahwa subordinasi legal dari satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin lainnya adalah salah. Dia terus memprotes praktik tradisional yang menyangkal hak moral yang sama bagi perempuan untuk memilih pekerjaan sesuai dengan pilihannya. Dalam bukunya *On Liberty* (1859), Mill sangat prihatin dengan nilai kebebasan individu. Dia sangat mendukung pemberian hak suara kepada perempuan dan persamaan hak di bidang pendidikan dan pekerjaan. Dia tidak pernah menerima perbedaan bawaan antara pria dan wanita dan, oleh karena itu, berpendapat bahwa tidak hanya tidak rasional untuk membuat perbedaan ini tetapi juga berbahaya secara sosial. Sebaliknya, perlakuan terhadap perempuan secara setara akan bermanfaat bagi kebahagiaan dan kemajuan umat manusia. Penegasan mendasarnya adalah bahwa kesempatan yang sama tidak hanya akan menjamin pembebasan perempuan, tetapi juga pencapaian kesetaraan laki-laki dan perempuan, yang akan memperkuat persahabatan perkawinan dan kemajuan masyarakat manusia.

Pada abad ke-20, feminisme mulai menarik banyak pengikut. Memasuki dunia kerja mendorong mereka untuk menjadi lebih mandiri dan menuntut suami mereka untuk ikut andil dalam tugas-tugas rumah tangga dan pengasuhan anak. Dalam bukunya *The Feminine Mystique* (1963), Betty Friedan menunjukkan rasa frustrasi wanita terhadap norma-norma sosial yang berprasangka buruk terhadap mereka dan mengondisikan mereka untuk secara pasif menerima dominasi pria. Dalam pandangannya, perempuan harus menerima perlakuan yang adil dari masyarakat karena, meskipun ada perbedaan penting antara kedua jenis kelamin, perempuan memiliki hak untuk diperlakukan tanpa prasangka. Friedan akhirnya mendirikan *National Organisation of Women (NOW)* di Amerika Serikat dan memprakarsai gerakan feminis.

Namun, posisi teoritis kaum liberal telah ditantang dengan berbagai alasan. Pertama dan terutama, pembentukan demokrasi

dan deklarasi hukum tentang kesetaraan kesempatan tidak menjamin penghapusan perbedaan gender atau menghancurkan lembaga-lembaga negara yang menindas. Kaum liberal ingin memperbaiki situasi perempuan hanya dalam batas-batas struktur kekuasaan yang tidak adil.

Kaum Marxis tentang Feminisme

Berbeda dengan kaum liberal, kaum Marxis bersikeras bahwa negara sebagai sebuah institusi adalah alat kelas dominan untuk mengeksploitasi kelas-kelas subordinat dalam masyarakat. Pendekatan Marxis terhadap negara mendapat perlakuan yang sistematis dalam tulisan-tulisan Marx, Engels, Gramsci, Miliband, Poulantzas, dan banyak lagi. Mereka berkomentar bahwa negara dalam masyarakat kelas melayani kepentingan kelas dominan. Dalam kata-kata Marx sendiri, eksekutif negara modern hanyalah sebuah komite untuk mengelola urusan bersama seluruh borjuasi, dan bahwa kekuasaan politik adalah kekuasaan terorganisir dari satu kelas untuk menindas kelas lainnya. Miliband menambahkan bahwa negara melayani kepentingan kelas dominan karena kelas ini berdasarkan fakta bahwa mereka memiliki dan mengendalikan alat-alat produksi yang darinya mereka memperoleh kekuasaan politik.

Fungsi negara dalam mempertahankan dan memperluas sistem kapitalis dan melayani kepentingan kelas penguasa dijelaskan dalam hal penggunaan instrumental tekanan ekonomi dan politik oleh kelas penguasa dan secara langsung oleh wakil-wakilnya yang menduduki posisi strategis dalam aparatus negara. Poulantzas berargumen dengan cara yang berbeda, bahwa negara melayani kepentingan kelas yang berkuasa karena adanya kendala struktural di dalam sistem yang muncul dari struktur masyarakat kapitalis itu sendiri.

Berdasarkan pemahaman umum tentang negara dalam masyarakat kapitalis, kaum Marxis berusaha menjelaskan status sosial perempuan di seluruh masyarakat dengan menganalisis basis material masyarakat, dengan penekanan pada perubahan historis, kelas, dan moda produksi yang berlaku. Para feminis Marxis telah menambahkan pertanyaan tentang Perempuan pada pertanyaan

tentang kelas dalam masyarakat kapitalis. Mereka menganggap status gender sebagai hasil dari faktor ekonomi dan bukannya nilai-nilai budaya.

Kaum Marxis percaya bahwa ideologi muncul untuk membenarkan kondisi material dan status gender yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, asimetri seksual dijelaskan oleh hubungan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan terhadap alat produksi. Menurut Engels, penindasan terhadap perempuan terkait dengan munculnya kepemilikan pribadi. Laki-laki membentuk keluarga pribadi karena mereka ingin mewariskan harta benda mereka kepada anak-anak mereka, dengan demikian menggantikan hak keibuan dengan patrilinealitas. Kekalahan historis dunia dari jenis kelamin Perempuan ditandai dengan evolusi monogami dan penindasan seksual terhadap perempuan untuk menjamin keabsahan ahli waris. Perempuan menjadi tanggungan karena produksi mereka diturunkan ke ranah privat, yaitu di dalam unit keluarga. Dalam kata-kata Engels sendiri, dalam rumah tangga lama, yang terdiri dari banyak pasangan dan anak-anak mereka, tugas yang dipercayakan kepada perempuan untuk mengelola rumah tangga adalah tugas publik, sebuah industri yang diperlukan secara sosial seperti halnya pengadaan makanan oleh laki-laki. Dengan adanya keluarga patriarki dan terlebih lagi dengan adanya keluarga monogami, sebuah perubahan terjadi. Manajemen rumah tangga kehilangan karakter publiknya. Ia tidak lagi menyangkut masyarakat. Ini menjadi layanan pribadi; istri menjadi pelayan kepala, dikecualikan dari semua partisipasi dalam produksi sosial. Keluarga individu modern didirikan di atas perbudakan domestik yang terbuka atau tersembunyi dari istri, dan masyarakat modern adalah massa yang terdiri dari keluarga-keluarga individu sebagai molekul-molekulnya.

Menurut kaum Marxis, satu-satunya solusi untuk mengakhiri asimetri seksual adalah dengan mengembalikan perempuan ke dalam lingkup produksi sosial. Engels menekankan bahwa syarat pertama untuk pembebasan istri adalah dengan membawa seluruh peretasan seks perempuan ke dalam industri publik dan hal ini pada gilirannya menuntut agar karakteristik keluarga monogami sebagai

unit ekonomi masyarakat dihapuskan. Hal ini memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perempuan akan mendapatkan status melalui partisipasi mereka dalam produksi sosial. Dalam jangka panjang, partisipasi yang setara oleh perempuan dalam produksi sosial akan membantu mereka untuk bergabung dengan gerakan proletar untuk menghapuskan perbedaan kelas.

Para pengkritik pendekatan Marxis berargumen bahwa dengan penghapusan distorsi mendasar dari aturan kelas (yaitu dominasi kelas), masalah representasi yang stabil dari beragam kepentingan kelompok yang dihasilkan dari pembagian kerja akan mudah diselesaikan. Asumsi ini tidak dapat dipertahankan karena masih harus ada mekanisme untuk mengartikulasikan, mewakili, memediasi, dan pada akhirnya memutuskan antara bentuk-bentuk alternatif dan cara-cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Gagasan bahwa perempuan adalah korban pasif dari masyarakat kelas jelas tidak dapat diterima. Para pengkritik menyatakan bahwa seksisme, bukan kelasisme, pada dasarnya merupakan penyebab ketidaksetaraan dan bahwa hal itu tidak akan terselesaikan dengan penghapusan masyarakat kelas. Oleh karena itu, mereka menyerukan transformasi masyarakat yang lebih luas. Mereka berpendapat bahwa akar ketidaksetaraan perempuan karena penindasan bersifat biologis, pembebasan perempuan hanya dapat terjadi melalui revolusi biologis-teknologi.

Intinya, meskipun ketidaksetaraan gender mungkin ditentukan secara biologis, perbedaan biologis antara jenis kelamin sama sekali tidak dapat diubah. Disimpulkan bahwa transformasi masyarakat yang nyata membutuhkan, pertama-tama, pembebasan perempuan dari tirani biologi produktif mereka dengan segala cara yang tersedia, dan penyebaran peran melahirkan dan membesarkan anak kepada masyarakat secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan.

D. Rangkuman Materi

Feminisme merupakan gerakan sosial dan ideologi yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender, memperjuangkan hak-hak

perempuan, serta menantang ketidakadilan dan diskriminasi berbasis gender yang sering kali terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Feminisme tidak hanya berfokus pada isu-isu perempuan, tetapi juga memperjuangkan hak dan kebebasan bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, untuk hidup dalam kondisi yang adil dan setara.

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan tentang feminisme adalah:

1. **Kesetaraan Gender:** Feminisme berjuang untuk menghilangkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan hak-hak sosial. Gerakan ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, harus memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan publik.
2. **Pemberdayaan Perempuan:** Salah satu fokus utama feminisme adalah pemberdayaan perempuan, baik secara individu maupun kolektif. Ini termasuk memastikan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan yang adil, hak atas kesehatan, dan kebebasan untuk membuat keputusan mengenai tubuh dan hidup mereka sendiri.
3. **Menghadapi Struktur Sosial yang Patriarkal:** Feminisme mengkritik sistem patriarkal yang telah lama mendominasi banyak masyarakat, di mana kekuasaan dan otoritas sering kali lebih banyak dikuasai oleh laki-laki. Gerakan ini berupaya untuk meruntuhkan norma-norma sosial yang membatasi peran dan hak perempuan, serta mempromosikan struktur sosial yang lebih egaliter.
4. **Inklusivitas:** Feminisme masa kini semakin menekankan pentingnya inklusivitas, yang mencakup perjuangan hak-hak perempuan dari berbagai latar belakang, termasuk perempuan dari ras, kelas sosial, orientasi seksual, dan identitas gender yang berbeda. Feminisme kini menjadi lebih luas, berfokus pada interseksionalitas, yang memperhatikan bagaimana berbagai

faktor seperti ras, kelas, dan identitas seksual saling memengaruhi pengalaman diskriminasi.

5. **Perubahan Sosial dan Budaya:** Feminisme bukan hanya tentang perubahan kebijakan atau hukum, tetapi juga berfokus pada perubahan budaya dan cara berpikir masyarakat. Ini termasuk mengubah persepsi tentang peran tradisional gender, menghentikan stereotip, serta menanggulangi kekerasan berbasis gender yang masih banyak terjadi.

Secara keseluruhan, feminisme adalah gerakan yang terus berkembang dengan tujuan menciptakan dunia yang lebih adil dan setara bagi semua gender. Dengan memperjuangkan hak-hak perempuan, feminisme tidak hanya menguntungkan perempuan, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

E. Soal Latihan:

1. Jelaskan definisi feminisme.
2. Bagaimana faktor terjadinya pemahaman ini?
3. Bagaimana konsensus pakar memandang feminisme?
4. Bagaimana corak feminisme mengevaluasi politik?
5. Bagaimana dinamika feminisme di Indonesia?

F. Sumber Bacaan

Badran, M. *Feminism In Islam: Secular and Religious Convergences*. Oneworld publications. 2013.

Farid, Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.

Fahmi Asy Syannawi, *Fiqh Politik Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Masa Kini*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).

Finifter, Ada, ed. *Political Science: The State of the Discipline*. Washington: American Political Science Association, 1993.

Ilyas, Yunahar, *Feminism Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1998.

BAB 11

Lingkungan Hidup

A. Deskripsi Singkat

Bab ini menguraikan berbagai teori tentang environmentalisme dalam politik, mendefinisikannya, dan menjelaskan fitur-fitur esensialnya.

B. Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami konsep Lingkungan Hidup atau Environmentalisme
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Environmentalisme Dalam Politik

C. Penyajian Materi

Pendahuluan

Environmentalisme adalah produk dari serangkaian ideologi yang menempatkan kesehatan, keselarasan, dan integritas lingkungan alam sebagai pusat perhatian dan kepedulian manusia. Hal ini telah muncul sebagai gerakan politik dan etika yang berusaha melindungi lingkungan alam dari kerusakan atau polusi. Gerakan ini berusaha mencegah lingkungan dari degradasi akibat aktivitas manusia. Namun, gerakan ini juga berusaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui pelestarian, restorasi, atau peningkatan sumber daya alam.

Hal ini mengadvokasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan alam melalui sarana kebijakan publik dan melalui perubahan perilaku masyarakat. Mereka menyatakan bahwa “manusia harus berhenti memperlakukan lingkungan alam, termasuk hewan lain, sebagai gudang sumber daya yang nilainya hanya bergantung pada pemanfaatannya bagi manusia. Hal ini membutuhkan apresiasi yang lebih dalam terhadap sistem ekologi dan keanekaragaman, dan untuk menahan diri dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai lingkungan yang lebih sehat.

1. Prinsip-Prinsip Environmentalisme

Prinsip-prinsip dasar environmentalisme dijelaskan oleh berbagai pemikir. Lester Milbrath memberikan prinsip-prinsip berikut ini untuk environmentalisme:

1. Penghargaan yang tinggi terhadap alam;
2. Belas kasih terhadap masyarakat, generasi, dan spesies lain;
3. Merencanakan untuk menghindari teknologi yang sensitif terhadap lingkungan;
4. Membatasi pertumbuhan ekonomi;
5. Paradigma sosial yang baru;
6. Partisipasi yang lebih besar, kehidupan yang lebih sederhana, dan kerja sama masyarakat;
7. Solusi publik dan bukan solusi privat untuk banyak masalah; dan terakhir,
8. Penekanan yang lebih besar pada kepuasan pekerja.

Pemikir Barat menambahkan prinsip-prinsip lain dari environmentalisme, antara lain:

1. Pengakuan bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem global;
2. Desentralisasi dan partisipasi politik;
3. Penekanan pada nilai-nilai non-material;
4. Kurang peduli dengan solusi teknis; dan
5. Kepedulian terhadap masa depan.

Sebagaimana dinyatakan di atas, para ahli yang berbeda menekankan aspek-aspek yang berbeda dari lingkungan hidup.

Namun, semua rumusan tersebut memiliki dua kesamaan, yaitu keberlanjutan dan akuntabilitas. Keberlanjutan menyiratkan bahwa manusia tidak boleh menggunakan sumber daya lebih dari yang dapat diperbaharui. Akuntabilitas menyiratkan pengakuan bahwa individu dan organisasi merupakan bagian dari jaringan masyarakat yang lebih luas dan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh jaringan tersebut.⁴⁶

Asal-usul Gerakan Lingkungan Hidup

Gerakan lingkungan memiliki sejarah aktivitas yang jauh lebih panjang, dimulai sejak abad ke-18. Pada tahun 1739, beberapa penduduk Philadelphia mengajukan petisi kepada Majelis Negara Bagian Pennsylvania untuk menghentikan pembuangan limbah dari distrik komersial di dalam dan sekitar kota. Namun, gerakan lingkungan menemukan akar filosofisnya pada awal abad ke-18. Pada tahun 1854, Henry David Thoreau menerbitkan bukunya, *Walden*, di mana ia menulis tentang hidup sederhana di lingkungan yang alami. 10 tahun kemudian pada tahun 1868, temannya, John Muir, pindah dari Philadelphia ke Lembah Yosemite di California. Dia yakin bahwa alam memiliki nilai yang melekat dan perlu dilindungi dari perusakan yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, dia membentuk sebuah klub, Sierra Club, dan melobi Kongres untuk menciptakan cagar alam untuk Yosemite. Singkatnya, dia memulai gerakan Pelestarian Lingkungan.

Sekitar waktu ini, Gifford Pinchot kembali ke Amerika Serikat dari Prancis pada tahun 1898 setelah menyelesaikan studinya di bidang kehutanan. Dia mulai bekerja di industri kehutanan, dan akhirnya menjadi Kepala Rimbawan. Dia terkejut melihat penyalahgunaan lahan yang tidak efisien di Amerika Serikat. Pinchot membawa ratusan juta hektar tanah di bawah kepemilikan publik dan dijadikan Hutan Nasional. Dengan kata lain, Pinchot menganjurkan strategi konservasi di mana sumber daya alam digunakan dan bukan disalahgunakan. Dengan demikian, dari Gerakan ini muncul dua sub kelompok

⁴⁶ BA, Mansur, *Pandangan Islam Terhadap Pengembangan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup*, cet. 1, Jakarta: PT Intermasa, 1986.

gerakan lingkungan: konservasi dan pelestarian. Pelestarian konservasi merupakan salah satu isu sentral dalam perdebatan lingkungan saat ini.

Gerakan lingkungan yang populer dimulai pada tahun 1960-an. Pada tahun 1962, Rachel Carson menerbitkan buku revolusionernya, *Silent Spring*, di mana ia mengangkat masalah yang ditimbulkan oleh pestisida, dan menjelaskan bahayanya. Buku ini mendapat banyak perhatian namun menimbulkan banyak kecurigaan dalam industri kimia. Demikian pula, pada tahun 1970-an di India, Gerakan Chipko melakukan perlawanan damai terhadap penggundulan hutan dan menyebarkan slogan yang kuat, ekologi adalah ekonomi permanen. Pada pertengahan tahun 1970-an di seluruh dunia terdapat kekhawatiran yang sama bahwa mungkin manusia sedang berada di ambang bencana lingkungan. Gerakan Kembali ke Tanah pun dimulai. Protes terhadap Perang Vietnam, senjata nuklir, dan tenaga nuklir memperluas kesadaran masyarakat. Di Amerika Serikat, seri *The Whole Earth Catalog* dan *Co-Evolution Quarterly* mulai diterbitkan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Keduanya terus terbit hingga tahun 1990-an dan di abad ke-21.

2. Aktivis lingkungan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para pencinta lingkungan dibagi menjadi dua kelompok: Konservasionis dan Pelestari. Dari dua gerakan ini muncul satu kelompok baru: Ahli Ekologi Mendalam (*Deep Ecologists*). Prinsip-prinsip dasar dari *Deep Ecology* disoroti oleh Arne Naess dan George Session. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan dan perkembangan kehidupan manusia dan non-manusia di bumi memiliki nilai tersendiri. Nilai dari bentuk-bentuk kehidupan non-manusia tidak bergantung pada kegunaan yang mungkin dimiliki oleh bentuk-bentuk kehidupan tersebut untuk kepentingan manusia yang sempit.
2. Kekayaan dan keanekaragaman bentuk kehidupan merupakan nilai tersendiri dan berkontribusi pada perkembangan kehidupan manusia dan non-manusia di bumi.

3. Manusia tidak memiliki hak untuk mengurangi kekayaan dan keanekaragaman ini kecuali untuk memenuhi kebutuhan vital.
4. Campur tangan manusia saat ini terhadap dunia non-manusia sudah berlebihan, dan situasinya semakin memburuk.
5. Berkembangnya kehidupan dan budaya manusia sejalan dengan penurunan substansial populasi manusia. Berkembangnya kehidupan non-manusia membutuhkan penurunan tersebut.
6. Perubahan kondisi kehidupan yang signifikan ke arah yang lebih baik membutuhkan perubahan kebijakan. Hal ini mempengaruhi struktur ekonomi, teknologi, dan ideologi dasar.
7. Perubahan ideologi terutama adalah menghargai kualitas hidup (tinggal dalam situasi yang memiliki nilai intrinsik) daripada mengikuti standar hidup yang tinggi. Akan ada kesadaran yang mendalam tentang perbedaan antara besar dan hebat.
8. Mereka yang menganut poin-poin di atas memiliki kewajiban secara langsung atau tidak langsung untuk berpartisipasi dalam upaya mengimplementasikan perubahan yang diperlukan.

Banyak juga kelompok pencinta lingkungan yang paling radikal. Salah satu varian dari yang paling radikal adalah gerakan pembebasan hewan yang juga memperjuangkan pelarangan perburuan dan pemeliharaan hewan ternak untuk makanan dan kebutuhan ekonomi lainnya. Dalam pemikiran mereka berargumen bahwa semua hewan dapat merasakan sakit dan oleh karena itu, mereka harus dilindungi. Namun, sebagian besar ahli lingkungan mengambil jalan tengah mengenai pembebasan hewan. Secara keseluruhan, ekologi mendalam memberikan tantangan serius bagi semua aktivitas kontemporer peradaban modern.

3. Lingkungan dan Politik

Dampak dari ideologi environmentalisme tersebar luas. Sebuah gerakan yang mendunia telah berkembang di hampir semua negara di dunia. Partai politik, biasanya atas nama Partai Hijau, telah dibentuk di banyak negara, seperti di Jerman, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Partai Hijau Amerika Serikat menekankan pada 10 prinsip berikut ini:

1. Demokrasi akar rumput
2. Keadilan sosial dan kesempatan yang sama
3. Kearifan ekologis
4. Non-kekerasan
5. Desentralisasi
6. Ekonomi berbasis masyarakat dan keadilan ekonomi
7. Feminisme dan kesetaraan gender
8. Penghormatan terhadap keragaman
9. Tanggung jawab pribadi dan global
10. Fokus pada masa depan dan keberlanjutan.

Pada bulan Juni 2007, Partai Hijau Kanada mengumumkan rencana perubahan iklimnya. Rencana Partai Hijau menyerukan:

- Pengembangan sumber energi terbarukan Kanada secara cepat melalui insentif pajak, dana penelitian dan kebijakan-kebijakan baru, termasuk klausul persyaratan karbon yang mengharuskan penerapan Tarif Energi Terbarukan Tingkat Lanjut di tingkat provinsi.
- Insentif pajak, peraturan dan program-program yang didanai untuk mengurangi emisi kendaraan sebesar 30 persen pada tahun 2015 dan 85 persen pada tahun 2040, termasuk insentif untuk pembuatan kendaraan listrik dan kendaraan listrik hibrida plug-in di Kanada.
- Semua bangunan di Kanada ke tingkat efisiensi energi yang tinggi pada tahun 2025 dan nol energi bersih setelah tahun 2025 dengan menggunakan kredit pajak yang dapat dikembalikan, KPR Hijau yang dapat dikurangkan dari pajak, Tunjangan Biaya Modal yang dipercepat sebesar 100 persen, pinjaman bergulir dari pemerintah pusat, dan perubahan pada Kode Bangunan Kanada.
- Peraturan yang mewajibkan semua peralatan untuk memenuhi peringkat Energy Star pada tahun 2015 dengan sebagian besar peralatan dan bola lampu yang tidak efisien dihapuskan pada tahun 2010.
- Strategi adaptasi untuk mengatasi gangguan iklim yang tidak dapat dihindari lagi, termasuk gugus tugas khusus untuk

menyiapkan strategi khusus untuk daerah tertentu dan Dana Adaptasi Perubahan Iklim untuk membantu daerah-daerah yang terkena dampak bencana “alam” yang terkait dengan pemanasan global.

- Penarikan dana federal untuk program-program seperti Pacific Gateway Programme, yang mendorong perluasan kota dan meningkatkan penggunaan kendaraan.
- Penghapusan semua subsidi untuk produksi batu bara, minyak, gas, dan gas metana batu bara, pembatasan tingkat ekstraksi bahan bakar fosil secara keseluruhan, dan penghentian secara bertahap penggunaan batu bara, minyak, gas, dan pembangkit listrik tenaga nuklir.
- Pembayaran kepada petani untuk penyerapan karbon di tanah dalam pasar karbon domestik.
- Pajak karbon atau potongan harga karbon untuk perusahaan hutan untuk mencerminkan kerugian bersih dari penyimpanan karbon atau keuntungan bersih dari penyerap karbon dari lahan mereka.
- Pajak metana untuk semua tempat pembuangan sampah dan kewajiban untuk menangkap metana setelah tahun 2015.
- Standar verifikasi dan sertifikasi global untuk kredit karbon dan pendirian Bank Karbon Kanada bersama dengan kerangka kerja federal untuk bank karbon lokal dan provinsi untuk mendorong pembelian offset lokal.
- Perluasan Protokol Kyoto setelah tahun 2012 dengan memasukkan penerbangan dan pelayaran internasional serta komitmen untuk meningkatkan energi surya, kendaraan listrik dan teknologi rendah karbon lainnya.

D. Rangkuman Materi

Lingkungan hidup tentu saja merupakan tantangan bagi pola industrialisasi kontemporer. Pada abad ke-21 ini, salah satu tantangan utama yang dihadapi ekonomi kontemporer adalah masalah degradasi lingkungan. Gerakan ini telah membujuk banyak orang untuk mencari kesenangan alami melalui penggunaan produk alami. Gerakan lingkungan secara bertahap menjadi populer. Banyak pemerintah

telah mengadopsi kebijakan daur ulang dan pengendalian polusi. Gagasan pembangunan berkelanjutan telah menjadi landasan bagi lembaga-lembaga donor bantuan internasional. Partai-partai politik telah dipaksa untuk memasukkan agenda kepedulian lingkungan ke dalam platform kebijakan mereka. Meskipun tidak dihargai oleh banyak orang, Islam sangat peduli dengan perlindungan lingkungan. Kesatuan, perwalian dan pertanggungjawaban, yaitu tauhid, khalifah dan akhirat, merupakan tiga pilar etika lingkungan dalam Islam. Ketiga pilar ini merupakan nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh Al-Qur'an, ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW dan diabadikan dalam syariah. Nilai-nilai ini memberikan alternatif Islam yang sejati terhadap pemikiran dan tindakan yang merusak lingkungan yang mendominasi dunia saat ini. Syariah dapat menjadi pelopor dalam legislasi lingkungan hidup.

E. Soal Latihan:

1. Jelaskan definisi environmentalisme.
2. Bagaimana negara dan industri modern sekarang memandang lingkungan?
3. Bagaimana konsensus pakar memandang persoalan lingkungan hidup ini?
4. Bagaimana modernisasi mempengaruhi polusi?
5. Sebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi krisis lingkungan?

F. Sumber Bacaan

Abdillah, Mujiono, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Abidin, Zainal Ahmad, *Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2014.

Ali, Muhammad Mumtaz. *Issues in Islamization of Human Knowledge Civilization Building Discourse of Contemporary Muslim Thinkers*. IIUM Press. 2014.

- AlMawardi, I. (2014). *Al Ahkam Al Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi: Darul Falah.
- BA, Mansur, *Pandangan Islam Terhadap Pengembangan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup*, cet. 1, Jakarta: PT Intermasa, 1986.

Partai Politik

A. Deskripsi Singkat

Bab ini menguraikan berbagai teori tentang partai politik dan system kepartaian, mendefinisikannya, dan menjelaskan fitur-fitur esensialnya.

B. Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami konsep Partai Politik
2. Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Kepartaian

C. Penyajian Materi

Pendahuluan

Partai politik adalah alat demokrasi. Faktanya, partai-partai politik menciptakan demokrasi dan demokrasi modern tidak dapat dipikirkan kecuali dalam kerangka partai-partai. Politik partai telah menjadi fenomena universal, dengan pengecualian beberapa monarki seperti Arab Saudi dan kediktatoran militer, setiap negara di dunia memiliki sistem kepartaiannya sendiri. Sistem ini sangat penting bagi negara-negara Demokrasi Eropa Barat dan juga sistem diktator. Kita dapat menemukannya di negara-negara kecil di Afrika dan di negara-negara besar seperti India dan Cina. Dalam satu atau lain bentuk, partai politik adalah *omnipresent*. Oleh karena itu, penting

untuk mempelajari partai politik dan sistem kepartaian. Bab ini memperkenalkan konsep dasar partai politik modern, menelaah fungsi-fungsinya, dan menggambarkan sistem partai politik yang telah dikembangkan di berbagai negara.

1. Definisi Partai Politik

Pada dasarnya, partai politik adalah perkumpulan individu yang memiliki seperangkat keyakinan dan tujuan politik yang sama, yang memiliki keinginan yang sama untuk menguasai pemerintahan melalui cara-cara konstitusional. Menurut Joseph LaPalombara,

Partai politik adalah sebuah organisasi formal yang sadar diri, tujuan utamanya adalah untuk menempatkan dan mempertahankan dalam jabatan publik orang-orang yang akan mengontrol, sendiri atau dalam koalisi, mesin pemerintahan.

Epstein mendefinisikannya sebagai “setiap kelompok, betapa pun longgarnya organisasi, yang berusaha untuk memilih pemegang jabatan pemerintah dengan label tertentu. “3 Mereka adalah jenis organisasi yang khusus. Mereka memiliki karakteristik mendasar berikut ini:

1. Mereka adalah kelompok orang dengan label seperti Liberal, Konservatif, Republikan, Partai Keadilan Sejahtera, Golkar, PDI dan sebagainya.
2. Beberapa orang terorganisir, yaitu, mereka dengan sengaja bertindak bersama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka memiliki tujuan yang sama.
3. Mereka adalah organisasi massa, dengan keanggotaan yang mudah diakses oleh semua warga negara. keanggotaan.
4. Untuk mempromosikan tujuan-tujuan mereka, partai-partai bekerja melalui mekanisme pemerintahan perwakilan, seperti pemilihan umum dan badan legislatif.
5. Kegiatan utama partai adalah memilih kandidat untuk jabatan publik. “Partai-partai,” seperti yang dicatat oleh Weber, “hidup di dalam rumah ‘kekuasaan’ yang biasanya berurusan dengan penaklukan sebuah komunitas.

Hampir semua masyarakat masa kini, baik yang demokratis maupun tidak, memiliki semacam sistem partai politik untuk menghubungkan warga negara dengan pemerintah. Terkadang, diktator militer mencoba menghapuskan partai-partai, dan menyalahkan partai-partai tersebut sebagai penyebab masalah-masalah politik di negara tersebut. Namun, pada akhirnya, bahkan para diktator pun menyadari bahwa mereka membutuhkan partai. Suka atau tidak suka, negara-negara tampaknya tidak dapat hidup tanpa partai politik.

2. Pertumbuhan Partai Politik

Partai-partai politik adalah ciptaan zaman modern. Mereka muncul pada abad ke-19 seiring dengan perkembangan demokrasi, dengan perluasan hak pilih rakyat dan kekuasaan parlementer. Ada dua penjelasan umum tentang kemunculan partai yang harus dipelajari. Yaitu: teori-teori institusional yang berfokus pada evolusi badan-badan parlementer; dan teori-teori krisis-historis yang berfokus pada masalah-masalah tertentu seperti gerakan kemerdekaan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan modernisasi) yang dihadapi para pemimpin politik.⁴⁷

Ilmuwan politik barat banyak menunjukkan bahwa partai-partai politik pada awalnya adalah klub-klub politik, dan kelompok-kelompok terorganisir lainnya di dalam lembaga legislatif. Ketika kekuasaan parlemen tumbuh para anggota parlemen mulai mengorganisir diri mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok yang disebut fraksi yang anggotanya memiliki pandangan yang sama tentang isu-isu penting. Pada saat yang sama, perluasan hak pilih juga membuat beberapa orang mengorganisir pemilih. Hingga sekitar tahun 1900, sebagian besar partai tumbuh dari hubungan dan kerja sama antara kelompok-kelompok parlementer dan elektoral dalam sistem parlementer yang lebih tua di Eropa Barat dan Amerika Utara.

Tidak semua partai politik dibentuk secara internal. Beberapa partai terpenting saat ini dibentuk di luar sistem yang berlaku. Bahkan, setelah sekitar tahun 1900, partai-partai dibentuk dari luar

⁴⁷ Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok penekan*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1984.

parlemen. Sebagai contoh, serikat buruh terkadang berkembang menjadi atau membantu menciptakan partai politik sosialis. Inilah bagaimana Partai Buruh Inggris berkembang. Gerakan nasionalis yang mengakhiri rezim kolonial diorganisir oleh kelompok-kelompok kecil untuk mempengaruhi kebijakan kolonial. Ketika pemerintah kolonial tidak mengakui orang-orang ini sebagai pembuat kebijakan, mereka mencari dukungan rakyat dan mengorganisir partai-partai. Demikian pula, banyak kelompok minoritas bahasa, etnis, dan suku mengorganisir partai-partai terpisah untuk menuntut kemerdekaan atau otonomi. Contoh yang baik dari hal ini adalah organisasi Liga Muslim di India sebelum kemerdekaan. Liga ini khawatir jika India merdeka, maka umat Islam akan diperintah oleh mayoritas Hindu. Oleh karena itu, mereka mengorganisir diri mereka terlebih dahulu untuk mempengaruhi pemerintah, dan kemudian meminta perlindungan dari pemerintah kolonial, tetapi kemudian keluar dengan tuntutan untuk Pakistan yang merdeka pada tahun 1947.

Secara eksternal, partai-partai politik juga dapat dibentuk sebagai hasil dari modernisasi sosial di negara tersebut. Masyarakat yang baru merdeka, ketika mengalami modernisasi yang cepat, komunikasi, pembangunan ekonomi, pendidikan massal, gangguan bentuk dan sikap sosial tradisional mungkin tidak memiliki kerangka kerja organisasi untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Alternatifnya adalah kekacauan; pria dan wanita tercerabut secara psikologis dan tidak memiliki titik referensi sosial dan politik. Partai reformasi nasionalis yang memodernisasi kemudian dibentuk, bukan untuk memimpin bangsa menuju kemerdekaan (yang sudah tercapai), tetapi untuk membantu menciptakan ketertiban di dunia yang tidak teratur. Ada beberapa contoh nyata dari partai semacam itu, terutama di Amerika Latin: Accion Democratica di Venezuela, Partai Revolusioner Institusional di Meksiko, dan Partai Pembebasan Nasional di Kosta Rika. Partai-partai yang memodernisasi juga termasuk Partai Rakyat Republik Turki dan Partai Sosialis Destourian di Tunisia.

Dengan demikian, kemunculan partai politik baik secara internal maupun eksternal sangat terkait dengan fase tertentu dalam evolusi demokrasi. Partai-partai yang dibentuk secara internal umumnya

muncul ketika tidak ada sistem partai yang terorganisir. Anggota parlemen sering kali membentuk sebuah organisasi untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih yang baru diberi hak pilih. Sebaliknya, partai-partai yang dibentuk secara eksternal muncul dengan berbagai alasan, baik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun untuk menuntut otonomi atau kemandirian dari kelompok yang lebih besar.

3. Fungsi Partai Politik

Partai politik menjalankan beberapa fungsi penting yang membantu membuat sistem politik bekerja secara efisien dan efektif. Beberapa fungsi ini adalah sebagai berikut:

Penghubung Antara Rakyat dan Pemerintah

Partai-partai politik menjalankan apa yang dikenal sebagai fungsi penghubung. Mereka menyediakan penghubung antara pemerintah dan rakyatnya. Partai politik adalah mekanisme yang digunakan untuk mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginan masyarakat kepada pemerintah. Tanpa partai, individu akan berdiri sendiri dan diabaikan oleh pemerintah. Dengan bekerja di dalam, atau memilih, sebuah partai, warga negara dapat mempengaruhi keputusan politik. Demikian juga, partai politik membuat warga negara mendapat informasi tentang keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Agregasi kepentingan

Partai-partai berjuang untuk merebut kekuasaan; mereka berusaha untuk membentuk keteraturan dari kekacauan. Mereka berusaha memperluas kepentingan yang mereka wakili dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan tersebut satu sama lain. Mereka membantu kelompok-kelompok kepentingan memoderasi tuntutan mereka, bekerja sama, dan bekerja untuk kebaikan partai. Mereka membantu menyelesaikan konflik kelompok kepentingan dengan menggabungkan kepentingan-kepentingan mereka yang terpisah ke dalam organisasi yang lebih besar. Partai politik, dalam arti tertentu, adalah koalisi dari kelompok-kelompok kepentingan. Sebagai contoh, Partai Konservatif

Inggris bergantung pada dukungan dari berbagai kelompok ekonomi, sosial, dan geografis dalam politik Inggris. Di Indonesia, Partai Golkar misalnya menyatukan berbagai kelompok etnis dan menyatukan kepentingan mereka dan dengan demikian memberikan stabilitas pada sistem politik.

Sosialisasi Politik

Dalam melaksanakan kampanye, partai politik memberikan pelatihan politik kepada pemilih awam dan mengajari anggotanya bagaimana memainkan permainan politik. Mereka menyelenggarakan program pelatihan khusus dan konferensi untuk memastikan bahwa anggota memahami kebijakan partai dan mematuhi disiplin partai. Dalam kegiatan partai, mereka belajar berbicara di depan umum, mengadakan pertemuan, dan melakukan kampanye dari pintu ke pintu. Hal ini membantu para anggota meningkatkan kompetensi politik mereka. Oleh karena itu, partai politik dapat dianggap sebagai instrumen untuk rekrutmen politik dan tempat pelatihan kepemimpinan politik.

Mobilisasi Pemilih

Fungsi yang paling terlihat dari partai-partai adalah memobilisasi massa dan membuat mereka memilih. Ketika berkampanye untuk kandidat mereka, partai-partai menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan minat pemilih dan mendorong mereka untuk memberikan suara pada hari pemilihan. Di Indonesia dan Kanada, partai-partai menggunakan media massa untuk mendidik masyarakat secara politik. Tanpa iklan partai, banyak warga negara yang tidak akan memperhatikan pemilu. Partai-partai menyederhanakan dan memperjelas isu-isu dan dengan demikian memudahkan orang untuk memilih di antara alternatif-alternatif yang kompleks. Sebagian besar ilmuwan politik berpendapat bahwa keengganan orang untuk memilih selama pemilihan disebabkan, antara lain, oleh partai politik yang lemah. Di Swedia, partai-partai yang kuat dan terorganisir dengan baik sering kali menghasilkan jumlah pemilih sebesar 90 persen atau lebih tinggi. Di Indonesia, partisipasi pemilih bervariasi antara 70

hingga 90 persen karena upaya serius yang dilakukan oleh partai-partai politik untuk memobilisasi massa.

Membentuk Pemerintahan

Partai politik dibentuk untuk merebut kekuasaan politik. Oleh karena itu, partai-partai berusaha sekuat tenaga untuk meraih suara mayoritas yang tanpanya mereka tidak bisa membentuk sebuah pemerintahan atau tetap berkuasa. Oleh karena itu, penting bagi partai-partai untuk merekrut kandidat-kandidat yang menang dalam pemilihan dan mengidentifikasi orang-orang yang akan mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Selain itu, partai-partai harus tunduk pada cambuk partai dan disiplin partai. Di AS, Presiden yang baru terpilih menunjuk lebih dari ribuan orang untuk menduduki jabatan-jabatan penting di departemen eksekutif. Hal ini memungkinkan Presiden untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Di Kanada dan Eropa Barat, di mana sistem parlementer berlaku, partai-partai mengendalikan cabang-cabang legislatif dan eksekutif pemerintahan. Dengan demikian, Perdana Menteri dapat mengimplementasikan kebijakannya tanpa banyak penundaan, karena disiplin partai sangat kuat. Namun, harus diingat bahwa kontrol partai terhadap pemerintahan tidak mutlak. Partai-partai harus berurusan dengan birokrasi pemerintahan yang sudah mapan yang memiliki kekuatan yang cukup besar.

Oposisi yang Layak

Meskipun partai politik mengikuti pemilihan umum untuk memenangkan mayoritas, tidak semua partai politik berhasil pada tingkat yang sama. Partai-partai yang memenangkan lebih sedikit kursi akan membentuk oposisi. Fungsi oposisi adalah menentang. Mereka mengkritik kebijakan dan kegiatan, dengan demikian bertindak sebagai pengecekan terhadap pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh partai yang berkuasa. Memang, salah satu alasan untuk menentang partai yang berkuasa adalah untuk mendapatkan popularitas dan menjadi pemenang mayoritas dalam pemilihan berikutnya.

Dengan demikian, partai politik menjalankan banyak fungsi penting. Akan tetapi, sebagian besar akademisi berpendapat bahwa masyarakat juga harus melihat “disfungsi” partai politik. Pertama, partai politik dapat memolarisasi opini dengan cara-cara yang berbahaya bagi stabilitas sistem politik. Hal ini sangat berbahaya dalam masyarakat yang plural secara etnis seperti Indonesia. Dua, partai politik juga dapat bertindak bukan sebagai elemen pendamai dalam menyatukan sejumlah besar kepentingan bersama, melainkan sebagai titik fokus ketidakpuasan dan oposisi yang terorganisir. Ketiga, partai politik juga dituduh menghancurkan individualitas para anggotanya yang mengakibatkan kejahatan favoritisme, nepotisme, dan sistem rampasan menjadi berlipat ganda. Akhirnya, bakat-bakat rakyat diabaikan karena politik partai, dan kepentingan partai lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa.

Partai Politik, Kelompok dan Faksi

Kebanyakan orang secara bergantian dan salah menggunakan partai, kelompok kepentingan, dan faksi. Partai politik adalah sekelompok orang yang mencalonkan kandidat untuk jabatan publik di bawah sebuah label. Kegiatan inilah yang membedakan partai dengan kelompok kepentingan yang tidak akan mencalonkan kandidat atas nama mereka. Beberapa orang salah mengira bahwa partai politik berbeda dengan kelompok kepentingan karena jumlah orang yang terkait dengan masing-masing. Biasanya, partai politik menarik lebih banyak pendukung daripada kelompok kepentingan, namun hal ini tidak selalu berlaku untuk partai politik kecil. Partai politik juga tidak boleh dibedakan dari kelompok kepentingan berdasarkan tujuan mereka. Tidak semua partai politik memiliki tujuan utama merebut jabatan publik. Beberapa anggota partai-partai kecil ikut serta dalam pemilihan umum bukan untuk menang, melainkan untuk mendaftarkan tuntutan-tuntutan politik mereka. Mereka berpikir bahwa publisitas yang mereka terima selama pemilu akan membantu mereka mewujudkan tuntutan mereka dengan mudah. Singkatnya, hal penting yang membedakan partai politik dengan kelompok kepentingan bukanlah ukuran atau tujuan, melainkan cara yang dipilih masing-masing untuk membuat pengaruhnya terasa

di arena politik: partai politik adalah satu-satunya organisasi yang mencalonkan kandidat untuk jabatan di bawah labelnya.

Penting juga untuk membedakan partai politik dengan faksi. Faksi adalah kelompok individu yang bergabung bersama secara *ad-hoc* untuk memenangkan beberapa keuntungan politik untuk diri mereka sendiri. Setelah munculnya pemilihan umum untuk memilih pejabat publik, faksi-faksi akan terbentuk di sekitar individu atau keluarga tertentu untuk memperebutkan jabatan politik. Pada masa-masa ketika jumlah pemilih terbatas dan jumlah jabatan yang dipilih relatif sedikit, faksi-faksi ini mampu mengendalikan pemilihan umum secara efektif. Dengan bertambahnya jumlah jabatan dan jumlah pemilih, menjadi penting untuk mengorganisir upaya-upaya pemilihan umum secara lebih ekstensif dan menempatkannya pada basis yang lebih permanen. Dengan demikian, faksi-faksi berangsur-angsur berubah dan muncul sebagai partai politik: mencalonkan kandidat-kandidat untuk jabatan di bawah label yang sama. Istilah faksi masih digunakan sampai sekarang untuk menyebut kelompok-kelompok yang merupakan bagian dari entitas politik yang lebih besar. Kadang-kadang, istilah ini digunakan untuk menggambarkan bagian dari sebuah kelompok kepentingan. Lebih sering istilah ini digunakan untuk menunjuk beberapa pengelompokan dalam partai politik berdasarkan kepribadian, filosofi, atau wilayah geografis tertentu. Dalam pengertian ini, faksi identik dengan divisi atau sayap.

Faksi memiliki beberapa ciri. Pertama, faksi biasanya berpusat pada seorang tokoh politik atau seorang pemimpin atau kadang-kadang pada isu politik tertentu. Dua, mereka umumnya tidak memiliki struktur permanen, terorganisir dengan baik, dan hubungan simbolis dengan para pengikutnya. Ketiga, mereka sering beroperasi di belakang layar daripada di tempat terbuka, karena mereka tidak memiliki legitimasi seperti partai politik karena masyarakat tidak bersedia memberikan hak kepada mereka untuk mencalonkan kandidat untuk jabatan tertentu.

4. Sistem Kepartaian

Partai politik, seperti yang didefinisikan di atas, adalah organisasi dengan label di mana para kandidat mencari pemilihan untuk jabatan pemerintahan. Akan tetapi, sistem kepartaian berbeda. Sistem kepartaian merujuk pada interaksi partai-partai satu sama lain dan dengan sistem politik secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam studi sistem kepartaian, kita harus mempelajari jaringan partai-partai politik besar dan kecil serta semua organisasi yang memainkan peran sebagai partai tidak langsung. Jadi, ruang lingkup studi ini diperluas untuk mencakup setiap partai politik, besar atau kecil, yang beroperasi di tingkat nasional, regional, atau lokal, dengan komitmen ideologis atau netralitas, dan sejenisnya. Stabilitas atau ketidakstabilan suatu sistem politik bergantung pada sistem kepartaian. Sistem partai yang tidak stabil dapat menghancurkan konstitusi yang baik. Sistem partai yang stabil dan moderat memungkinkan demokrasi di Amerika Serikat, Inggris, Indonesia. Sistem partai yang tidak kenal kompromi membuat ketidakstabilan seperti di Pakistan atau Afghanistan. Di bawah sistem seperti itu, konflik cenderung mengakar kuat, konsensus pasti rendah, dan legitimasi sistem politik dipertanyakan secara luas.

Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan sistem-sistem partai. Maurice Duverger memberikan klasifikasi yang sangat sederhana tentang sistem satu, dua, dan multi partai dan mencoba memasukkan semua sistem partai di dunia ke dalam salah satu dari tiga kategori yang relevan. Namun, sistem ini sudah ketinggalan zaman dan menurut banyak ahli adalah tidak ilmiah. Klasifikasi sistem kepartaian yang diadopsi dalam studi ini membedakan sistem satu partai dari sistem multipartai dengan berbagai tipe. Perbedaan-perbedaan itu bisa dijelaskan sebagai berikut:

Sistem Partai Tunggal

Sistem partai tunggal merupakan fenomena abad ke-20. Dalam sistem ini, partai yang berkuasa mendominasi semua kelompok lain atau menekan semua kelompok oposisi atas nama persatuan dan pembangunan nasional. Sistem ini banyak ditemukan di bawah rezim totaliter (seperti Nazi Jerman atau Komunis Rusia), biasanya

setelah oposisi dimusnahkan. Uni Soviet, Cina, dan banyak negara berkembang di Afrika dan Asia adalah pernah menjadi negara satu partai. Negara-negara ini dicirikan oleh satu partai yang mengendalikan setiap tingkat pemerintahan dan merupakan satu-satunya partai yang diizinkan secara hukum di negara tersebut.

Para pemimpin di bawah sistem satu partai mengklaim bahwa mereka mewakili apa yang benar-benar diinginkan dan dibutuhkan oleh rakyat, dan oleh karena itu, mereka demokratis. Namun, mereka tidak mengizinkan pemilihan umum yang adil atau jajak pendapat publik yang jujur untuk mendukung klaim ini. Para pemimpin juga mengklaim bahwa sistem partai tunggal itu baik karena tidak memungkinkan negara menjadi terpecah belah dan terpecah belah. Hal ini juga akan membantu para pemimpin untuk berkonsentrasi pada perkembangan sosial, ekonomi, dan politik negara. Namun, sistem partai tunggal tidak demokratis. Di dalamnya, orang tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pendapat mereka, dan mereka diharapkan untuk mematuhi aturan dan peraturan yang diumumkan oleh partai yang berkuasa.

Sistem Partai Dominan

Dalam sebuah sistem partai dominan, sebuah partai tunggal meraih sekitar lebih dari lima puluh persen atau lebih kursi di badan legislatif dan dua atau lebih partai lain biasanya meraih kurang dari 40 persen kursi. Tetapi sebuah faktor krusial membedakan sistem partai dominan ini, dan juga sistem-sistem sejenisnya di Meksiko dan Jepang, dengan negara-negara satu partai yang sesungguhnya. Partai-partai oposisi dalam sistem partai dominan bebas mengikuti pemilihan umum.

Namun, beberapa negara demokratis juga memiliki sistem partai yang dominan di tingkat nasional. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia telah diperintah oleh Barisan Nasional (BN). Meskipun BN kadang-kadang kehilangan beberapa kursi di tingkat negara bagian dan nasional, oposisi pada umumnya terlalu terfragmentasi untuk menang. Demikian pula, Partai Liberal-Demokratik Jepang secara konsisten menang sehingga Jepang disebut

sebagai “sistem satu-setengah partai”, dengan Partai Sosialis yang jauh lebih kecil sebagai setengah partai. Di Meksiko, Partai Institusi Revolusioner (PRI) juga mendominasi secara total sejak tahun 1929, tetapi tidak sepenuhnya demokratis. Partai Aksi Nasional (PAN) yang lebih konservatif telah mengancam akan melakukan pembangkangan sipil jika kecurangan pemungutan suara yang dilakukan PRI tidak berhenti. Meksiko adalah sebuah sistem partai dominan dengan sentuhan kediktatoran partai tunggal.

Sistem Dua Partai

Sistem dua partai memiliki dua fitur penting: Pertama, hanya ada dua partai yang berbagi sebagian besar suara elektoral dan memegang kendali politik. Kedua partai besar itu bergantian dalam menjalankan kekuasaan. Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru semuanya memiliki dua partai besar dengan peluang menang yang cukup setara dan mereka bergantian menjalankan kekuasaan. Meskipun mungkin ada partai ketiga, seperti Partai Demokrat Liberal Inggris, mereka mendapatkan jumlah kursi yang terbatas, tidak cukup untuk membentuk pemerintahan atau menjadi oposisi resmi.

Ada yang berpendapat bahwa sistem dua partai memberikan stabilitas kepada pemerintah karena dikendalikan oleh satu partai dan bukan oleh koalisi partai. Sistem ini relatif sederhana dan dengan demikian lebih mudah bagi para pemilih untuk memilih dari sejumlah kandidat dan kebijakan yang terbatas. Sistem dua partai juga diklaim sebagai sistem yang memungkinkan oposisi menjadi lebih kuat dan karenanya dapat bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh partai yang berkuasa. Akan tetapi, sistem ini juga mengundang beberapa kritik. Sistem dua partai, menurut beberapa ahli, dapat menimbulkan kediktatoran kabinet. Hal ini dikarenakan badan legislatif dikendalikan oleh satu partai yang dapat mendisiplinkan jajarannya dan dapat melakukan apa pun yang diinginkannya. Ada juga sarjana lain yang menunjukkan bahwa sistem dua partai membatasi pilihan rakyat. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang memberikan kebebasan tanpa batas

kepada rakyat untuk mengekspresikan pandangan mereka dan memilih dari sejumlah alternatif.

Sistem Multipartai

Sistem ini adalah sistem di mana tidak ada partai yang dapat memperoleh mayoritas di badan legislatif untuk membentuk pemerintahan. Ada tiga atau lebih partai yang bersaing dalam pemilihan umum. Mereka memenangkan kursi di badan legislatif, dan membentuk koalisi di antara mereka sendiri untuk membentuk pemerintahan. Partai-partai yang berkompetisi memiliki ukuran dan basis dukungan yang berbeda-beda. Di Prancis, jumlah partai yang terorganisir bervariasi antara belasan hingga dua puluhan partai. Spanyol memiliki hingga lima puluhan partai terorganisir yang ikut serta dalam pemilihan umum setiap kali diadakan.

Sistem multi partai didukung oleh banyak pihak karena memberikan kebebasan lebih besar kepada rakyat untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang urusan-urusan publik. Semakin banyak jumlah partai, semakin besar kemungkinan untuk memasarkan ide dan sudut pandang yang berbeda. Sistem multi partai juga menyelamatkan negara dari kemungkinan tirani pemerintahan satu partai absolut atau tirani kabinet dalam sistem dua partai. Namun, sistem ini sering dikritik karena tidak stabil dan karenanya tidak memungkinkan kesinambungan kebijakan. Italia sering dikutip sebagai contoh kekurangan dari memiliki banyak partai. Italia tidak mampu mempertahankan pemerintahan yang berkuasa untuk waktu yang lama. Meskipun biasanya benar bahwa keberadaan banyak partai politik memaksa negara untuk membentuk pemerintahan koalisi, hal ini tidak selalu terjadi. Belanda, Swedia, dan Norwegia umumnya berhasil membangun koalisi multipartai yang stabil dan memerintah secara efektif. Jumlah partai bukan satu-satunya alasan ketidakstabilan kabinet. Banyak hal yang tergantung pada budaya politik, tingkat kesepakatan mengenai isu-isu dasar, dan aturan-aturan untuk membentuk dan membubarkan kabinet.

D. Rangkuman Materi

Perlu dicatat bahwa partai-partai di Barat lebih sering dilihat sebagai instrumen pemilihan umum untuk membuat sekelompok pemimpin terpilih ke berbagai jabatan pemerintahan. Partai politik, dengan penekanannya pada ideologi Islam, harus berfungsi bukan hanya sebagai instrumen pemilihan umum, tetapi juga sebagai organisasi pelayanan sosial. Mereka harus terlibat dalam mengaktifkan pemerintah daerah, menyelesaikan perbedaan etnis, dan yang terpenting, memberikan kepemimpinan dan inisiatif dalam mengembangkan layanan pedesaan dan perkotaan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Tidak terkecuali Islam, banyak negara di dunia Muslim yang mengorganisir partai politik sesuai dengan garis-garis Barat. Namun, sebagian besar organisasi yang menyebut diri mereka partai pada kenyataannya hanya samar-samar menyerupai apa yang secara umum dikenal sebagai partai. Banyak di antaranya hanya merupakan kreasi pribadi dari individu atau keluarga tertentu, dan mereka akan memudar setelah orang tersebut meninggal atau kehilangan minat dalam politik. Banyak juga yang memiliki basis ideologi, tetapi tidak memiliki kekuatan organisasi. Sebagian besar partai kekurangan dana dan kekurangan staf, dan mereka menderita kekurangan personel berpengalaman yang dapat mengelola birokrasi yang kompleks.

Mungkin perbedaan yang paling signifikan antara partai-partai Dunia Muslim dan rekan-rekan mereka di dunia Barat adalah bahwa partai-partai Muslim tidak selalu diorganisir untuk memenangkan pemilihan umum. Dalam banyak kasus, partai-partai ini ada bukan untuk bersaing dengan partai-partai lain dalam memperebutkan suara, tetapi untuk menghubungkan warga negara yang baru dimobilisasi dengan segmen modern dari masyarakat majemuk. Partai-partai ini beroperasi dalam situasi non-kompetitif. Mereka adalah satu-satunya partai yang diizinkan oleh hukum. Sebuah survei terhadap seratus negara di Dunia Muslim pada tahun sembilan puluhan menunjukkan bahwa tiga puluhan negara, atau hanya kurang dari sepertiga dari keseluruhan, mengizinkan hanya satu partai resmi yang berdiri. Termasuk dalam daftar ini adalah negara-negara besar seperti

Mesir, Aljazair, dan Tunisia. Banyak negara lain yang secara hukum merupakan negara multi-partai, tetapi secara de facto merupakan sistem satu partai karena dominasi yang disahkan oleh satu partai atas partai-partai lainnya. Indonesia di bawah Soeharto adalah contoh paling terkenal dari fenomena ini. Dalam sistem seperti itu, partai dominan atau partai tunggal ada bukan untuk memobilisasi pemilih untuk memenangkan pemilihan umum, melainkan bertindak sebagai saluran komunikasi dan pendidikan yang akan menyatukan bagian masyarakat pedesaan dan tradisional dengan segmen masyarakat perkotaan yang modern.

E. Soal Latihan:

1. Jelaskan definisi partai politik.
2. Jelaskan faktor-faktor pemicu pendirian sebuah partai politik.
3. Bagaimana konsensus pakar memandang partai politik?
4. Bagaimana sistem kepartaian dalam dinamika politik?
5. Analisa konteks di Indonesia dalam pelaksanaan partai politik yang ditinjau dari pandangan kritis?

F. Sumber Bacaan

Boulding, Kenneth E. *Tiga Wajah Kekuasaan*. Newbury Park, CA: Sage, 1989.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Cst Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Maarif, Ahmad Syafii. *Percaturan Islam Dan Politik*. IRCISOD. 2021.

Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok penekan*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1984.

BAB 13

Kelompok Penekan

A. Deskripsi Singkat

Bab ini menguraikan berbagai teori tentang kelompok penekan dalam politik, mendefinisikannya, dan menjelaskan fitur-fitur esensialnya.

B. Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami konsep Kelompok Penekan
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Kelompok Penekan Dalam Politik

C. Penyajian Materi

Pendahuluan

Partai politik bukanlah satu-satunya kekuatan penting dalam sistem demokrasi. Kelompok penekan adalah elemen penting lain dalam demokrasi. Saat ini, semua sistem politik yang majemuk memiliki kelompok penekan. Dengan pertumbuhan modernisasi dan industrialisasi, ruang lingkup aktivitas kelompok penekan telah meningkat di semua sistem demokrasi modern. Abad kedua puluh menyaksikan peningkatan pesat dalam jumlah kelompok kepentingan karena spesialisasi pekerjaan dan meningkatnya tanggung jawab pemerintah.

1. Pengertian Kelompok Penekan/Kelompok Kepentingan

Kedua istilah kelompok penekan dan kelompok kepentingan digunakan secara bergantian dalam ilmu politik. Keduanya pada dasarnya memiliki arti yang sama. Menurut pemikir Barat, kelompok penekan atau kelompok kepentingan adalah kumpulan orang yang diorganisir untuk mempromosikan tujuan yang mereka miliki bersama atau untuk menolak beberapa tujuan pemerintah atau kelompok lain yang entah bagaimana berhubungan dengan proses politik. Kelompok penekan adalah kelompok individu yang terorganisir secara sukarela di luar struktur pemerintahan yang berusaha untuk mencalonkan, mengangkat personil pemerintahan, administrasi pemerintahan dan kebijakan publik. Karakteristik utama dari kelompok penekan adalah: a) mereka memiliki struktur organisasi formal; b) mereka mampu mengumpulkan dan mengartikulasikan kepentingan; c) mereka mempengaruhi kebijakan publik; dan d) mereka mencoba mempengaruhi kekuasaan daripada menjalankan tanggung jawab pemerintah sendiri. Dengan kata lain, kelompok penekan adalah “semua organisasi non-publik yang tidak bertanggung jawab secara publik yang berusaha mempromosikan kepentingan pribadi bersama dengan mempengaruhi hasil kebijakan publik yang mempengaruhi mereka.

2. Perbedaan Kelompok Kepentingan dengan Partai Politik

Pada awalnya, tampaknya partai politik dan kelompok kepentingan adalah sama. Namun, ada banyak perbedaan di antara keduanya. Partai politik mencari kekuasaan politik dan karenanya bertanggung jawab kepada rakyat. Kelompok penekan tidak bersaing dalam pemilihan umum nasional untuk mendapatkan kekuasaan politik. Oleh karena itu, partai politik berurusan dengan isu-isu nasional sementara kelompok kepentingan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan sektarian. Jelas, organisasi partai politik sangat besar, sementara organisasi kelompok penekan sangat sempit. Beberapa

pendapat dengan jelas menyoroti perbedaan antara partai politik dan kelompok kepentingan sebagai berikut.

Tujuan

Tujuan partai politik adalah memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum. Sedangkan kelompok kepentingan, lebih mementingkan program dan isu-isu spesifik dan jarang terwakili dalam struktur formal pemerintahan. Kelompok kepentingan mencoba mengarahkan partai politik dan pejabat terpilihnya ke arah kebijakan tertentu daripada memberlakukan kebijakan itu sendiri. Kelompok kepentingan sering kali mencoba untuk memenangkan dukungan dari partai politik. Di Indonesia para aktivis lingkungan hidup menginginkan dukungan dari Partai umum dan Partai Islam dalam perjuangan mereka untuk meminimalisir kerusakan ekologis. Namun, terkadang, mereka mengambil sikap mendukung salah satu partai jika mereka yakin bahwa partai tersebut akan memajukan tujuan mereka dengan semangat yang lebih besar. Dalam sebagian besar pemilihan umum, para pencinta lingkungan mendukung Partai Demokrat, tetapi mereka tidak terikat dengan partai tersebut.

Sifat Keanggotaan

Sebagian besar partai politik menginginkan dukungan yang cukup luas untuk memenangkan pemilihan umum, dengan menarik berbagai kepentingan ke dalam barisan mereka. Keanggotaan mereka jauh lebih bervariasi daripada kelompok kepentingan. Bahkan Partai Republik yang konservatif mencakup orang-orang dari semua kelompok pendapatan dan pekerjaan, dan beberapa anggotanya lebih liberal daripada Partai Demokrat. Partai Demokrat, di sisi lain, yang dipandang sebagai partai yang lebih progresif dari kelas pekerja, juga memperhitungkan semua lapisan masyarakat di antara para pendukungnya, termasuk orang-orang kaya. Kelompok-kelompok kepentingan umumnya memiliki keanggotaan yang lebih selektif. Anggota serikat pekerja cenderung memiliki kondisi kehidupan dan pekerjaan yang sama dan memiliki latar belakang pendidikan dan budaya yang sebanding. Kelompok kepentingan untuk masalah isu tertentu, seperti ekologi atau

Kelompok Penekan Non-Asosiasi

Kelompok-kelompok ini tidak memiliki nama atau tidak memiliki struktur formal. Namun, mereka sadar akan perbedaan mereka dengan yang lain karena mereka memiliki karakteristik dan minat yang sama. Mereka memiliki perasaan akan identitas mereka sendiri. Namun, mereka mencerminkan sebagian besar kepentingan sosial, etnis, budaya, atau agama yang tidak diartikulasikan. Contoh terbaik dari kelompok-kelompok ini adalah individu-individu yang menganggur, anggota kelompok agama atau etnis tertentu, atau kelompok-kelompok normatif yang tidak merokok, dan lain-lain.

Kelompok Institusional

Kelompok ini ada di dalam pemerintahan. Mereka sudah mapan, seperti birokrasi pemerintah, anggota angkatan bersenjata, anggota parlemen, dll. Mereka memiliki kepentingan pribadi dan melobi dari dalam, sering kali tidak terlihat oleh publik. Dengan demikian, “Militer bergabung dengan kontraktor-kontraktor pertahanan dalam mempromosikan program-program persenjataan, dan departemen-departemen seperti Tenaga Kerja, Pertanian, dan Pendidikan sering dituduh sebagai tawanan kepentingan-kepentingan khusus yang paling terpengaruh secara langsung oleh program-program yang mereka kelola.

Kelompok-kelompok Anomik

Kelompok-kelompok ini lahir secara spontan ketika masyarakat menentang keras kebijakan-kebijakan tertentu. Ada keprihatinan publik yang serius yang menuntut tindakan politik segera. Kata anomie berarti rasa keterpisahan dari norma-norma sosial. Tanpa perencanaan atau pengorganisasian sebelumnya ketika masyarakat ingin menunjukkan kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah tertentu, maka kelompok masyarakat tersebut disebut sebagai kelompok penekan anomie. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, demonstrasi di seluruh negeri yang menentang Perang Vietnam pada tahun 1960-an atau menentang Perang Irak pada tahun 2002 adalah contoh yang paling baik.

Menurut Almond, bahkan kerusakan jalanan pun bisa dimasukkan ke dalam kategori ini.

Selain kategori-kategori di atas, kelompok penekan juga diklasifikasikan berdasarkan dua kriteria: orientasi dan struktur. Ada dua jenis kelompok penekan dalam hal fokus atau orientasi: kepentingan pribadi dan promosi. Kelompok penekan yang mementingkan diri sendiri tertarik untuk memajukan kepentingan pribadi para anggotanya saja. Kelompok-kelompok ini merupakan kelompok kepentingan pribadi, seperti Asosiasi Guru Indonesia atau Asosiasi Dosen Indonesia.

Di sisi lain, fokus kelompok kepentingan promosi adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas. Mereka peduli dengan kepentingan umum dan, oleh karena itu, mereka juga disebut kelompok kepentingan publik. Contoh terbaiknya adalah Women Rehabilitation, Indonesian Medical Association, dll. Dari segi struktur, ada dua jenis organisasi: berorientasi pada isu dan terlembaga. Beberapa organisasi lahir untuk menangani satu isu dan melobi hanya untuk isu tersebut, seperti kelompok Anti-Aborsi. Namun, kelompok-kelompok lain dilembagakan. Mereka memiliki catatan eksistensi yang panjang, keanggotaan yang besar, dan aktif secara teratur.

3. Peran/Kontribusi Kelompok Penekan

Kelompok penekan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Mereka memainkan peran penting bagi masyarakat dan pemerintah. Pertama, kelompok penekan merupakan mekanisme untuk representasi politik. Kepentingan rakyat terwakili dengan baik dalam sistem politik dengan cara yang terorganisir.⁴⁸

Kedua, kelompok penekan memungkinkan proses politik menjadi lebih responsif. Pemerintah tahu bahwa kebijakannya akan berdampak pada kelompok-kelompok yang aktif atau peduli yang dapat menciptakan publisitas yang buruk bagi para elit yang berkuasa.

⁴⁸ Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok penekan*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1984.

Ketiga, kelompok penekan berperan sebagai mediator. Mereka menyediakan hubungan yang berguna antara rakyat dan pemerintah dan dengan demikian dapat membantu para-administrator atau legislator untuk mendapatkan informasi tentang fakta dan sikap. Setiap pemerintah yang demokratis ingin menilai reaksi dari kebijakan atau program yang dibuatnya. Hal ini membantu pemerintah untuk mendapatkan informasi atau masukan dari kelompok-kelompok tersebut sebelum mengambil keputusan.

Keempat, banyak kelompok penekan, terutama kelompok atau lembaga promosi, - melengkapi lembaga pemerintah. Sebagai contoh, Asosiasi Medis Kanada atau Asosiasi Medis Malaysia melakukan penelitian tentang penyakit serius seperti kanker, AIDS, diabetes, dan hasil penelitian tersebut membantu pemerintah untuk mengadopsi kebijakan publik yang tepat.

Kelima, setiap warga negara mungkin lemah sebagai individu. Mungkin sulit bagi seorang individu untuk mengajukan tuntutan atau keluhannya, tetapi melalui asosiasi, individu menjadi kuat. Inilah yang disebut dengan pemeliharaan diri.

Terakhir, dan yang paling penting, keberadaan kelompok-kelompok penekan mencegah pemusatan kekuasaan. Kelompok-kelompok kepentingan memaksa pemerintah untuk tetap menjadi pemerintah yang konstitusional.

Organisasi Internasional

Organisasi internasional telah menduduki tempat penting dalam sejarah peradaban manusia. Dengan berkembangnya sistem negara-bangsa, setiap negara telah mengklaim kekuasaan absolutnya. Klaim kedaulatan absolut telah mengakibatkan banyak konflik dan akhir dari konflik telah dimungkinkan melalui kerja sama. Konflik dan kerja sama telah menjadi ciri utama politik internasional. Di satu sisi, setiap negara sangat serius dengan kedaulatannya, yang mengarah pada perbedaan kepentingan di antara negara-negara. Di sisi lain, setiap negara bergantung pada tindakan negara lain di bidang-bidang vital yang menjadi perhatian bersama, yang mengarah pada konvergensi kepentingan. Secara bertahap, para pemimpin

dunia merasa bahwa konflik harus dihindari dan hal ini hanya dapat dicapai melalui pembentukan organisasi internasional di mana para pemimpin dari berbagai negara dapat menyelesaikan konflik mereka melalui diskusi, kompromi, dan negosiasi. Dalam bab ini, pembahasan akan dibatasi pada definisi organisasi internasional, perkembangan organisasi internasional, Piagam Madinah, Liga Bangsa-Bangsa, dan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Apa yang dimaksud dengan Organisasi Internasional?

Pemikir barat memberikan definisi tradisional tentang organisasi internasional. Menurut mereka, organisasi internasional adalah seni menciptakan dan mengelola masyarakat umum dan regional yang terdiri dari negara-negara independen untuk memfasilitasi dalam mewujudkan maksud dan tujuan bersama. Dengan kata lain, ini adalah organisasi antara atau di antara dua negara atau lebih untuk memfasilitasi atau mengatur hubungan timbal balik mereka. Namun, definisi mereka tidak menggambarkan definisi sebenarnya dari organisasi internasional modern. Pada masa modern, organisasi internasional didefinisikan baik dari sudut pandang tujuan maupun dari sudut pandang sifat institusi.

Dari sudut pandang tujuan, organisasi disebut sebagai organisasi internasional jika memiliki tujuan sebagai berikut: (a) Pengaturan atau penyelesaian konflik melalui cara-cara damai; (b) Meminimalkan konflik atau perang; (c) Memajukan kerja sama dan kegiatan pembangunan; dan (d) Pertahanan kolektif terhadap ancaman.

Dari sudut pandang sifat lembaga, organisasi internasional dapat dibagi menjadi dua jenis: Organisasi antar pemerintah (IGO) dan organisasi non-pemerintah (NGO). Sementara dalam organisasi antar-pemerintah harus ada keterlibatan pemerintah, dalam organisasi non-pemerintah, pemerintah tidak harus terlibat, misalnya, Masyarakat Palang Merah Internasional, Persatuan Pos Internasional, Kamar Dagang Internasional, dan lain-lain. Semua ini adalah organisasi internasional tetapi mereka tidak peduli dengan perdamaian dan keamanan internasional. Ada empat jenis organisasi antar-pemerintah. Mereka adalah:

1. Keanggotaan global dengan tujuan umum, misalnya, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Keanggotaan global dengan tujuan terbatas, misalnya Bank Dunia.
3. Keanggotaan terbatas dengan tujuan umum, misalnya ASEAN, OKI.
4. Keanggotaan terbatas dengan tujuan terbatas, misalnya NAFTA.

Organisasi internasional yang ada saat ini merupakan hasil dari sejarah yang panjang. Sejak awal peradaban manusia, baik secara teori maupun praktik, banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan organisasi internasional. Nabi Muhammad SAW yang meletakkan dasar filosofis dan politik organisasi internasional melalui Piagam Madinah. Secara bertahap, setelah abad ke-16, dunia Eropa meniru model Piagam Madinah dalam Konsorsium Eropa, Liga Bangsa-Bangsa, dan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berikut ini adalah deskripsi singkat dari masing-masing organisasi.

Piagam Madinah

Piagam Madinah, yang ditulis dan diumumkan oleh Nabi Muhammad untuk 10.000 warga kota Madinah yang terdiri dari berbagai agama pada tahun 622 M, merupakan dokumen pertama yang menetapkan prinsip-prinsip utama organisasi internasional. Sementara Piagam tersebut adalah piagam untuk melakukan hubungan antara dan di antara suku-suku yang berbeda, Piagam PBB adalah perjanjian untuk melakukan hubungan antara dan di antara bangsa-bangsa. Ibnu Ishaq dan Abu 'Ubaid telah mereproduksi seluruh teks Piagam, kata demi kata, dalam buku-buku mereka masing-masing dari naskah asli yang disimpan oleh Ibnu Abi Khithamah. Piagam ini terdiri dari 47 klausa berikut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

- (1) Ini adalah dokumen dari Nabi Muhammad (yang mengatur hubungan) antara orang-orang yang beriman dan Muslim dari Quraisy dan Yatsrib, dan mereka yang mengikuti mereka dan bergabung dengan mereka dan bekerja bersama mereka.

- (2) Mereka adalah satu komunitas (umat) dengan mengesampingkan semua orang.
- (3) Kaum Quraish yang hijrah sesuai dengan kebiasaan mereka saat ini harus membayar diat sesuai dengan jumlah mereka dan harus menebus tawanan mereka dengan kebaikan dan keadilan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang beriman.
- (4-8) Bani 'Auf menurut kebiasaan mereka saat ini harus membayar diat yang mereka bayarkan di masa kafir; setiap bagian harus menebus tawanan mereka dengan kebaikan dan keadilan yang biasa terjadi di antara orang-orang beriman. Bani Sa'ida, Bani al-Harits, Bani Jushām, dan Bani al-Najjar juga demikian.
- (9-11) Bani 'Amr bin 'Auf, Bani al-Nabit, dan Bani al-'Aus.
- (12)(a) Orang-orang beriman tidak boleh membiarkan seorang pun di antara mereka dalam keadaan melarat dengan tidak membayar diat atau diat dalam bentuk kebaikan.
- (12)(b) Seorang mukmin tidak boleh menjadikan orang yang dimerdekakan sebagai sekutu bagi seorang muslim yang memusuhinya.
- (13) Orang-orang beriman yang bertakwa akan melawan orang yang memberontak atau orang yang berusaha menyebarkan ketidakadilan, atau dosa atau permusuhan, atau kerusakan di antara orang-orang beriman tangan setiap orang akan melawan dia meskipun dia adalah anak dari salah satu dari mereka.
- (14) Seorang mukmin tidak boleh membunuh seorang mukmin demi orang kafir, dan tidak boleh membantu orang kafir melawan orang mukmin.
- (15) Perlindungan Allah adalah satu; yang terkecil di antara mereka dapat memberikan perlindungan kepada orang asing atas nama mereka. Orang-orang percaya adalah teman satu sama lain dengan mengesampingkan orang luar.
- (16) Bagi orang Yahudi yang mengikuti kita, ada pertolongan dan kesetaraan. Ia tidak akan dianiaya dan musuh-musuhnya tidak akan dibantu.
- (17) Damai sejahtera bagi orang-orang percaya tidak dapat dipisahkan. Tidak ada perdamaian yang terpisah ketika orang-orang percaya

berperang di jalan Allah. Kondisi harus adil dan setara bagi semua.

- (18) Dalam setiap perjalanan, seorang pengendara harus membawa pengendara lain di belakangnya.
- (19) Orang-orang percaya harus membalas darah satu sama lain yang tertumpah di jalan Allah.
- (20) (a) Orang-orang beriman yang bertakwa menikmati bimbingan yang terbaik dan paling lurus.
- (20)(b) Tidak ada seorang musyrik yang akan mengambil harta benda orang Quraisy yang berada di bawah perlindungannya, dan tidak pula seorang musyrik yang akan melakukan intervensi terhadap seorang mukmin.
- (21) Barang siapa yang dihukum karena membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar, maka ia tidak boleh dibunuh kecuali jika keluarga yang ditinggalkan merasa puas (dengan diat), dan orang-orang mukmin menjadi sekutu bagi orang mukmin, dan mereka wajib menindaknya.
- (22) Tidak halal bagi seorang mukmin yang berpegang pada apa yang tertulis di dalam dokumen ini dan beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menolong orang yang berbuat jahat dan tidak pula melindunginya. Laknat Allah dan kemarahan-Nya pada hari kebangkitan akan menyimpannya jika ia melakukannya, dan tidak ada pertobatan atau tebusan yang akan diterima darinya.
- (23) Setiap kali kalian berbeda pendapat tentang suatu masalah, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad.
- (24) Orang-orang Yahudi harus menyumbang biaya perang selama mereka berperang bersama orang-orang percaya.
- (25) Orang-orang Yahudi dari Bani 'Auf adalah satu komunitas dengan orang-orang beriman (orang-orang Yahudi memiliki agama mereka dan orang-orang Muslim memiliki agama mereka), orang-orang yang dimerdekakan dan orang-orang yang menerima mereka yang berperilaku tidak adil dan berdosa, karena mereka tidak menyakiti kecuali diri mereka sendiri dan keluarga mereka.
- (26-35) Hal yang sama berlaku untuk orang-orang Yahudi dari Banī al-Najjar, Banī al-Harits, Banī Sa'ida, Banī Jushām, Banī

al-'Aus, Banī Tha'laba, dan Jafnah, sebuah klan dari Tha'laba dan Banī al-Shutaibah. Kesetiaan adalah perlindungan terhadap pengkhianatan. Orang-orang yang dibebaskan dari Tha'laba adalah seperti diri mereka sendiri. Teman-teman dekat orang-orang Yahudi adalah seperti diri mereka sendiri.

- (36) Tidak seorang pun dari mereka yang boleh pergi berperang kecuali dengan izin dari Muhammad, tetapi ia tidak boleh dihalangi untuk membalas dendam atas suatu luka. Barang siapa membunuh seseorang tanpa peringatan, maka ia membunuh dirinya sendiri dan keluarganya, kecuali jika orang itu menganiaya dirinya, karena Allah akan menerimanya.
- (37) Orang-orang Yahudi harus menanggung biaya hidup mereka dan orang-orang Muslim menanggung biaya hidup mereka. Masing-masing harus membantu yang lain terhadap siapa pun yang menyerang orang-orang dari dokumen ini. Mereka harus saling meminta nasihat dan konsultasi, dan kesetiaan adalah perlindungan terhadap pengkhianatan. Seseorang tidak bertanggung jawab atas kesalahan sekutunya. Orang yang dirugikan harus ditolong.
- (38) Orang-orang Yahudi harus membayar dengan orang-orang percaya selama perang berlangsung.
- (39) Yatsrib akan menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang ada di dalam dokumen ini.
- (40) Orang asing yang berada di bawah perlindungan akan menjadi seperti tuan rumahnya yang tidak membahayakan dan tidak melakukan kejahatan.
- (41) Seorang wanita hanya akan diberikan perlindungan dengan persetujuan keluarganya.
- (42) Jika ada perselisihan atau kontroversi yang mungkin menimbulkan masalah, maka hal tersebut harus diserahkan kepada Allah dan Muhammad Rasul Allah. Allah menerima apa yang paling dekat dengan ketakwaan dan kebaikan dalam dokumen ini.
- (43) Suku Quraisy dan para pembantunya tidak akan diberikan perlindungan.

- (44) Pihak-pihak yang menandatangani perjanjian terikat untuk saling membantu satu sama lain dalam menghadapi serangan terhadap Yatsrib
- (45)(a) Jika mereka dipanggil untuk berdamai dan memeliharanya, mereka harus melakukannya; dan jika mereka membuat permintaan yang sama pada umat Islam, itu harus dilakukan kecuali dalam kasus perang suci.
- (45)(b) Setiap orang akan mendapatkan bagiannya dari pihak yang menjadi bagiannya.
- (46) Orang-orang Yahudi dari al-Aus, orang-orang yang dibebaskan dan diri mereka sendiri memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang ada di dalam dokumen ini dalam hal kesetiaan yang murni dari orang-orang yang ada di dalam dokumen ini. Kesetiaan adalah perlindungan terhadap pengkhianatan. Dia yang mendapatkannya harus mendapatkannya untuknya. Allah merestui dokumen ini.
- (47) Perbuatan ini tidak akan melindungi orang-orang yang zalim dan berdosa. Orang yang pergi berperang dan orang yang tinggal di rumah di kota akan aman kecuali jika dia berbuat zalim dan berdosa. Allah adalah pelindung orang yang baik dan orang yang bertakwa dan Muhammad adalah Rasul Allah.

Organisasi internasional modern memuat semua prinsip-prinsip Piagam Madinah. Pasal 23 dan 42 menyatakan bahwa di masa depan jika ada konflik, "harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad Rasul Allah." Dalam Pasal 15, 17, 19, dan 45, dinyatakan bahwa semua pihak akan diperlakukan sama. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan masalah pembalasan atas pembunuhan (Pasal 21), larangan melindungi penjahat (Pasal 22), pertanggungjawaban mereka yang melakukan kejahatan (Pasal 31b), larangan bagi individu untuk membuat perdamaian terpisah dengan musuh-musuh negara (Pasal 17) - semua prinsip-prinsip ini diadopsi oleh Piagam PBB.

Harus dicatat bahwa Piagam Madinah, Dustur al-Madinah, secara jelas dan nyata mencerminkan kegeniusan Nabi. Sungguh menakjubkan untuk mencatat keakuratan yang luar biasa dari kata-katanya, sebuah karakteristik yang dengan mudah dikonfirmasi oleh

mereka yang ahli dalam menafsirkan perjanjian internasional. Piagam Madinah memberikan kepada masyarakat dunia “sebuah lembaga publik pusat untuk mencari keadilan ... yang mengakhiri kekacauan kesukuan untuk selamanya dan meletakkan dasar bagi lembaga yang lebih luas.” Secara keseluruhan, harus dikatakan bahwa berabad-abad setelah diumumkan, masyarakat dunia kini telah sampai pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah.

Upaya Barat

Setelah itu, banyak filsuf politik Muslim seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Al-Farabi mendukung gagasan Piagam Madinah. Namun, selama Abad Pertengahan, para pemikir politik seperti Santo Agustinus, Santo Thomas Aquinas berpikir untuk membangun Komunitas Kristen Universal. Kekaisaran Romawi meluas, tetapi keberhasilannya sangat terbatas karena tantangan terhadap kekuasaan duniawi Gereja terus-menerus muncul baik dari dalam maupun dari luar negara Kristen. Awal gerakan Renaisans dan Reformasi di Eropa pada abad ke-16 membawa perubahan dramatis dalam perilaku negara-negara Eropa. Gereja kehilangan supremasinya dan terjadi pemisahan antara politik dan agama. Otoritas tertinggi kembali ke tangan raja. Negara-negara kota kecil ditelan atau digabungkan dengan unit-unit politik yang lebih besar. Dalam prosesnya, lima dinasti berkembang: Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, dan Austria. Kelima raja tersebut menandatangani Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 untuk perlindungan dan keamanan bersama. Namun, dinasti-dinasti tersebut tidak membangun organisasi mediator untuk mematuhi perjanjian tersebut. Akibatnya, ketika pada tahun 1789, Napoleon dari Prancis mulai memperluas wilayahnya dengan melanggar Perjanjian Westphalia, negara-negara lain menyadari perlunya memiliki lembaga internasional. Setelah kekalahan Napoleon dalam Perang Waterloo, negara-negara besar mengadakan Kongres Wina pada tahun 1815 dan mendirikan Konser Eropa.

Semangat Kongres Wina terus berlanjut hingga tahun 1870. Dimulai pada tahun 1870-an, Kongres Wina mulai terurai di bawah pengaruh kekuatan baru dan menantang dari revolusi industri dan

meningkatnya nasionalisme massa. Dengan pertumbuhan perusahaan swasta, individu mulai mengambil alih kendali, yang memunculkan nasionalisme massa sebagai lawan dari nasionalisme negara. Dengan revolusi industri, senjata-senjata baru mulai diproduksi. Akibatnya, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Eropa terbagi menjadi dua blok yang jelas: Triple Alliance dan Triple Entente. Konflik antara kedua blok ini terus berlanjut hingga pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914.

Liga Bangsa-Bangsa

Perang Dunia I berlanjut selama sekitar lima tahun. Setelah perang, muncul kesadaran bahwa tidak ada perdamaian akhir yang mungkin terjadi tanpa organisasi internasional. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk membentuk organisasi internasional. Bahkan, segera setelah perang dimulai, Presiden Amerika Woodrow Wilson mengajukan rencana pada tahun 1916 untuk membentuk organisasi internasional. Selama perang, tidak banyak perhatian yang diberikan pada proposal tersebut. Ketika negara-negara sekutu bertemu pada bulan April 1919 di Konferensi Perdamaian Paris, mereka menerima proposal tersebut. Namun, negara-negara tersebut menunggu hingga penandatanganan Perjanjian Versailles pada Januari 1920. Liga Bangsa-Bangsa secara resmi didirikan pada tanggal 10 Januari 1920. Konstitusi Liga Bangsa-Bangsa kemudian dikenal sebagai Perjanjian. Liga memiliki empat tujuan (a) Negara-negara akan mengikuti kebijakan kerja sama dan bukannya perang dan konflik, (b) Negara-negara akan menyelesaikan perselisihan mereka melalui Liga dan bukannya dengan sendirinya, (c) Negara-negara hanya dapat terlibat dalam perang tiga bulan setelah keputusan Liga, dan (d) Sanksi-sanksi akan diterapkan, baik ekonomi maupun militer, jika keputusan Liga tidak ditaati.

Liga Bangsa-Bangsa hanya memiliki 59 anggota. Awalnya, Liga Bangsa-Bangsa hanya memiliki 40 anggota karena Liga tidak mengizinkan semua negara di dunia menjadi anggotanya. Hanya negara-negara yang bersama pasukan sekutu, atau setidaknya, tidak bergabung dengan pasukan yang kalah selama Perang Dunia I yang

diizinkan untuk bergabung dengan Liga. Pasukan yang kalah, seperti Uni Soviet atau Jerman, tidak diikutsertakan. Pada dasarnya, ada dua jenis anggota - primer dan sekunder. Mereka yang merupakan anggota asli disebut anggota primer dan mereka yang bergabung kemudian seperti Jerman atau Uni Soviet disebut anggota sekunder. Meskipun ada tawaran keanggotaan permanen di Dewan, Amerika Serikat tidak bergabung dengan Liga karena Senat Amerika tidak menyetujui usulan Presiden.

Liga terdiri dari tiga organ utama: Majelis, Dewan, dan Sekretariat. Namun kemudian, sebuah pengadilan permanen dibentuk.

Majelis

Majelis adalah organ terbesar. Semua negara anggota Liga adalah anggota Majelis. Majelis ini mengadakan satu kali sidang dalam setahun. Dalam setiap sidang, negara anggota dapat mengirim hingga tiga perwakilan tetapi hanya memiliki satu suara. Keputusan harus diambil dengan suara bulat, kecuali dalam hal menerima, mengusir, dan menanggukkan negara anggota, yang membutuhkan dua pertiga mayoritas. Fungsi utama Majelis adalah untuk membahas masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama, mengesahkan anggaran tahunan Liga, dan memilih anggota-anggota tidak tetap Dewan. Majelis dari waktu ke waktu dapat menyarankan agar para anggota Liga mempertimbangkan kembali perjanjian-perjanjian yang sudah tidak dapat diterapkan lagi dan mempertimbangkan kondisi-kondisi internasional yang kelanjutannya dapat membahayakan perdamaian dunia.

Dewan

Dewan adalah organ Liga yang paling efektif. Dewan memiliki dua jenis anggota-permanen dan tidak permanen. Anggota tetapnya adalah Inggris, Prancis, Jepang, Italia, dan A.S. Karena A.S. tidak bergabung dengan Liga, maka kursi tersebut selalu kosong. Awalnya ada delapan anggota tidak tetap, tetapi secara bertahap jumlahnya dinaikkan menjadi 12. Majelis memilih anggota tidak tetap tersebut. Dewan akan bertemu dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan,

dan setidaknya sekali setahun, di tempat kedudukan Liga (Jenewa), atau di tempat lain yang diputuskan. Dewan dapat membahas dalam pertemuannya masalah apa pun dalam lingkup tindakan Liga atau yang mempengaruhi perdamaian dunia. Setiap anggota Liga yang tidak terwakili dalam Dewan dapat diundang untuk mengirimkan seorang wakilnya untuk duduk sebagai anggota dalam pertemuan-pertemuan Dewan dalam mempertimbangkan masalah-masalah, terutama yang mempengaruhi kepentingan anggota Liga tersebut. Dalam pertemuan-pertemuan Dewan, setiap anggota Liga yang diwakili di Dewan memiliki satu suara. Fungsi utama Dewan adalah untuk membahas dan menyelesaikan setiap perselisihan internasional dan menerapkan sanksi terhadap anggota yang melanggar keputusan Liga. Kecuali jika secara tegas diatur dalam Kovenan, keputusan-keputusan dalam setiap pertemuan Majelis atau Dewan memerlukan persetujuan dari semua anggota Liga yang diwakili dalam pertemuan tersebut. Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Dewan menunjuk sekretaris dan staf Sekretariat. Sekretaris Jenderal harus bertindak dalam kapasitas tersebut dalam semua pertemuan Majelis dan Dewan.

Sekretariat

Sekretariat adalah organ administratif Liga. Seorang Sekretaris Jenderal yang dipilih oleh Majelis untuk masa jabatan lima tahun mengepalainya. Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Dewan dapat menunjuk sekretaris dan staf Sekretariat. Sekretaris Jenderal biasanya bertindak dalam kapasitas tersebut pada semua pertemuan Majelis dan Dewan. Fungsi utama dari Sekretariat adalah untuk mengatur pertemuan dan seminar dan untuk mengurus masalah administrasi Liga. Selain itu, Sekretariat juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan anggaran tahunan dan laporan tahunan Liga. Sekretaris Jenderal Liga yang pertama adalah Eric Drummond, seorang pegawai negeri Inggris.

Liga Bangsa-Bangsa lahir dengan antusiasme yang tinggi dengan harapan dapat menyelesaikan konflik dan menghindari perang. Dekade pertama, 1920-1930, merupakan periode yang sukses karena setidaknya 60 masalah dibawa ke hadapan Liga dan banyak di antaranya yang

berhasil diselesaikan. Namun, ujian sesungguhnya bagi Liga muncul ketika ada keterlibatan negara-negara besar dalam konflik. Semua yang diselesaikan sebelumnya tidak melibatkan kekuatan besar mana pun. Namun, pada tahun 1930-an, dua kekuatan besar, Jepang dan Italia, menjadi agresor dalam konflik.

Pada bulan September 1931, Jepang menyerang Manchuria dengan dalih awal bahwa mereka melindungi hak-hak mereka yang melibatkan properti kereta api. Cina segera mengajukan banding ke Liga. Namun, Prancis dan Inggris tidak mau mengambil tindakan efektif terhadap Jepang. Akhirnya, Komisi Litton yang beranggotakan lima orang dibentuk untuk menyelidiki masalah ini. Komisi ini tiba tujuh bulan setelah kejadian awal. Pada saat itu, Jepang telah menyelesaikan penaklukkannya atas Manchuria. Tantangan kedua terhadap Liga muncul pada tahun 1935 ketika Italia menginvasi Ethiopia. Kaisar Ethiopia Haile Selassie meminta Liga untuk turun tangan. Dewan Liga dengan suara bulat memilih untuk menerapkan beberapa sanksi ekonomi terhadap Italia, tetapi tepat setelah pengumuman kemenangan Mussolini dan pengangkatannya sebagai Kaisar Ethiopia, semua sanksi terhadap Italia dicabut pada bulan Juli 1936. Akhirnya, Perang Dunia II pecah pada tahun 1939, dan Liga gagal mencegah Perang.

Apa penyebab kegagalan Liga? Ada beberapa penyebab umum dan khusus dari kegagalan Liga. Penyebab umum adalah sebagai berikut:

- a) Gagasan untuk menekan Jerman tidaklah baik. Karena Jerman tidak diberi perlakuan yang tepat, mereka bersiap-siap untuk membalas dendam;
- b) Pada tahun 1930-an, tidak ada negara yang tertarik untuk menyerahkan kepentingan mereka sendiri. Hal ini karena dunia sedang mengalami masa depresi dan negara-negara tersebut memiliki masalah di negaranya masing-masing;
- c) Liga memiliki awal yang lemah. Amerika Serikat tidak pernah menerima keanggotaan Liga. Jerman dan Uni Soviet pada awalnya tidak diizinkan untuk menjadi anggota Liga;

- d) Liga tidak memiliki militer sendiri untuk mengimplementasikan keputusan-keputusannya; dan
- e) Liga tidak lahir secara independen. Itu adalah bagian dari Perjanjian Versailles.

Selain penyebab umum di atas, ada beberapa alasan lain yang menyebabkan kegagalan Liga. Pertama, secara konstitusional: (a) Menurut Pasal 12 Perjanjian, perang tidak dilarang. Setiap negara dapat terlibat dalam perang lagi setelah tiga bulan dari keputusan Liga; (b) Dalam Liga, keputusan harus diambil dengan suara bulat yang merupakan tugas yang hampir mustahil; dan (c) Liga dapat mencampuri urusan negara mana pun meskipun negara tersebut bukan anggota Liga. Jika sebuah negara bukan anggota Liga, maka bagaimana mungkin Liga dapat menerapkan sanksinya terhadap negara tersebut? Kedua, politik: Dalam Liga, ada klasifikasi anggota: kelas satu (primer) dan kelas dua (sekunder). Negara-negara yang kalah pada awalnya tidak diizinkan menjadi anggota Liga. Kemudian, mereka bergabung sebagai anggota sekunder. Mereka tidak melihat Liga sebagai lembaga yang objektif. Jerman bergabung dengan Liga hanya untuk menghancurkannya. Ketiga, organisasi: Liga bukanlah lembaga internasional dalam arti bahwa tidak ada negara di luar Eropa, kecuali Jepang, yang menjadi anggota Liga. Liga ini pada dasarnya adalah organisasi Eropa dan bahkan di dalam Eropa, Inggris dan Prancis mendominasinya.

Asal Usul Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Upaya-upaya resmi melewati delapan tahap: Deklarasi London, Piagam Atlantik, Deklarasi Moskow, Deklarasi Teheran, Konferensi Bretton-Woods, Konferensi Dumbarton Oaks, Konferensi Yalta, dan Konferensi San Francisco.

Deklarasi London

Segera setelah Perang Dunia II dimulai, delapan pemimpin negara mencari suaka ke Inggris. Mereka adalah Belgia, Cekoslowakia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Prancis, dan Yugoslavia. Semua kekuatan ini bertemu di London. Selain itu, Inggris, Australia,

Selandia Baru, dan Afrika Selatan juga bergabung dalam pertemuan tersebut. Mereka semua menyatakan niat mereka untuk perdamaian internasional yang langgeng, yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi London.

Piagam Atlantik

Dua tahun setelah Deklarasi London, Presiden Amerika Serikat Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Churchill, ketika berlayar di sebuah kapal di Samudra Atlantik, memutuskan untuk memberikan makna yang dapat diterapkan pada Deklarasi tersebut dan menandatangani sebuah perjanjian pada tahun 1941 tentang tujuh prinsip yang kemudian dikenal sebagai Piagam Atlantik. Prinsip-prinsip tersebut adalah hak untuk memerintah sendiri, kedaulatan dan kesetaraan semua negara, penyelesaian damai atas semua perselisihan, kerja sama sosial-ekonomi, pelucutan senjata, penetapan batas teritorial setiap negara, dan menentang segala jenis agresi.

Deklarasi Moskow

Untuk memberikan bentuk konkret pada Piagam tersebut dua tahun kemudian, pada tahun 1943, Menteri Luar Negeri AS, Inggris, Uni Soviet, dan Duta Besar Tiongkok bertemu di Moskow dan menguraikan rencana operasional untuk sebuah organisasi internasional yang baru.

Deklarasi Teheran

Satu bulan setelah Menteri Luar Negeri dari negara-negara besar menyiapkan rencana operasional untuk organisasi internasional masa depan, kepala pemerintahan AS, Inggris, dan Uni Soviet, yaitu Roosevelt, Churchill, dan Stalin bertemu di Teheran dan menyetujui Deklarasi Moskow. Mereka memutuskan untuk mendapatkan umpan balik dari semua negara dalam pertemuan umum yang dijadwalkan akan diadakan di AS pada tahun 1944.

Konferensi Bretton Woods

Pada tahun 1944, hampir 44 negara bertemu di New Hampshire untuk mendiskusikan rekonstruksi keuangan setelah perang, terutama untuk negara-negara berkembang. Dari konferensi ini, muncul gagasan untuk mendirikan Dana Moneter Internasional (IMF), Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), dan Bank Dunia.

Konferensi Dumbarton Oaks

Tiga pemimpin besar memutuskan untuk membuka kesempatan bagi negara-negara lain untuk menyetujui rencana Moskow. Oleh karena itu, sebuah konferensi diadakan di Dumbarton Oaks, Washington, DC, antara 21 Agustus hingga 28 September 1944. Tujuannya adalah untuk menyusun konstitusi organisasi internasional yang diusulkan. Akhirnya, rancangan konstitusi dipresentasikan kepada para delegasi dari 29 negara yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut.

Konferensi Yalta

Pada tahun 1945, Roosevelt, Churchill, dan Stalin bertemu di Yalta untuk mendiskusikan isu-isu yang tersisa mengenai organisasi tersebut. Mereka memutuskan bahwa dalam usulan Dewan Keamanan PBB, lima negara besar akan memiliki hak veto, dan Ukraina serta Byelorusia akan diberikan keanggotaan terpisah. Diputuskan bahwa konferensi terakhir akan diadakan di San Francisco pada bulan April 1945.

Konferensi San Francisco

Sesuai jadwal, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan pada tanggal 25 April 1945. Sebanyak 50 negara berpartisipasi dalam Konferensi dan menandatangani konstitusi, Piagam PBB. Kemudian, Polandia juga menandatangani Piagam tersebut. Konferensi berakhir pada 26 Juni 1945.

Tujuan dan Prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa

Piagam PBB menguraikan semua hubungan dan program-program selanjutnya berdasarkan tujuan dan prinsip-prinsip tertentu.

Piagam PBB dengan jelas menetapkan empat tujuan. Keempat tujuan tersebut adalah

- (1) Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional,
- (2) Menjamin hak untuk menentukan nasib sendiri,
- (3) Memelihara kerja sama sosial-ekonomi di antara negara-negara, dan,
- (4) Memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi semua orang.

Lebih lanjut, Piagam PBB didasarkan pada lima prinsip berikut:

- (1) Kesetaraan kedaulatan semua anggota,
- (2) Penyelesaian sengketa internasional melalui cara-cara damai,
- (3) Tanggung jawab kolektif dalam penegakan tindakan PBB,
- (4) Tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, dan
- (5) Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi tiga organ utamanya dari Liga Bangsa-Bangsa, tetapi menambahkan tiga organ lainnya. Enam organ utamanya adalah: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, dan Dewan Perwalian.

Majelis Umum

Majelis Umum dianggap sebagai badan pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap anggota PBB secara otomatis diwakili di Majelis Umum oleh maksimal lima perwakilan. Karena perannya yang beragam, Majelis Umum sangat bergantung pada penasihat dan ahli. Dewan ini juga menggunakan struktur komite untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Cakupan luas dari fungsinya dapat dibagi menjadi empat kategori: musyawarah, pengawasan, keuangan, dan pilihan. Musyawarah mengacu pada kemampuan untuk mendiskusikan, mempelajari, dan merekomendasikan. Majelis Umum dapat membuat rekomendasi kepada Dewan Keamanan atau badan-badan lain di Perserikatan

Bangsa-Bangsa. Majelis Umum tidak dapat membuat rekomendasi mengenai isu-isu yang sedang dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan kecuali Dewan Keamanan meminta masukannya. Majelis Umum berkewajiban untuk memulai studi dan membuat rekomendasi untuk tujuan memajukan kerja sama internasional dalam mewujudkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta menangani perselisihan yang tidak ditangani oleh Dewan Keamanan. Dalam rangka mengumpulkan informasi untuk memajukan kerja sama internasional, Majelis Umum melakukan studi yang ekstensif. Istilah rekomendasi agak menyesatkan karena sering kali lebih dari sekedar rekomendasi. Sebagai contoh, dalam kasus Korea, Palestina dan Yunani, Dewan Keamanan bertindak sebagai konsultan, mediator, dan konsiliator. Mereka telah membantu dalam negosiasi dengan menyediakan sumber ide untuk solusi yang dapat diterima. Rekomendasinya tidak mengikat secara hukum, namun memiliki kekuatan moral. Piagam ini melarang intervensi dalam masalah-masalah yang pada dasarnya berada di dalam yurisdiksi domestik negara. "Dengan demikian, fungsi Majelis Umum terbatas pada pencarian fakta, diskusi, persuasi dan rekomendasi.

Fungsi pengawasan Majelis Umum memberikannya kekuasaan untuk mengontrol dan mengatur organ-organ dan badan-badan di PBB. Untuk memenuhi fungsi ini, Majelis Umum menerima dan mempertimbangkan laporan dari badan-badan lain seperti Dewan Keamanan dan Sekretariat. Dengan mengawasi semua badan dan badan khusus lainnya, Majelis Umum mampu mengkoordinasikan mereka sehingga mengurangi duplikasi pekerjaan investigasi dan pekerjaan lainnya. Dapat dikatakan bahwa Majelis Umum adalah manajer Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Majelis Umum juga bertanggung jawab atas masalah keuangan. Semua pengaturan keuangan dan anggaran badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dipertimbangkan dan disetujui oleh Majelis Umum. Majelis Umum juga membagi pengeluaran di antara para anggota. Umumnya, biaya dibagi berdasarkan kemampuan membayar, dengan batas atas dan batas bawah jumlah yang dapat disumbangkan.

Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa:⁴⁹

Komite-komite utama

Organ-organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa

Organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya

Badan-badan khusus dan organisasi otonom lainnya di dalam sistem

Komite-komite tetap dan prosedural

Organ-organ pembantu lainnya dari Majelis Umum

Mahkamah Internasional

Dewan Perwalian

Majelis Umum

Dewan Keamanan

UNTSO Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB di Palestina

UNMOGIP Kelompok Pengamat Militer Perserikatan Bangsa-Bangsa di India dan Pakistan

UNFICYP Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Siprus

UNEF Pasukan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa

UNDOF Pasukan Pengamat Pelepasan Perserikatan Bangsa-Bangsa Komite Mandiri Militer

Komisi Perlucutan Senjata

Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat UNRWA

Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan UNCTAD

Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan UNCTAD

Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF

Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR

Program Pangan Dunia Bersama PBB/FAO

Lembaga Pelatihan dan Penelitian PBB UNITAR

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Program Pembangunan PBB UNDP

Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa UNIDO

Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNEP

⁴⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa UNU
Dana Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dewan Pangan Dunia
Dewan Ekonomi dan Sosial:
Komisi Regional
Komisi-komisi Fungsional
Komisi-komisi sessional, tetap dan ad hoc
Kesekretariatan
IAEA Badan Energi Atom Internasional
GATT Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan
ILO Organisasi Perburuhan Internasional
FAO Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNESCO Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan
Perserikatan Bangsa-Bangsa
WHO Organisasi Kesehatan Dunia
IDA Asosiasi Pembangunan Internasional
IBRD Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan
IFC International Finance Corporation (Korporasi Keuangan
Internasional)
IMF Dana Moneter Internasional
ICAO Organisasi Penerbangan Sipil Internasional
UPU Universal Postal Union (Serikat Pos Universal)
ITU International Telecommunication Union (Persatuan Telekomunikasi
Internasional)
WMO Persatuan Meteorologi Dunia (World Meteorological Union)
IMCO Organisasi Konsultatif Maritim Antar-Pemerintah
WIPO Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia

Majelis Umum berbagi beberapa fungsi pemilihan dengan Dewan Keamanan. Sebagai contoh, kedua badan tersebut berbagi dalam pemilihan 15 hakim Mahkamah Internasional. Pemilihan anggota baru memerlukan dua pertiga suara dalam Majelis Umum setelah Dewan Keamanan memberikan rekomendasi untuk mendukung anggota baru dan pemohon mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal. Pemilihan 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan anggota Dewan Ekonomi dan Sosial sepenuhnya merupakan tanggung jawab

Majelis Umum. Para anggota dapat dicabut hak suaranya apabila mereka gagal memenuhi kewajiban keuangannya. Selain itu, seorang anggota dapat ditangguhkan atau dikeluarkan dari organisasi jika melanggar ketentuan-ketentuan dalam Piagam.

Untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang sangat banyak, majelis umum bertemu dalam sebuah sesi tahunan yang teratur. Sesi ini dimulai pada hari Selasa ketiga setiap bulan September dan berlangsung selama setidaknya tiga bulan. Seorang Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk setiap sesi.

Karena banyaknya topik yang dibahas oleh Majelis Umum, organisasi ini menggunakan sistem komite untuk menyelesaikan tugasnya. Anggota komite utama mempertimbangkan hal-hal yang bersifat substantif. Terdapat enam komite utama, yang dibentuk pada setiap sesi tahunan. Setiap komite terbuka bagi semua anggota untuk diwakili. Majelis Umum memberi mereka tugas-tugas, yang membutuhkan rancangan rekomendasi. Hal ini digunakan dalam pertemuan-pertemuan rutin. Keenam komite utama dibagi menurut bidang-bidang yang berbeda. Komite Politik dan Keamanan berurusan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, kerja sama politik, dan peraturan persenjataan. Komite ini juga mempertimbangkan hal-hal seperti penerimaan anggota baru dan penangguhan atau pengusiran anggota yang tidak mengikuti ketentuan Piagam. Komite Ekonomi dan Keuangan menangani masalah-masalah ekonomi dan keuangan dalam lingkup Piagam. Sebagai contoh, Komite ini mempromosikan kerja sama ekonomi termasuk kemajuan ekonomi dan standar hidup yang lebih tinggi bagi negara-negara Dunia Ketiga. Komite Sosial Kemanusiaan dan Budaya menangani hal-hal seperti bantuan dalam mewujudkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Komite Administrasi dan Anggaran mempertimbangkan pembagian biaya, peraturan staf untuk sekretariat dan pengaturan keuangan dengan badan-badan khusus. Komite Hukum menangani masalah-masalah hukum dalam lingkup Piagam. Komite-komite lain meneruskan pertanyaan-pertanyaan hukum kepadanya. Terakhir, terdapat Komite Perwalian namun komite ini tidak memiliki arti penting saat ini karena tidak ada lagi

wilayah perwalian. Selain komite-komite utama, ada dua komite prosedural dan dua komite tetap. Komite prosedural memutuskan item mana yang akan menjadi agenda dan menentukan prioritas masalah yang akan ditangani. Dua komite tetap berfungsi secara terus menerus bahkan ketika Majelis Umum sedang tidak bersidang.

Majelis Umum tidak memiliki kekuatan hukum, namun memiliki kekuatan opini publik. Namun, Majelis Umum memiliki tiga instrumen untuk mengimplementasikan keputusan. Instrumen-instrumen tersebut adalah (a) Deklarasi: Ketika Majelis Umum mendeklarasikan sebuah kebijakan, semua anggota akan menandatangani deklarasi tersebut. Tentunya, menjadi kewajiban bagi para anggotanya untuk mematuhi deklarasi tersebut. (b) Resolusi: Setiap resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum memiliki implikasi otomatis untuk diikuti oleh negara-negara anggota. (c) Konvensi: Setiap perjanjian yang ditandatangani di bawah naungan konvensi PBB menjadi wajib bagi para anggotanya.

Dewan Keamanan

Dewan Keamanan adalah organ PBB yang paling efektif. Terdiri dari 15 anggota. Lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Lima anggota tetap adalah Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Cina, dan Inggris. Sepuluh anggota tidak tetap dipilih untuk masa jabatan dua tahun oleh Majelis Umum. Mereka dipilih untuk memastikan distribusi geografis yang adil dalam Dewan Keamanan. Masing-masing dari 15 anggota memiliki satu perwakilan yang selalu hadir di markas besar PBB.

Fungsi utama Dewan Keamanan adalah musyawarah, penegakan, dan pemilihan. Musyawarah meliputi kegiatan-kegiatan seperti diskusi, investigasi, penyelidikan, dan memberikan rekomendasi. Piagam mencantumkan perkembangan logis dari langkah-langkah yang harus yang harus digunakan dalam menangani sengketa internasional. Jelas, suatu sengketa harus ada sebelum Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan apa pun. Jika setelah menyelidiki suatu situasi, Dewan Keamanan menentukan bahwa ada ancaman, Dewan Keamanan dapat membuat rekomendasi. Pertama, Dewan Keamanan akan mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk

damai sendiri. Jika tindakan bilateral tidak dapat menyelesaikan sengketa, pihak yang bersengketa berkewajiban untuk membawa masalah tersebut ke Dewan Keamanan. Pasal 39 memberi Dewan Keamanan wewenang untuk menentukan situasi sebagai ancaman terhadap perdamaian dan untuk memutuskan langkah-langkah yang tepat yang harus diambil untuk ancaman tersebut.

Meskipun perselisihan antar negara merupakan ancaman yang paling nyata terhadap perdamaian dunia, namun itu bukanlah satu-satunya masalah yang ditangani oleh Dewan Keamanan. Ancaman lain terhadap perdamaian seperti penimbunan persenjataan dan masalah pengendalian energi atom juga termasuk dalam domain kepentingannya. Dengan demikian, setiap situasi yang berpotensi mengancam perdamaian dunia menjadi perhatian Dewan Keamanan.

Fungsi penegakan mengacu pada kekuasaan untuk memutuskan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk memelihara dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan-tindakan pengeluaran dan mengumpulkan kontribusi dari para anggota. Sekretaris Jenderal memainkan peran sentral dalam proses administrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sekretaris Jenderal juga memainkan peran politik yang penting. Dia membuat laporan tahunan tentang pekerjaan organisasi, di mana dia menyatakan pendapat dan rekomendasinya. Sekretaris Jenderal adalah satu-satunya orang yang mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa secara keseluruhan dalam negosiasi dengan pemerintah dan organisasi lain. Sekretaris Jenderal dapat membawa masalah apa pun yang menjadi perhatian internasional ke Dewan Keamanan.

Dewan Ekonomi dan Sosial

Dewan ini merupakan badan yang mengurus kerja sama sosial-ekonomi dan pembangunan di antara negara-negara. Selama pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, disadari bahwa meskipun masalah ekonomi dan sosial bukanlah satu-satunya penyebab konflik internasional, namun penyelesaiannya akan mengurangi ketegangan internasional. Oleh karena itu, PBB memasukkan organ terpisah yang disebut Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan ini memutuskan aturan

dan prosedurnya sendiri. Dewan ini memiliki setidaknya dua sesi reguler setiap tahun. Pada awal setiap sesi, seorang Presiden dan dua Wakil Presiden dipilih. Setiap anggota diperbolehkan mengirimkan satu perwakilan pada pertemuannya. Keputusan dibuat di antara lima puluhan anggota yang dipilih untuk masa jabatan tiga tahun oleh Majelis Umum.

Salah satu pasal menyatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan membantu penciptaan kondisi stabilitas dan kesejahteraan yang diperlukan untuk hubungan damai dan bersahabat di antara bangsa-bangsa. Hal ini akan dicapai dengan mempromosikan hal-hal berikut: Standar hidup yang lebih tinggi, lapangan kerja penuh, dan kondisi kemajuan dan perkembangan ekonomi dan sosial; Solusi masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan masalah-masalah terkait; dan operasi budaya dan pendidikan internasional; dan penghormatan universal terhadap dan ketaatan pada hak asasi manusia serta kebebasan mendasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.

Dalam mempromosikan cita-cita ini, Dewan Ekonomi dan Sosial menjalankan tiga fungsi utama. Dewan ini dapat membuat atau memulai studi dan laporan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal yang terkait. Dewan ini mengumpulkan informasi mengenai pertumbuhan penduduk, masalah pengungsi, kekurangan perumahan dan masalah rekonstruksi daerah yang hancur.

Namun demikian, rekomendasi dari Dewan ini tidak mengikat anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan ini memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum dan badan-badan khusus PBB lainnya. Selain membuat rekomendasi, Dewan dapat menyiapkan rancangan konvensi untuk diserahkan kepada

Majelis Umum. Ini adalah proposal perjanjian tertulis, yang menghilangkan tugas negosiasi atas nama negara-negara yang bersangkutan. Yang harus mereka lakukan adalah menandatangani perjanjian yang telah disiapkan. Dewan ini juga menggunakan konferensi untuk menyampaikan maksudnya.

Dewan Ekonomi dan Sosial adalah organisasi payung yang secara longgar mengawasi kegiatan badan-badan khusus PBB. Badan-badan khusus tersebut antara lain: Dana Anak-Anak PBB, Program Pembangunan PBB, Organisasi Kesehatan Dunia, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, dll. Masing-masing badan ini dan badan khusus lainnya memiliki Piagam dan strukturnya sendiri. Masing-masing memiliki anggaran dan stafnya sendiri. Dewan mengkoordinasikan badan-badan ini melalui perjanjian dan negosiasi. Operasi mereka juga harus memenuhi persetujuan Majelis Umum. Dengan demikian, badan-badan khusus ini dikelola sedemikian rupa untuk menghilangkan tumpang tindih tugas dan untuk mencapai tujuan keseluruhan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim yang dipilih dengan suara terbanyak oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Setiap hakim memiliki masa jabatan sembilan tahun. Masa jabatannya diselang-seling sehingga hanya lima hakim yang akan dipilih kembali setiap tiga tahun. Untuk menghilangkan bias nasional dari pengadilan, tidak ada dua hakim yang berasal dari negara yang sama. Ketua dan Wakil Ketua pengadilan dipilih oleh para hakim untuk masa jabatan tiga tahun. Para hakim secara permanen bersidang, kecuali hari libur, di Mahkamah Internasional yang berlokasi di Den Haag, Belanda. Kasus-kasus diputuskan dengan suara mayoritas dari para hakim yang berpartisipasi. Sembilan hakim merupakan kuorum. Jika terjadi hasil seri, Presiden Mahkamah memiliki hak suara. Mahkamah Internasional mengadili kasus-kasus yang diajukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Agar sebuah kasus dapat sampai ke Mahkamah, kasus tersebut harus (1) melibatkan perselisihan yang mempertentangkan klaim antar negara; (2) dapat dibenarkan, atau tunduk pada penyelesaian berdasarkan hukum; (3) dirujuk ke pengadilan. Selain kasus-kasus yang melibatkan negara-negara, Mahkamah juga memberikan nasihat kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan mengenai pertanyaan-pertanyaan hukum.

Mahkamah Internasional tidak dapat menegakkan putusannya tanpa bantuan Dewan Keamanan. Pada dasarnya, Mahkamah Internasional bergantung pada bobot moral dari keputusan-keputusannya. Negara-negara anggota diwajibkan untuk mematuhi keputusan Mahkamah. Walaupun memiliki banyak kekurangan, Mahkamah memainkan peranan penting dalam pengembangan sistem internasional.

Dewan Perwakilan

Saat ini, badan ini hampir menjadi badan PBB yang tidak aktif. Awalnya, 11 wilayah negara yang kalah dalam Perang Dunia II ditetapkan sebagai wilayah perwakilan. Artinya, wilayah-wilayah tersebut ditempatkan di bawah yurisdiksi negara pemenang untuk mempersiapkan mereka menuju kemerdekaan. Fungsi utama Dewan ini adalah untuk menyediakan, atas nama komunitas internasional, pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri yang ditetapkan sebagai wilayah perwalian. Meskipun setiap wilayah ditempatkan di bawah tanggung jawab pengawasan negara tertentu, Dewan Perwalian secara keseluruhan bertanggung jawab atas semua wilayah perwalian. Pasal 87 dan 88 Piagam menunjukkan metode utama untuk melaksanakan peran pengawasan ini. Metode-metode ini adalah (1) penyusunan kuesioner yang terperinci mengenai kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan dari penduduk di wilayah perwakilan, yang akan digunakan sebagai dasar laporan oleh otoritas administratif; (2) pemeriksaan secara lisan yang komprehensif terhadap juru bicara otoritas administratif berdasarkan jawaban kuesioner, dan laporan tertulis dari Dewan Perwalian kepada Majelis Umum; (3) penerimaan dan pemeriksaan petisi dari individu atau kelompok di wilayah perwalian; dan (4) kunjungan berkala ke setiap wilayah perwalian oleh para utusan Dewan Perwakilan.

Pada awalnya, Dewan ini terdiri dari 14 anggota, yang mana lima di antaranya merupakan anggota tetap Dewan Keamanan dan sisanya dipilih oleh Majelis Umum. Dewan ini tidak lagi aktif

sejak tahun 1994 karena semua wilayah perwakilan telah mencapai kemerdekaan.

Perbandingan antara PBB dan Liga Bangsa-Bangsa

Menurut beberapa ahli, Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah penjelmaan baru dari Liga Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya muncul dalam sebuah bentuk. Namun, ada juga yang percaya bahwa PBB adalah lembaga yang jauh lebih baik dan lebih baik. Memang benar bahwa ada beberapa kesamaan, tetapi ada banyak perbedaan. Pertama, kedua organisasi tersebut ingin mencegah perang dan memiliki penyelesaian damai. Kedua, keduanya didirikan setelah perang besar. Ketiga, keduanya menekankan keamanan kolektif. Terakhir, dalam keduanya, ada dominasi kekuatan besar. Namun, kita dapat melihat perbedaan-perbedaannya dalam tabel berikut ini dalam hal asal-usul, organisasi, dan konstitusi.

Organisasi Regional

Sejak berakhirnya Perang Dunia II dan sebagai akibat dari Perang Dingin, regionalisme telah terwujud dalam politik dunia. Tiga jenis organisasi regional telah muncul: Organisasi Ekonomi, Pertahanan, dan Sosial. Sementara organisasi ekonomi dibentuk untuk mencari kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota, organisasi pertahanan dibentuk untuk membela negara-negara sekutu. Jenis organisasi sosial dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan umum. Sebuah analisis dari empat organisasi yang dipilih diberikan dalam bab ini. Organisasi-organisasi itu adalah NATO, OKI, Uni Eropa, dan ASEAN.

Sekilas perbandingan Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dilihat sebagai berikut:

Kategori	Liga Bangsa-Bangsa	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Asal	1. Liga Bangsa-Bangsa lahir atas nama “Pihak-pihak Berkontrak Tinggi.” 2. Liga adalah bagian dari Perjanjian Versailles. 3. Negara-negara besar seperti AS dan Uni Soviet tidak bergabung dengan Liga.	1. PBB lahir atas nama “Rakyat” Dunia. 2. PBB lahir sebagai lembaga independen. 3. Keduanya adalah anggota PBB.
Organisasi	1. Liga adalah organisasi yang sempit. Hanya memiliki tiga organ utama. 2. Liga tidak menekankan pada kerja sama sosioekonomi. 3. Liga lebih terpusat.	1. PBB adalah organisasi yang luas dalam arti memiliki enam organ utama dan banyak badan tambahan. 2. PBB memiliki organ khusus, Dewan Ekonomi dan Sosial untuk meningkatkan kerja sama sosial-ekonomi di antara negara-negara.

Kategori	Liga Bangsa-Bangsa	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Konstitusi	1. Di Liga, Majelis dan Dewan tidak memiliki pemisahan kekuasaan yang jelas. 2. Prosedur pengambilan keputusan di Liga dilakukan dengan suara bulat yang membuat lembaga ini tidak efektif. 3. Liga tidak melarang perang karena negara-negara dapat terlibat dalam perang setelah tiga bulan dari keputusan Liga. 4. Liga hanya dapat ikut campur jika agresi yang sebenarnya terjadi. 5. Dalam Liga, setiap anggota dapat mengundurkan diri kapan saja sehingga membuat organisasi menjadi lemah.	1. Di PBB, ada pemisahan kekuasaan, bukan peleburan kekuasaan. 2. Sebagian besar kasus di PBB diputuskan oleh mayoritas sederhana. Dalam beberapa kasus, diperlukan dua pertiga mayoritas dan dalam beberapa kasus, suara bulat seperti di Dewan Keamanan. 3. Di bawah Piagam PBB, perang dilarang kecuali dalam keadaan khusus. 4. PBB dapat ikut campur jika ada kemungkinan situasi perang. 5. PBB tidak memiliki ketentuan mengenai penarikan diri.

Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO)

North Atlantic Treaty Organisation (NATO) adalah aliansi 26 negara dari Amerika Utara dan Eropa. Pakta Pertahanan Atlantik Utara ditandatangani pada tanggal 4 April 1949. Semua negara anggota yang berpartisipasi dalam aspek militer Aliansi menyumbangkan pasukan dan peralatan. Pasukan dan aset ini tetap berada di bawah komando

nasional. NATO memiliki kebijakan pintu terbuka sehubungan dengan perluasan. Setiap negara Eropa yang berada dalam posisi untuk memajukan prinsip-prinsip Perjanjian Washington dan berkontribusi pada keamanan di wilayah Euro-Atlantik dapat menjadi anggota Aliansi atas undangan Dewan Atlantik Utara. Negara-negara yang bercita-cita menjadi anggota NATO juga diharapkan untuk memenuhi tujuan politik, ekonomi, dan militer tertentu untuk memastikan bahwa mereka akan menjadi kontributor keamanan Aliansi serta penerima manfaatnya. Rencana Aksi Keanggotaan NATO dirancang untuk membantu negara-negara mitra yang bercita-cita untuk menjadi anggota NATO. Fitur utama NATO meliputi perencanaan kekuatan kolektif; pendanaan bersama; perencanaan operasional bersama; formasi multinasional, markas besar dan pengaturan komando; sistem pertahanan udara terpadu; keseimbangan peran dan tanggung jawab di antara Sekutu; penempatan dan pengerahan pasukan di luar wilayah negara jika diperlukan; pengaturan, termasuk perencanaan manajemen krisis dan penguatan; standar dan prosedur umum untuk peralatan, pelatihan, dan logistik; doktrin dan latihan gabungan dan gabungan jika diperlukan; serta kerja sama infrastruktur, persenjataan, dan logistik.

Tujuan

- A. Menurut Perjanjian, peran mendasar NATO adalah untuk menjaga kebebasan dan keamanan negara-negara anggotanya melalui cara-cara politik dan militer. Menurut Pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara, tujuan utamanya adalah pencegahan terhadap penggunaan kekuatan terhadap anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Ini mewujudkan prinsip bahwa serangan terhadap salah satu dari mereka dianggap sebagai serangan terhadap semua. Selama 15 tahun terakhir, NATO juga telah memainkan peran yang semakin penting dalam manajemen krisis dan pemeliharaan perdamaian.
- B. Peran struktur militer terpadu adalah menyediakan kerangka kerja organisasi untuk mempertahankan wilayah negara-negara anggota terhadap ancaman terhadap keamanan dan stabilitas mereka, sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian.

- C. NATO akan mencegah setiap potensi agresi terhadap negara anggota dengan menghentikan gerak maju agresor sejauh mungkin.
- D. NATO juga harus siap untuk berkontribusi pada pencegahan konflik dan untuk melakukan operasi tanggap krisis non-Artikel 5. Pasukan Aliansi memiliki peran penting dalam membina kerja sama dan pemahaman dengan mitra NATO dan negara-negara lain, terutama dalam membantu mitra untuk mempersiapkan potensi partisipasi dalam operasi yang dipimpin NATO.

Dengan demikian, NATO berkontribusi pada pelestarian perdamaian, perlindungan kepentingan keamanan bersama anggota Aliansi, dan pemeliharaan keamanan dan stabilitas kawasan Euro-Atlantik. Contoh signifikan pertama dari peran yang baru diperluas ini adalah pengerahan pasukan militer NATO yang belum pernah terjadi sebelumnya bersama dengan pasukan militer negara-negara lain di Bosnia dan Herzegovina, di mana NATO diberi tanggung jawab oleh U.N.O. pada akhir tahun 1995.

Organisasi Konferensi Islam (OKI)

OKI didirikan pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko untuk menyatukan negara-negara Islam. Sebanyak 57 negara hadir, menyatukan dan mengkonsolidasikan kekuatan mereka untuk menegaskan martabat dan kehormatan Islam. Mereka bersatu untuk melindungi perdamaian dan martabat negara-negara Islam. OKI beroperasi melalui berbagai organnya, tetapi memiliki dua badan utama: Konferensi Raja dan Kepala Negara dan Pemerintahan, dan Konferensi Menteri Luar Negeri. Yang pertama, yang dikenal sebagai Konferensi OKI, berlangsung setiap tiga tahun dan yang kedua bertemu setahun sekali. Konferensi Menteri Luar Negeri adalah badan pengambil keputusan dan pelaksana utama.

Selama tiga dekade yang telah berlalu, upaya-upaya diintensifkan dan kerja sama diperluas ke bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sejalan dengan agenda global dan regional. Sebagai bagian dari upayanya, organisasi ini mengadakan pertemuan puncak di negara-negara anggota untuk menyediakan platform bagi

pertukaran wawasan dan pandangan di antara negara-negara anggota, untuk mencapai solusi dalam menghadapi musuh, dan mempromosikan serta mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Di antara resolusi-resolusinya dalam KTT sebelumnya adalah pengembangan pariwisata di antara negara-negara anggota, mempersiapkan negara-negara Islam untuk abad ke-21, dan membangun fondasi Islam untuk ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan, lingkungan dan kesehatan.

Tujuan

Memperkuat:

- A. Solidaritas Islam di antara negara-negara anggota.
- B. Kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan.
- C. Perjuangan seluruh umat Islam untuk menjaga martabat, kemerdekaan dan hak-hak nasional mereka.

Mengkoordinasikan tindakan untuk:

- A. Menjaga tempat-tempat suci.
- B. Mendukung perjuangan rakyat Palestina dan membantu mereka mendapatkan hak-haknya serta membebaskan wilayah-wilayah mereka yang terjajah.

Bekerja untuk:

- A. Menghapuskan diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan.
- B. Menciptakan suasana yang menguntungkan untuk meningkatkan kerja sama dan pemahaman antara negara-negara anggota dan negara-negara lain.

Prinsip-prinsip

OKI didasarkan pada tiga prinsip:

- A. Kesetaraan total di antara negara-negara anggota.
- B. Menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri.
- C. Menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial setiap negara anggota.

Para anggota selama beberapa waktu tidak senang dengan cara OKI beroperasi. Oleh karena itu, ada seruan untuk melakukan reformasi terhadap badan ini. Program Aksi Sepuluh Tahun OKI diluncurkan pada tanggal 19 Juni 2006. Program ini berjanji untuk:

- menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan
- melindungi hak-hak perempuan, anak-anak, dan kaum minoritas
- mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan
- membantu negara-negara kurang berkembang untuk menangani berbagai penyakit.

Dalam rangka memodernisasi organisasi, OKI mengadopsi Piagam baru yang didasarkan pada konsep moderasi dan modernisasi. Dalam waktu empat tahun setelah restrukturisasi ini, OKI telah menjadi pemain yang kredibel di kancah internasional, mengejar kebijakan untuk mempromosikan dan mengkonsolidasikan perdamaian dan pembangunan global.

Di bidang sosial-ekonomi, OKI telah mengadopsi sejumlah proyek yang sedikit banyak terkait dengan Tujuan Pembangunan Milenium PBB. Proyek-proyek ini termasuk, antara lain, dana pengentasan kemiskinan untuk memerangi kemiskinan dengan dana sebesar puluhan miliar. OKI juga telah memperkenalkan beberapa program untuk meningkatkan perdagangan intra-OKI, promosi investasi, pengembangan kapasitas agroindustri dan pembangunan infrastruktur. Target utama perdagangan intra-OKI di bawah Program Aksi Sepuluh Tahun adalah untuk mencapai tingkat 20% pada tahun 2015. Di bidang politik, upaya-upaya dilakukan untuk mendorong langkah-langkah pembangunan kepercayaan antara faksi-faksi yang bersaing dan menyelesaikan konflik di antara Negara-negara Anggota OKI. OKI juga telah mengembangkan kemitraan dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang relevan untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di Palestina, Afganistan, Kashmir, Somalia, Irak, dan wilayah-wilayah lainnya.

Uni Eropa

Uni Eropa adalah asosiasi negara-negara Eropa. Negara-negara anggotanya telah membentuk lembaga-lembaga bersama yang mendelegasikan sebagian kedaulatan mereka sehingga keputusan mengenai hal-hal tertentu yang menjadi kepentingan bersama dapat dibuat secara demokratis di tingkat Eropa. Akar sejarah Uni Eropa berawal dari Perang Dunia II. Gagasan integrasi Eropa disusun untuk mencegah perang besar lainnya. Ide ini pertama kali diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Robert Schumann, dalam sebuah pidato pada tanggal 9 Mei 1950. Tanggal ini, yang merupakan “hari lahir” dari apa yang sekarang dikenal sebagai Uni Eropa, dirayakan setiap tahun sebagai Hari Eropa.

Komposisi

Awalnya, Uni Eropa hanya terdiri dari enam negara: Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luksemburg, dan Belanda. Denmark, Irlandia dan Inggris bergabung pada tahun 1973, Yunani pada tahun 1981, Spanyol dan Portugal pada tahun 1986, Austria, Finlandia dan Swedia pada tahun 1995. Pada tahun 2004, perluasan terbesar yang pernah ada terjadi dengan bergabungnya 10 negara baru. Pada tahun-tahun awal, sebagian besar kerja sama antara negara-negara Uni Eropa adalah tentang perdagangan dan ekonomi, tetapi sekarang Uni Eropa juga berurusan dengan banyak hal lain yang penting secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, seperti hak-hak warga negara; memastikan kebebasan, keamanan dan keadilan; penciptaan lapangan kerja, pembangunan regional, perlindungan lingkungan dan membuat globalisasi bekerja untuk semua orang.

Uni Eropa berfungsi melalui lima organnya, yaitu:

- Parlemen Eropa (dipilih oleh rakyat negara-negara anggota);
- Dewan Uni Eropa (mewakili pemerintah negara-negara anggota);
- Komisi Eropa (kekuatan pendorong dan badan eksekutif);
- Pengadilan Kehakiman (memastikan kepatuhan terhadap hukum); dan
- Pengadilan Auditor (mengontrol pengelolaan anggaran Uni Eropa yang sehat dan sesuai hukum).

Kelima organ Uni Eropa di atas dibantu oleh badan-badan berikut:

- Komite Ekonomi dan Sosial Eropa (mengekspresikan pendapat masyarakat sipil yang terorganisir tentang masalah ekonomi dan sosial);
- Komite Wilayah (mengekspresikan pendapat otoritas regional dan lokal);
- Bank Sentral Eropa (bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan mengelola Euro);
- Ombudsman Eropa (menangani keluhan warga negara tentang mal administrasi oleh lembaga atau badan Uni Eropa mana pun); dan
- Bank Investasi Eropa (membantu mencapai tujuan Uni Eropa dengan mendanai proyek-proyek investasi).

Tujuan

Tujuan utama Uni Eropa adalah sebagai berikut:

- A. Memperluas kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota;
- B. Menyelesaikan masalah dan perselisihan regional; dan
- C. Perdagangan bebas di antara negara-negara anggota.

Uni Eropa telah memberikan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran selama setengah abad. Uni Eropa telah membantu meningkatkan standar hidup, membangun pasar tunggal di seluruh Eropa, meluncurkan mata uang tunggal Eropa, Euro, dan memperkuat suara Eropa di dunia. Eropa adalah benua dengan banyak tradisi dan bahasa yang berbeda, tetapi juga dengan nilai-nilai yang sama. Uni Eropa membela nilai-nilai ini. Uni Eropa memupuk kerja sama di antara masyarakat Eropa, mempromosikan persatuan sambil melestarikan keanekaragaman dan memastikan bahwa keputusan dibuat sedekat mungkin dengan warga negara. Dalam dunia yang semakin saling bergantung pada abad ke-21, akan semakin penting bagi setiap warga negara Eropa untuk bekerja sama dengan orang-orang dari negara lain dalam semangat toleransi dan solidaritas.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima negara anggota awal, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei Darussalam bergabung pada 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999. Wilayah ASEAN memiliki populasi sekitar 500 juta jiwa, luas wilayah 4,5 juta kilometer persegi, produk domestik bruto gabungan sebesar US\$ 737 miliar, dan total perdagangan US\$ 720 miliar.

Tujuan

Deklarasi ASEAN menyatakan bahwa maksud dan tujuan Asosiasi adalah:

- (i) mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya di kawasan pembangunan di kawasan ini melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat fondasi untuk komunitas bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai, dan (ii) untuk memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar Negara di kawasan ini dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Prinsip-prinsip

Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation/TAC) di Asia Tenggara, yang ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Pertama pada tanggal 24 Februari 1976, menyatakan bahwa dalam hubungan mereka satu sama lain, Para Pihak Tinggi harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar berikut ini:

- Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan identitas nasional semua negara;

- Hak setiap Negara untuk menjalankan kehidupan nasionalnya yang bebas dari campur tangan, subversi, atau paksaan dari luar;
- Tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain;
- Penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai;
- Penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan; dan
- Kerja sama yang efektif di antara mereka sendiri.

Struktur

Organ pengambilan keputusan tertinggi ASEAN adalah Pertemuan Kepala Negara dan Pemerintahan ASEAN. KTT ASEAN diselenggarakan setiap tahun. Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (Menteri Luar Negeri) diadakan setiap tahun. Pertemuan tingkat menteri dari beberapa sektor lain juga diadakan: pertanian dan kehutanan, ekonomi, energi, lingkungan, keuangan, informasi, investasi, tenaga kerja, hukum, kabut asap regional, pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan sosial, kejahatan lintas batas, transportasi, pariwisata, pemuda, Dewan AIA, dan Dewan AFTA. Untuk mendukung badan-badan kementerian tersebut, terdapat 29 komite pejabat senior dan 122 kelompok kerja teknis.

Untuk mendukung pelaksanaan hubungan eksternal ASEAN, telah membentuk komite-komite yang terdiri dari para kepala misi diplomatik di ibu kota berikut ini: Brussels, London, Paris, Washington DC, Tokyo, Canberra, Ottawa, Wellington, Jenewa, Jenewa, Seoul, New Delhi, New York, Beijing, Moskow, dan Islamabad.

Sekretaris Jenderal ASEAN diangkat berdasarkan prestasi dan memiliki status menteri. Sekretaris Jenderal ASEAN, yang memiliki masa jabatan lima tahun, diberi mandat untuk memprakarsai, memberi saran, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan ASEAN. Para anggota staf profesional Sekretariat ASEAN diangkat berdasarkan prinsip rekrutmen terbuka dan kompetisi di seluruh kawasan.

Pencapaian

ASEAN telah mencapai banyak keberhasilan melalui kesepakatan politik dan ekonomi berikut ini. Kesepakatan-kesepakatan politik tersebut adalah:

- Deklarasi ASEAN, Bangkok, 8 Agustus 1967;
- Deklarasi Zona Damai, Kebebasan dan Netralitas, Kuala Lumpur, 27 November 1971;
- Deklarasi Kesepakatan ASEAN, Bali, 24 Februari 1976;
- Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara, Bali, 24 Februari 1976;
- Deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan, Manila, 22 Juli 1992; dan
- Perjanjian tentang Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara, Bangkok, 15 Desember 1997.
- Kerja sama fungsional dipandu oleh rencana-rencana berikut:
 - Rencana Aksi ASEAN untuk Pembangunan Sosial;
 - Rencana Aksi ASEAN tentang Kebudayaan dan Informasi;
 - Rencana Aksi ASEAN untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Rencana Aksi Strategis ASEAN di bidang Lingkungan Hidup;
 - Rencana Aksi ASEAN dalam Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba; dan
 - Rencana Aksi ASEAN dalam Memerangi Kejahatan Transnasional.

ASEAN telah menegaskan bahwa ASEAN yang berwawasan ke luar memainkan peran penting dalam komunitas internasional dan memajukan kepentingan bersama. ASEAN telah membuat langkah besar dalam membangun hubungan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan akan terus menempatkannya sebagai prioritas utama. Kerja sama dengan negara-negara Asia Timur lainnya telah dipercepat dengan diadakannya dialog tahunan di antara para pemimpin ASEAN, Cina, Jepang, dan Republik Korea. ASEAN juga mendorong kerja sama dengan Pakistan di beberapa sektor tertentu. Sejalan dengan tekadnya untuk meningkatkan kerja sama dengan kawasan-kawasan berkembang lainnya, ASEAN menjalin hubungan

dengan organisasi-organisasi antar-pemerintah lainnya, yaitu, Organisasi Kerja Sama Ekonomi, Dewan Kerja Sama Teluk, Asosiasi Asia Selatan untuk Kerja Sama Regional, dan Forum Pasifik Selatan.

D. Rangkuman Materi

Secara umum, kelompok penekan berusaha mempengaruhi kebijakan publik dan membentuk opini publik baik melalui metode langsung maupun tidak langsung. Metode langsung adalah: (a) dengan mengupayakan terpilihnya wakil-wakil rakyat yang berpandangan sama; (b) dengan mengupayakan akses kepada pejabat publik; dan (c) dengan melakukan kampanye di media massa. Metode tidak langsung adalah keanggotaan yang saling terkait yang tercermin dalam empat cara yang berbeda: (a) Anggota parlemen juga merupakan anggota suatu kelompok, dan sebagai anggota suatu kelompok, mereka memiliki kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan kelompok mereka sendiri; (b) Kadang-kadang, pasangan birokrat adalah anggota suatu kelompok dan pasangannya dapat mempengaruhi pasangannya di rumah terkait kebijakan yang berkaitan dengan kelompoknya; (c) Ada banyak perwakilan perdagangan paruh waktu yang memiliki akses terus menerus kepada perwakilan politik dan menteri; dan (d) Birokrat yang sudah pensiun bergabung dengan LSM dan perusahaan swasta, tetapi memiliki hubungan dengan birokrat yunior yang ada di dalam lembaga pengambil keputusan di pemerintahan.

Di negara-negara demokrasi liberal, metode yang digunakan oleh kelompok penekan berbeda-beda tergantung pada (a) struktur lembaga politik, (b) sifat sistem kepartaian, (c) budaya politik, (d) sifat isu, dan (e) sifat kelompok. Struktur kelembagaan suatu sistem politik mempengaruhi kegiatan kelompok penekan dalam banyak hal. Sebagai contoh, dalam sistem kesatuan seperti Inggris, kelompok penekan harus berurusan dengan satu otoritas pusat.

Akan tetapi, dalam sistem seperti di Indonesia, kelompok penekan beroperasi di tingkat nasional dan negara bagian. Jika sebuah kelompok gagal di tingkat negara bagian, mereka mungkin akan berhasil di tingkat federal, atau jika gagal di tingkat nasional, mereka mungkin akan berhasil di tingkat negara bagian, atau jika gagal di

suatu negara bagian, mereka mungkin akan berhasil di provinsi lain di Indonesia. Keterkaitan antara partai politik dan kelompok penekan juga menentukan metode yang digunakan oleh kelompok penekan. Di Inggris dan Perancis, serikat pekerja dihubungkan dengan partai politik. Di Bangladesh, setiap serikat pekerja dihubungkan dengan partai politik yang berbeda. Hubungan yang erat dengan partai politik memiliki efek penting pada kekuatan kelompok penekan. Namun, di Indonesia, serikat pekerja tidak secara terbuka terkait dengan partai politik mana pun. Budaya politik juga sangat berpengaruh terhadap metode kelompok penekan. Sikap politik di Kanada menunjukkan toleransi politik yang lebih besar terhadap aktivitas kelompok penekan dibandingkan dengan yang terjadi di Eropa atau Malaysia. Sifat isu adalah variabel lain dalam analisis metode kelompok penekan.

Kelompok penekan harus menggunakan metode yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Akhirnya, sifat kelompok itu sendiri menentukan metode yang digunakan oleh kelompok penekan. Kelompok-kelompok yang memusuhi pemerintah yang sedang berkuasa tidak dapat berharap untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang pro-pemerintah. Lebih penting lagi, Pemerintah mungkin membutuhkan dukungan dari beberapa kelompok jika kebijakan akan diimplementasikan.

Taktik kelompok penekan dapat bersifat nyata atau laten. Cara-cara yang tersedia untuk mengekspresikan tuntutan suatu kelompok adalah penting untuk menentukan strategi suatu kelompok dalam sistem politik mana pun. Jangkauan dan efektivitas tuntutan mereka tergantung pada sifat sistem. Sifat pemerintah menentukan taktik yang dapat diadopsi oleh suatu kelompok untuk merealisasikan tuntutan mereka. Lesant dan manifes

Dalam sistem politik yang demokratis dan terbuka, biasanya aktivitas kelompok-kelompok tersebut bersifat manifes. Dalam sistem manifes, biasanya kelompok penekan menggunakan dua strategi berikut ini: (a) lobi dan (b) aksi industrial. Lobi memungkinkan setiap individu atau kelompok untuk mempengaruhi legislator dan birokrat. Banyak kelompok penekan memiliki agen tetap untuk

menjalin kontak pribadi dengan anggota parlemen atau kongres dan mempengaruhi suara mereka, baik untuk mendukung atau menentang RUU tertentu. Mereka disebut pelobi. Taktik standar untuk melobi adalah tampil di hadapan komite legislatif untuk memperjuangkan tuntutannya. Lobi kelompok penekan untuk mempengaruhi anggota legislatif untuk memperkenalkan, memodifikasi, meloloskan atau mematikan RUU tertentu. Contoh utamanya adalah Federasi Pertanian Amerika, Asosiasi Mobil Indonesia, Asosiasi Konsumen Indonesia dan sejenisnya.

Namun, ketika taktik lobi gagal, kelompok penekan saat ini menggunakan banyak taktik lain untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Mereka melakukan aksi langsung yang dimulai dengan demonstrasi. Para demonstran akan mengorganisir pemboikotan dan pemogokan. Mereka berkampanye, menulis selebaran dan buku-buku serta mengadakan berbagai acara untuk menarik perhatian pemerintah dan media. Jika kelompok-kelompok tersebut tidak berhasil, mereka cenderung menggunakan taktik-taktik yang tidak sah dan koersif yang menggunakan kekerasan dan terorisme. Di negara lain, kekerasan telah menandai perjuangan kelompok antara buruh dan manajemen sejak negara ini menjadi negara bangsa yang merdeka. Konsekuensi dari kekerasan fisik yang terus berlanjut memang mengkhawatirkan, namun kekerasan selalu menjadi kemungkinan dalam aktivitas kelompok penekan. Terorisme telah mengambil bentuk pembunuhan yang disengaja terhadap perwakilan diplomatik, serangan bersenjata terhadap kelompok lain atau pejabat pemerintah, provokasi pertumpahan darah, dan ancaman pengeboman. Teroris seringkali berhasil menarik perhatian dunia terhadap tujuan mereka, tetapi pada saat yang sama mereka dapat kehilangan dukungan publik karena tindakan kekerasan mereka.

E. Soal Latihan:

1. Apa yang dimaksud kelompok penekan dalam politik?
2. Sejauh mana efektivitas keberadaan kelompok penekan dalam suatu negara?

3. Bagaimana konsensus pakar memandang peranan kelompok penekan?
4. Sebutkan beberapa kritik terhadap kelompok penekan?
5. Tujuan yang baik harus juga diiringi oleh cara yang baik. Jelaskan dalam kasus kelompok penekan!

F. Sumber Bacaan

Finifter, Ada, ed. *Political Science: The State of the Discipline*. Washington: American Political Science Association, 1993.

Friedrich, Carl J. ed., *Authority*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958.

Goodin, Robert Hans-Dieter Klingemann, eds. *A New Handbook of Political Science*. New York: Oxford University Press, 1998.

Harahap, Ali Musa. et.al. (2022). *Mengenal Hubungan Internasional Madani*. UNIDA Gontor Press.

Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok penekan*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1984.

Mikac, R., Harahap, A.M., Stanisic, L.K., Response to The COVID-19 crisis: a Comparative Analysis of The Actions of Indonesia, Mexico, and Croatia. *JASSP*. 2(2). 2022.

BAB 14

Pemilihan Umum

A. Deskripsi Singkat

Bab ini menguraikan berbagai teori tentang pemilihan umum dalam politik, mendefinisikannya, dan menjelaskan fitur-fitur esensialnya.

B. Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami konsep Pemilihan Umum
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Pemilu Dalam Politik

C. Penyajian Materi

Pendahuluan

Dalam demokrasi perwakilan, warga negara biasa tidak memerintah; sebaliknya, mereka memilih orang-orang yang mampu melakukannya. Aristoteles menyebut sistem seperti itu sebagai kekuasaan segelintir orang yang diawasi oleh banyak orang. Sistem demokrasi memberi rakyat kendali atas para pemimpinnya sehingga pemimpin tersebut dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jika masyarakat umum tidak mampu melakukan kontrol tersebut, maka pemerintahan tidak akan berbeda dengan oligarki, yang otoritas politiknya dipegang oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat.

Berasal dari kata kerja Latin *eligere*, yang berarti memilih, memilih, pemilihan adalah proses terorganisir di mana orang memilih seseorang, untuk posisi penting publik seperti presiden, atau sekelompok orang untuk mewakili mereka dalam pemilu nasional atau nasional. majelis negara. Pemilu adalah cara utama untuk mencapai tujuan rakyat dan pergantian personel yang menjalankan pemerintahan secara tertib.

1. Fungsi Pemilu

Mekanisme khusus yang dikembangkan oleh negara-negara demokrasi perwakilan untuk menjaga agar para pemimpin politik mereka tetap bertanggung jawab kepada masyarakat umum adalah melalui pemilu. Etos demokrasi menekankan memilih dalam pemilu yang bebas sebagai tindakan tertinggi sebagai warga negara. Pemilu mempunyai berbagai fungsi.⁵⁰

Pertama, pemilu adalah sarana untuk membuat pemerintah bertanggung jawab kepada yang diperintah. Pemilu terakhir menentukan siapa yang akan memerintah; pemikiran tentang pemilu berikutnya menentukan bagaimana mereka melakukannya. Jika mereka memerintah dengan buruk, maka mereka akan dicopot dari jabatannya pada pemilu berikutnya. Tradisi ini menekankan adanya arus komunikasi ke atas dalam proses pemilu dari kalangan bawah (pemilih) ke kalangan atas (partai dan pemerintah). Persaingan antar partai memaksa mereka untuk menanggapi pandangan para pemilih. Dengan kata lain, pemilu adalah instrumen yang digunakan oleh para pemilih untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik dan menolak orang-orang dan kebijakan-kebijakan yang tidak lagi didukung oleh mayoritas pemilih.

Kedua, pemilu merupakan sarana untuk memilih siapa yang akan memimpin dan mengarahkan urusan pemerintahan. Agar hal ini bisa terjadi, pemilu harus memberikan pemilih pilihan antara kandidat atau pilihan apakah kebijakan tertentu harus diikuti. Pemilu membuat kekerasan tidak diperlukan untuk menyelesaikan perbedaan politik. Pemungutan suara massal adalah cara yang damai dan stabil

⁵⁰ Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000.

untuk menyingkirkan satu kelompok pemegang kekuasaan politik dan mengangkat kelompok lain.⁵¹

Ketiga, pemilu memberikan legitimasi kepada pemerintah. Inilah alasan popularitas pemilu di negara-negara demokrasi maupun non-demokrasi. Para pemimpin otoriter sering kali terpaksa mengadakan pemilu (referendum atau pemungutan suara) untuk melegitimasi mereka atau kebijakan mereka. Rezim satu partai biasanya menyelenggarakan pemilu nasional berkala yang dikelola oleh negara secara hati-hati untuk memperkuat legitimasi mereka. Pemilu memberikan perasaan memilih kepada para pemilih dan sebagai hasilnya, otoritas pemerintah terhadap para pemilih menjadi sangat meningkat. Di bekas Uni Soviet, menurut sebuah penelitian,

Kampanye pemilu nasional berlangsung sekitar dua bulan dan kampanyenya sangat intensif. Kepemimpinan partai memobilisasi jutaan pihak terkait serta masyarakat biasa, untuk mempublikasikan pemilu, menjelaskan isu-isu dan program-program yang dianggap penting oleh partai, dan memastikan bahwa seluruh masyarakat pergi ke tempat pemungutan suara. Minggu-minggu sebelum pemilu kita menyaksikan terbentuknya lingkaran belajar, kelompok diskusi, pertemuan kampanye, kampanye dari pintu ke pintu, unjuk rasa, demonstrasi, dan pidato yang tak terhitung jumlahnya.

Namun, hingga reformasi demokrasi tahun 1989, para pemilih tidak punya banyak pilihan. Hanya satu kandidat yang dinominasikan untuk setiap posisi. Tujuan pemilu di Uni Soviet bukanlah untuk memilih siapa yang akan memerintah namun untuk memperbarui antusiasme dan dukungan rakyat terhadap rezim. Keempat, yang berkaitan erat dengan fungsi legitimasi adalah efek demonstrasi yang diperkirakan akan terjadi di luar negeri. Rezim otoriter dan diktator sering kali merasa perlu meyakinkan dunia luar bahwa mereka mendapat dukungan massa. Oleh karena itu, rezim-rezim ini melakukan upaya ekstra untuk memberikan kesan kebebasan memilih dalam pemilu, bahkan ketika hanya terdapat satu daftar kandidat dan satu suara. pilihan pemilih adalah menerima atau menolak daftar tersebut sebagaimana adanya. Akibatnya, rezim-rezim

⁵¹ Dahl, Robert. *Modern Political Analysis*. New York: Prentice Hall, 1990.

tersebut menggambarkan diri mereka sebagai rezim yang berbasis massa dan, jika berhasil, dapat menerima bantuan dan hibah dari negara-negara industri maju dan demokratis.

Terakhir, pemilu mempunyai fungsi mobilisasi. Di negara-negara diktator dan di banyak rezim partai tunggal, pemilu digunakan sebagai instrumen yang berguna untuk mengajak masyarakat mengambil tindakan guna mendukung kebijakan nasional. Bahkan di negara demokrasi, pemilu digunakan sebagai alasan untuk memperkenalkan kebijakan baru atau meneruskan kebijakan lama.

2. Pemilu yang Bebas dan Adil

Agar pemilu bermakna, pemilu harus bebas dan adil. Lalu, apa ciri-ciri penting pemilu yang bebas dan adil? Pemilu yang “bebas” umumnya dikaitkan dengan karakteristik berikut:

1. Setiap warga negara dewasa, kecuali anak di bawah umur, orang asing, orang gila, dan penjahat, wajib mempunyai hak pilih. Dalam negara demokrasi, batas usia minimum yang paling umum untuk memenuhi syarat memilih adalah 18 tahun.
2. Setiap warga negara dewasa harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan bahwa suara setiap warga negara harus mempunyai bobot yang sama dengan suara setiap warga negara dewasa lainnya.
3. Pemungutan suara harus dilakukan secara rahasia.
4. Warga negara harus mempunyai kebebasan penuh untuk membentuk partai politik, mengikuti pemilu, dan mencalonkan calon pilihan mereka.
5. Kandidat harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempublikasikan nama dan posisi kebijakannya sehingga pemilih dapat memahami dan memilih kandidat dan kebijakan.

Pemilu yang dianggap adil umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemilihan umum diadakan secara berkala dan dalam batas waktu yang ditentukan. Jarak waktu antara satu pemilu dengan pemilu berikutnya biasanya empat hingga lima tahun.

2. Para pemilih mempunyai akses yang sama terhadap tempat pemungutan suara dan mereka harus dapat memilih tanpa rasa takut, paksaan, atau pembalasan yang diakibatkannya.
3. Pada akhir pemilu, suara harus dihitung secara akurat dan di depan umum serta hasilnya harus diumumkan sesegera mungkin.
4. Semua kandidat diberikan dukungan keuangan yang sama dan waktu luang yang sama di radio dan televisi agar pandangan mereka diketahui oleh para pemilih.
5. Proses pemilu harus diselenggarakan dan diawasi oleh sebuah badan yang tidak memihak yang terdiri dari para ahli pemilu.

3. Jenis Pemilu

Pemilu digolongkan menjadi tiga jenis: Pemilu Biasa, Pemilu Menyimpang, dan Pemilu Penyelarasan. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat dukungan yang diperoleh partai politik sebagaimana tercermin dalam hasil pemilu dari waktu ke waktu.

Pemilu Normal adalah pemilu yang hasilnya mencerminkan keseimbangan loyalitas partai jangka panjang di kalangan pemilih secara keseluruhan. Hasil pemilu menunjukkan bahwa orang-orang yang secara mental mengasosiasikan diri dengan satu partai selama bertahun-tahun telah memilih partai yang sama yang memenangkan pemilu. Dalam bahasa ilmu politik, pemilu nasional mengungkapkan bahwa identifikasi partai stabil dan sebagian besar masyarakat memilih berdasarkan identifikasi tersebut. Jenis pemilu ini disebut juga mempertahankan pemilu.

Pemilu yang Menyimpang adalah pemilu dimana partai mayoritas yang menang kalah dalam pemilu karena faktor-faktor jangka pendek seperti daya tarik kandidat. Pergeseran dalam pemungutan suara ini hanya bersifat sementara; setelah itu para pemilih kembali ke identifikasi partai jangka panjangnya. Pemilu presiden Amerika pada tahun 1952 dan 1956, yang dimenangkan oleh Dwight Eisenhower dari Partai Republik, dianggap pemilu yang menyimpang. Pemilu berikutnya memperlihatkan para pemilih kembali ke identifikasi partai jangka panjang mereka dengan memilih kandidat dari Partai Demokrat. Begitu pula dengan pemilu presiden tahun 1980 yang

dimenangkan oleh Ronald Reagan yang dianggap sebagai pemilu yang menyimpang. Kekalahan calon dari Partai Demokrat ini disebabkan tidak efektifnya petahana Demokrat, Jimmy Carter. Namun, kemenangan Partai Republik selanjutnya menunjukkan bahwa Partai Demokrat bukanlah partai mayoritas alami di Amerika Serikat.

Penyelarasan atau Kritis Pemilu menunjukkan perubahan besar dalam distribusi loyalitas partai di daerah pemilihan. Dalam pemilu seperti ini, para pemilih melepaskan loyalitas lama mereka pada partai dan membangun identitas partai baru yang tahan lama. Pemilu tahun 1800, 1828, 1860, 1896, dan 1932 diidentifikasi sebagai pemilu yang menyelaraskan kembali sejarah AS.

Pemilu dan Referendum

Pemilu juga dapat dikategorikan berdasarkan peluang pengambilan keputusan. Banyak negara demokratis membatasi keterlibatan warga negaranya dalam urusan negara hanya pada pemungutan suara untuk memilih wakil-wakilnya. Kebijakan negara kemudian diputuskan oleh wakil-wakil terpilih tanpa ada masukan langsung dari para pemilih. Cara pemilihan wakilnya bisa langsung dan tidak langsung. Dalam sebagian besar kasus, rakyat diberikan kekuasaan untuk menggunakan hak memilih dan memilih secara langsung wakil-wakil mereka. Dalam beberapa kasus, metode pemilihan wakil bersifat tidak langsung. Di sini, rakyat menggunakan hak pilihnya untuk memilih beberapa orang yang secara umum dikenal sebagai Electoral College. Badan ini kemudian memilih perwakilan sebenarnya. Presiden Amerika Serikat dipilih secara tidak langsung oleh para pemilih. Presiden Pakistan, Jenderal Ayub Khan (1958-1969), merancang sistem yang dikenal sebagai Demokrasi Dasar di mana rakyat diberi hak memilih untuk memilih puluhan ribu Demokrat Dasar yang kemudian memilih Presiden.

Meskipun pemilu digunakan untuk memilih perwakilan di sebagian besar negara, beberapa negara demokrasi memperbolehkan pemilih dalam kondisi tertentu untuk memutuskan secara langsung, dalam pemilu, apakah pemerintah harus mengikuti kebijakan tertentu. Pemilihan seperti ini disebut referendum. Referendum adalah metode

pemilihan yang memungkinkan pemilih untuk memutuskan suatu kebijakan atau masalah konstitusi melalui suara terbanyak atas permintaan pemerintah atau badan legislatif. Di beberapa negara bagian, isu-isu penting, seperti amandemen konstitusi, harus diserahkan kepada pemilih melalui referendum. Swiss sejauh ini merupakan negara yang paling banyak menggunakan referendum nasional. Dari tahun 1886 hingga 1991, Swiss mengadakan 420 referendum, diikuti oleh Australia dengan 45 referendum, dan Prancis dengan 21 referendum. AS tidak pernah mengadakan referendum, tetapi sejumlah negara bagian Amerika telah mengadakan banyak referendum di seluruh negara bagian. Di Pakistan, referendum digunakan untuk memutuskan apakah kepala negara, biasanya seorang Jenderal, harus mengambil peran sebagai Presiden. Di Maladewa, Presiden nya dilantik untuk masa jabatan keenam pada 11 November 2003 setelah ia memenangkan referendum di mana ia memperoleh 90,28 persen dari 113.992 suara yang disurvei. Dia adalah satu-satunya calon presiden dalam referendum tersebut.

Sistem pemilihan

Sistem pemilu dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan untuk menyelenggarakan pemilu. Hal ini mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, penetapan daerah pemilihan, cara pemberian suara, calon dan partai peserta pemilu, dan sejenisnya. Sistem pemilu juga menangani pertanyaan-pertanyaan seperti: Jabatan mana yang harus diisi melalui pemungutan suara? Siapa yang berhak memilih? Bagaimana seharusnya suara diubah menjadi kursi?

Secara umum, jabatan Presiden, Perdana Menteri dan anggota parlemen biasanya dipilih. Namun masih banyak jabatan lain yang bisa diisi melalui pemungutan suara. Sistem pemilu menetapkan jumlah jabatan yang harus diisi dan juga cara pemungutan suara. Di Amerika Serikat, jumlah jabatan terpilih terlalu banyak, mulai dari Presiden hingga penangkap anjing. Di Australia, kedua majelis parlemen dipilih secara langsung. Kanada mempunyai badan legislatif bikameral namun Senat merupakan badan yang ditunjuk. Selandia

Baru memiliki badan legislatif unikameral. Australia mempunyai dua tingkat pemerintahan sub nasional terpilih: negara bagian dan lokal. Oleh karena itu, jumlah jabatan yang harus diisi melalui pemilu bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya, dan hal ini harus ditentukan oleh sistem pemilu.

Hak pilih merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pemilu. Waralaba berkaitan dengan pertanyaan tentang siapa yang dapat memilih. Sebagian besar negara bagian menerapkan prinsip hak pilih universal yang memberikan setiap orang yang memenuhi syarat dalam masyarakat mempunyai hak untuk memilih. Di sebagian besar negara demokrasi, batasan usia yang paling umum adalah 21 tahun. Di banyak negara, seperti Kanada, Malaysia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat, batasan usia minimum adalah 18 tahun. Orang-orang yang dikecualikan dari pemilihan termasuk penjahat, orang yang tidak kompeten secara mental, dan penduduk yang bukan warga negara seperti pekerja tamu. Ada pengecualian. Beberapa negara bagian di Amerika Latin memperbolehkan orang asing yang telah tinggal setidaknya selama lima tahun untuk memberikan suara dalam pemilihan kota. Venezuela telah mengizinkan orang asing untuk memilih dalam pemilihan presidennya. Namun, waralaba universal ini relatif baru. Dalam pemilu Kanada pertama pada tahun 1867, perempuan dan penduduk asli Kanada tidak diberi hak untuk memilih. Perempuan mendapatkan hak pilihnya pada tahun 1918 dan penduduk asli India mendapatkannya pada tahun 1960.

Elemen sistem pemilu yang paling banyak dibicarakan adalah aturan untuk mengubah suara menjadi kursi. Ada dua jenis sistem pemilu yang digunakan di hampir semua negara demokrasi: Sistem pluralitas daerah pemilihan dengan satu wakil dan variasinya. Jenis sistem pemilu yang kedua dikenal dengan sistem perwakilan proporsional dan bentuknya juga bermacam-macam.

Sistem Pluralitas Distrik dengan Anggota Tunggal

Dalam sistem, seperti namanya, satu anggota dipilih dari setiap distrik berdasarkan suara terbanyak. Dalam sistem, suatu negara bagian atau unit sub-nasionalnya dibagi menjadi daerah pemilihan

yang setara, dengan satu wakil dipilih dari setiap distrik. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu daerah memenangkan pemilu. Varian yang paling mudah dipahami dan paling banyak digunakan adalah sistem first past the post yang digunakan di Inggris, Malaysia, Bangladesh, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya. Sistem first past the post ini biasanya berarti bahwa kandidat yang memenangkan banyak dukungan belum tentu mendapatkan suara mayoritas di daerah pemilihan. Sistem ini menguntungkan partai besar dan merugikan partai kecil. Ini memberikan bonus kursi kepada partai yang memimpin perolehan suara. Oleh karena itu, hal ini mendorong pemerintahan oleh satu partai yang memiliki mayoritas jelas di parlemen. Varian lain dari sistem adalah alternatif vote (AV). Sistem ini memperhitungkan lebih banyak informasi tentang preferensi pemilih daripada yang pertama kali diposkan. Dalam sistem ini, pemilih mengurutkan kandidat berdasarkan preferensinya dengan menempatkan nomor. Jika seorang kandidat memperoleh mayoritas suara pilihan pertama pada penghitungan pertama, dia dinyatakan terpilih. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas pada penghitungan pertama, kandidat yang memperoleh suara terendah akan dikeluarkan dan suara akan didistribusikan kembali sesuai dengan preferensi pilihan kedua. Mereka mengulangi hal ini sampai seorang kandidat memperoleh suara mayoritas. Sistem ini digunakan untuk memilih majelis rendah seperti di Malaysia dan empat dari delapan negara bagian dan teritorinya. Varian ketiga dari sistem mayoritas dikenal sebagai run-off atau yang kedua, pemungutan suara untuk membantu kandidat mendapatkan mayoritas absolut. Sistem ini digunakan di Indonesia. Jika para kandidat untuk jabatan legislatif dan eksekutif tidak dapat memperoleh suara mayoritas pada pemungutan suara pertama, mereka bersaing dalam pemilihan putaran kedua yang berlanjut hingga seorang kandidat memperoleh suara mayoritas.

Sistem Representasi Proporsional

Representasi proporsional memungkinkan sebuah partai politik memenangkan kursi di dewan legislatif sesuai dengan perolehan suara terbanyak. Ini didasari karena ada pendapat bahwa sistem

mayoritas tidak adil karena kursi yang dimenangkan dalam sistem ini tidak mencerminkan suara yang diperoleh partai politik. Pada pemilu federal tahun 1993 di Kanada, partai Reformasi memperoleh 18,69 persen suara populer namun memenangkan 52 kursi di House of Commons dibandingkan dengan 54 kursi yang dimenangkan oleh Blok Quebecois dengan 13,52 persen suara. Hal serupa terjadi pada pemilu Inggris tahun 2001, Partai Demokrat Liberal memperoleh 18 persen suara namun hanya meraih delapan persen kursi di House of Commons.

Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan sistem kepartaian. Beberapa klasifikasi yang sangat sederhana mengenai sistem satu, dua, dan multi-partai dan mencoba menempatkan semua sistem kepartaian di dunia dalam salah satu dari tiga kategori yang relevan. Namun sistem ini sudah ketinggalan zaman dan menurut banyak ahli tidak ilmiah. Klasifikasi sistem kepartaian yang dianut dalam penelitian ini membedakan sistem partai tunggal dengan sistem multipartai dalam berbagai jenis. Penjelasannya adalah sebagai berikut: Dengan demikian, banyak suara yang terbuang. Dalam sistem perwakilan proporsional, tidak akan ada suara yang kurang terwakili atau terbuang percuma. Dalam sistem perwakilan proporsional, kursi dialokasikan secara proporsional dengan jumlah suara yang diperoleh di daerah pemilihan yang beranggotakan banyak orang. Ada dua varian perwakilan proporsional:

Sistem Daftar dan Single Transferable Vote.

Sistem Daftar adalah bentuk representasi proporsional yang paling umum. Ini digunakan di sebagian besar negara di Eropa. Sistem ini beroperasi berdasarkan prinsip bahwa jumlah total suara yang diperoleh suatu partai menentukan berapa banyak kandidat yang terpilih dari daftar tersebut. Artinya, jika Partai Nasionalis memperoleh 20 persen suara dalam pemilu, maka partai tersebut akan memperoleh sekitar 20 persen kursi di badan legislatif; jika partai tersebut memperoleh 30 persen suara, maka ia akan memperoleh sekitar 30 persen kursi. Dengan demikian, sistem ini tidak membedakan

partai kecil. Sistem ini diciptakan justru karena sistem mayoritas tidak memberikan hasil yang proporsional.

Ada beberapa versi sistem Daftar. Pada satu sisi ekstrim adalah versi yang disebut daftar tertutup partai yang digunakan di Portugal dan Spanyol. Di bawah sistem ini, para pemilih tidak mempunyai pilihan terhadap kandidat tetapi hanya memilih partai yang mereka sukai. Sebenarnya, di tempat pemungutan suara, pemilih memilih surat suara dan daftar partainya dan menyimpannya di kotak suara. Setiap partai menerima sejumlah kursi di badan legislatif sesuai dengan persentase total suara terbanyak jika Partai A memperoleh 10 persen suara dalam 100 kursi parlemen, maka akan ada 10 kursi yang ditempati oleh 10 kandidat teratas dalam daftar tersebut. Di sisi ekstrim lainnya adalah daftar partai bebas yang digunakan di Swiss dan Luxemburg. Di negara-negara ini, para pemilih memiliki kebebasan penuh untuk memilih kandidat yang mencalonkan diri di daerah pemilihan yang beranggotakan banyak orang. Pemilih mempunyai suara sebanyak jumlah kursi yang harus diisi di daerah pemilihan dan pemilih dapat memberikan seluruh suaranya untuk satu calon tertentu atau membagikannya kepada semua calon. Partai mendapat alokasi kursi sebanding dengan total suara untuk semua daftar.

Suara Tunggal yang dapat dipindahtangankan digunakan di Senat Australia, di Republik Irlandia, Malta, dan negara bagian lainnya. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk memilih secara maksimal calon dan juga menjamin bahwa seluruh suara akan digunakan untuk memilih wakil. Setiap pemilih mempunyai suara sebanyak jumlah kursi. Pemilih di daerah pemilihan beranggotakan banyak menunjukkan referensinya dengan memberi tanda 1, 2, 3, dan seterusnya pada nama calon. Suara tersebut dihitung, dan mereka yang mendapatkan kuota dinyatakan terpilih. Kuota berarti jumlah suara minimum yang dibutuhkan seorang kandidat untuk pemilu. Hal ini diperoleh dengan membagi jumlah total suara dengan jumlah kursi yang harus diisi ditambah satu, dan menambahkan satu pada hasilnya.

Sistem proporsional merupakan alat yang baik untuk keterwakilan kelompok minoritas di lembaga legislatif. Di dalamnya, tidak ada pemborosan suara karena suara dapat ditransfer. Partai-partai yang lebih kecil atau lebih baru tidak akan didiskriminasi secara tidak adil dalam sistem ini sebagaimana mereka berada dalam sistem Mayoritas. Dengan pengecualian sesekali, semua sistem ini mempunyai lebih dari dua partai besar. Namun beberapa negara bagian lebih memilih ini karena mereka ingin mencegah sistem multi-partai yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Mereka berpendapat bahwa di bawah sistem ini, partai-partai kecil akan didiskriminasi dan karenanya mereka akan menghilang atau bergabung dengan partai-partai besar. Hal ini pada akhirnya akan memunculkan sistem dua partai yang memudahkan penyelenggaraan negara. Benar bahwa sebagian besar negara yang menjalankan sistem ini hanya mempunyai dua partai besar, namun ada beberapa negara seperti Malaysia, Bangladesh dan Pakistan yang mengoperasikan ini namun mempunyai lebih dari dua partai besar. Bahkan Kanada yang menggunakan ini menjalankan sistem multi-partai, meskipun Partai Liberal dan Konservatif adalah dua partai yang pernah memerintah negara tersebut.

Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian

Para ilmuwan politik umumnya sepakat bahwa sistem pemilu mempengaruhi sifat sistem kepartaian. Daerah pemilihan dengan satu wakil, yang dimenangkan oleh pluralitas sederhana, cenderung menghasilkan sistem dua partai atau dua-plus. Hal serupa terjadi di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, dan Selandia Baru semuanya menggunakan model asli Inggris. Alasannya tidak sulit untuk dipahami: Pihak ketiga kecil sangat kurang terwakili dalam sistem tersebut dan sering kali menyerah untuk mencoba. Terdapat keuntungan besar dalam daerah pemilihan dengan satu wakil dalam menggabungkan kekuatan politik untuk membentuk partai yang memiliki mayoritas atau setidaknya pluralitas. Jika salah satu partai terpecah, pemilu sering kali dialihkan ke partai yang bertahan. Faksi-faksi dalam sebuah partai mungkin tidak saling mencintai, namun mereka tahu bahwa mereka harus tetap bersatu untuk meraih masa

depan politik. Faktor ini menjelaskan mengapa kedua partai besar Amerika tetap bersatu meski ada perbedaan internal yang besar.

Representasi proporsional memungkinkan dan bahkan mungkin mendorong partai-partai untuk berpisah. Sistem proporsional menggunakan daerah pemilihan multi anggota dan menetapkan kursi parlemen sebanding dengan persentase suara di distrik tersebut. Di daerah pemilihan dengan wakil tunggal Anglo-Amerika, pemenanglah yang mengambil semuanya.

Di daerah pemilihan dengan banyak anggota, pemenang hanya menentukan persentasenya. Oleh karena itu, tidak ada biaya besar yang dibebankan pada penyelenggaraan partai; kelompok sempalan mungkin memutuskan bahwa mereka dapat memilih satu atau dua orang tanpa harus berkompromi dengan sudut pandang lain. Modifikasi undang-undang pemilu dapat mengubah sistem kepartaian suatu negara, mendorong suatu negara dari sistem multipartai menjadi sistem dua-plus, seperti di Jerman, atau dari sistem multipartai menjadi sistem dua blok, seperti di Perancis. Menariknya, ketika Perancis beralih ke sistem proporsional pada pemilihan legislatif tahun 1986, Front Nasional yang kecil dan rasis memenangkan kursi untuk pertama kalinya, yang menggambarkan bagaimana sistem proporsional mendorong partai-partai kecil.

4. Pemilu di Barat

Di Barat, pemilu merupakan mekanisme formal partisipasi politik yang dominan dan sarana kelancaran peralihan kekuasaan dari satu partai ke partai lain. Pemilu di negara-negara demokrasi liberal sering dilihat sebagai institusi yang menjadikan pemerintah bertanggung jawab kepada yang diperintah. Pemilu di negara-negara demokrasi liberal diselenggarakan dengan interval frekuensi yang telah ditentukan sebelumnya, relatif bebas dan mengakibatkan pergantian partai yang berkuasa. Pemilu menentukan secara efektif siapa yang akan memerintah negara bagian untuk jangka waktu tertentu, hal ini membuat otoritas yang berkuasa mengambil kebijakan yang dipandang menguntungkan oleh para pemilih. Persaingan

antar partai juga memaksa mereka untuk menanggapi pandangan para pemilih.

Namun, ada pula yang berpendapat bahwa pemilu adalah instrumen yang digunakan untuk memperluas kekuasaan elite terhadap masyarakat. Pemerintahan yang terpilih menggunakan berbagai mekanisme untuk memasukkan orang-orang yang berpotensi berbeda pendapat ke dalam sistem politik, mengurangi partisipasi rakyat hanya sekedar ikut campur dalam pemungutan suara dan mendorong masyarakat untuk mematuhi negara tanpa membatasi otonominya. Mereka menunjuk pada rendahnya angka partisipasi pemilih untuk membuktikan argumen mereka. Meskipun argumen mereka tidak dapat disangkal, pemilu memang membawa perubahan terhadap kebijakan publik. Di Inggris, Amerika Serikat, dan banyak negara demokrasi lainnya, partai-partai mempunyai usulan manifesto yang berbeda-beda dan mereka umumnya melaksanakan janji-janji mereka ketika terpilih. Pemerintah cukup tanggap terhadap keinginan para pemilih.

Pemilu di bawah Pemerintahan Komunis

Pemilu di bawah pemerintahan komunis pada dasarnya tidak kompetitif. Di Uni Soviet, misalnya, hanya ada satu kandidat baik anggota partai atau non-anggota yang telah mendapat persetujuan partai. Di beberapa negara lain, kandidat baik anggota partai maupun non anggota yang telah mendapat persetujuan partai. Di beberapa negara lain, kandidat dari partai lain ditoleransi namun hanya sebagai mitra kecil dari partai yang berkuasa. Perlombaan ini benar-benar pemilu tanpa pilihan. Pemilu dimaksudkan untuk memobilisasi masyarakat di belakang perjuangan partai menuju pembentukan masyarakat komunis yang bebas eksploitasi. Pemilu memberikan kesempatan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai pencapaian partai yang berkuasa dan tantangan ke depan. Pemilu juga berfungsi untuk menunjukkan kontrol partai terhadap rakyat.

Pemilu di negara-negara Komunis baru mendapat pengaruh besar setelah runtuhnya Uni Soviet dan komunisme pada tahun sembilan puluhan. Negara-negara pasca-komunis dengan cepat

mengadakan pemilu yang kompetitif untuk membantu memastikan legitimasi pemilu tersebut. Gerakan payung yang telah menggulingkan pemerintahan komunis memenangkan banyak pemilu. Kebanyakan partai komunis memperoleh kurang dari dua puluh persen suara namun mereka terpilih kembali di Albania dan setelah reformasi internal, di Bulgaria

D. Rangkuman Materi

Pemilu tidak terlalu berpengaruh di dunia ketiga. Pemilu berbentuk pemungutan suara yang diadakan oleh Presiden atau diktator militer untuk meneguhkan kekuasaan mereka sendiri. Hal inilah yang terjadi dalam kasus Asia Selatan pada tahun 2002 atau sebelumnya pada tahun 1984. Atau pemilu tersebut merupakan pemilu yang kompetitif dimana salah satu partai menggunakan suap dan paksaan untuk mempertahankan kekuasaannya, seperti yang dilakukan oleh Asia Selatan. Asia Selatan pada tahun 1980-an dan awal 1990-an memandang pemilu mempunyai arti penting. Pemilu yang bermakna dan cukup bebas telah berlangsung di Malaysia, Iran, Bangladesh dan Indonesia. Di negara-negara ini, perubahan terjadi pada partai yang berkuasa dengan relatif damai.

Ada banyak negara di dunia ketiga yang berada di bawah pemerintahan monarki atau menjalankan sistem dominan satu partai. Bahkan negara-negara ini mencoba menyelenggarakan pemilu dengan satu atau lain cara. Mengapa? Para penguasa mengadakan pemilu karena mereka merasa posisi mereka akan diperkuat jika mereka bisa menyampaikan hal ini kepada komunitas internasional bahwa mereka adalah pemerintahan terpilih. Selain itu, organisasi-organisasi Barat juga membuat bantuan mereka bergantung pada kinerja politik rezim penerima.

Bagaimanapun, bagi sebagian besar negara di dunia Muslim, proses pemilu sangatlah sulit. Sebagian besar negara bagian ini relatif baru dan beragam elemen etnis di dalamnya masih lemah dalam kesatuan. Pemilu di negara-negara tersebut cenderung memunculkan konflik sektarian antar suku dan wilayah yang selalu mengancam perpecahan negara. Akibatnya, pemilu ditandai dengan kekerasan

yang meluas yang menewaskan banyak orang dan melukai lebih banyak lagi. Selain itu, sikap elite terhadap pemilu juga kurang menggembirakan. Selalu ada kemungkinan terjadinya kecurangan sehingga pemilu selalu membawa mudorot ketimbang masalah.

E. Soal Latihan:

1. Jelaskan definisi pemilihan umum.
2. Apa fungsi dasar pemilihan umum?
3. Bagaimana fenomena pemilihan umum di negara Asia Tenggara umumnya?
4. Bagaimana perbandingan pemilu di dunia Barat?
5. Bagaimana penerapan pemilu bebas adil di Indonesia?

F. Sumber Bacaan

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Cst Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Curzon, Mary H. ed. *Career and the Study of Political Science: A Guide for Undergraduates*. Washington, DC: American Political Science Association, 1991.

Crick, Bernard. *In Defense of Politics*. Magnolia, Mass: Peter Smith Publisher, 1994

Dahl, Robert. *Modern Political Analysis*. New York: Prentice Hall, 1990.

Pengembangan Masyarakat

A. Deskripsi Singkat

Bab ini menguraikan berbagai teori tentang pengembangan masyarakat dalam politik, mendefinisikannya, dan menjelaskan pengembangan Masyarakat beserta fitur-fitur esensialnya.

B. Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami teori Pengembangan Masyarakat
2. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengembangan Masyarakat beserta fitur-fitur esensialnya

C. Penyajian Materi

Pendahuluan

Politik dan pengembangan masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Di satu sisi, politik sebagai suatu sistem yang mengatur kekuasaan dan distribusi sumber daya, memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan yang dapat mempengaruhi kemajuan masyarakat. Di sisi lain, pengembangan masyarakat tidak hanya bergantung pada kebijakan politik, tetapi juga pada bagaimana masyarakat itu sendiri mengelola sumber daya dan potensi yang ada untuk menciptakan perubahan positif.

1. Politik sebagai Instrumen Pengembangan Masyarakat

Politik, dalam arti luas, dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama. Sebagai sistem yang mengatur kekuasaan, politik memiliki pengaruh yang besar terhadap arah pengembangan masyarakat. Melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga negara, politik dapat menciptakan kerangka yang mendukung terciptanya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan.

Salah satu contoh paling nyata dari pengaruh politik dalam pengembangan masyarakat adalah dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Negara dapat menggunakan kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya, kebijakan subsidi untuk sektor-sektor tertentu, seperti pertanian atau pendidikan, dapat mempercepat pengembangan sektor-sektor tersebut di dalam masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga merupakan hasil dari keputusan politik yang mendasari kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pendidikan, kesehatan, dan sektor sosial lainnya juga merupakan bagian penting dari pengembangan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan politik. Negara yang mendorong pembangunan pendidikan yang inklusif dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata akan menciptakan masyarakat yang lebih berdaya, terdidik, dan sehat. Ini semua adalah hasil dari kebijakan politik yang mengambil perhatian terhadap kesejahteraan rakyat.

2. Pengembangan Masyarakat melalui Partisipasi Politik

Selain kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pengembangan masyarakat juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Demokrasi yang sehat memberikan ruang bagi warga negara untuk terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum,

aksi protes, atau forum-forum publik yang memungkinkan mereka menyuarakan aspirasi dan kepentingannya.

Partisipasi masyarakat dalam politik sangat penting karena dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam konteks pengembangan masyarakat, partisipasi politik juga memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih inklusif, dimana kelompok-kelompok marginal dan minoritas memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalah yang mereka hadapi dan mendapatkan solusi yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa politik bukan hanya urusan elit atau penguasa, melainkan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang langsung mempengaruhi nasib mereka.

Di negara-negara berkembang, sering kali terdapat tantangan dalam hal partisipasi politik yang adil dan merata. Ketidakesetaraan dalam akses informasi, hambatan sistem hukum, dan dominasi elit politik dapat menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk membangun kesadaran politik yang kuat dan mendukung reformasi untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka, transparan, dan inklusif.

3. Politik dan Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat adalah keberlanjutan. Pengembangan yang berkelanjutan tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap lingkungan dan pengurangan kesenjangan sosial. Politik memiliki peran kunci dalam menciptakan kebijakan yang mendorong pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan, harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan publik. Ini termasuk kebijakan yang mendukung energi terbarukan,

pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Negara yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan politiknya akan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan hidup dalam harmoni dengan lingkungan.

4. Tantangan dalam Hubungan Politik dan Pengembangan Masyarakat

Walaupun politik memiliki potensi besar untuk mempercepat pengembangan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam hubungan antara keduanya. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakstabilan politik yang sering kali menghambat implementasi kebijakan yang efektif. Ketika pergantian pemerintahan terjadi dengan cepat atau ketika terjadi konflik politik internal, kebijakan-kebijakan yang sudah disusun dapat terhambat atau bahkan dibatalkan, sehingga pengembangan masyarakat pun terganggu.

Selain itu, masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi hambatan besar dalam proses pengembangan masyarakat. Korupsi yang merajalela dapat menyebabkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat malah teralihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan.

Tidak hanya itu, ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap layanan dasar juga menjadi masalah yang sering dihadapi. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau wilayah terpencil sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Oleh karena itu, kebijakan politik yang efektif harus mampu menjangkau semua lapisan masyarakat dan memastikan pemerataan pembangunan yang adil.

D. Rangkuman Materi

Secara keseluruhan, hubungan antara politik dan pengembangan masyarakat merupakan sebuah dinamik yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Politik, sebagai sistem yang mengatur kekuasaan dan pengambilan keputusan, memegang peran yang sangat penting dalam membentuk arah pembangunan dan kemajuan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, mulai dari sektor ekonomi, sosial, pendidikan, hingga kesehatan, memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, politik berfungsi sebagai instrumen utama dalam menentukan bagaimana sumber daya yang ada digunakan, bagaimana sektor-sektor penting dikelola, serta bagaimana kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi secara adil dan merata.

Namun, pengembangan masyarakat bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah atau politisi semata. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi sangat penting dalam mewujudkan perubahan yang berkelanjutan. Masyarakat yang terlibat dalam proses politik, yang memiliki kesadaran sosial dan politik yang tinggi, akan mampu memperjuangkan hak-hak mereka serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Dalam konteks ini, politik bukan hanya menjadi urusan para elit, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat yang sangat mempengaruhi nasib mereka.

Salah satu aspek utama dalam pengembangan masyarakat yang harus diprioritaskan adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Kebijakan politik yang berpihak pada keberlanjutan akan menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan mampu bertahan menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, politik yang mendorong pembangunan yang holistik dan tidak hanya mengutamakan pencapaian ekonomi semata sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sehat, dan sejahtera.

Namun, meskipun potensi besar yang dimiliki politik dalam mendorong pengembangan masyarakat, tantangan besar juga selalu ada. Ketidakstabilan politik, korupsi, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya sering menjadi penghambat utama dalam proses pembangunan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat menyebabkan terhambatnya implementasi kebijakan yang seharusnya dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Selain itu, ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar dan pembangunan yang tidak merata juga menjadi isu penting yang perlu diselesaikan agar pengembangan masyarakat benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi negara untuk menjaga stabilitas politik dan menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Pembenahan sistem politik dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas. Selain itu, pemberantasan korupsi dan peningkatan kesadaran sosial politik akan mempercepat tercapainya pengembangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Akhirnya, untuk mencapai pengembangan masyarakat yang optimal, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hanya dengan kerja sama yang solid dan kesadaran kolektif untuk menciptakan perubahan, pengembangan masyarakat dapat terwujud dengan lebih adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, politik memiliki peran sentral sebagai alat untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya memperhatikan kepentingan jangka pendek, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh masyarakat, dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

E. Soal Latihan:

1. Bagaimana definisi konsep pengembangan masyarakat?
2. Apa landasan politik dalam memimpin gerakan pengembangan masyarakat ini?
3. Mengapa masyarakat mengalami stagnansi dalam periode khususnya masa krisis wabah global?

4. Apa saja faktor penting dalam kelanjutan pengembangan masyarakat?
5. Bagaimana prinsip-prinsip pengembangan masyarakat?

F. Sumber Bacaan

Anderson, J. (2019). *The Politics of Development: Understanding the Role of Governance in Society*. Cambridge University Press.

Ali, Muhammad Mumtaz. *Issues in Islamization of Human Knowledge Civilization Building Discourse of Contemporary Muslim Thinkers*. IIUM Press. 2014.

Brown, K. (2018). *Community and Politics: A Historical Perspective*. Oxford University Press.

Elder.L&Green.S. *The Politics of Parenthood*. Suny Press. 2012.

Harahap, Ali Musa. *Youth and Campus Politics: Malaysian Experience: An Assesment of A Public University*. 2020.

Islam, Muhammad Thoriqul. *Pendidikan spiritualitas di perguruan tinggi pesantren Universitas darussalam gontor*, Working Paper. 2023.

BAB 16

Kesimpulan

Ilmu politik berada pada tahap yang sangat penting dalam sejarah hubungan internasional. Para pemimpin politik dunia menghadapi tantangan yang sangat besar dan oleh karena itu, mereka mencari nasihat dari para ilmuwan politik untuk menghadapi tantangan tersebut. Banyak dari tantangan ini berasal dari sosio-ekonomi; yang merupakan produk sampingan dari politik. Oleh karena itu, para ilmuwan politik dituntut untuk menghasilkan teori dan juga strategi praktis untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Tantangan-tantangan tersebut adalah kemiskinan, kerusakan lingkungan, proliferasi nuklir dan senjata pemusnah massal, terorisme, dan perdagangan narkoba.

Salah satu tantangan terbesar di abad ke 21 adalah sebagian besar penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan. Peningkatan 100 juta orang yang harus diberi makan setiap tahunnya membutuhkan lebih banyak makanan setiap tahunnya. Kemiskinan adalah kelaparan; kemiskinan adalah kurangnya tempat tinggal. Kemiskinan memiliki banyak wajah dan telah digambarkan dengan berbagai cara. Ada banyak penyebab kemiskinan, namun salah satu penyebab yang paling penting adalah pertumbuhan penduduk yang berlebihan di beberapa negara. Jika tidak terkendali, pertumbuhan penduduk yang berlebihan ini akan mengakibatkan lebih banyak kesengsaraan dan kelaparan. Baik negara berkembang maupun negara maju harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan di tingkat global.

Pertama, negara-negara berkembang harus memberikan perhatian khusus pada hal-hal berikut: pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi; kedua meningkatkan distribusi pendapatan dan kekayaan; dan ketiga mempercepat pembangunan sosial. Kedua, negara-negara maju, LSM, donor dan lembaga internasional harus mendukung negara-negara ini secara finansial, teknologi, dan dengan penasihat ahli. Ketiga, LSM dan lembaga-lembaga negara donor harus memantau perkembangan hasil. Hal ini akan melibatkan survei dan menganalisis data untuk mendengar suara masyarakat miskin. Penting juga bagi setiap negara untuk memantau kemiskinan dan menganalisis dampak kebijakan dan proyek. Beberapa pihak memperkirakan bahwa pada beberapa tahun ke depan pertumbuhan penduduk akan meningkat menjadi lebih dari sepuluh miliar yang akan berdampak pada kesempatan kerja dan menekan pasokan makanan. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin akan melebar. Semua ini akan menantang laju pembangunan ekonomi nasional khususnya negara berkembang.

Globalisasi telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di abad dua satu ini. Hal ini mereduksi dunia manusia menjadi sebuah desa global melalui ekspansi besar-besaran teknologi komunikasi. Para pendukung globalisasi mengklaim bahwa globalisasi memiliki nilai positif karena dapat menghilangkan hambatan terhadap perdagangan bebas. Lebih penting lagi, globalisasi mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan lapangan kerja dan memberikan standar hidup yang lebih tinggi. Namun, para pengkritik menunjukkan bahwa semua asumsi ini belum tentu benar. Globalisasi belum, tidak bisa dan tidak akan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Globalisasi tidak meningkatkan lapangan kerja, atau standar hidup yang lebih tinggi-kecuali bagi para pemegang saham perusahaan-perusahaan multinasional (MNC). Sebaliknya, dalam jangka panjang, globalisasi akan menjadi bencana besar bagi umat manusia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Akan sangat terlambat jika kebenarannya terungkap di masa depan.

Sistem perdagangan bebas akan benar-benar menjadi sistem tumpangan gratis, karena perusahaan-perusahaan akan membahayakan masyarakat dengan mencemari tanah, laut dan udara, lubang

ozon, menyebabkan hilangnya lapisan tanah, meledaknya biaya kesehatan, alergi, pemanasan global, penghancuran spesies, pestisida dalam makanan, bakteri yang kebal terhadap antibiotik, kriminalitas, pengangguran, meningkatnya biaya sosial, dan lain-lain. Globalisasi hanya memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham, sementara para pemangku kepentingan lainnya harus menanggung biaya, misalnya untuk membersihkan lingkungan. Seorang akademisi mengatakan bahwa globalisasi lebih tepat disebut sebagai Proteksionisme Pemegang Saham. Dunia saat ini sedang menghadapi krisis kesehatan dan lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun ada begitu banyak perkembangan di kedua bidang ini, dunia semakin mendekati ambang bencana global.

Kesejahteraan masa depan umat manusia, serta banyak bentuk kehidupan lain di planet ini, berada dalam bahaya. Orang-orang di seluruh dunia dipengaruhi oleh perubahan lingkungan regional dan global. Masalah lingkungan yang drastis ini, misalnya perubahan iklim dan penipisan lapisan ozon, terutama disebabkan oleh gaya hidup yang tidak berkelanjutan, konsumsi yang berlebihan, dan pola pembangunan yang tidak sehat. Akar penyebab krisis lingkungan adalah sebagai berikut: pertama pandangan eurosentris tentang kemajuan dunia harus bergerak dengan cara-cara pembangunan Eropa; kedua pemikiran ekonomi yang sudah ketinggalan zaman; ketiga fokus yang berlebihan pada pertumbuhan ekonomi; keempat neoliberalisme dan perdagangan, seolah-olah pasar dapat menyelesaikan segalanya.

Ilmu politik menawarkan berbagai perangkat konseptual dan kerangka teoritis untuk memahami cara kerja berbagai sistem politik. Kerangka ini dapat membantu kita mengidentifikasi komponen-komponen utama sistem politik, hubungan antara komponen-komponen ini, dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku aktor politik. Ilmu politik membantu kita memahami distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Ilmu politik meneliti bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan bagaimana kekuasaan memengaruhi hasil politik. Pemahaman ini penting untuk memahami dinamika konflik politik, dampak keputusan politik pada berbagai kelompok dalam masyarakat, dan potensi perubahan politik. Ilmu

politik membantu kita mengevaluasi kebijakan publik. Ilmu politik memberi kita berbagai perangkat analitis untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan publik. Perangkat ini dapat membantu kita menilai dampak kebijakan pada berbagai kelompok dalam masyarakat, mengidentifikasi konsekuensi kebijakan yang tidak diinginkan, dan mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan kebijakannya. Ilmu politik membantu kita memahami peran individu dalam politik. Ilmu politik mengakui bahwa individu bukan sekadar aktor pasif dalam proses politik. Sebaliknya, individu memiliki kapasitas untuk membentuk hasil politik melalui partisipasi mereka dalam organisasi politik, keterlibatan mereka dalam aktivisme politik, dan perilaku pemungutan suara mereka.

Selain kontribusi umum ini, ilmu politik juga memberikan wawasan tentang bidang-bidang tertentu dalam kehidupan politik kontemporer, seperti: Hubungan internasional – Ilmu politik membantu kita memahami hubungan yang rumit antara negara, peran organisasi internasional, dan tantangan tata kelola global. Politik komparatif – Ilmu politik meneliti keragaman sistem politik di seluruh dunia, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stabilitas dan ketidakstabilan politik, dan proses demokratisasi. Studi regional – Ilmu politik memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem politik regional, termasuk lembaga-lembaganya, prosesnya, dan dampaknya terhadap masyarakat. Ilmu politik adalah bidang studi yang dinamis dan terus berkembang, dan relevansinya dalam memahami dunia yang rumit saat ini hanya akan tumbuh di tahun-tahun mendatang. Saat kita menghadapi tantangan dan peluang baru di dunia yang terglobalisasi dan saling terhubung, ilmu politik akan terus memberi kita alat yang kita butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat, untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin kita, dan untuk berpartisipasi secara efektif dalam membentuk masa depan bersama kita.

Wallahu A'lam Bi Showab.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Mujiono, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Abidin, Zainal Ahmad, *Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2014.
- Albert, Richard. *Constitutional Amendments. Making, Breaking, and Changing Constitution*. Oxford University Press. 2019.
- Ali, Muhammad Mumtaz. *Issues in Islamization of Human Knowledge Civilization Building Discourse of Contemporary Muslim Thinkers*. IIUM Press. 2014.
- AlMawardi, I. (2014). *Al Ahkam Al Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi: Darul Falah.
- Almond, Gabriel Abraham. *A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science*. Newbury Park, Calif.: Sage. 1990.
- Almond, Gabriel Abraham. *Ventures in Political Science: Narratives and Reflections*. Lynne Rienner Publisher. 2002
- Anderson, J. (2019). *The Politics of Development: Understanding the Role of Governance in Society*. Cambridge University Press.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004

- Aristoteles. *The Politics*, diedit dan diterjemahkan oleh Ernest Barker. New York: Oxford University Press, 1962.
- Badran, M. *Feminism In Islam: Secular and Religious Convergences*. Oneworld publications. 2013.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- BA, Mansur, *Pandangan Islam Terhadap Pengembangan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup*, cet. 1, Jakarta: PT Intermasa, 1986.
- Bakry, Umar Suryadi. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Edisi Pertama. Kencana. 2017.
- Bateman, Thomas, et.al. *Menantang Dunia: Bacaan dalam Politik Kontemporer*. Scarborough: Nelson Thomson Learning, 2000.
- Black, Anthony. *The History of Islamic Political Thought From The Prophet To The Present*. Edinburgh University Press. 2011.
- Boulding, Kenneth E. *Tiga Wajah Kekuasaan*. Newbury Park, CA: Sage, 1989.
- Brown, K. (2018). *Community and Politics: A Historical Perspective*. Oxford University Press.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Cst Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Curzon, Mary H. ed. *Career and the Study of Political Science: A Guide for Undergraduates*. Washington, DC: American Political Science Association, 1991.
- Crick, Bernard. *In Defense of Politics*. Magnolia, Mass: Peter Smith Publisher, 1994
- Dahl, Robert. *Modern Political Analysis*. New York: Prentice Hall, 1990.
- Dault, Adhyaksa, *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

- Dinihari, Kurniawan. *Buku Pintar 34 Provinsi Di Indonesia*. Diva Press. 2018
- Easton, David. *Sistem Politik: Sebuah Penyelidikan tentang Ilmu Politik*. Chicago University of Chicago Press, 1981.
- Easton, David, et.al. *The Development of Political Science*. New York: Routledge, 1991.
- Elder.L&Green.S. *The Politics of Parenthood*. Suny Press. 2012.
- Elly Dar Chaidir, *Negara Hukum Demokrasi dan Konstalansi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Farid, Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Fahmi Asy Syannawi, *Fiqh Politik Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Masa Kini*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Finifter, Ada, ed. *Political Science: The State of the Discipline*. Washington: American Political Science Association, 1993.
- Friedrich, Carl J. ed., *Authority*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958.
- Goodin, Robert Hans-Dieter Klingemann, eds. *A New Handbook of Political Science*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Harahap, Ali Musa. et.al. (2022). *Mengenal Hubungan Internasional Madani*. UNIDA Gontor Press.
- Harahap, Ali Musa. *Youth and Campus Politics: Malaysian Experience: An Assesment of A Public University*. 2020.
- Heinaman, Robert. *Plato and Aristotle Ethics*. Ashgate Publishing. 2003.
- Ilyas, Yunahar, *Feminism Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1998.
- Islam, Muhammad Thoriqul. *Pendidikan spiritualitas di perguruan tinggi pesantren Universitas darussalam gontor*, Working Paper. 2023.
- Johnson, Allan, Frank Bealey, eds. *The Blackwell Dictionary of Political Science: A User's Guide to its Terms*. London, England: Blackwell Publishers, 1999.

- Jones, Laurence and Edward Olson. *Political Science Research: A Handbook of Scope and Method*. New York: Harper Collins College Publishers, 1996.
- Jones, Tudor. *Modern Political Thinkers And Ideas An Historical Introduction*. Routledge. 2002.
- Kempshall, M.S. *The Common Good In Late Medieval Political Thought*. Oxford University Press. 1999.
- Kymlicka, W. *Contemporary Political Philosophy An Introduction*. Oxford University Press. 2001.
- Lasswell, Harold. D. *Politik: Siapa yang Mendapat, Apa Kapan, Bagaimana*. New York: McGraw-Hill, 1936.
- Lasswell, Harold D. and Kaplan, Abraham. *Power and Society*. New Haven: Yale University Press, 1950.
- Lazarsky, C. *Power Tends To Corrupt*. Cornell University Press. 2012.
- Lijphart, Arend. *Pattern of Democracy*. Yale University Press. 2012.
- Lipset, Seymour Martin. *Democracy in Europe and the Americas*. Congressional Quarterly. 1998.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Percaturan Islam Dan Politik*. IRCISOD. 2021.
- Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok penekan*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1984.
- Mikac, R., Harahap, A.M., Stanisic, L.K., Response to The COVID-19 crisis: a Comparative Analysis of The Actions of Indonesia, Mexico, and Croatia. *JASSP*. 2(2). 2022.
- Milgram, Stanley. *Ketaatan pada Otoritas: Sebuah Pandangan Eksperimental*. New York: Harper & Row, 1974.
- Mustaqim, Abdul, Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad), Yogyakarta: *Jurnal Analisis*, Vol. XI, No. 1, Juni 2011.

- Morton, Rebecca. *Methods and Models: A Guide to the Empirical Analysis of Formal Models in Political Science*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Syafiie, Inu Kencana. *Alqur'an Dan Ilmu Politik*. Rineka Cipta Jakarta. 1996.
- Winter, Herbert. *Political Science and Theory*. New York: Harper Collins College Publishers, 1992.
- Zubaidi, Achmad dan Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2007

Index

- Al-Qur'an 56, 64, 92, 144, 185, 194,
287, 289, 290
- kepentingan 2, 4, 7, 14, 18, 19, 29,
34, 47, 59, 73, 81, 84, 97, 99,
100, 110, 113, 116, 119, 133,
147, 150, 156, 157, 158, 162,
174, 175, 181, 183, 190, 201,
202, 204, 205, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 228, 229, 247,
250, 254, 255, 278, 280, 285
- Negara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 46,
47, 48, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59,
60, 61, 99, 100, 101, 102, 103,
129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 137, 139, 142, 143, 145,
146, 147, 14176, 276, 277, 280,
283, 284, 286, 292
- Pemerintah 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
29, 31, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60,
64, 69, 70, 72, 73, 74, 79, 81, 94,
95, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 123, 125, 127, 136, 142,
151, 152, 154, 159, 162, 163,
164, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 192, 193, 198, 199, 200,
201, 208, 210, 213, 214, 216,
217, 218, 219, 239, 250, 255,
256, 257, 260, 261, 264, 265,
271, 276, 279, 280, 292
- Politik 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
32, 33, 34, 35, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85,
87, 88, 89, 129, 130, 131, 143,
145, 146, 147, 148, 149, 150,
152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 160, 161, 162, 163, 165,
168, 169, 170, 171, 172, 174,
177, 178, 179, 254, 255, 256,
257, 259, 260, 261, 262, 263,
267, 268, 270, 271, 272, 273,
275, 276, 277, 278, 279, 280,
283, 285, 286

Biografi



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1981 dengan nama Ali Musa Harahap putra dari Bapak Parlindungan Harahap dan Ibu Melinda Dalimunthe. Dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Anwar Harahap dan Jamila Nur Harahap dari seorang istri bernama Ridha Abrita Mawarti, S.Pd.

Riwayat Pendidikan yang ditempuh penulis mulai dari sekolah Taman Kanak-kanak bersekolah di TK Tangkai Mulia. Kemudian melanjutkan di SD Kartika Candra Kirana lulus pada tahun 1993 dan menempuh pendidikan menengah pertama di SMPN 177 Bintaro lulus pada tahun 1996. Sedangkan pendidikan menengah atas, penulis tempuh di Madrasah Aliyah Darunnajah Ulujami, Jakarta Selatan lulus pada tahun 2000.

Penulis memulai pendidikan Strata I di International Islamic University Malaysia pada program studi Ilmu Politik dan menyelesaikannya pada tahun 2008. Melanjutkan studi, penulis menempuh pendidikan Strata II di universitas yang sama dalam program studi Ilmu Politik dan lulus pada tahun 2013. Alhamdulillah, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Strata III (Ph.D) di program studi Ilmu Politik, juga di International Islamic University Malaysia, pada awal tahun 2025. Penulis adalah seorang akademisi yang saat ini menjabat sebagai dosen di Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor), Indonesia, yang memiliki kekhususan keahlian tentang Value Based Governance and Political Empowerment.